



**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017-2022**



WALIKOTA



WAKIL WALIKOTA

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2020**



**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2020**



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan seluruh program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dan dimulai Tahun 2020 dan seterusnya;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang mengalokasikan 40% Dana Otsus dikelola oleh Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, yang memberikan seluruh pengelolaan DOKA kembali ke kab/kota sehingga mempengaruhi penambahan program RPJM Kota Lhokseumawe;
- d. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe yang mengamanatkan pembentukan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe;
- e. bahwa sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/ XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019 yang diantaranya menyebutkan bahwa penyusunan indikator kinerja dalam RPJM belum sesuai dan adanya ketidakselarasan program antara RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya serta keselarasan antara RPJMN dan RPJPD;

- f. bahwa hasil dari pelaksanaan evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022 yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada awal Tahun 2020, telah diperoleh beberapa kesimpulan yang menghasilkan beberapa rekomendasi agar dilakukan pembaharuan (*updating*) terhadap data Kondisi Kinerja awal (2017) RPJMK Lhokseumawe 2017-2022 yang terurai pada BAB II (penyempurnaan data pendukung dalam penentuan indikator kinerja), BAB VI (penambahan Kebijakan Kepala Daerah) dan BAB IX (penyempurnaan Indikator Kinerja);
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012- 2032 Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);



17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe.



2. Kota Lhokseumawe adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kota Lhokseumawe adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk priode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang merupakan hasil penyesuaian.
13. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang mengacu kepada RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

14. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) Tahun.
 15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
 16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika RPJM Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Kota
BAB III	: Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV	: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX	: Penutup

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

RPJM Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD untuk seluruh pemangku kepentingan di Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode 2017-2022;
- b. Pemerintah Kota dalam menyusun RKPK.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

RPJM Kota Lhokseumawe dilaksanakan oleh Walikota dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota.



5. Merubah Lampiran Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 November 2020
8 Rabi'ul Akhir 1442


WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

WAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 November 2020
8 Rabi'ul Akhir 1442


SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 9
REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH:(9/87/2020)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2017-2022

I. PENJELASAN UMUM

bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/ XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019 serta hasil dari pelaksanaan evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022 yang telah dilakukan oleh Bappeda pada awal Tahun 2020, maka perlu dilakukan penyelarasan terhadap setiap indikator-indikator kinerja dan program-program dengan mengacu pada ketentuan yang adatelah terjadi perubahan Program, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR ...



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-9
1.4 Maksud dan Tujuan	1-10
1.5 Sistematika Penulisan	1-11
BAB II Gambaran Umum Kondisi Kota	1-11
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II -11
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi	II -11
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II -11
2.2.1.2 Laju Imflasi	II -15
2.2.1.3 PDRB Per Kapita.....	II -16
2.2.1.4 Indeks Rasio Gini	II -17
2.2.1.5 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan ...	II -17
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II -18
2.2.2.1 Pendidikan	II -18
2.2.2.2 Kesehatan	II -21
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II -40
2.2.3.1 Kebudayaan	II -40
2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga	II -41
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II -41
2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II -41
2.3.1.1. Pendidikan	II -41
2.3.1.2. Kesehatan	II -46
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II -92
2.3.1.6. Sosial	II -102
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II -107

2.3.2.1. Tenaga Kerja.....	II -107
2.3.2.2. Komunikasi dan Informatika	II -116
2.3.2.3. Penanaman Modal.....	II -119
2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II -120
2.3.2.5. Pangan	II -125
2.3.2.6. Pertanian.....	II -126
2.3.2.7. Lingkungan Hidup.....	II -127
2.3.2.8. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	II -131
2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II -134
2.3.2.10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II -144
2.3.2.11. Perhubungan.....	II -145
2.3.2.12. Komunikasi dan Informatika	II -152
2.3.2.13. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	II -153
2.3.2.15. Kepemudaan dan Olahraga.....	II -156
2.3.2.16. Statistik.....	II -157
2.3.2.17. Kebudayaan	II -158
2.3.2.18. Perpustakaan	II -60
2.3.2.19. Kearsipan	II -161
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	II -162
2.3.3.1. Pariwisata.....	II -162
2.3.3.3. Perdagangan.....	II -167
2.3.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II -169
2.3.4.1. Perencanaan	II -169
2.3.4.2. Keuangan	II -172
2.3.4.3. Kepengawain, Pendidikan dan Pelatihan	II -173
2.3.4.4. Pengawasan.....	II -176
2.3.5. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan	II -179
2.3.5.1. Syariat Islam	II -179
2.3.5.2. Majelis Ulama.....	II -180
2.3.6. Aspek Daya Saing Daerah.....	II -182
2.3.6.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II -182
2.3.6.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur	II -183
2.3.6.3. Fokus Iklim Investasi	II -184
2.3.6.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II -187

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERA	
3.1	kinerja Keuangan Masa Lalu	III -2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBK.....	III -2
3.1.1.1	Perkenbangan dan Kinerja Pendapatan	III - 6
3.1.1.2	Realisasi Belanja	III -14
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	III -14
3.1.2	Neraca Daerah	III -14
3.2	Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III -19
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III -20
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III -21
3.3	Kerangka Pendanaan	III -24
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III -24
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III -29
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV -1
4.1	permasalahan Pembangunan	IV - 2
4.2	Isu- isu Strategis Daerah.....	IV - 4
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1	Visi	V - 1
5.2	Misi	V - 2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V -3
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
	PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI - 1
6.2	Program Pembangunan Daerah.....	VI - 14
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	
	PERANGKAT DAERAH	VII - 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII - 1
BAB IX	PENUTUP	IX - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rata-rata Temperatur Maksimum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -9
Tabel 2.2	Banyaknya Curah Hujan,Hari Hujan dan penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -9
Tabel 2.3	Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -10
Tabel 2.4	Arah Angin ,Kecepatan Rata-rata, dan Kecepatan Angka Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -10
Tabel 2.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -11
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -13
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Kontan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -14
Tabel 2.8	Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -15
Tabel 2.9	Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota Tetangga Tahun 2015-2019	II -17
Tabel 2.10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -42
Tabel 2. 11	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -43
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murnai (APM) Kota lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -44
Tabel 2. 13	Angka Putus Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -45
Tabel 2.14	Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2019	II -46
Tabel 2.15	Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -47

Tabel 2. 16 AKHB dan AKB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -48
Tabel 2. 17 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -49
Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -51
Tabel 2. 19 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -51
Tabel 2. 20 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -52
Tabel 2. 21 Rasio Pukesmas, Poliklinik ,Pustu Per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -54
Tabel 2. 22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -55
Tabel 2. 23 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -57
Tabel 2. 24 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -58
Tabel 2. 25 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -59
Tabel 2. 26 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kopetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -61
Tabel 2. 27 Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 .	II -62
Tabel 2. 28 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -63
Tabel 2. 29 Cakupan Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 ..	II -64
Tabel 2. 30 Cakupan Persentase Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -65
Tabel 2. 31 Cakupan Penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -66
Tabel 2. 32 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -67
Tabel 2.33 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -68
Tabel 2. 34 Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -69

Tabel 2. 35 Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -70
Tabel 2. 36 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -71
Tabel 2. 37 Cakupan Penderita Diare yang ditangani Kota lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -72
Tabel 2. 38 Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -73
Tabel 2. 39 Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -74
Tabel 2. 40 Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang tepat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -75
Tabel 2. 41 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -76
Tabel 2. 42 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -77
Tabel 2. 43 Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan dan Pukesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -78
Tabel 2. 44 Cakupan Pukesmas dan Pembantu Pukesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -78
Tabel 2. 45 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -80
Tabel 2. 46 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumaw Tahun 2015-2019	II -82
Tabel 2. 47 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -84
Tabel 2. 48 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -85
Tabel 2. 49 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -88
Tabel 2. 50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -89
Tabel 2. 51 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -90

Tabel 2. 52 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi \leq 24 Jam Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -92
Tabel 2. 53 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Km)	II -93
Tabel 2. 54 Jenis,kondsi,Kelas,dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -94
Tabel 2. 55 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -96
Tabel 2. 56 Panjang Jalan dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -97
Tabel 2. 57 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -97
Tabel 2. 58 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -98
Tabel 2. 59 Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -99
Tabel 2. 60 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Limnas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -100
Tabel 2. 61 Jumlah penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -101
Tabel 2. 62 Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -102
Tabel 2. 63 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial.....	II -103
Tabel 2. 64 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Pontensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -104
Tabel 2. 65 Persentase Pante Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -105
Tabel 2. 66 Disabilitas yang Menerima Bantuan Tahun 2015-2019	II -106
Tabel 2. 67 Angka partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -107
Tabel 2. 68 Tingka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -108
Tabel 2. 69 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -108

Tabel 2. 70 Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -109
Tabel 2. 71 Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -110
Tabel 2. 72 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -111
Tabel 2. 73 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -112
Tabel 2. 74 Angka Sengketa Pengusaha –Pekerja Per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -112
Tabel 2. 75 Besaran Kasur yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -113
Tabel 2. 76 Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -114
Tabel 2. 77 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -115
Tabel 2. 78 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijkskn Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019..	II -116
Tabel 2. 79 Rasio Warnet Terhadap Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -116
Tabel 2. 80 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -118
Tabel 2. 81 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -119
Tabel 2. 82 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -120
Tabel 2. 83 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -121
Tabel 2. 84 Proporsi Kursi yang di Duduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -122
Tabel 2. 85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -122
Tabel 2. 86 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -124

Tabel 2. 87 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -125
Tabel 2. 88 Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -126
Tabel 2. 89 Luas Lahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019.....	II -127
Tabel 2. 90 Persentase Timbulan Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -128
Tabel 2. 91 Persentase Jumlah Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -129
Tabel 2. 92 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -130
Tabel 2. 93 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -131
Tabel 2. 94 Rasio Bayi Ber akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -132
Tabel 2. 95 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -134
Tabel 2. 96 Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2015-2019	II -135
Tabel 2. 97 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -135
Tabel 2. 98 Data Penyaluran Dana Ke Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -136
Tabel 2. 99 Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -137
Tabel 2.100 Data Badan Usaha Milik Gnpung (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -138
Tabel 2.101 Cakupan Pembinaan Badan Usah milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -139
Tabel 2.102 Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-019	II -140
Tabel 2.103 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -141
Tabel 2.104 Presentase PKK aktif di Kota Lhkseumawe Tahun 2015-2019	II -142

Tabel 2.105 Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -143
Tabel 2.106 Strata Posyandu di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019..	II -143
Tabel 2.107 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -144
Tabel 2.108 Jumlah Kendraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -145
Tabel 2.109 Rasio Izin Trayek Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019	II -146
Tabel 2.110 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019	II -147
Tabel 2.111 Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -148
Tabel 2.112 Kepemilikan KIR Angkutan Umun Tahun 2015-2019	II -149
Tabel 2.113 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umun (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -149
Tabel 2.114 Pemasangan Rambu-rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -150
Tabel 2.115 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2019	II -151
Tabel 2.116 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2019	II -151
Tabel 2.117 Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -152
Tabel 2.118 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019	II -153
Tabel 2.119 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019..	II -154
Tabel 2.120 Jumlah investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019	II -154
Tabel 2.121 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tashun 2015-2019	II -155
Tabel 2.122 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -155
Tabel 2.123 Persentase organisasi pemuda yang aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II - 156
Tabel 2.124 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II - 156

Tabel 2.125 Cakupan pelatih yang bersertifikasi Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II - 157
Tabel 2.126 Penyelenggara festival seni budaya Kota Lhokseumawe	II - 59
Tabel 2.127 Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II - 160
Tabel 2.128 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019	II - 161
Tabel 2.129 Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II - 162
Tabel 2.130 Objek wisata Kota Lhokseumawe.....	II - 163
Tabel 2.131 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -164
Tabel 2.132 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -165
Tabel 2.133 Kontribusi Kelompok Tani Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2019	II -166
Tabel 2.134 Produktivitas Komunitas Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -166
Tabel 2.135 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2016	II -167
Tabel 2.136 Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -168
Tabel 2.137 Produksi Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -168
Tabel 2.138 Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -173
Tabel 2.139 Presentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -174
Tabel 2.140 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,Jabatan Pengawas,Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -175
Tabel 2.141 Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -176
Tabel 2.142 Capaian Kapabilitas APIP Pemerinta Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -177
Tabel 2.143 Capaian Tingkat Kematangan SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -178

Tabel 2.144	Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -179
Tabel 2.145	Jumlah Hafiz –Hafizah yang di Bina Tahun 2015-2019.....	II -180
Tabel 2.146	Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -181
Tabel 2.147	Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -181
Tabel 2.148	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -183
Tabel 2.149	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -184
Tabel 2.150	Angka Kriminalitas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -185
Tabel 2.151	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -186
Tabel 2.152	Presentasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019	II -187
Tabel 2.153	Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -188
Tabel 2.154	Pusat-pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -189
Tabel 3.1	Rata- rata Pertumbuhan APBK Lhokseumawe Tahun 2016-2020	III- 3
Tabel 3.2	Rata- rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 15
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019	III- 18
Tabel 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 21
Tabel 3.5	Surplus/ Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020	III- 22
Tabel 3.6	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 23
Tabel 3.7	Perubahan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022.....	III- 26

Tabel 3.8	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022	III- 30
Tabel 3.9	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022	III- 31
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.....	V- 6
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran DAN Strategi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.....	VI- 2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022	VI- 12
Tabel 6.3	Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.....	VI- 14
Tabel 6.4	Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi.....	VI- 16
Tabel 6.4 A	Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi.....	VI- 42
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018-2020 Pemerintah Kota Lhokseumawe	VII- 2
Tabel 7.1 A	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021-2022 Pemerintah Kota Lhokseumawe	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020	VII-5
Tabel 7.2 A	Indikasi Rencana Program Perioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022	VII- 27
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022.....	VIII- 3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2022.....	VIII- 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Proses penyusunan RPJMK Lhokseumawe	I -2
Gambar 1. 2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I -9
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Kota Lhokseumawe.....	II -2
Gambar 2. 2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe	II -3
Gambar 2. 3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe.....	II -4
Gambar 2. 4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II -5
Gambar 2. 5	Penggunaan Lahan Kota lhokseumawe (Ha).....	II -6
Gambar 2. 6	Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II -8
Gambar 2. 7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2015- 2019 (%).....	II -12
Gambar 2. 8	PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	II -16
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2019	II -18
Gambar 2.10	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -19
Gambar 2.11	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -20
Gambar 2.12	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -21
Gambar 2.13	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -22
Gambar 2. 14	Indeks Perkembangan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -23
Gambar 2. 15	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -24
Gambar 2. 16	Prevalensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -25
Gambar 2. 17	Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -26
Gambar 2. 18	Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -27
Gambar 2. 19	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -28

Gambar 2. 20 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -29
Gambar 2. 21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -30
Gambar 2. 22 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -31
Gambar 2. 23 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar.....	II -32
Gambar 2. 24 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke atas Mendapatkan Skiring Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -33
Gambar 2. 25 Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -34
Gambar 2. 26 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -35
Gambar 2. 27 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -36
Gambar 2. 28 Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar Kota Lhokseumae Tahun 2015-2019	II -37
Gambar 2. 29 Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -38
Gambar 2. 30 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019	II -39
Gambar 2. 31 Group Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -40
Gambar 2. 32 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -169
Gambar 2. 33 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.....	II -183
Gambar 3.1 Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 7

Gambar 3.2	Rata- rata Pertumbuhan Komponen PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III -8
Gambar 3.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III -8
Gambar 3.4	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020	III- 9
Gambar 3.5	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 10
Gambar 3.6	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020	III- 10
Gambar 3.7	Proporsi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 11
Gambar 3.8	Proporsi Komponen Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 12
Gambar 3.9	Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020.....	III- 13
Gambar 3.10	Pertumbuhan Asset Kota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019	III- 17
Gambar 3.11	Balance Sheet Ratio Kota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019	III- 19
Gambar 3.12	Realisasi Silpa Kota Lhokseumawe Tahun 2016- 2019	III- 23
Gambar 5.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	V- 4
Gambar 5.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	V- 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

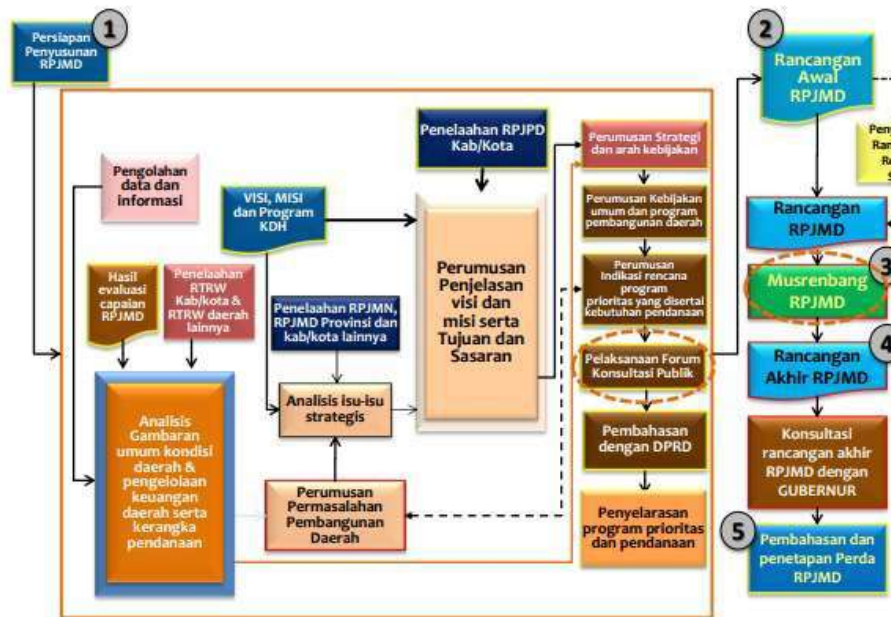
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, dimana tata cara perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menetapkannya menjadi peraturan daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan berdasarkan empat pendekatan penting. Pertama, pendekatan teknokratik yaitu proses penyusunan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJM. Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPJM melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. Keempat, pendekatan bottom

up dan top down yang merupakan proses perencanaan yang berproses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai hirarki pemerintahan. Selanjutnya proses penyusunan RPJMK Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMK Lhokseumawe



Dalam pelaksanaannya, RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020 direkomendasikan untuk disempurnakan dengan melakukan revisi RPJM, hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 2/LHPKINERJA/ XVLLL.BAC/12/2019, tanggal 22 Desember 2019, diantaranya disebutkan bahwa penyusunan indikator kinerja dalam RPJM belum sesuai dan adanya ketidaksielarasan program antara RPJMD dan dan dokumen perencanaan lainnya serta keselarasan antara RPJMN dan RPJPD, selain itu RPJM perlu dilakukan revisi akibat terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang mengalokasikan 40% Dana Otsus dikelola oleh Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan terdapat program-program DOKA yang belum tertampung dalam RPJM, dan terbitnya Peraturan

Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, yang memberikan seluruh pengelolaan DOKA kembali ke kab/kota sehingga mempengaruhi penambahan program RPJMK Lhokseumawe.

Selanjutnya revisi perlu dilakukan dengan terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan seluruh program dalam RPJMK Lhokseumawe mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tersebut dimulai Tahun 2020 dan seterusnya. Hal tersebut diatas sesuai dengan amanat dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan terjadi perubahan yang mendasar yakni adanya perubahan kebijakan nasional

Selanjutnya hasil dari pelaksanaan evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022 yang telah dilakukan oleh BAPPEDA pada awal tahun 2020, telah diperoleh beberapa kesimpulan yang menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam rangka melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 antara lain:

- a. Agar dilakukan pembaharuan (updating) terhadap data Kondisi Kinerja awal (2017) RPJMK Lhokseumawe 2017-2022. Data tersebut terurai pada BAB II (penyempurnaan data pendukung dalam penentuan indikator kinerja), BAB VI (penambahan Kebijakan Kepala Daerah) dan BAB IX (penyempurnaan Indikator Kinerja). Adapun sumber data ini umumnya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun OPD Kota Lhokseumawe.

- b. Disebabkan karena kesulitan evaluasi terhadap keuangan pada program-program yang memiliki lebih dari 1 (satu) outcome, maka target keuangan program yang tercantum pada BAB VII-Tabel 7.2 dapat ditampilkan outcome dan keuangannya dan agar dilakukan Penyempurnaan BAB IV Terhadap Prioritas 6 yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan yang mendukung 2 Misi yaitu Misi ke 5 dan Misi Ke 6, hendaknya masing-masing Misi paling sedikit mendukung 1 Prioritas.
- c. Agar dapat dilakukan penambahan untuk Dinas Pertanahan dan memasukkan Program-program prioritas dalam RPJMK 2017-2022 serta agar dilakukan sinkronisasi dengan memasukkan beberapa kebijakan nasional yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ke dalam dokumen perubahan RPJMK Lhokseumawe 2017-2022.
- d. Untuk Program dengan kinerja yang belum mencapai target maka dilakukan penambahan anggaran yang mencukupi dan melakukan revisi/penyesuaian/penurunan target jika tidak mungkin dicapai pada akhir periode.
- e. Program yang tercantum dalam RPJMK, namun tidak pernah dilaksanakan, maka jika dinilai bahwa tidak diperlu dilaksanakan, agar dihapus dari dokumen RPJMK dan jika dinilai perlu untuk dilaksanakan, maka agar diberikan dorongan yang kuat guna mengejar “ketinggalan”. Selanjutnya untuk program yang tidak tercantum dalam RPJMK (Program DOKA) namun dilaksanakan, agar dicantumkan pada dokumen perubahan RPJMK.
- f. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dalam RPJMK Lhokseumawe mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut untuk tahun 2021-2022.

Dari beberapa rekomendasi atas Hasil Evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe di atas dan juga terkait dengan beberapa perubahan kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya pasal 342, maka perlu dilakukan Revisi RPJM Kota Lhokseumawe

Tahun 2017-2022 agar hasil rekomendasi atas Hasil Evaluasi RPJM Kota Lhokseumawe dapat dilaksanakan dan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dapat menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dan kondisi terkini terkait COVID-19. Selanjutnya proses penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan *stakeholders* agar memperoleh hasil perencanaan yang aspiratif berdasarkan kepada kepentingan masyarakat dan dapat memberi manfaat nyata.

Selanjutnya Revisi RPJMK Lhokseumawe ini juga akan mengakomodir rencana program terkait dengan Program Pembentukan Perbankan Syariah Kota Lhokseumawe dimana disyaratkan harus dituangkan dalam Dokumen RPJMD sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berupa Program Perekonomian dan Pembangunan, selain itu juga mengakomodir penambahan Program Nasional terkait Program kerja Dekranas Kota Lhokseumawe berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dibidang Kesehatan serta rencana Walikota Lhokseumawe untuk melakukan Relokasi TPA Alue Lim terkait persampahan dan Pembangunan Jembatan Pusong-Kandang serta Rencana Pembangunan Dermaga Pelabuhan dan Pembukaan Rute Feri dari Pelabuhan KP3. Penyajian program-program tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam mewujudkan pembangunan Kota Lhokseumawe yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 tetap terintegrasi dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang termuat di dalam KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pertimbangan untuk merumuskan isu-isu strategis guna menetapkan program-program di dalam Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, KLHS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Guna mencapai Visi pembangunan Kota Lhokseumawe, maka Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 tetap menjadi referensi utama di dalam setiap program pembangunan yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Lhokseumawe. Untuk itu, Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

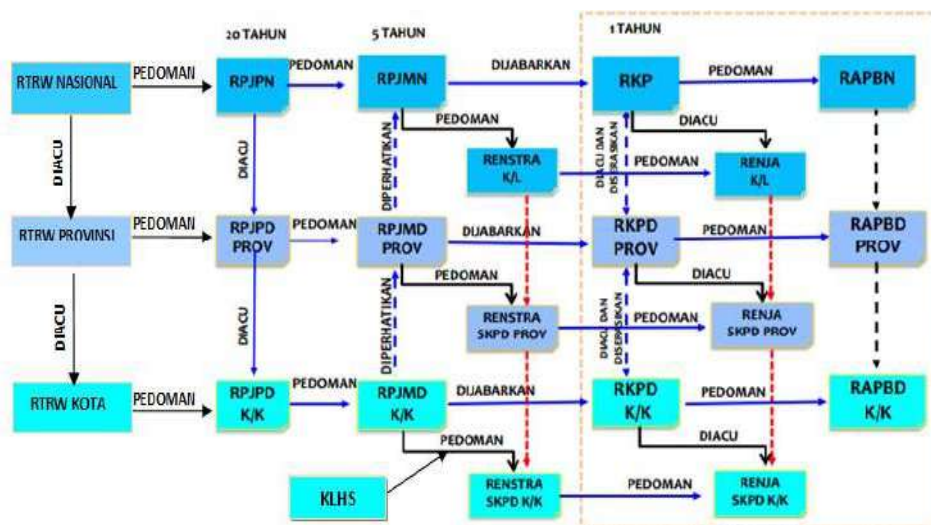
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam menjaga sinergisitas, keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional tahun 2015-2019 dan RPJP Nasional tahun 2005-2025. RPJM Aceh 2017-2022 dan RPJP Aceh tahun 2012-2032 serta RPJP Kota Lhokseumawe 2005-2025. Kemudian Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini juga menjadi pedoman dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Perubahan Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra).
2. Rencana Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe untuk periode 1 tahun selanjutnya disebut Renja OPD.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini:

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Selanjutnya secara terperinci hubungan antara RPJM Kota Lhokseumawe dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe berpedoman pada RTRW Kota Lhokseumawe yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota.
- 2) Penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Qanun tersebut sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
- 3) Memperhatikan RTRW daerah regional, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pertimbangan aspek kelanjutan lingkungan dan sosial budaya berdasarkan kebijakan rencana dan program dalam Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah melakukan penyelarasan Program sebagai pedoman pembangunan Kota Lhokseumawe untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022 yang terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe secara sinergis.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan umum, kebijakan keuangan daerah, dan strategi Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan menentukan program-program prioritas rencana kerja untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun RKPD, KUA dan PPAS, serta RAPBK untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022.
4. Sebagai alat dalam mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk sisa waktu Pemerintahan Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB IX. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

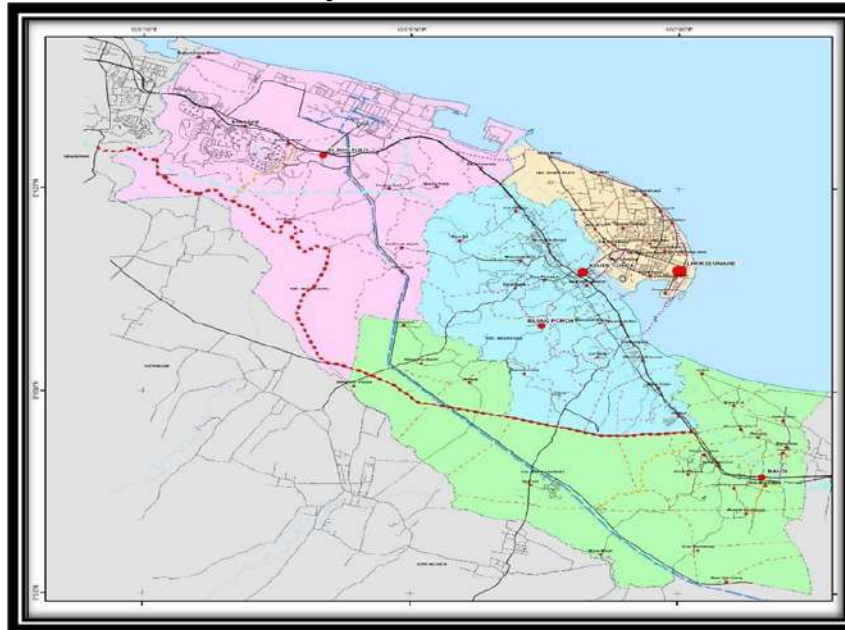
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20' –97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

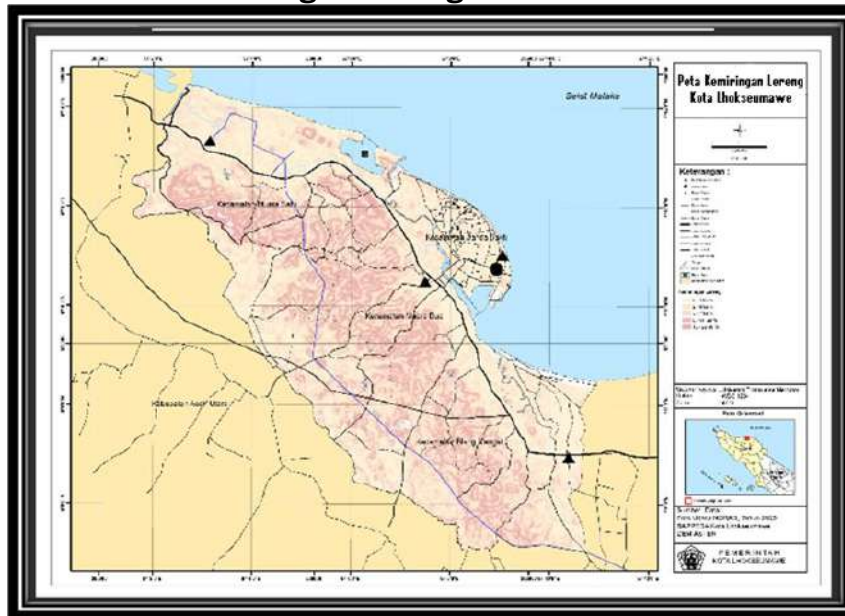
Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

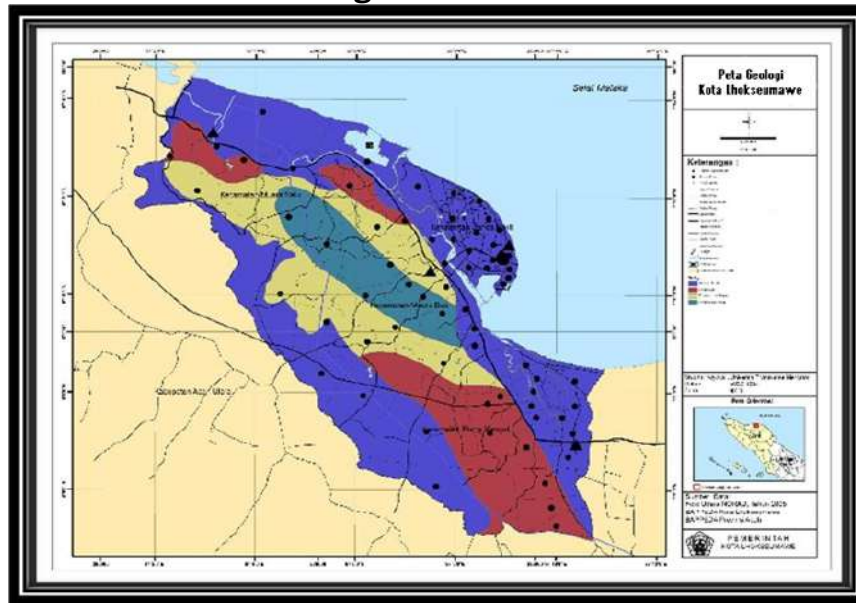
Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluvial berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tukaan, lempung ber lignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

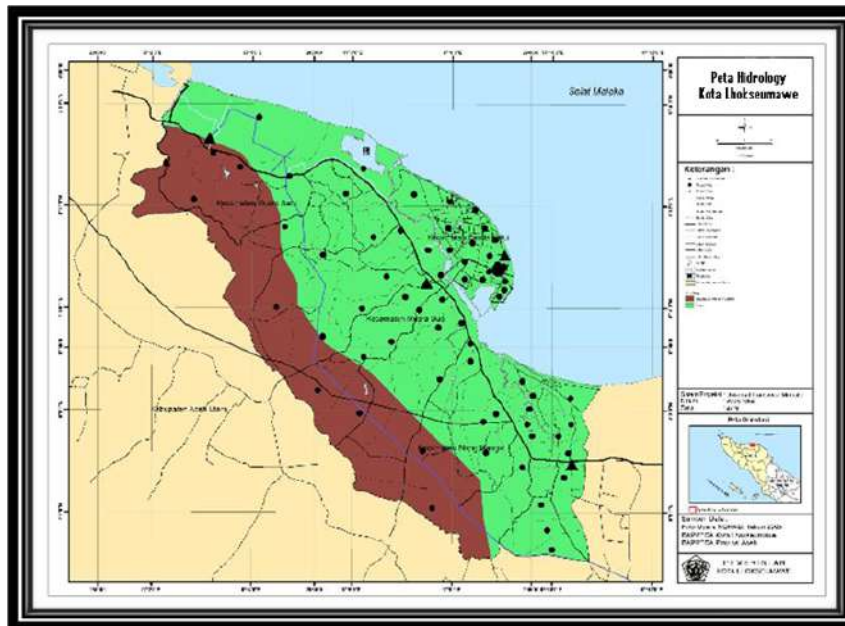
Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

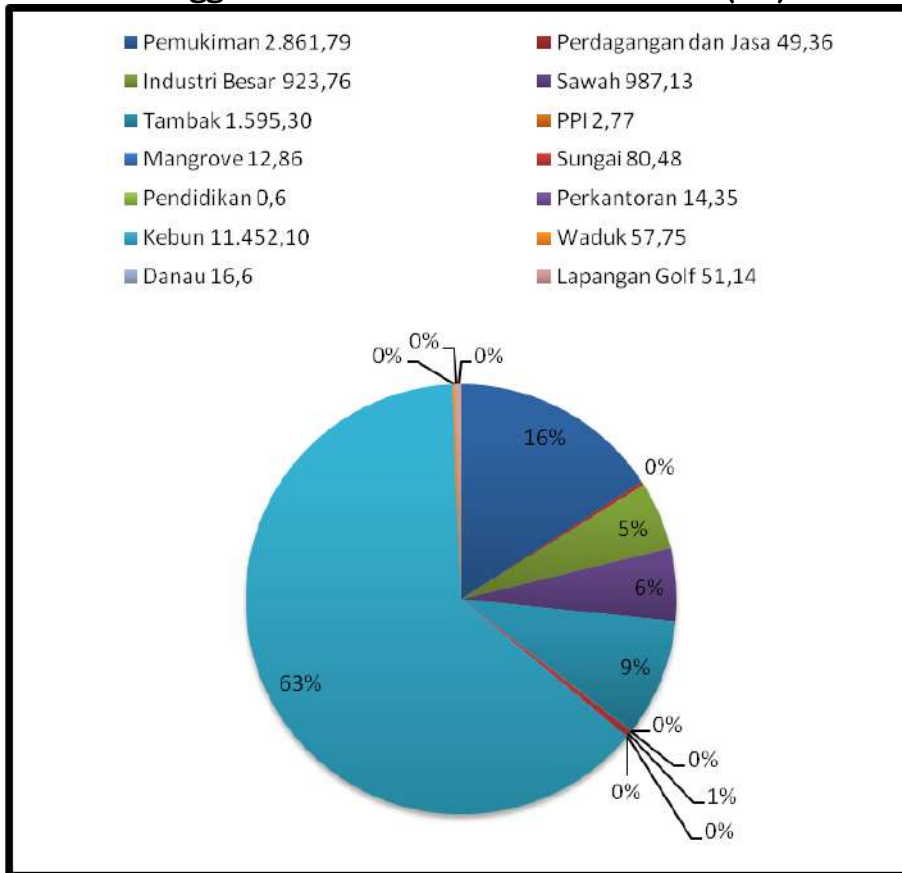
Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)



Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020.

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:

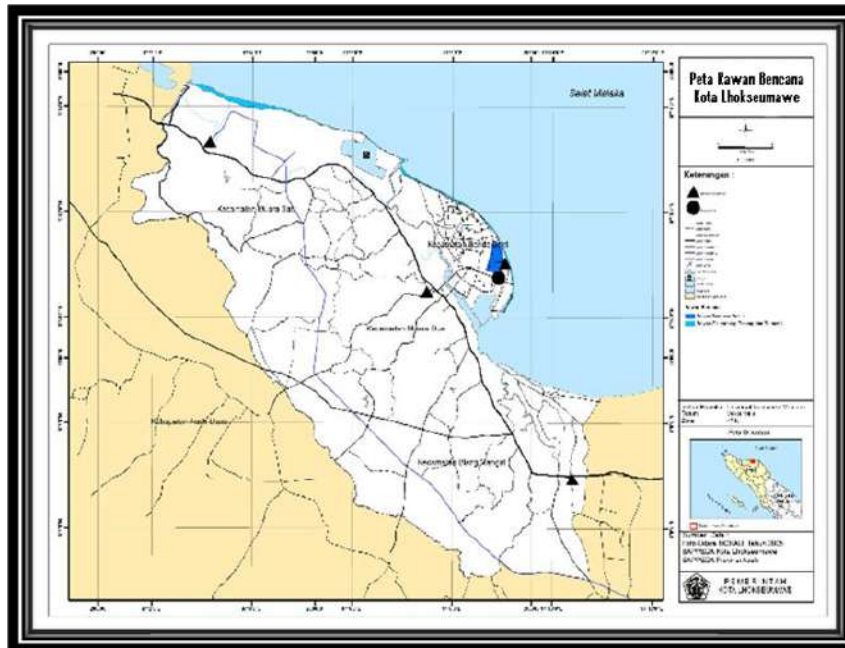
1. zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
 - zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
 - zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;

- zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
 3. zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

Sementara itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam.

Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan kawasan yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan kawasan yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Berikut Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2019, rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe berkisar antara 21^oC dan suhu udara maksimum 33^oC dan rata rata kelembapan udara berkisar 81% sampai dengan 86%. Dan rata rata tekanan udara berkisar 1.009 mb sampai dengan 1011 mb. Lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Maret sebesar 77 hingga 78 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 12 dan 5 hari. Sementara itu, jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 50 persen yang terjadi pada Bulan Oktober dengan jumlah hari hujan yaitu 21 hari sedangkan rata-rata kelembapan udara tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar 85 persen dan terendah terjadi pada Bulan Juli yaitu sekitar 78 persen. Berikut tabel temperatur suhu Kota Lhokseumawe Tahun 2019:

Tabel 2.1
Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Temperatur (°C)				
	07.00 WIB	13.00 WIB	18.00 WIB	Max	Min
Januari	23,6	29,2	27,8	33,0	21,0
Februari	23,1	30,0	28,5	31,1	22,3
Maret	23,6	31,0	29,4	32,0	23,0
April	24,3	31,4	29,1	35,0	22,4
Mei	24,5	31,0	28,7	33,6	21,4
Juni	24,3	31,5	30,2	34,9	22,0
Juli	24,5	31,5	29,8	34,7	22,0
Agustus	24,2	31,0	29,5	36,6	21,0
September	23,6	30,5	28,3	33,2	22,0
Oktober	23,9	29,6	27,7	32,4	22,3
November	23,8	29,4	27,7	32,6	21,8
Desember	23,7	29,3	27,7	33,0	22,0

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

Tabel 2.2
Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	97	15	47
Februari	63	11	69
Maret	14	7	77
April	101	13	66
Mei	170	22	64
Juni	63	9	56
Juli	120	13	63
Agustus	79	7	64
September	97	22	50
Oktober	258	14	47
November	296	24	47
Desember	74	19	48

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

Tabel 2.3
Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Rata-rata	Tekanan Udara (mb)
Januari	87	1 010,9
Februari	80	1 011,8
Maret	80	1 010,8
April	82	1 009,4
Mei	83	1 009,8
Juni	83	1 008,9
Juli	81	1 009,7
Agustus	81	1 009,4
September	86	1 010,8
Oktober	88	1 010,3
November	88	1 010,2
Desember	86	1 010,9

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

Tabel 2.4
Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Bulan	Arah Angin	Kecepatan Rata-rata	Kecepatan Maksimum	Arah Maksimum
Januari	E	4	14	100
Februari	NE	3	14	110
Maret	SW	4	10	080
April	SW	4	23	120
Mei	NE	4	11	060
Juni	SE	3	10	130
Juli	SW	4	12	040
Agustus	SE	4	13	290
September	SE	4	14	110
Oktober	SW	4	9	020
November	SE	4	12	060
Desember	SE	5	14	090

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2020.

Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah 203.284 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 101.290 jiwa laki-laki dan 101.994 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda Sakti sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Blang Mangat. Konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Lebih jelas mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Pria	Wanita	Total
Blang Mangat	56,12	13.865	13.893	27.758
Muara Dua	57,80	28.303	28.847	57.150
Muara Satu	55,90	16.827	16.980	33.807
Banda Sakti	11,24	41.827	41.766	83.593
Jumlah	181,06	100.822	101.486	202.308
2018		101.290	101.994	203.284
2017		99.282	99.698	198.980
2016		95.277	96.136	191.413
2015		93.403	94.052	187.455

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020.

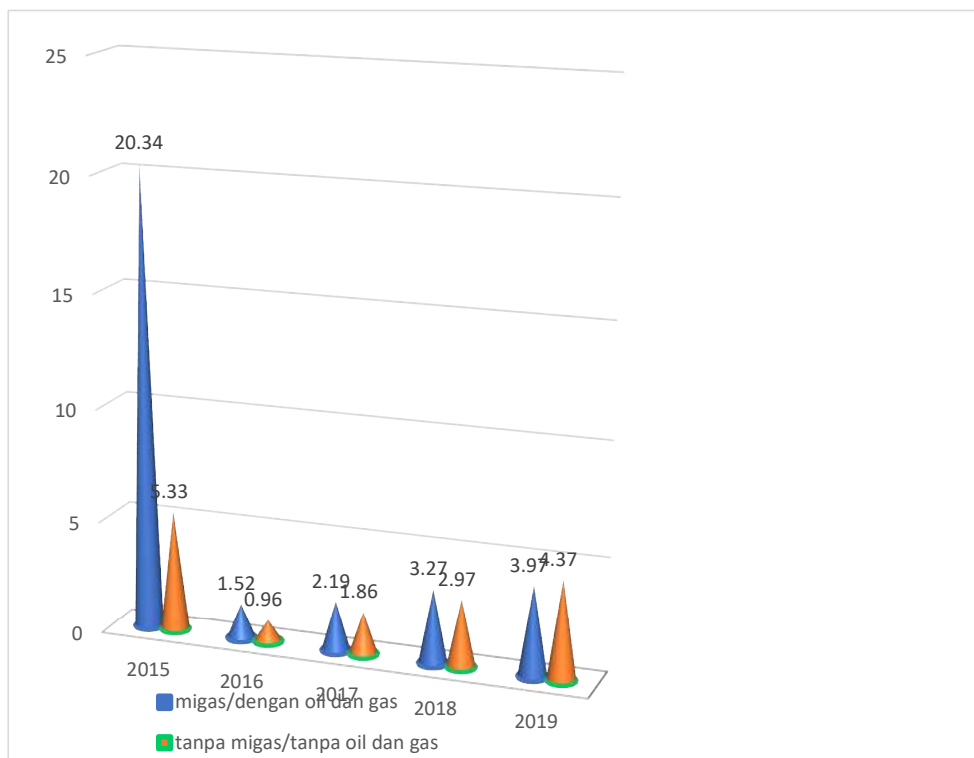
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2015-2019), pertumbuhan ekonomi dengan migas Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif pada Tahun 2016 serta pertumbuhan positif pada Tahun 2017 s.d 2019. Hal ini terjadi karena kategori migas (yang dulunya merupakan sektor unggulan) banyak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga Tahun 2016.

Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2015-2019 (%)



Gambar 2.7, menunjukkan pada Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 3,97 persen (dengan migas) dan 4,37 persen (tanpa migas). Kondisi ini merupakan mulainya terjadi kecenderungan pergeseran sektor ekonomi unggulan migas ke non migas di Lhokseumawe. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017r	2018*	2019**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	585,236.90	627,308.70	663,601.10	716,657.90	773,164.4
B.	Pertambangan dan Penggalian	31,916.10	32,890.70	33,766.00	31,421.90	31,042.6
C.	Industri Pengolahan	3,672,013.00	1,513,054.40	1,414,675.50	1,531,142.40	1,647,162.8
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,035.50	8,804.20	11,658.00	13,228.70	14,274.5
E.	Limbah dan Daur Ulang	591	761.6	904.6	1,074.10	1,169.4
F.	Konstruksi	1,055,271.00	1,273,495.90	1,229,442.50	1,164,292.90	1,203,060.6
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,662,981.10	1,726,605.50	1,791,550.10	1,838,542.20	1,893,363.2
H.	Transportasi dan Pergudangan	927,598.30	942,195.10	916,351.20	935,595.30	919,140.8
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70,462.20	80,582.00	96,713.60	123,630.1	153,969.5
J.	Informasi dan Komunikasi	247,459.10	255,998.10	264,954.80	273,712.60	277,653.3
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	160,021.50	178,477.70	202,674.40	228,855.50	239,533.8
L.	Real Estat	253,958.30	279,709.30	317,347.20	349,956.90	382,065.6
M,N.	Jasa Perusahaan	59,073.30	65,885.60	71,312.50	76,904.20	83,800.4
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	252,867.20	279,188.60	305,594.60	334,118.20	359,410.4
P.	Jasa Pendidikan	74,785.60	85,824.30	95,294.20	105,822.60	117,643.3
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185,836.50	205,683.50	224,546.90	246,355.70	262,299.1
R,S,T,U.	Jasa lainnya	72,931.30	79,267.20	88,510.00	98,938.90	106,660.6
PDRB dengan Migas		7,635,732,3	7,728,897,1	8,070,275,2	8,465,414,3	8,907,082,9
PDRB tanpa Migas		6,270,951.3	6,473,133.40	6,718,166,2	7,005,287.00	7,425,846.4

r Angka revisi/Revised Figures

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	516,413.70	529,818.90	542,672.70	567,783.3	599,904.7
B.	Pertambangan dan Penggalian	29,305.90	29,857.20	27,727.50	26,592.5	27,489.5
C.	Industri Pengolahan	1,301,452.30	1,154,623.10	1,201,613.00	1,288,992.0	1,315,362.0
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,223.70	11,926.10	12,564.70	13,316.5	14,156.5
E.	Limbah dan Daur Ulang	577.3	634.3	688.8	733.7	867.6
F.	Konstruksi	1,042,918.80	994,918.80	933,175.20	948,908.2	1,005,316.5
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,508,861.40	1,515,851.60	1,523,096.20	1,546,120.1	1,584,878.4
H.	Transportasi dan Pergudangan	840,006.40	830,707.60	851,160.80	866,183.1	882,442.3
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63,638.10	71,993.80	86,988.00	103,331.0	114,294.1
J.	Informasi dan Komunikasi	242,641.00	249,796.20	257,346.60	262,761.7	271,300.0
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	132,617.10	144,292.90	158,068.40	160,749.20	175,548.9
L.	Real Estat	242,647.00	262,646.50	284,661.60	302,105.40	321,543.0
M,N.	Jasa Perusahaan	57,146.90	60,521.40	64,184.50	68,494.10	71,928.5
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	233,876.90	248,964.70	266,250.30	281,251.90	292,765.0
P.	Jasa Pendidikan	72,951.90	77,781.10	83,029.90	89,603.90	96,365.5
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187,051.70	201,196.60	218,896.80	230,950.00	247,507.4
R,S,T,U.	Jasa lainnya	68,819.60	74,877.30	81,367.20	86,819.30	94,525.0
PDRB dengan Migas		6,550,150.00	6,450,408.2	6,591,663.2	6,844,695.7	7,116,194.7
0PDRB tanpa Migas		5,367,681.40	5,419,221.0	5,520,251.7	5,691,510.6	5,940,023.5

^r Angka revisi/Revised Figures

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

PDRB Kota Lhokseumawe atas dasar harga berlaku (ADHB) selama lima Tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari Tahun 2015, PDRB meningkat sebesar 1,27 triliun rupiah menjadi 8,91 triliun rupiah pada Tahun 2019. Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,29 triliun rupiah perTahun. PDRB ADHB Tahun 2019 mencapai 7,43 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,42 triliun rupiah dari Tahun 2018. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2015-2018 mengalami peningkatan dari 6,27 menjadi 7,01 triliun rupiah.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan nilai harga (barang/jasa) umum yang terjadi secara terus menerus. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Perkembangan Laju inflasi berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 menunjukkan bahwa inflasi di Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Kota Banda Aceh dan Nasional. Berbeda pada Tahun sebelumnya, laju inflasi Kota Lhokseumawe sangat tinggi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8
Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (%)

Bulan	Lhokseumawe	Banda Aceh	Nasional
Januari	0,14	0,43	0,32
Februari	-0,68	-0,54	-0,08
Maret	-0,45	-0,44	0,11
April	0,64	0,36	0,44
Mei	0,86	1,48	0,68
Juni	0,30	0,38	0,55
Juli	0,22	-0,24	0,31
Agustus	-0,54	0,20	0,12
September	-0,42	-0,55	-0,27
Oktober	0,53	0,07	0,02
November	0,02	-0,10	0,14
Desember	0,60	0,46	0,34
JUMLAH			
2018	2.05	1,93	2,50
2017	2.87	4.86	3.61
2016	5.6	3.13	3.02
2015	2.44	1.27	3.35

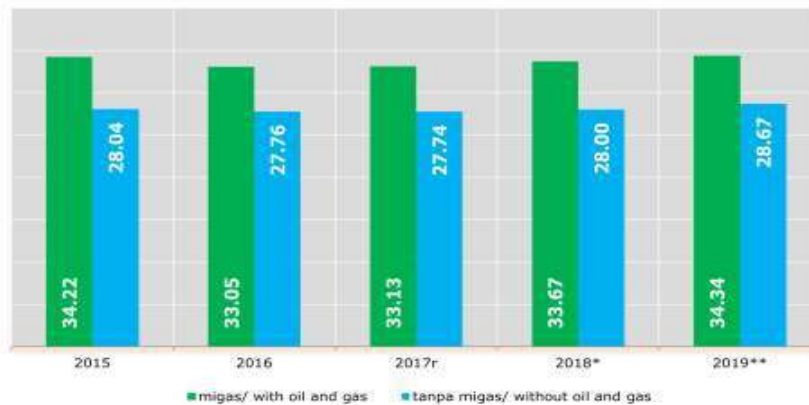
Sumber : BPS, Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2020.

Dari tabel 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata Inflasi di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 0,57% dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 0,86%. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Mei 2019, umumnya menunjukkan peningkatan terutama pada item kelompok sandang.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Berdasarkan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 dalam gambar 2.8 dibawah ini:

Gambar 2.8
PDRB Per Kapita ADHK
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, 2015-2019

Dari gambar 2.8 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB per kapita harga konstan dengan migas mengalami penurunan pada Tahun 2015 ke 2016, tapi mulai meningkat sejak Tahun 2017. Sedangkan untuk PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilainya tumbuh positif namun sangat kecil. Tahun 2015 PDRB per kapita ADHK dengan migas sebesar 34,22 juta rupiah seTahun dan menurun mencapai angka 33,05 juta rupiah di Tahun 2016, lalu mulai meningkat di Tahun 2017 hingga 2019 sebesar 33,13 juta rupiah seTahun hingga 34,34 juta rupiah seTahun. Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita Tahun 2015 sebesar 28,04 juta rupiah dan berturut-turut Tahun 2016-2018 bernilai 27,76 juta rupiah seTahun, 27,74 juta rupiah seTahun dan 28 juta rupiah seTahun. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 28,67 juta rupiah seTahun.

2.2.1.4. Indeks Rasio Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan individu. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0-1 dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Tabel 2.9
Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi
Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga
Tahun 2015-2019

Kabupaten/Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Lhokseumawe	0.324	0.291	0,291	0,305	0,310
Aceh Utara	0.271	0.270	0,266	0,292	0,312
Kota Langsa	0.356	0.359	0,342	0,356	0,363
Aceh	0.334	0.333	0,329	0,325	0,319

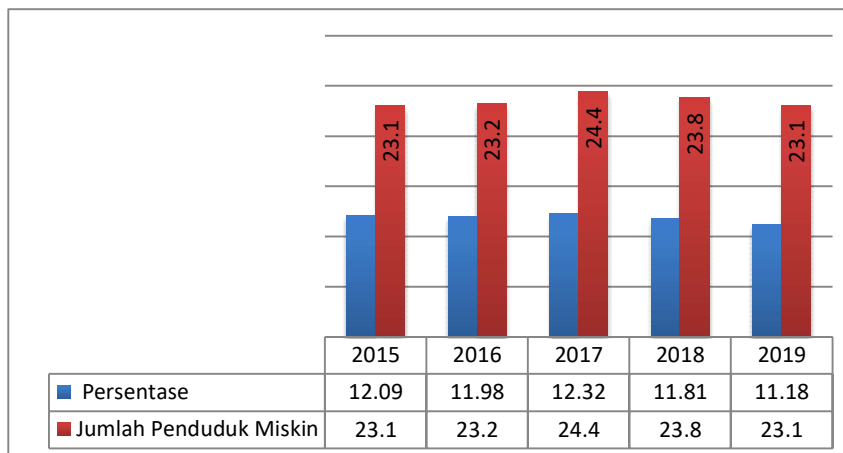
Sumber: Analisis Indeks Gini Kab/Kota Provinsi Aceh, 2020.

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Rasio Gini Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Kota Langsa dan Provinsi Aceh masih dibawah 0,4 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah.

2.2.1.5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.9 dibawah ini:

Gambar 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe
Tahun 2014 - 2019



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2020.

Berdasarkan gambar 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2015-2019 bergerak secara dinamis, terlihat bahwa pada Tahun 2015 persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 12.09 % dan Tahun 2019 mengalami penurunan yakni 11,18 % atau 23.1 jiwa.

Gambaran di atas merupakan hasil kerja dan jerih payah semua pihak serta bentuk partisipasi yang tinggi dari masyarakat guna mengatasi kemiskinan Kota Lhokseumawe. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian. Disamping itu terdapat program-program unggulan yang ikut memberi pengaruh besar dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan menurun.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

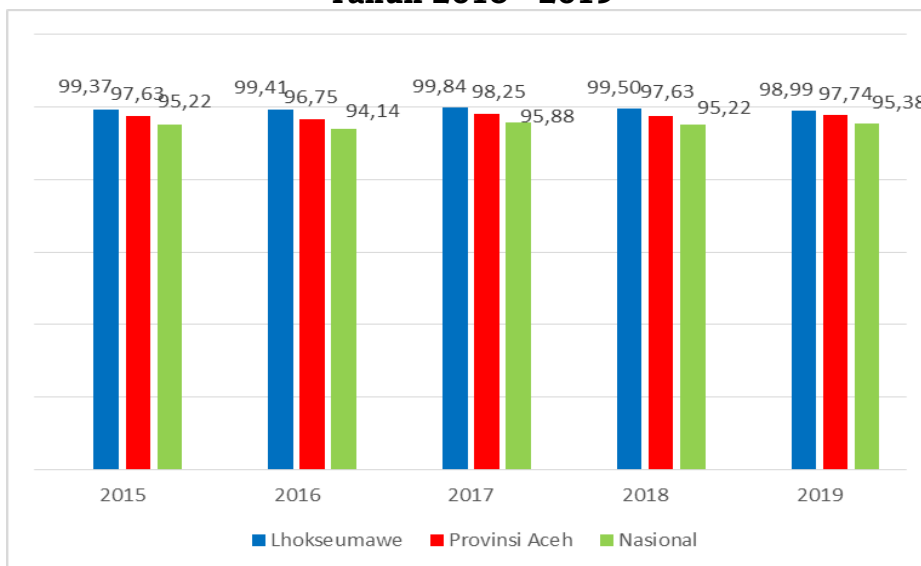
Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020, Angka Melek Huruf (AMH) Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebesar 98,99% dan sudah berada di atas rata-rata AMH Nasional dan AMH Aceh, dimana pada Tahun 2019 rata-rata AMH Nasional adalah 95,38% sedangkan rata-rata AMH Aceh 97,74%.

Berikut gambar 2.10 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019:

Gambar 2.10
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019

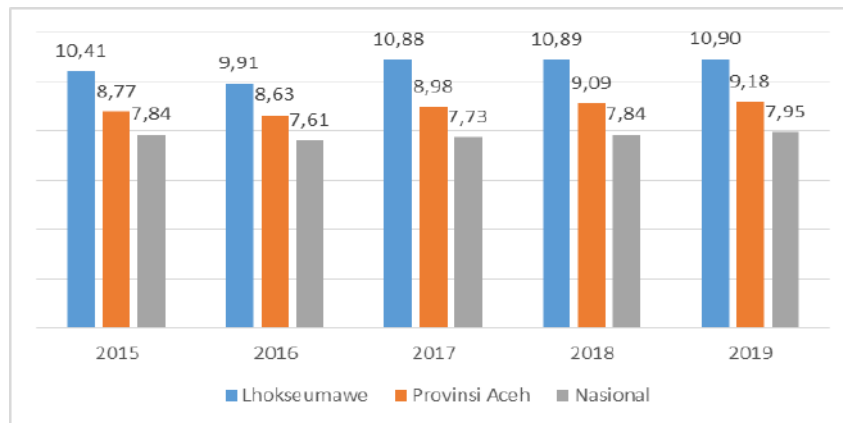


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2020.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah. Makin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut ini:

Gambar 2.11
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



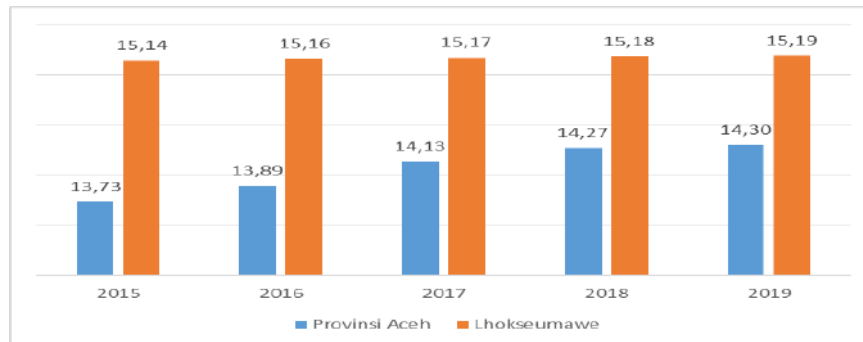
Sumber : BPS Aceh, 2020.

Dari Gambar 2.11 dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2019 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi dan nasional, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 10.90% sedangkan provinsi sebesar 9,18% dan nasional tercatat hanya sebesar 7,95%.

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah sudah berada di atas rata-rata nasional (12,29). Berikut angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe dalam gambar 2.12 berikut ini:

Gambar 2.12
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Aceh, 2020.

Gambar 2.12 di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 15,14% meningkat menjadi 15,19% pada akhir Tahun 2019. Angka ini juga menunjukkan bahwa bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe masih di atas angka provinsi yang hanya mencapai 13,73% pada Tahun 2015 dan 14,30% pada Tahun 2019.

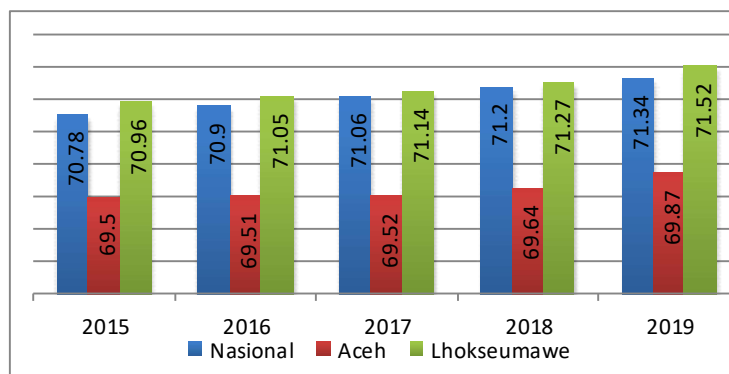
2.2.2.2. Kesehatan

A. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.

Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 Tahun merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup produktif dan mandiri. Berikut gambar 2.13 berkenaan dengan angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sampai dengan 2019:

Gambar 2.13
Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019.



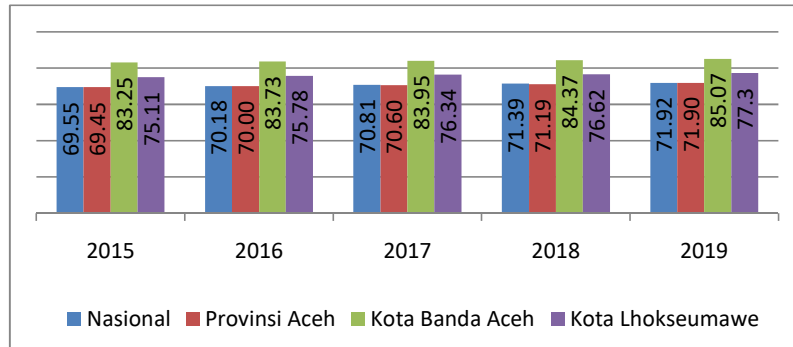
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

Jika dilihat dari Gambar di atas rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 terjadi peningkatan setiap Tahunnya. Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rata-rata 70,96 kemudian di Tahun 2016 menjadi rata-rata 71,05. Sedangkan Tahun 2017 meningkat menjadi rata-rata 71.14 dan di Tahun 2018 mencapai rata-rata 71,27. Pada Tahun 2019 Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe rata-rata 71.52 Tahun lebih tinggi dibandingkan Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Aceh yang rata-rata 69.87 Tahun dan Angka Usia Harapan Hidup Nasional yang rata-rata 71.34 Tahun.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut gambar 2.14 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe antara Tahun 2015-2019:

Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019



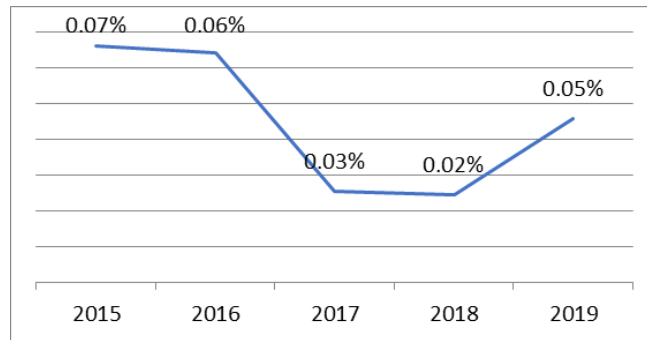
Sumber : BPS Aceh, 2020.

Jika dilihat dari nilainya, Provinsi Aceh memperoleh nilai IPM sebesar 71.90 pada Tahun 2019, sedangkan untuk IPM Kota Banda Aceh mempunyai nilai yang sangat tinggi sebesar 85.07 dan disusul dengan Kota Lhokseumawe sebesar 77.30 di Tahun 2019.

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk [mengetahui status gizi](#) yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Berikut gambar Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019:

Gambar 2.15
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

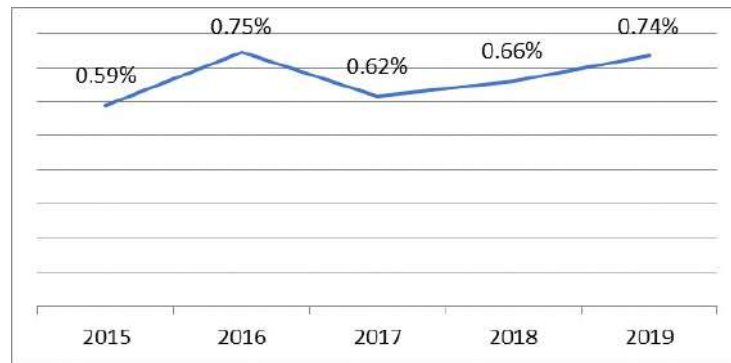
Dari Gambar 2.15 di atas dapat dilihat Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2015 Persentase Balita Gizi Buruk 0.07% dan Tahun 2016 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 0.06%, selanjutnya di Tahun 2017 dapat dituruni menjadi 0,03% dan pada Tahun 2018 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe turun lagi menjadi 0,02%, namun pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0.05%.

D. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat, dan karenanya merupakan issue fundamental dalam kesehatan masyarakat (Emerson, 2005; Mendez, 2005). Status gizi pada balita dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek. Gizi kurang pada balita, membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental, yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Akibat lainnya adalah penurunan daya tahan, menyebabkan hilangnya masa hidup sehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah timbulnya kecacatan, tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian.

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar World Health Organization (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Berikut gambar Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019:

Gambar 2.16
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

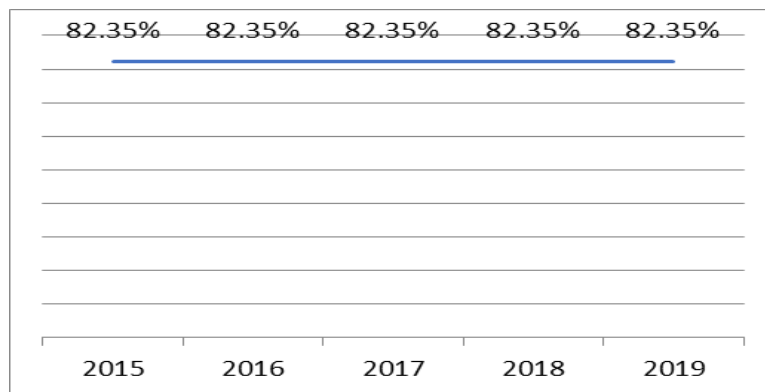
Dari Gambar 2.16 di atas dapat dilihat bahwa Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 s.d 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2016 Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe adalah tertinggi 0.75% yang naik dari Tahun 2015 sebesar 0.59% dan Tahun 2017 sebesar 0.62%. Selanjutnya pada Tahun 2018 dan 2019 Prevelensi Balita Gizi kurang Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan menjadi masing-masing sebesar 0.66% pada Tahun 2018 dan 0,74% pada Tahun 2019.

E. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Konsep desa siaga adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu (Depkes 2009). Berikut gambar Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019:

Gambar 2.17
Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



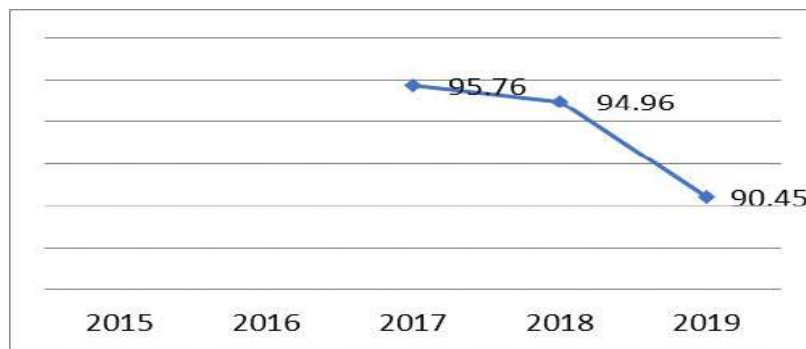
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.17 di atas dapat di lihat Cakupan Desa Siaga Aktif Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 adalah 82.35%. Dari 68 Desa di Kota Lhokseumawe, jumlah desa siaga yang dibentuk adalah sebanyak 56 desa siaga. Dari 59 desa siaga yang dibentuk semua desa siaga tersebut berstatus aktif.

F. Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kesehatan ibu hamil perlu dijaga dengan baik karena akan berpengaruh terhadap janin di dalam kandungannya. Bahkan ada pedomannya tersendiri untuk menjaga kesehatan selama masa kehamilan, sehingga ibu hamil membutuhkan program pelayanan kesehatan bernama *antenatal care*. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga profesional kepada wanita selama masa hamil sesuai standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas puskesmas dan rumah sakit. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2009).

Gambar 2.18
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



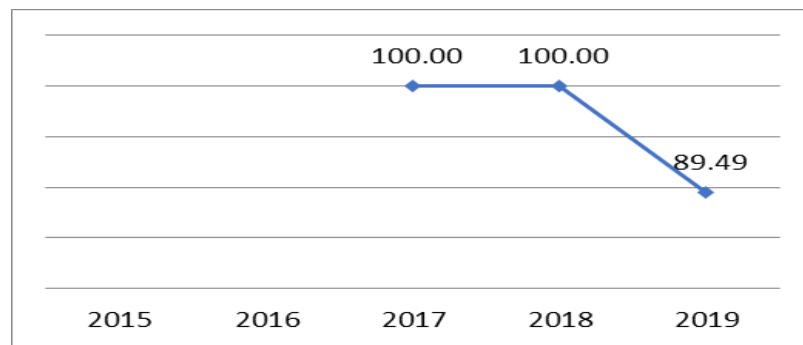
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.18 di atas Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu Hamil Kota Lhokseumawe Tahun 2017 tertinggi sebesar 95,76 persen, pada Tahun 2018 sebesar 94,96 persen dan selanjutnya pada Tahun 2019 sebesar 90,45 persen. Persentase ibu hamil mendapat Pelayanan kesehatan Ibu Hamil setiap Tahunnya bergantung kepada jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dan jumlah sasaran ibu hamil.

G. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan, pada penjelasan lain disebutkan Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Gambar 2.19
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019



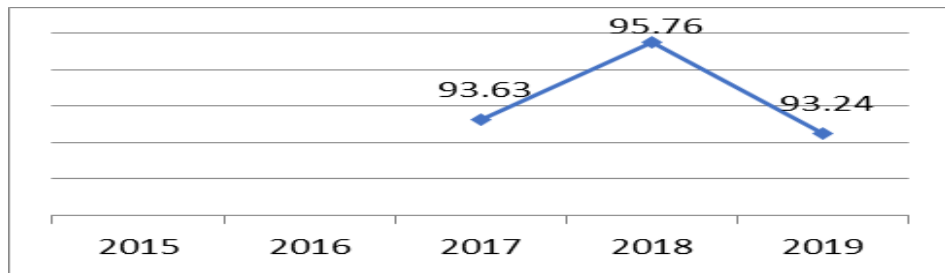
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.19 di atas dapat kita lihat Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 100 persen dimana jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan terlayani seluruhnya dari jumlah sasaran Ibu bersalin. Sedangkan pada Tahun 2019 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sebesar 89,49%.

H. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun”. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.20
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Lhoseumawe Tahun 2015 - 2019



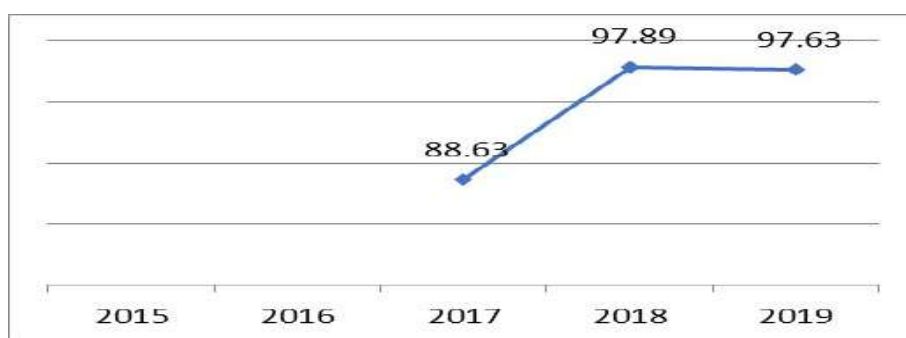
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari gambar 2.20 di atas dapat kita lihat Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada Tahun 2015 s.d 2019 di Kota Lhokseumawe tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 95,76% diikuti Tahun 2017 sebesar 93,63% dan Tahun 2019 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 93,24%.

I. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.21
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



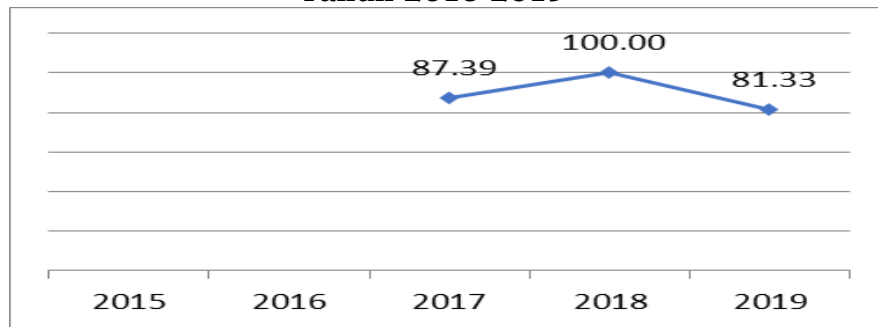
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada gambar 2.21 di atas. Pada Tahun 2018 Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Lhokseumawe adalah yang tertinggi sebesar 97,89%, pada Tahun 2017 sebesar 88,63% dan pada tahun 2019 sebesar 97,63%.

J. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Pernyataan Standar ” Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar “. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkauan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu Tahun ajaran.

Gambar 2.22
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari gambar 2.22 di atas dapat kita lihat Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 adalah sebesar 87,39%, pada Tahun 2018 sebesar 100% dan di Tahun 2019 sebesar 81,33%. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar sangat tergantung pada jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan jumlah semua anak usia pendidikan dasar.

K. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar”. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 Tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 Tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 Tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.23
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

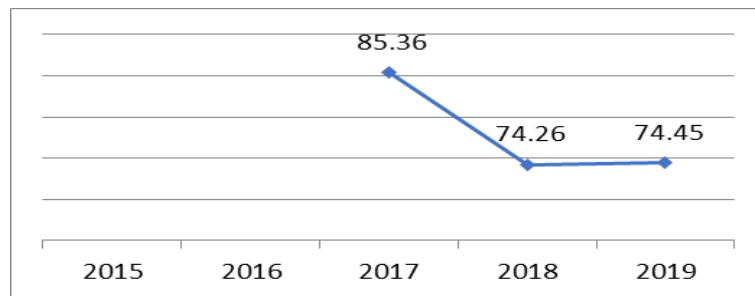
Dari gambar 2.23 di atas Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 37,57%, pada Tahun 2018 sebesar 92,06% dan pada Tahun 2019 sebesar 93,30%.

L. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 Tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 Tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.24
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

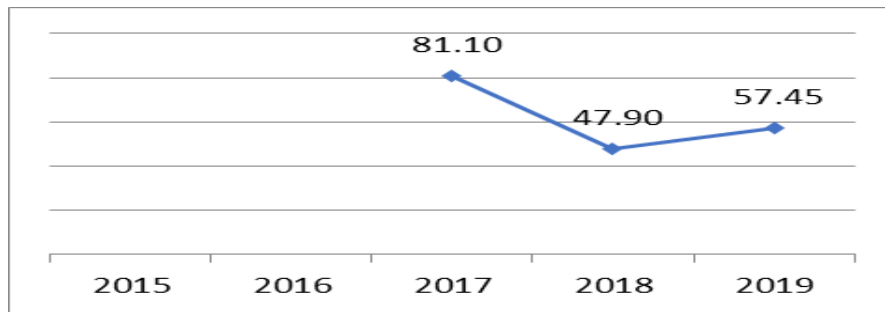
Dari gambar 2.24 di atas dapat di lihat Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 85,36% , namun pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 74,26% dan Tahun 2019 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 74,45%

M. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah : penduduk usia 15 Tahun ke atas Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di dapat dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun dibagijumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktub satu Tahun pada Tahun yang sama.

Gambar 2.25
Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



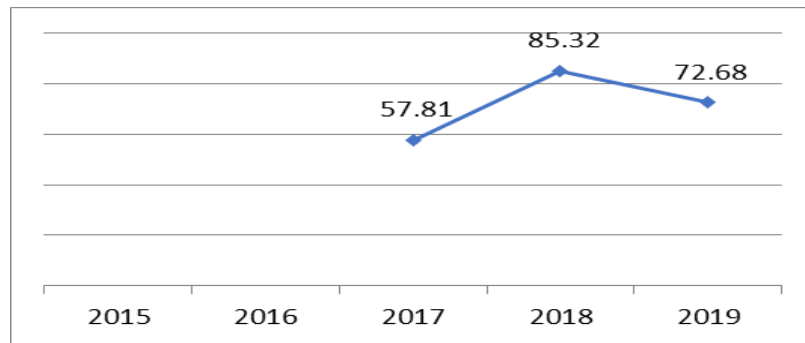
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.25 di atas terlihat bahwa Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 81,10%, pada Tahun 2018 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 47,90% dan pada Tahun 2019 sebesar 57,45%

N. Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu Tahun pada Tahun yang sama.

Gambar 2.26
Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

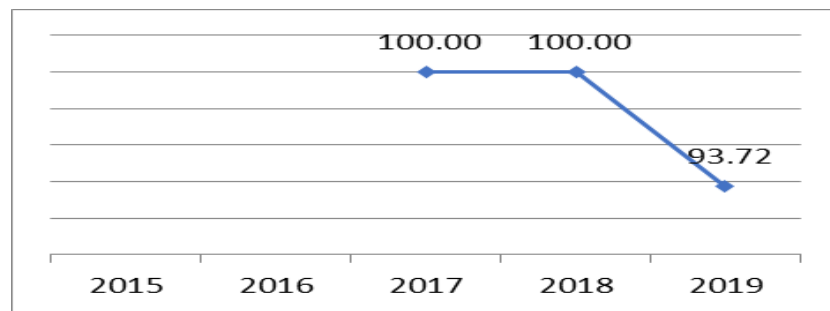
Dari gambar 2.26 di atas dapat dilihat Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Tahun 2018 meningkat menjadi 85,32% dari Tahun 2017 sebesar 57,81% dan pada Tahun 2019 sebesar 72,68%.

O. Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah : Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu Tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu Tahun yang sama.

Gambar 2.27
Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



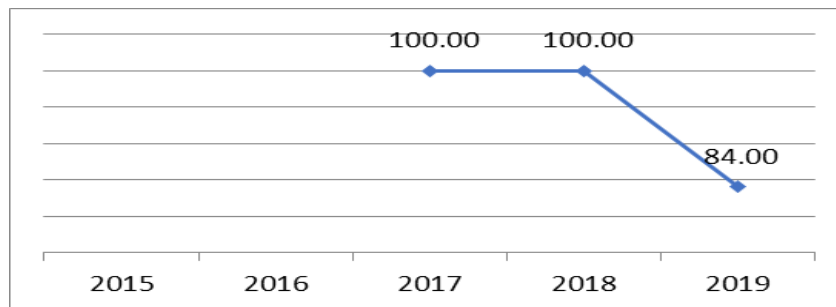
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Pada gambar 2.27 pada grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai target 100% pada Tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 93,72%. Kontribusi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya juga Kontribusi Swasta/Masyarakat, Praktek swasta sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

P. Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Gambar 2.28
Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

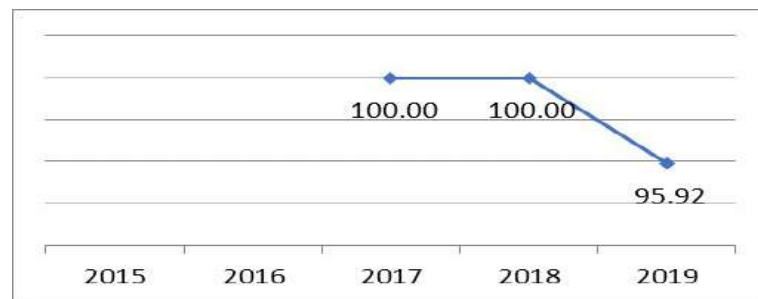
Kalau dilihat dari gambar 2.28 di atas pada Tahun 2017 dan 2018 Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar sebesar 100%, tetapi Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84%. Kedepannya petugas kesehatan pada umumnya, menanggung jawab program TB pada khususnya agar tetapmeningkatkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada tersangka TB untuk dapat memeriksakan Suspek TB Ke fasyankes serta meningkat kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program Tb-Paru.

Q. Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkoba.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu Tahun.

Gambar 2.29
Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Gambar 2.29 pada Tahun 2017 dan 2018 Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar adalah sebesar 100% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,92%. Hal ini disebabkan tidak semua orang yang berisiko terinfeksi HIV mau dilakukan screening HIV jadi harus dilakukan penyuluhan HIV kepada orang yang berisiko terinfeksi HIV.

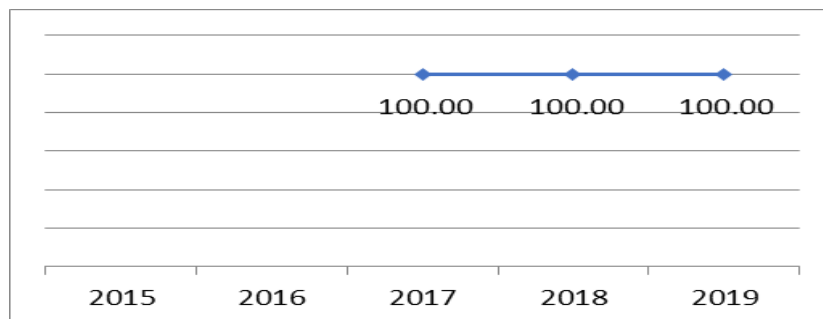
R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang cenderung meningkat jumlah pasien serta semakin luas penyebarannya. Hal ini karena masih tersebarnya nyamuk *Aedes aegypti* (penular penyakit DBD) di seluruh pelosok tanah air, kecuali pada daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.

Untuk memberantas penyakit ini diperlukan pembinaan peran serta masyarakat yang terus menerus dalam memberantas nyamuk penularnya dengan cara 3 M yaitu : menguras tempat penampungan air (TPA), menutup TPA dan mengubur/menyingskirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Cara pencegahan tersebut juga dikenal dengan istilah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Upaya memotivasi masyarakat untuk melaksanakan 3M secara terus menerus telah dan akan dilakukan Pemerintah melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral termasuk tokoh masyarakat dan swasta.

Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu Tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu Tahun yang sama. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini,

Gambar 2.30
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020

Dari gambar 2.30 di atas di atas dapat dilihat Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017-2019 adalah 100%.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi seni budaya dan olahraga di Kota Lhokseumawe dapat dijelaskan melalui perkembangan seni budaya dan pemuda dan olahraga yang selalu mengalami perkembangan dinamis dan memerlukan peran pemerintah dalam peningkatan kualitasnya.

2.2.3.1. Kebudayaan

Di Kota Lhokseumawe Gedung Kesenian hingga Tahun 2016 belum memiliki aset gedung kesenian sendiri. Namun sejak Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mulai membangun Gedung Kesenian dengan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) walaupun sampai dengan akhir 2019 gedung tersebut belum tuntas pembangunannya. Direncanakan gedung tersebut akan tuntas dibangun pada Tahun 2019 dengan sumber dana DOKA. Selama ini pagelaran kesenian yang diselenggarakan Kota Lhokseumawe menggunakan Gedung KNPI dan Stadion Tunas Bangsa. Sementara itu jumlah grup kesenian terus tumbuh setiap Tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut ini:

Gambar 2.31
Group Kesenian dan Gedung Kesenian
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari gambar 2.31 dapat dilihat bahwa jumlah group kesenian pada Tahun 2015 sebanyak 138 group, terus meningkat setiap Tahunnya hingga Tahun 2019 mencapai 188 group.

2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga

Sementara itu, Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Berdasarkan data Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, jumlah klub olahraga sampai dengan Tahun 2019 yang ada di Kota Lhokseumawe berjumlah 125 Klub. Jumlah tersebut terdiri dari klub sepak bola sebanyak 75 klub, futsal sebanyak 15 klub, klub voli berjumlah 12 klub, klub sepeda sebanyak 8 klub, klub panahan 1 klub, klub menembak sebanyak 8 klub dan klub tenis lapangan sebanyak 6 klub. Kota Lhokseumawe saat ini memiliki gedung olahraga sebanyak 1 unit yaitu Gedung Olahraga ARUN yang terletak di Komplek Perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG).

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.3.1.1. Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Lhokseumawe bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke pedesaan. Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah sebanyak 138 Sekolah Negeri & Swasta dengan jumlah murid 5020 orang.

Tabel 2.10
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Kecamatan	Sekolah			Jumlah Siswa		
	Negeri	Swasta	N+S	L	P	L+P
Muara Dua	1	39	40	562	914	1476
Banda Sakti	1	47	48	1056	1013	2069
Blang Mangat	1	24	25	345	343	688
Muara Satu	2	23	25	404	383	787
Jumlah	5	133	138	2367	2653	5020

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Dari tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa jumlah PAUD di Kota Lhokseumawe tersebar di empat kecamatan. PAUD terbanyak berada di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 48 PAUD dengan jumlah murid mencapai 2069 orang. Sedangkan PAUD yang paling sedikit berada di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu dengan masing-masing 25 PAUD dan jumlah murid masing-masing 688 orang di Kecamatan Blang Mangat dan 787 orang di Kecamatan Muara Satu.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai jenjang pendidikan tersebut, APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1.2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1.3	APK SD/MI	122.73	105.14	103.41	102.09	105.63
2	SMP/MTs					
2.1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2.2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2.3	APK SMP/MTs	104,39	104.57	103.6	100.61	101
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3.2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361
3.3	APK SMA/MA/SMK	108,13	106.18	97,56	91.87	91.8

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Dari tabel 2.11 diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI/ Paket A tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 122.73. Sedangkan terendah pada Tahun 2018 sebesar 102.09 artinya dari tabel diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/ MTs seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah menengah pertama telah memperoleh pendidikan tertinggi terlihat pada Tahun 2016 Angka partisipasi kasar sebesar 104.57 dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 100.61. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA/ Paket C tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 108,13 dan terendah sebesar 91.80 yang terjadi pada Tahun 2019.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 Tahun (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini,

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1,1	Jlh siswa usia 7-12 thn	17.894	20.092	20.737	21.062	19.727
1,2	Jlh penduduk kelompok usia 7-12 thn	18.119	20.967	21.399	21.791	21.062
1,3	APM SD/MI	98,76	95,83	96,91	96,65	93,66
2	SMP/MTs					
2,1	Jlh siswa 13-15 thn	9.488	10.315	11.012	11.040	9.659
2,2	Jlh penduduk kelompok usia 13-15 thn	11.556	12.066	12.542	12.538	12.219
2,3	APM SMP/MTs	82,1	85,49	87,8	88,05	79,05
3	SMA/MA/SMK					
3,1	Jlh siswa 16-18 thn	9.226	7.238	9.171	9.300	8.715
3,2	Jlh penduduk kelompok usia 16-18 thn	10.435	10.103	11.744	12.415	12.361
3,3	APM SMA/MA/SMK	88,41	71,64	78,09	74,91	70,5

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Dalam tabel 2.12 diatas, menunjukkan Angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada Tahun 2015 sebesar 98,76. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 93,66. Pada tingkat SMP/MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu 88,05. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 79,05. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada Tahun 2015 sebesar 88,41. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 70,5.

D. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 Tahun). Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini,

Tabel 2.13
Angka Putus Sekolah (APS)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/ MI	0.15	0.12	0.49	0.05	0.03
2	SMP/ MTs	0.06	0	0	0.008	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Angka putus sekolah jenjang SD/MI di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada kisaran angka di bawah 1. Dan kecenderungan menurun setiap Tahunnya. Angka tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan nilai mencapai 0,49 dan angka terendah terjadi pada Tahun 2019 dengan nilai 0,03. Sedangkan Angka putus sekolah jenjang SMP/ MTs di Kota Lhokseumawe, secara umum hanya berada pada angka 0. Dan ini terjadi pada Tahun 2016, 2017 dan Tahun 2019. Angka putus sekolah tertinggi hanya mencapai angka 0,06 saja.

E. Ruang Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik

Kondisi Sekolah SD/MI Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Pada Tahun 2017 kondisi sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI terdapat 517 ruang kelas bekondisi baik, 115 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan, sedangkan pada Tahun 2018 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik sebanyak 562 ruang kelas, untuk kondisi rusak ringan sebanyak 112 ruang kelas. Selanjutnya pada Tahun 2019 kondisi sekolah pendidikan SD/ MI yang berkondisi baik 587 ruang kelas, 107 ruang kelas yang kondisinya rusak ringan.

Sedangkan jumlah ruang kelas baik pada tingkat SMP dan SMA semakin baik untuk tiap Tahun. Pada Tahun 2019, untuk tingkat SMP/MTs 365 ruang kelas dengan kondisi baik dan rusak ringan 55 ruang. Untuk tingkat Sekolah Menengah terdapat 426 ruang kelas dengan kondisi baik, dan 15 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2019

No	Jenjang Pendidikan	2017		2018		2019	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	SD/ MI	517	115	562	112	587	107
2	SMP/ MTs	-	-	-	-	365	55
3	SMA	-	-	-	-	426	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

2.3.1.2. Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang di lakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Pada gambar dibawah ini dapat dilihat dalam kurun waktu lima (5) Tahun terdapat AKB yang tinggi 7,5% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2015 AKB kota Lhokseumawe 6,3% dan terjadi penurunan setiap Tahun nya menjadi 6% pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 menjadi 4,2% dan 3,3% pada Tahun 2018.

Tabel 2.15
Angka Kematian Bayi (AKB) (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota Lhokseumawe	6,3	6	4,2	3,3	7,5

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi dapat dilihat dari Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) (berumur kurang 1 Tahun) pada satu Tahun tertentu. Dan membandingkan jumlah Angka Kelahiran Hidup Bayi (AKHB) pada satu Tahun tertentu.

Angka kematian bayi (AKB), merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Berdasarkan tabel dibawah laporan jumlah kematian bayi menurut kecamatannya di Kota Lhokseumawe. AKB yang didapat dalam Tahun 2015 : $21/4102 \times 1000$ Tahun 2016 : $26/4103 \times 1000$, Tahun 2017 : $17/4270 \times 1000$ Tahun 2018 : $14/4199 \times 1000$ dan Tahun 2019 sebesar $32/4215 \times 1000$. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat AKB terendah adalah pada Tahun 2018 sebesar 14 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB tertinggi adalah pada Tahun 2019 sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.16
AKHB dan AKB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKB	AKHB
2015	Banda Sakti	5	1.844	21	4102
	Muara Dua	4	1.043		
	Muara Satu	7	747		
	Blang Mangat	5	468		
2016	Banda Sakti	6	1.844	26	4103
	Muara Dua	4	1.043		
	Muara Satu	7	747		
	Blang Mangat	9	468		
2017	Banda Sakti	8	1.933	17	4270
	Muara Dua	3	1.097		
	Muara Satu	3	797		
	Blang Mangat	3	443		
2018	Banda Sakti	8	1.941	14	4199
	Muara Dua	3	1.129		
	Muara Satu	2	697		
	Blang Mangat	1	432		
2019	Banda Sakti	13	1.958	32	4215
	Muara Dua	8	1.144		
	Muara Satu	7	624		
	Blang Mangat	4	489		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan sehingga berdampak ungukit besar terhadap penurunan AKB dan AKABA di Lhokseumawe.

Angka kematian balita (AKABA) yang terendah dilaporkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup, di ikuti Tahun 2017 adalah sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan dengan AKABA tertinggi adalah pada Tahun 2016 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.17
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian BALITA usia 5 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKBA	AKHB
2015	Banda Sakti	0	NA	0	0
	Muara Dua	0	NA		
	Muara Satu	0	NA		
	Blang Mangat	0	NA		
2016	Banda Sakti	6	1844	26	4102
	Muara Dua	4	1043		
	Muara Satu	7	747		
	Blang Mangat	9	468		
2017	Banda Sakti	8	1933	17	4216
	Muara Dua	3	1043		
	Muara Satu	3	797		
	Blang Mangat	3	443		
2018	Banda Sakti	8	1941	18	4199
	Muara Dua	4	1129		
	Muara Satu	2	697		
	Blang Mangat	4	432		
2019	Banda Sakti	0	1958	1	4215
	Muara Dua	1	1144		
	Muara Satu	0	624		
	Blang Mangat	0	489		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

D. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0 – 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi.

Pada Tahun 2018 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 13 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4.199 jiwa. Pada Tahun 2019 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 12 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4.215 jiwa. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

E. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 Kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2015 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 97.5 ($4/4102 \times 100.000$). Tahun 2016 Angka kematian ibu meningkat menjadi 186.6 ($8/4282 \times 100.000$), Tahun 2017 kembali menurun menjadi 140.5 ($6/4269 \times 100.000$) dan Tahun 2018 dapat diturunkan kembali menjadi 119.1 ($5/4199 \times 100.000$) serta Tahun 2019 naik kembali menjadi 142.3 ($6/4215 \times 100.000$). Cara efektif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional difasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan kontrasepsi paska persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

Tabel 2.18
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Tahun	4	8	6	5	6
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	4102	4282	4269	4199	4215
Persentase		97.5	186.8	140.5	119.1	142.3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait (Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006). Rasio posyandu per 1000 balita di Kota Lhokseumawe tinggi pada Tahun 2019 yaitu dengan rasio 7,78 di pengaruhi oleh bertambahnya jumlah posyandu dan jumlah Balita. Sedangkan Rasio posyandu terendah Tahun 2015 dengan rasio 6,03.

Tabel 2.19
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Posyandu	100	100	101	101	125
2	Jumlah Balita	16.571	15.106	15.732	16.355	15.863
Rasio		6,03	6,61	6,42	6,17	7,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020.

Rasio posyandu per 1000 balita perkecamatan Tahun 2015 s.d Tahun 2018 tertinggi di Kecamatan Blang Mangat dengan rasio masing-masing 13,8 pada Tahun 2015, 14,0 pada Tahun 2016, 13,7 pada Tahun 2017 dan 13,6 pada Tahun 2018. Dan terendah di Kecamatan Banda Sakti dari Tahun 2015 s.d 2019 dengan rasio masing-masing 4,48 pada Tahun 2015, rasio 4,95 pada Tahun 2016, rasio 4,42 pada Tahun 2017 dan rasio 2,72 pada Tahun 2018 serta rasio 6,43 Tahun 2019, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk perkecamatan dan anggota KB aktif di kecamatan tersebut.

Tabel 2.20
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2015	Muara Dua	24	4305	5,57
	Banda Sakti	32	7140	4,48
	Blang Mangat	29	2100	13,8
	Muara Satu	15	3026	4,95
2016	Muara Dua	24	3574	6.71
	Banda Sakti	32	6450	4,96
	Blang Mangat	29	2065	14,0
	Muara Satu	15	3017	4,97
2017	Muara Dua	24	3430	6,99
	Banda Sakti	32	7229	4.42
	Blang Mangat	29	2110	13,7
	Muara Satu	15	2963	5,06
2018	Muara Dua	24	3591	6,68
	Banda Sakti	21	7710	2.72
	Blang Mangat	29	2123	13.6
	Muara Satu	15	2931	5,12
2019	Muara Dua	48	2494	19.2
	Banda Sakti	33	5130	6,43
	Blang Mangat	29	1745	16.6
	Muara Satu	15	2130	7,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk

Puskesmas dan jaringannya, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib yang terdiri :

1. upaya promosi kesehatan
2. upaya kesehatan lingkungan
3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
4. upaya perbaikan gizi
5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. upaya pengobatan

Jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 6 Puskesmas. Pada Tahun 2019 bertambah 1 Puskesmas menjadi sebanyak 7 puskesmas. Adapun Rasio Puskesmas dari Tahun 2015-2019 semakin tinggi. Berdasarkan rasio kecukupan Puskesmas secara Nasional sebesar 28.000 penduduk/Puskesmas. Berarti ketersediaan Puskesmas di Kota Lhokseumawe belum memadai, jumlah penduduk terus meningkat dari Tahun keTahun. Begitu juga dengan sarana kesehatan lainnya hal ini perlu mendapat perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan yang mencukupi dan memelihara kondisi fisik bangunan dan sanitasinya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari Puskesmas. Pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah.

Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan Puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada diwilayah kerja.

Tabel 2.21
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	7
2	Jumlah Poliklinik	8	8	10	10	10
3	Jumlah Pustu	22	22	22	22	22
4	Jumlah Penduduk	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0.032	0.030	0.030	0.029	0.034
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0.042	0.040	0.050	0.049	0.048
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	0.117	0.112	0.110	0.108	0.107

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020.

H. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 11 (Sebelas) Rumah Sakit(RS), terdiri dari 1 Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 10 Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud.

Tabel 2.22
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	8	8	10	10	10
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	11	11	11
7	Jumlah Penduduk	187.4 55	195.1 86	198.9 80	203.2 84	204.2 84
Rasio		0.04 8	0.04 6	0.05 5	0.054	0.053

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

I. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendaya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus ASN, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta.

Adapun rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan satu (1) orang dokter harus melayani pada Tahun 2015 seorang dokter harus melayani 31.243 penduduk, Tahun 2016 adalah seorang dokter harus melayani 11.482 penduduk, Tahun 2017 adalah seorang dokter harus melayani 3.553 penduduk, Tahun 2018 adalah seorang dokter harus melayani 4.620 penduduk, dan di Tahun 2019 adalah seorang dokter harus melayani 3.783 penduduk, sedangkan menurut KEPNAKES/SK/I/2004 tentang indikator Indonesia sehat 2010 seorang dokter harus melayani 2500 setiap penduduk dilihat dari PERMENKES tersebut Kota Lhokseumawe masih kekurangan dokter.

Tabel 2.23
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter Umum	6	17	56	44	54
2	Jumlah Penduduk	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Rasio	0.03	0.08	0.28	0.22	0.26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

J. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas difasilitas pelayanan kesehatan dimasyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah menggunakan indikator rasio.

Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Perubahan terjadi pada Tahun 2017 jumlah tenaga medis 127 orang meningkat dari Tahun 2015 dan 2016 sebanyak 47 orang dan Tahun 2018 mengalami penurunan sehingga jumlah tenaga medis menjadi 99 orang dan pada Tahun 2019 tenaga medis meningkat menjadi 120 orang, jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Penurunan terjadi karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis pada Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Medis	47	47	127	99	120
2	Jumlah Penduduk	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Rasio	0.25	0.24	0.63	0.48	0.58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma kecelakaan. Komplikasi kebidanan antara lain pecah ketuban dini, pendarahan, pervaginam, hipertensi dalam kehamilan (systole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju dan infeksi masa nifas).

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi.

Berdasarkan data bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani untuk Tahun 2015 dan 2016 adalah sebesar 64.98%, pada Tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan menjadi 51.08%. Pada Tahun 2018 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 57.78% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 55.51%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja	618	618	496	561	549
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	951	951	971	971	989
Persentase		64.98	64.98	51.08	57.78	55.51

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020

L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu Dokter Spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), Dokter Umum dan Bidan serta diupayakan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya adalah kemitraan Bidan dan Dukun, peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program persalinan, model rumah tunggu dengan Puskesmas didaerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan.

Revitalisasi Bidan koordinator melalui pelaksanaan supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan. Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik.

Cakupan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/Nakes dari Tahun 2015-2019 dengan rasio 0.9 atau 90%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes	Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Rasio
2015	Muara Dua	1049	1179	0.9
	Banda Sakti	1840	1955	
	Blang Mangat	466	575	
	Muara Satu	749	828	
2016	Muara Dua	1049	1179	0.9
	Banda Sakti	1840	1955	
	Blang Mangat	466	575	
	Muara Satu	749	828	
2017	Muara Dua	1097	1991	0.92
	Banda Sakti	1930	1198	
	Blang Mangat	443	0	
	Muara Satu	795	587	
2018	Muara Dua	1127	1197	0.9
	Banda Sakti	1944	1992	
	Blang Mangat	433	587	
	Muara Satu	694	859	
2019	Muara Dua	1141	1209	0.99
	Banda Sakti	1960	2027	
	Blang Mangat	489	598	
	Muara Satu	622	405	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai umurnya. Pada kondisi ini diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat berkerja secara optimal. Namun demikian pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 1 awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut *drop out Rate* DPT/HB1 Campak.

UCI adalah gambaran suatu desa atau kelurahan dimana pada Tahun 2015 dan 2016 desa UCI sebanyak 41 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 60,3% dan pada Tahun 2017 desa uci sebanyak 38 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 55.9%, pada Tahun 2018 terdapat 30 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe yaitu 44.1% dan pada Tahun 2019 terdapat 68 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Jumlah Desa	Desa/Kelurahan UCI%				
			Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	68	41	41	38	30	68
Persentase			60.3	60.3	55.9	44.1	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

N. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dari anak usianya. Rata-rata berat badannya hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal. Ciri-ciri klinis yang biasanya menyertainya antara lain: kenaikan berat badan berkurang bahkan terus menurun, ukuran lingkaran lengan atas menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tinggi normal atau cenderung menurun, tebal lipatan kulit normal atau semakin berkurang. Seluruh balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 s.d 2019 seluruhnya mendapat perawatan mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	10	10	5	4	7
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	10	10	5	4	7
	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet(ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak – anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, di laporkan jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun sebanyak 3.386 jiwa dengan persentase 78.38%, data ini lebih tinggi di banding Tahun 2019 yang sebesar 2.574 jiwa atau 59.8%. Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun tertinggi pada Tahun 2017 sebanyak 3.803 atau 91.46%, namun pada Tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 3.499 atau 80.93%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun	3.386	3.386	3.803	3.499	2.574
2	Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama	4.320	4.320	4.158	4.323	4.303
	Persentase	78.3	78.3	91.4	80.9	59.8
		8	8	6	3	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 Tahun, ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang di duga kasus polio sampai di buktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada Tahun 2015-2017 kasus SFP non polio yang di laporkan di Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kasus atau 0.003% dan pada Tahun 2018-2019 menurun menjadi 1 Kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	2	2	2	1	1
2	jumlah penduduk < 15 Tahun	61.8 60	61.8 60	59.6 94	63.2 00	29.0 66
Persentase		0.00 3	0.00 3	0.00 3	0.00 1	0.00 3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang ini disebabkan oleh kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imunologi).

Adapun cakupan balita pneumonia dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Pada Tahun 2015 dan 2016 sebesar 4.21 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 79 kasus, adapun perkiraan pneumonia capaian yang terendah terdapat pada Tahun 2018 sebesar 2.54 persen dengan jumlah kasus yang di temukan sebanyak 55 kasus dengan perkiraan pneumonia pada balita 2.163 kasus. Pada Tahun 2019 terdapat 73 kasus atau 8.23% dengan perkiraan penderita pneumonia balita sebanyak 886 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	79	79	79	55	73
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.875	1.875	2.154	2.163	886
Persentase		4.21	4.21	3.6	2.54	8.23

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberculosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat di ukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pada Tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA positif (BTA+) yang tinggi sebanyak 418 kasus, namun pada Tahun 2016 s.d 2017 terjadi penurunan jumlah penderita baru TBC BTA (+) masing- masing 198 kasus dan 152 kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 198 kasus dan 152 kasus atau mencapai 100%. Pada Tahun 2018 terdapat 161 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 679 perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 23,7%. Sementara pada Tahun 2019 terdapat 136 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 102 kasus perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 133%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita
Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja elama 1 Tahun	418	198	152	161	136
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama	418	198	152	679	102
Persentase		100	100	100	23.7	133

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2020.

S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 334% dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 679 kasus dan Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe terendah adalah pada Tahun 2019 sebesar 42.58% dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 87 kasus dari jumlah penduduk 204.284 pada Tahun tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	443	367	328	679	87
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Persentase	236.3	188	164.8	334	42.58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

T. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 tuberkulosis di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 0% dengan tidak adanya pasien TB yang meninggal. Pada Tahun 2017 dan 2018 di Kota Lhokseumawe terdapat 2 kasus pasien TB yang meninggal atau dengan tingkat kematian sebesar 1% dan 0.98%. Sedangkan pada Tahun 2019 tingkat kematian karena Tuberkulosis menurun sebesar 0.48% dengan kasus kematian hanya 1 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	0	0	2	2	1
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Persentase	0	0	1	0.98	0.48

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

U. Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS

Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA(+) adalah salah satu upaya mengendalikan TB Paru yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan, Yaitu angka keberhasilan pengobatan ini di bentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap ada. Pada Tahun 2015 persentase sembuh sebesar 106% dari 418 pasien baru TB paru yang di perkirakan 443 pasien BTA mendapat pengobatan melalui DOTS. Kemudian pada Tahun 2016 dari 367 pasie baru yang diperkirakan 198 pasien BTA mendapat pengobatan atau 54%. Begitu juga pada Tahun 2017 dan 2018 persentase sembuh sebesar 46% dan 76%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam
Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pasien tuberculosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	443	198	152	518	136
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	418	367	328	679	102
Persentase		106	54	46	76	133

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

V. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk keperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, misalnya *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang Tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Pada Tahun 2016 jumlah penderita DBD yang di laporkan sebanyak 280 kasus, terjadi peningkatan dibanding jumlah kasus pada Tahun 2015 sebanyak 115 kasus, pada Tahun 2017 menurun menjadi 95 kasus, namun Tahun 2018 meningkat kembali sehingga 111 kasus dan Tahun 2019 terdapat 84 kasus penderita DBD yang tertangani. Kesimpulan pada dari jumlah kasus tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	115	280	95	111	84
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	115	280	95	111	84
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

W. Penderita Diare Di Temukan Dan Ditangani

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering di sertai kematian. Seseorang di katakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya atau air besar lebih dari tiga kali dan berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah perilaku hidup sehat yang belum baik masih banyak sampah yang buang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak di jamban serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak di dahului dengan cuci tangan terlebih dahulu. Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan pada suatu wilayah.

Gambaran tabel di bawah ini menunjukkan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus tertinggi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2015 sebesar 54.4% dengan jumlah penderita diare 4.200 kasus dari jumlah perkiraan penderita 7.704 kasus. Sedangkan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 34.3% dengan jumlah penderita diare sebanyak 1.887 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5.489 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun	4.200	3.931	2.146	1.887	2.555
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	7.704	8.022	5.372	5.489	5.516
	Persentase	54.5	49.0	39.9	34.3	46.3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

X. Angka Kesakitan Malaria Per 100.000 Penduduk

Malaria adalah penyakit infeksi yang di sebabkan oleh Plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, di tularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki atau pun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. Pengobatan malaria harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan yang efektif adalah pemberian ACT (artemisin-based combination therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus di minum habis dalam 3 hari.

Pada Tahun 2015 ada Angka Kejadian Malaria sebesar 111 kasus, Tahun 2016 dan 2017 Angka Kejadian Malaria meningkat menjadi sebesar 635 kasus dan 644 kasus. Angka Kejadian Malaria pada Tahun 2018 turun menjadi sebesar 275 kasus, sedangkan pada Tahun 2019 Angka Kejadian Malaria di Kota Lhokseumawe meningkat dari Tahun 2018 menjadi sebesar 296 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang menderita malaria pada Tahun tertentu	115	635	644	275	296
2	Jumlah penduduk pada pertengahan Tahun	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Persentase	61.3	325.3	323.6	135.3	144.9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

Y. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 belum ditemukan angka kematian akibat malaria di Kota Lhokseumawe.

Z. Proporsi Anak Balita Yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida

Tabel 2.39
Proporsi Anak Balita Yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida	0	0	0	0	0
2	Jumlah Balita	16.571	15.106	15.732	16.355	15.863
	Persentase	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 belum ditemukan Anak Balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida di Kota Lhokseumawe.

AA. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang di Obati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui tiga tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali (tertiana) atau 4 hari sekali (kuartana).

Malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat antimalaria. Obat-obatan ini perlu disesuaikan dengan jenis parasit penyebab malaria, tingkat keparahan, atau riwayat area geografis yang pernah ditinggali penderita. Kasus Anak Balita yang demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang tepat ada 100% pada Tahun 2018 dengan jumlah penderita yang diobati sebanyak 111 kasus. Sedangkan Tahun 2015 s.d 2017 dan Tahun 2019 tidak terdapat kasus anak Balita yang demam yang diobati dengan oabat anti malaria yang tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang di Obati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 Tahun	0	0	0	111	0
2	Jumlah penderita positif dalam 1 Tahun	0	280	0	111	0
Persentase		0	0	0	100	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

BB. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Humam Immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat di ketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan voluntary,counseling, and testing (VCT), sero survey, dan survei terpadu biologis dan perilaku (STBP).

Gambaran kasus HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 s.d 2019 meningkat. Dari Tahun 2015 dan 2016 terdapat 5 Kasus Pasien HIV/AIDS, pada Tahun 2017 bertambah menjadi 8 Kasus Pasien HIV/AIDS dan pada Tahun 2018 dan 2019 bertambah kembali masing-masing menjadi 12 kasus dan 24 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x	5	5	8	12	24
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	187.455	195.186	198.980	203.284	204.284
	Persentase	0.0026	0.0025	0.0040	0.0059	0.0117

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

CC. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015 adalah 175.4 dan Tahun 2016 adalah 76.2, pada Tahun 2017 adalah 161.5, pada Tahun 2018 sebesar 159.1 dan pada Tahun 2019 sebesar 151.8, dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang-ulang dalam kisaran setahun melebihi dari kunjungan rata-rata pada Tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	329.526	148.656	321.422	316.624	302.016
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	187.455	195.186	198.980	198.980	198.980
	Persentase	175.8	76.2	161.5	159.1	151.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

DD. Cakupan Kunjungan Bayi

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2019 Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe mencapai 99,9% dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 100%. Sedangkan Tahun 2016 dan Tahun 2017 Cakupan kunjungan bayi masing-masing 99,6 dan 99,4. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Puskesmas	Kunjungan Bayi									
			2015		2016		2017		2018		2019	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Banda Sakti	Banda Sakti	1272	103,4	1350	99,5	1360	100	1380	100	1384	99,9
		Mongedong	572	100	562	100	573	100	561	100	573	100
2	Muara Dua	Muara Dua	1043	100	1072	99	1097	100	1129	100	1143	99,7
3	Muara Satu	Muara Satu	747	100	788	100	769	100	697	100	624	100
4	Blang Mangat	Blang Mangat	304	100	299	100	271	100	279	100	306	100
		Blang Cut	163	99,4	193	100	172	100	153	100	183	100
		Jumlah	4101	99,9	4264	99,6	4242	99,4	4199	100	4213	99,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

EE. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas

Pada Tahun 2019 jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe 7 unit dengan cakupan puskesmas 175% dan pustu sebanyak 22 unit dengan cakupan puskesmas pembantu sebesar 32,35%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Desa	Jumlah Pembantu Puskesmas
1	Muara Dua	2	17	4
2	Banda Sakti	2	18	8
3	Blang Mangat	2	22	7
4	Muara Satu	1	11	3
	Jumlah	7	68	22
	Persen	175%		32,35%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

FF. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil di wujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang – kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama (usia 0 - 12 minggu), minimal 1 kali pada trisemester kedua

(usia kehamilan 12 – 24 minggu) dan minimal 2 kali pada trisemester ke tiga (usia kehamilan 24 minggu – lahir).

Standart waktu pelayanan tersebut di anjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal di upayakan agar memenuhi standar kualitas yaitu:

- a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pengukuran lingkar lengan atas (LILA)
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi
- f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
- h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)
- i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (HB), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah di lakukan sebelumnya) dan tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat di nilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu ham yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang di anjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan.

Dari tabel di bawah ini terlihat pada Tahun 2012 K4 meningkat sebesar 96,24% menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang di berikan oleh tenaga kesehatan. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari Tahun ke Tahun relatif tidak terlalu stabil. Tahun 2015 sebesar 93,8%, Tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 93,7%, sementara pada Tahun 2017 sebesar 93,5% dan Tahun 2018 sebesar 91,2% selanjutnya Tahun 2019 sebesar 90,4%.

Tabel 2.45
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	4460	4552	4537	4426	4472
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4754	4857	4855	4855	4944
Persentase		93,8	93,7	93,5	91,2	90,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020.

GG. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang di lakukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang di anjurkan yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan pada hari ke – 4 sampai dengan hari ke – 28 pasca persalinan pada hari ke -29 sampai dengan hari ke – 42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

- a. pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,nadi,nafas dan suhu)
- b. pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- c. pemeriksaan lochia dan cairan pervaginam lain
- d. pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
- e. pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana

- f. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
- g. keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas di ukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan nifas (KF3) dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung naik, pada Tahun 2015 Cakupan Pelayanan Nifas sebesar 90,39%, pada Tahun 2016 sebesar 90,59% dan Tahun 2017 naik lagi menjadi 91.88%. Capaian indikator KF merupakan hasil yang baik dari upaya yang di lakukan oleh petugas dan juga termasuk peran masyarakat.

Tabel 2.46
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4.104	4.201	4.259	0	0
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	4.537	4.637	4.635	0	0
Persentase		90,39%	90,59%	91.88%	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

HH. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pada usia yang rentan ini, berbagai

masalah kesehatan bisa muncul. Tanpa penanganan yang tepat bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan resiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum diberikan pada saat lahir.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada 3 – 7 hari, 1 kali pada 8 – 28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu Tahun. Capaian KN lengkap sesuai dengan tabel di bawah ini adalah Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 69,10%, Tahun 2016 meningkat menjadi 118,88% dan Tahun 2017 turun menjadi 36,71%.

Tabel 2.47
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	425	642	235	NA	NA
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	615	540	640	NA	NA
Persentase		69.10	118.88	36,71		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

II. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Kehidupan anak, usia di bawah lima Tahun memperoleh bagian yang sangat penting, usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga masyarakat dan kehidupan secara umum.

Kesehatan bayi dan balita harus di pantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya lihat. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Untuk itu di pakai indikator – indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita di lakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh:

1. pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam setahun)
2. pemberian vitamin A, dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus
3. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita minimal 2x kali dalam setahun.
4. pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Adapun capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan 8 kali yaitu pada Tahun 2015 sebesar 91,1 persen capaian ini menurun di bandingkan Tahun 2016 menjadi sebesar 88,4 persen, dan Tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebesar 91,5%

Tabel 2.48
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	15.095	15.147	15.287	0	0
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	16.571	17.138	16.714	0	0
Persentase		91,1%	88,4%	91,5%	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

JJ. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Usia masuk sekolah merupakan hal yang penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/ sederajat kelas 1. Pemeriksaan kesehatan di laksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil).

Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah di latih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil. Hal ini di maksud agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya.

Kegiatan penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah – masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat di lakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari:

1. pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
2. pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri
3. pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
4. pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
5. pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacangan
6. pengukuran kebugaran jasmani
7. deteksi dini masalah mental emosional

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi adalah pada Tahun 2016 : $2583/4165 \times 100$, sebesar 62,02 persen mengalami penurunan dibandingkan cakupan Tahun 2015 yang sebesar 76,51 persen dan Tahun 2017 yang sebesar 84,99 persen. Sementara pada Tahun 2019 sebesar 91,93 persen mengalami kenaikan disbanding Tahun 2018 sebesar 71,34 persen. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi berarti pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat untuk mempertahankan gigi cukup baik melalui upaya pencegahan.

Tabel 2.49
Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kes oleh tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Persentase
2015	Banda Sakti	1602	1902	76,51
	Muara Dua	197	447	
	Muara Satu	0	0	
	Blang Mangat	100	133	
2016	Banda Sakti	1594	1785	62,02
	Muara Dua	136	1073	
	Muara Satu	433	771	
	Blang Mangat	420	536	
2017	Banda Sakti	1033	1305	84,99
	Muara Dua	678	806	
	Muara Satu	420	455	
	Blang Mangat	406	419	
2018	Banda Sakti	1288	1864	71,34
	Muara Dua	700	1115	
	Muara Satu	660	797	
	Blang Mangat	423	529	
2019	Banda Sakti	1817	1828	91,93
	Muara Dua	687	772	
	Muara Satu	541	762	
	Blang Mangat	610	614	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

KK. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Penduduk atau masyarakat sasaran program yang telah ditetapkan oleh KEMENKES dan Dinas Kesehatan kab/kota setempat. Seluruh penduduk umumnya di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe terlindung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapat subsidi pemerintah dan pemda di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain: puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2015 adalah 1420.3 dan Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 638.2, pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi 1317.3, selanjutnya pada Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 1325.9 serta 2019 sebesar 1310.3, dikarenakan jumlah kunjungan yang berulang-ulang dalam kisaran setahun melebihi dari kunjungan rata-rata pada Tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	329.526	148.565	321.422	316.624	302.016
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	23.200	23.280	24.400	23.880	23.050
Cakupan pelayanan		1420.3	638.2	1317.3	1325.9	1310.3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2017.

LL. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 741/VII/2008 SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dengan 18 Indikator. Salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM-K) adalah pelayanan kesehatan rujukan. Ada 2 Indikator untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu :

1. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS), Puskesmas (PKM) dan sarana kesehatan lainnya.
2. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualitas GELS (*General Emergency life support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma life support*) serta ACLS (*Advance Cardiac life support*) yang di lengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015-2019 adalah mencapai 100%.

Tabel 2.51
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	8	7	8	10	10
2	Jumlah Rumah Sakit	8	7	8	10	10
Persentase		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2020.

MM. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi \leq 24 Jam

Kejadian luar biasa (KLB) adalah kejadian atau peristiwa dalam masyarakat atau wilayah dari suatu kasus penyakit tertentu yang secara nyata melebihi dari jumlah yang di perkirakan. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang berjangkit wabah sebagai daerah wabah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004).

Kriteria KLB adalah kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Direktur jenderal Nomor 451/91 tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Menurut aturan itu suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika unsur :

1. timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
2. peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
3. peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, Tahun)
4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata - rata perbulan dalam Tahun sebelumnya.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi \leq 24 jam pada tabel di bawah ini menggambarkan ada terjadi KLB tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 15 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2016 sebesar 14 kasus dengan penanganan 100 persen, Tahun 2017 dan 2018 sebesar 5 dengan penanganan 100, Tahun 2019 sebesar 0 dengan penanganan 0 persen.

Tabel 2.52
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi \leq 24 jam
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani \geq 24 jam dalam periode tertentu	5	14	5	15	0
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	5	14	5	15	0
Jumlah		100 %	100 %	100 %	100 %	0%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe,2020.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari Tahun ke Tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan. Dari data yang terbaru Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Meter dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel 2.53 berikut ini.

Tabel 2.53
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 (Km)

Tahun	Jalan Kota		Jalan Propinsi	
	Kondisi Baik	Total	Kondisi Baik	Total
2015	N/A	N/A	624	1781,72
2016	N/A	N/A	1009,52	1847,91
2017	98,248	340,573	444,24	1701,82
2018	102,652	340,573	624	1781,72
2019	108,157	412,468	741,78	1781,72

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap Tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sementara itu, kondisi jalan negara yang berada pada wilayah Kota Lhokseumawe dengan total panjang 23,20 Km secara umum dalam kondisi baik, begitu pula dengan ruas jalan propinsi dengan panjang 4,60 Km secara umum juga dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan kota dengan panjang 412,468 Km yang terbagi pada 4 (empat) kecamatan ini masih memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang tercipta karena kondisi *drain hole* yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan *tonase* dari truck yang melintasi jalan tersebut. Berikut tabel 2.55 Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.54
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Jenis, Kondisi, Kelas	Status														
	Jalan Negara					Jalan Provinsi					Jalan Kabupaten/ Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Jenis Permukaan															
Aspal	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	231.606	286.389	229.544	231.606	286.389
Paklah (kerikil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.253	71.988	75.494	74.253	71.988
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.714	51.851	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	2.240	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	340.573	412.468	339.141	340.573	412.468
Kondisi Jalan															
Baik	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	95.411	108.157	95.240	95.411	108.157
Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.967	131.595	119.585	117.967	131.595
Rusak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.403	107.554	99.511	101.403	107.554
Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.792	65.122	24.805	25.792	65.122
Jumlah	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	340.573	412.428	339.141	340.573	412.428
Kelas Jalan															
Kelas I	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	231.606	286.389	229.544	231.606	286.389
Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.253	71.988	75.494	74.253	71.988

Jenis, Kondisi, Kelas	Status														
	Jalan Negara					Jalan Provinsi					Jalan Kabupaten/ Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kelas III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.714	51.851	33.412	34.714	51.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	2.240	0.691	0.000	2.240
Jumlah	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	340.573	412.468	339.141	340.573	412.468

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pengelompokan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Dimana pengelompokan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah panjang jalan di wilayah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan. Berikut tabel panjang jalan dilalui roda empat:

Tabel 2.55
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Panjang Jalan (KM)	301.082	373.439	299.882	301.082	373.439
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	191.407	195.186	187,455	191,407	195,186
	Rasio	1.572	1.913	1.599	1.572	1.913

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020

Dari tabel 2.55 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk pada Tahun 2016 sebesar 1.913 meningkat dibandingkan dua Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017 sebesar 1.599 dan Tahun 2018 sebesar 1.572.

C. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan < 10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang (40-80 km/jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Tabel 2.56
Panjang Jalan Dilalui Roda 4
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (>40 KM/Jam)	n/a	n/a	63,5	64,46	58,14

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.56 di atas dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang terjadi fluktuatif, dimana pada Tahun 2017 sepanjang 63,5 km, Tahun 2018 meningkat menjadi 64,46 km dan Tahun 2019 kondisinya menurun menjadi 58,14 km.

D. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.57
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

NO	URAIAN	2019		
		JUMLAH	LUAS	DAYA TAMPUNG
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	68	5,000	2,000
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	204	10,200	2,040
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	2	2,500	1,000
4	Lain – Lain	-	-	-
	Jumlah Tempat Pemakaman	274	17.700	5,040
6	Jumlah Penduduk (Jiwa)			195,186
	Rasio TPU Per Satuan Penduduk (1/6)			25.82

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.57 di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2019 jumlah Tempat Pemakaman yang ada di Kota Lhoskeumawe sebanyak 274 tempat, dengan rincian 68 Tempat Pemakaman Umum, 204 Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan 2 Tempat Pemakaman Khusus dengan total rasio sebesar 25.82.

E. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.223 jiwa/Km², Blang Mangat 479 jiwa/Km², Muara Satu 930 jiwa/Km², Muara Dua 597 jiwa/Km². Jumlah ibadah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 8 unit Masjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 13 unit Masjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mesjid	50	50	50	50	50
2	Mushalla	93	93	93	93	93
3	Meunasah	68	68	68	68	68
4	Gereja	3	3	3	3	3
5	Vihara	1	1	1	1	1
a	Jumlah Rumah Ibadah	215	215	215	215	215
b	Jumlah Penduduk (Jiwa)	191,407	195,186	187,455	191,407	195,186
b/a	Rasio	1.123	1.101	1.146	1.123	1.101

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2020

Dari tabel 2.58 di atas dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 terdapat sebanyak 2015 Unit Rumah Ibadah yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Jumlah mesjid sebanyak 50 unit, Mushalla sebanyak 93 unit, Meunasah sebanyak 68 unit, Gereja 3 unit, dan Vihara sebanyak 1 Unit.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Rasio Permukiman Layak Huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di Kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, kompleks perumahan PT. Arun, perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save the Children*, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/ Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya kompleks PT. Arun saja yang memiliki fasilitas pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan pusat kuliner serta sarana olah raga seperti, stadion bola kaki, kolam renang, tenis *out door*, *volyball*, basket, badminton, *joging track* dan golf.

B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:

Tabel 2.59
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
1	Keude Punteut	4.99	Blang Mangat	Sedang
2	Keude Cunda	4.00	Muara Dua	Sedang
3	Pusong	6.66	Banda Sakti	Sedang
4	Pusong	9.71	Banda Sakti	Sedang
5	Jawa	4.23	Banda Sakti	Sedang
	Jumlah	29.59		

Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2019.

Dari tabel 2.59 di atas dapat dilihat bahwa sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebar di 5 titik. Luas keseluruhan Kawasan kumuh yaitu 29.59 Ha.

2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019, Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Lhokseumawe memiliki rasio sebesar 11,25 persatuan penduduk. Keberadaan jumlah Polisi Pamong Praja terus meningkat setiap Tahunnya guna menunjang kelancaran tugas penegakan Perda di Kota Lhokseumawe. Sedangkan jumlah Linmas di Kota Lhokseumawe Tahun 2018 sebanyak 88 orang dan pada Tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 528. Penambahan Linmas ini ditujukan guna menambah tugas pengamanan Pilkada Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	101	124	147	206	213
2	Jumlah Linmas	606	606	88	88	528
3	Jumlah Penduduk	179.807	181.976	187.455	188.221	189.384
Rasio Polisi Pamong Praja		5.62	6.81	7.84	10.94	11.25
Rasio Jumlah Linmas		33.70	33.30	4.69	4.67	27.88

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah, 2020.

B. Penegakan PERDA/QANUN

Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.61
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penegakan PERDA	10	15	15	15	15
2	Jumlah Pelanggaran	85	49	141	133	862
Persen		11	30	10	11	17

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayul Hisbah, 2017.

Jumlah Penegakan PERDA dan pelanggaran PERDA di Tahun 2015 sebesar 11 persen atau sebanyak 10 penegakan PERDA dari jumlah pelanggaran sebanyak 85 pelanggaran dan pada Tahun 2019 sebesar 17 persen atau sebanyak 15 penegakan PERDA dari jumlah pelanggaran sebanyak 862 pelanggaran. Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat secara maksimal mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe.

C. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe tetap dilakukan dalam proporsi yang sama. Patroli ini merupakan kegiatan rutin guna melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.62
Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah waktu patroli	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
2	Jumlah Kegiatan patroli	3x sehari	3x sehari	3x sehari	3x sehari	3x sehari
Rasio		0.67	0.67	0.67	0.67	0.67

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah, 2017.

Dari tabel 2.62 dapat dilihat bahwa patroli penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan rutin oleh Satpol PP Kota Lhokseumawe berdurasi 2 jam dengan jumlah kegiatan patroli dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Patroli ini sangat penting sekali dilakukan untuk keberlangsungan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan kenyamanan ketertiban umum.

2.3.1.6. Sosial

A. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf H menetapkan “setipa orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan upaya melalui pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
PMKS yang memperoleh bantuan sosial

No	Jenis Masalah	Jumlah Penerima				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Bayi Terlantar					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	-	1	2	1
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	1	2	1
	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)					
2	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	58	97	58	37
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	58	97	58	37
3	Anak yang memerlukan perlakuan Khusus (AMPK)					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	63	105	61	51
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	-	-	-
	Anak Jalanan, Anak Terlantar					
4	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	-	-	18	45
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	-	-	25
5	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)					
	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	-	-	-	37	32
	- Jumlah yang diberikan bantuan	-	-	-	-	-
	Lanjut Usia (LANSIA)					
6	- Jumlah yang seharusnya mendapat bantuan	1.600	1.800	2.337	2.426	2.397
	- Jumlah yang diberikan bantuan	1.600	1.800	2.337	-	2.397

B. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang terdata pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sejumlah 1.560 jiwa, jumlah ini terus naik hingga pada Tahun 2019 berjumlah 2.346 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kota Lhokseumawe telah memberikan jaminan sosial sehingga pencapaiannya mencapai 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.64 dibawah ini:

Tabel 2.64
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 Tahun	1,560	1,575	1,724	1,870	2,346
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) Tahun	1,560	1,575	1,724	1,870	2,346
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020.

C. Persentase Panti Asuhan/Jompo yang Menerima Bantuan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana Setiap Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Saat ini terdapat 13 (Tiga Belas) Panti Asuhan yang mampu menampung 858 (delapan ratus lima puluh delapan) Orang.

Selain keberadaan panti asuhan, Kota Lhokseumawe juga memiliki 2 (dua) panti jompo yaitu Panti Jompo Darussa'dah dan Panti Jompo An-Nur sebagai sarana sosial untuk orang lanjut usia yang mana jumlahnya semakin meningkat pada setiap Tahunnya. Kedua panti jompo ini mampu menampung 45 (empat puluh lima) lansia.

Tabel 2.65
Persentase Panti Asuhan/Jompo yang menerima bantuan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panti Asuhan	13	13	13	13	13
2	Panti Jompo	2	2	2	2	2
a	Jumlah Seluruh Panti Asuhan/Jompo	15	15	15	15	15
b	Jumlah Penghuni Panti asuhan/Jompo yang menerima bantuan	908	908	908	908	908
c	Jumlah Penghuni Panti Asuhan/Jompo	1,030	1,099	1,128	1,224	1,320
	Persentase (b/c*100)	88	83	80	74	69

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.65 di atas dapat dijelaskan bahwa belum seluruhnya penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2019 jumlah persentase penghuni panti asuhan/jompo yang menerima bantuan sebesar 69 persen, turun dari Tahun-Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penghuni panti yang mengalami peningkatan setiap Tahunnya sedangkan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya untuk 908 orang penghuni panti asuhan/jompo.

D. Disabilitas yang menerima bantuan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 disebutkan tentang “Penyandang Cacat”. Penyandang Cacat seakan subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan dengan istilah “Cacat” berkonotasi sesuatu yang negative. Kata “Penyandang” memberikan predikat. Berikut tabel disabilitas yang menerima bantuan.

Tabel 2.66
Disabilitas yang menerima bantuan
Tahun 2015-2019

No	Jenis Alat Bantu	Jumlah Penerima				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kursi Roda	20	64	70	47	43
2	Tongkat Ketiak	2	15	-	-	-
3	Alat Bantu Jalan Segi Empat	-	-	-	9	6
4	Tongkat Siku	-	-	-	7	-
5	Sepeda Motor Modifikasi	-	-	-	1	-
6	Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-	4
	Jumlah	22	79	70	64	53

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 2020.

Disabilitas yang menerima bantuan Kursi Roda pada Tahun 2015 berjumlah 20 orang, Tahun 2016 berjumlah 64 orang, Tahun 2017 berjumlah 70 orang, Tahun 2018 berjumlah 47 orang dan tahun 2019 berjumlah 43 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Tongkat ketiak pada Tahun 2015 berjumlah 2 orang, Tahun 2016 berjumlah 15 orang. Disabilitas yang menerima Alat Bantu Jalan Segi Empat pada Tahun 2018 berjumlah 9 dan pada Tahun 2019 berjumlah 6 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Tongkat Siku pada Tahun 2018 berjumlah 7 orang. Disabilitas yang menerima bantuan Sepeda Motor Modifikasi pada Tahun 2018 berjumlah 1 orang. Disabilitas yang menerima bantuan sepeda motor roda tiga pada Tahun 2019 berjumlah 4 orang.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

A. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan angkatan kerja 15 Tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dikalikan seratus persen. Berikut tabel Angka Partisipasi Angkatan kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.67
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan kerja 15 Tahun keatas	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
2	Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas	130.93 1	133.82 1	136.75 7	140.07 6	143.17 3
Persentase		60%	65%	63%	58%	62%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) dikalikan seratus persen. Berikut tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk Angkatan kerja	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)	125.810	128.500	131.221	134.380	137.091
Persentase		63%	67%	66%	60%	65%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.69
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	11.122	18.207	9.046	10.144	9.881
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
Persentase		14%	21%	11%	13%	11%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

D. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat dengan membandingkan penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.70
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang bekerja	67.857	68.157	77.021	70.852	79.430
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	78.979	86.364	86.067	80.996	89.311
Persentase		86%	79%	89%	87%	89%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

E. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dapat dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Bruto dengan jumlah tenaga kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.71
Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produk Domestik Bruto	6.550.1500.000	6.450.410.000	6.591.660.000	6.844.700.000	7.116.190.000
2	Jumlah tenaga kerja	125	140	1885	833	2206
	Persentase	5240120000%	4607435714%	349690186%	821692677%	322583409%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

F. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas merupakan perbandingan antara kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dikalikan seratus persen. Berikut tabel Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.72
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kesempatan Kerja	9	12	16	17	20
2	Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas	130.931	133.821	136.757	140.076	143.173
Persentase		0,007%	0,009%	0,012%	0,012%	0,014%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

G. Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dengan total kesempatan kerja dikalikan seratus persen. Berikut tabel Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.73
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	63.230	68.017	75.011	69.879	75.339
2	Total kesempatan kerja	9	12	16	17	20
Persentase		702.556%	566.808%	468.819%	411.053%	376.695%

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

H. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun.

Angka sengketa merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dengan jumlah perusahaan per Tahun dalam suatu wilayah dikalikan 1000. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sebanyak 17 perusahaan. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sebanyak 19 perusahaan, Tahun 2017 sebanyak 21 perusahaan dan pada Tahun 2018 sebanyak 24 perusahaan, namun di Tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis hanya 8 perusahaan saja yang terdaftar. Sementara itu, jumlah sengketa pengusaha pekerja pada Tahun 2015 sebanyak 267 dan di Tahun ini merupakan angka tertinggi. Jumlah sengketa pekerja terus mengalami penurunan hingga pada Tahun 2016 hanya terdapat 75 kasus, Tahun 2017 terdapat 56 kasus, Tahun 2018 terdapat 48 kasus dan hingga di Tahun 2019 hanya terdapat 25 kasus . Berikut tabel Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.74
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja PerTahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	267	75	56	48	25
2	Jumlah Perusahaan	17	19	21	24	8
	Rasio	15.706	3.947	2.667	2.000	3.125

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

I. Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dengan jumlah kasus yang dicatatkan dikalikan seratus persen. Berikut tabel Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.75
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	29	17	51	40	25
2	Kasus Yang Dicatatkan	30	25	51	40	25
Persentase		97	68	100	100	100

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 dari kasus yang dicatatkan sebanyak 30 kasus dan diTahun itu juga kasus dapat ditangani sebanyak 29 kasus atau penanganan kasus mencapai 97%, pada Tahun 2016 kasus yang dicatatkan sebanyak 25 kasus dan dapat ditangani sebanyak 17 kasus atau mencapai 68% penanganan kasus. Untuk Tahun 2017-2019 dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanding dengan kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) hingga penanganan kasus dapat mencapai 100%. Secara garis besar pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan pencapaian penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB) di Tahun 2017-2019 hingga 100%, dalam arti kata semua kasus yang dicatatkan dapat diselesaikan.

J. Keselamatan dan Perlindungan Pekerja.

Tujuan dari keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan ditempat kerja agar mendapatkan perlindungan dalam bekerja yang layak. Pada Tahun 2015-2017 penerapan keselamatan kerja mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2015 hanya mencapai 15 perusahaan saja yang menerapkan keselamatan kerja dari 30 perusahaan yang terdata atau mencapai 50% penerapan keselamatan kerja, pada Tahun 2016 mencapai 20 perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja dari 25 perusahaan atau mencapai 80% penerapan keselamatan kerja dan pada Tahun 2017 meningkat hingga 83% atau 53 perusahaan telah menerapkan keselamatan kerja

dari 64 jumlah perusahaan. Berikut tabel Keselamatan dan Perlindungan Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.76
Keselamatan dan Perlindungan Pekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja	15	20	53	63	301
2	Jumlah perusahaan	30	25	64	82	386
Persentase		50%	80%	83%	77%	78%

Sumber : DPMTSP Naker, 2020.

K. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta program Jamsostek dapat dihitung dengan membanding antara jumlah pekerja/buruh Jamsostek dengan jumlah pekerja/buruh dikalikan seratus persen. Berikut tabel Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.77
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pekerja/Buruh JAMSOSTEK	-	-	38	47	54
2	Jumlah Pekerja/Buruh	-	-	-	-	-
Persentase		-	-	38%	47%	54%

Sumber : DPMTSP Naker, 2020.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2017-2019 jumlah pekerja/buruh yang menjadi program Jamsostek terus meningkat dari Tahun ke Tahun dan keseluruhan pekerja/buruh tersebut dari Tahun 2017-2019 terdaftar sebagai peserta program Jamsostek. dari Tahun 2017 hanya mencapai 38 orang

L. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2015-2019 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah terjadi kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2015 mencapai 29 kasus terselesaikan dari 30 kejadian kasus atau mencapai 97%, pada Tahun 2016 turun hingga 68% penyelesaian kasus dari 25 kejadian kasus hanya 17 kasus terselesaikan dan pada Tahun 2017 s.d 2019 kembali meningkat hingga 100% di Tahun 2019. Pada Tahun 2017 mencapai 71% penyelesaian kasus dari 51 kejadian kasus 36 kasus terselesaikan dan meningkat lagi di Tahun 2018 hingga 73% penanganan kasus dari 40 kejadian kasus 29 kasus terselesaikan dan terus meningkat lagi hingga mencapai 100% penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemerintah Daerah kasus di Tahun 2019. Berikut tabel Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.78
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan
Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dgn kebijakan Pemda	29	17	36	29	25
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	30	25	51	40	25
Persentase		97%	68%	71%	73%	100%

Sumber : DPMTSP Naker, 2020.

2.3.2.2. Komunikasi dan Informatika

A. Rasio Warnet Terhadap Penduduk

Teknologi informasi saat ini mulai berkembang dengan pesat sehingga mempermudah setiap orang untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi tanpa harus terbatas oleh waktu dan tempat. Salah satu cara untuk memperoleh informasi atau memperluas relasi saat ini adalah jasa di bidang internet.

Tabel 2.79
Rasio Warnet Terhadap Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	JumlahWarnet	76	78	80	82	88
2	Jumlah Penduduk	191.407	195.186	198.98	198.98	196.132
Rasio		0.039	0.040	0.402	0.412	0.044

Sumber : Lhokseumawe dalam angka, 2020.

Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio warnet terhadap penduduk Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rasionya 0.039 sedangkan Tahun 2019 rasionya sebesar 0.044 dengan perhitungan rasio per seribu jumlah penduduk.

B. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

C. Pameran/Expo

Pameran/ Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk Tahun 2015-2019 telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam Pameran meliputi pameran pembangunan dan pameran pendidikan.

D. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok informasi masyarakat (kim) merupakan program dari kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Kim dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan, salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Tujuan kelompok informasi masyarakat (kim) adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan.

Selain dari tujuan tersebut, kim berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota kim, dari kim kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, kim sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Kim sebagai sarana peningkatan literasi anggota kim dan masyarakat dibidang informasi dan media masa. Kim sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	3 (Tiga) Kelompok	4 (Empat) Kelompok	4 (Empat) Kelompok	4 (Empat) Kelompok	4 (Empat) Kelompok
2	Jumlah Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan	4 (Empat) Kecamatan
Persentase		75%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel diatas pada Tahun 2015 jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe hanya 3 (tiga) kelompok dari empat kecamatan yang ada dalam Kota Lhokseumawe sedangkan untuk Tahun 2016 s.d 2019 sudah berbading dari 4 (empat) KIM dan 4 (empat) Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

2.3.2.3. Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA).

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dari Tahun 2015-2019 jumlah investor untuk PMDN di Kota Lhokseumawe semakin meningkat tiap Tahunnya. Jumlah seluruh

investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.458 investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor.

Tabel 2.81
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Investor	215	297	302	312	332

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Dari tabel diatas jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 Tahun, dimana angka tertinggi mencapai 3.389.251.025.247 pada Tahun 2019. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA).

Tabel 2.82
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	URAIAN	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2015	Jumlah Investasi	2.237.000.000.000	-	2.237.000.000.000
2016	Jumlah Investasi	3.370.451.771.247	-	3.370.451.771.247
2017	Jumlah Investasi	3.373.624.221.247	-	3.373.624.221.247
2018	Jumlah Investasi	3.379.911.000.247	-	3.379.911.000.247
2019	Jumlah Investasi	3.389.251.025.247	-	3.389.251.025.247

Sumber : DPMTSPNAKER, 2020.

2.3.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting. baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.83
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pekerja Perempuan di Instansi Pemerintah	2.695	2.752	2.844	3.100	3.400
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	68002	69900	70875	71645	72891
	Persentase	3.96	3.93	4.012	4.32	4.66

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel 2.83 diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah pada Tahun 2015 sebanyak 2.695 pekerja perempuan atau 3.96%, pada Tahun 2019 terus meningkat menjadi 3.400 pekerja perempuan atau 4.66%

B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.84
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laki-laki	23	23	23	23	21
2.	Perempuan	2	2	2	2	4
Jumlah		25	25	25	25	25
Persentase		8%	8%	8%	8%	16%

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, Tahun 2020.

Dari tabel 2.84 diatas proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada periode 2014-2019 sebanyak 2 orang atau 8% dan pada periode 2019-2024 menurun proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR meningkat jadi 4 orang atau 16%. Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Lhokseumawe masih rendah selain belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat undang-undang ini terlihat dari tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berikut data dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut ini:

Tabel 2.85
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pekerja Perempuan di instansi Swasta	904	962	1.020	1.085	1.366
2	Jumlah Pekerja Perempuan	68002	69900	70875	71645	72891
Persentase		1.32	1.37	1.44	1.51	1.87

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat partisipasi perempuan di lembaga swasta pada Tahun 2015 sebanyak 904 dari 68002 pekerja perempuan atau sebesar 1.32%, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 962 dari 69900 pekerja perempuan atau 1.37% dan Tahun 2019 partisipasi perempuan di lembaga swasta menjadi 1.366 dari 72891 pekerja perempuan atau 1.87%.

D. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio KDRT tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.86
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KDRT	-	12	6	7	37
2	Jumlah RT	53717	52344	53068	53600	53535
	Rasio KDRT	0	0.022	0.011	0.013	0.067

Sumber : P2TP2A Tahun 2020.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari rasio KDRT yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada Tahun 2015 angka KDRT nol dan Tahun 2019 angka KDRT di Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada angka 0,067.

E. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat, yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.84 berikut:

Tabel 2.87
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh
Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kota Lhokseumawe 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	12	8	24	19	22
2	Jumlah Pengaduan	12	8	24	19	22
Rasio		100	100	100	100	100

Sumber : DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Rasio penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Lhokseumawe sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seluruh pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada Tahun 2015-2019 semuanya dapat diselesaikan.

2.3.2.5. Pangan

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras (padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi). Sampai saat ini Kota Lhokseumawe tidak memiliki permasalahan ketahanan pangan.

Tabel 2.88
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan Utama (%)
2015	0,76	191.407	0.0040
2016	0.076	195.186	0.00039
2017	0.074	198.98	0.00037
2018	0.074	198.98	0.00037
2019	0.075	196.123	0.00038

Sumber : DKPPP Kota Lhokseumawe 2020.

2.3.2.6. Pertanahan

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 Tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 2.89
Luas Lahan Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2019
1	Luas lahan bersertifikat milik pemerintah Kota Lhokseumawe	±255.169 m ²
2	Luas lahan bersertifikat milik masyarakat adalah :	17,370
	- Hak milik (HM) seluas	17.370.000 m ²
	- Hak Guna Bangunan (HGB)	316.598 m ²
3	Luas Wilayah	181,06 Ha

Sumber : Kantor Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2020.

2.3.2.7. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi.

Kota Lhokseumawe mempunyai masalah dengan lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah cair. Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya masih sangat minim sekali.

A. Persentase Timbulan Sampah yang ditangani

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Semua sampah dari sumber masing-masing akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Sumur Batu.

Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu :

1. sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga
2. sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga misalnya limbah dari proses industri.

Tabel 2.90
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Volume timbulan sampah yang ditangani (ton)	46.716	46.407	47.447	45.888	44.769
2	Total timbulan sampah (ton)	58.769	56.953	57.841	56.282	55.335
Persentase		79.49	81.48	82.03	81.53	80.90

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Persentase Timbulan sampah pada setiap tahunnya terjadi penurunan walaupun tidak begitu signifikan, pada Tahun 2015 persentase timbulan sampah sebesar 79.49%, Tahun 2016 persentase timbulan sampah sebesar 81.48%, Tahun 2017 persentase timbulan sampah sebesar 82.03%, Tahun 2018 persentase timbulan sampah sebesar 81.53% dan pada Tahun 2019 persentase timbulan sampah sebesar 80.90%.

B. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis.. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penanganan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih dirasa sangat minim, terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah sampah yang tertangani 79.49 ton, pada tahun 2016 jumlah sampah yang tertangani 81.48 ton, pada tahun 2017 jumlah sampah yang tertangani 82.03 ton, pada tahun 2018 jumlah sampah yang tertangani 81.53 ton dan pada tahun 2019 jumlah sampah yang tertangani 80.90 ton. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.80

Tabel 2.91
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	79,49	81,48	82,03	81,53	80,90
2	Total jumlah timbulana sampah diKab/Kota (ton)	100	100	100	100	100

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020

C. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman sebagian besar diselesaikan di lokasi sumber sampah dengan cara dibakar dan hanya sebagian yang dikumpulkan oleh pengumpul sampah informal untuk didaur ulang. Penanganan sampah di Kota Wates yang meliputi pertokoan dan pasar sudah mencapai 100%, artinya semua timbulan sampah setiap harinya sudah dapat diangkut ke TPA.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti tempat penampungan sampah sementara (kontainer, bin/tong, bak permanen), alat pengangkut (gerobak, dumptruck, becak sampah), dan sebagainya.

Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah.

Tabel 2.92
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha)	100,00	110,00	120,00	130,00	150,00
2.	Luas area kabupaten/kota (km ² /ha)	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06
Persentase		55.23	60.75	66.27	71.80	82.84

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2015 sebesar 55.23%, pada Tahun 2016 persentase cakupan area pelayanan sebesar 60.75%, pada Tahun 2017 persentase cakupan area pelayanan sebesar 66.27%, pada Tahun 2018 persentase cakupan area pelayanan sebesar 71.80% dan pada Tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan sebesar 82.84%.

2.3.2.8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin wajib memilikinya.

Pada Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Program KTP-elektronik atau e-KTP dengan empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Dengan adanya kewajiban perekaman KTP berbasis Elektronik, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengetahui jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang telah melakukan perekaman dan pembuatan KTP. Namun jumlah warga yang membuat KTP di usia 17 tidak terlalu naik begitu pesat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, di samping itu jumlah penduduk juga tidak begitu banyak terjadi penambahannya. Berikut Rasio penduduk ber KTP di Kota Lhokseumawe :

Tabel 2.93
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	95.579	105.487	107.793	116.032	122.958
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	127.094	130.027	131.931	132.038	128.230
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0.75	0.81	0.82	0.88	0.96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir 2015-2019, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 0.96. Sedangkan pada Tahun 2015 rasio ini mengalami penurunan menjadi 0.75.

B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat bahwa pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske dinas terkait. Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota Lhokseumawe dari tahun 2015 sampai dengan 2019:

Tabel 2.94
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	14.687	17.183	18.010	18.279	18.311
2	Jumlah Bayi	19.454	20.000	20.245	20.269	20.996
Rasio		0.75	0.86	0.89	0.88	0.87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.

Tabel diatas menggambar bahwa selama tiga tahun terakhir 2015-2019 rasio bayi ber akta kelahiran sangat fluktuatif. Pada Tahun 2015 rasio bayi ber akta kelahiran sebesar 0.75%, Tahun 2017 sebesar 0.86 % dan Tahun 2018-2019 menurun sebesar 0.88% dan 0.87%

C. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan paling lambat akhir Tahun 2011, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun 2006. Pada tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

D. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlakunya KTP adalah 5 Tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Tabel 2.95
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	95.579	105.487	107.293	116.032	122.988
2	Jumlah penduduk wajib KTP	127.094	130.027	131.931	132.038	128.230
	Persentase	75	81	82	88	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan KTP di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 sebesar 75%. Persentase ini sedikit menurun dibanding Tahun 2019 yang mencapai 96%.

2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dengan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang terlihat dari kondisi kantor Geuchik. Sampai dengan Tahun 2019 masih terdapat gampong dengan kondisi kantor yang rusak dan belum memiliki kantor. Pemerintahan gampong yang kondisi bangunannya rusak maupun yang tidak memiliki kantor dalam menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan sarana prasarana gampong lainnya seperti bangunan yang ada di masjid, meunasah, gedung pertemuan maupun ruangan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Kondisi kantor Geuchik dan mukim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.96
Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah Kondisi Kantor Geuchik					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kantor Dalam Kondisi Baik	49	51	38	54	58	
2	Kantor Dalam Kondisi Rusak	7	6	22	5	4	Alue Awe, Kota Lhokseumawe, Uteun Bayi, Cot Trieng
3	Belum Memiliki Kantor	12	11	8	9	6	Hagu Teungoh, Tumpok Teungoh, Jambo Timu, Blang Panyang, Batuphat Timur, Ujung Pacu
Jumlah		68	68	68	68	68	

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Sedangkan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%. Sejak Tahun 2015-2019 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.97
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	2015		2016		2017		2018		2019	
			Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana	Jumlah Kantor Yang Baik	Cakupan Sarana Prasarana
1	Muara Dua	17	12	70,58%	13	76,47%	13	76,47%	13	76,47%	16	94,11%
2	Banda Sakti	18	15	8,33%	16	88,88%	16	88,88%	16	88,88%	14	77,77%
3	Blang Mangat	22	16	72,72%	16	72,72%	17	72,72%	18	81,81%	21	95,45%
4	Muara Satu	11	6	54,54%	6	54,54%	6	54,54%	7	63,63%	7	63,63%
Jumlah		68	49	72,05%	51	75%	52	76,47%	54	79,41%	58	85%

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik mulai dari pada Tahun 2015 sebesar 72,05% dan pada Tahun 2019 meningkat mencapai 85%. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), sedangkan sumber dana dari APBK Kota Lhokseumawe melalui SKPD terkait tidak mengalokasikan anggaran pembangunan kantor keuchik.

B. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Yang Baik

Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap tahun telah memfasilitasi dana untuk gampong dengan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong dilaksanakan dari APBK melalui dana Alokasi Dana Gampong (ADG). Sejak tahun 2015 pemerintah pusat mulai APBN menyalurkan Dana Desa (DD). Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyalurkan dana bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gampong. Adapun besaran dana yang disalurkan untuk gampong sejak tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.98
Data Penyaluran Dana Ke Gampong
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Realisasi Penyaluran Dana Ke Gampong				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG	23.131.280.796	45.225.461.961	54.176.102.429	47.393.135.135	49.971.344.117
2	Dana Desa (DD)	19.510.027.000	43.536.057.800	54.679.330.666	53.475.677.300	58.773.329.996
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	-	544.265.970	928.342.385	973.164.381	-
	Jumlah	42.641.307.796	89.305.785.731	109.783.775.480	101.841.976.816	108.744.674.113

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dana tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sejak tahun 2015 sebesar Rp. 42.641.307.796,- dan Tahun 2019 menjadi Rp. 108.744.674.113 atau mengalami peningkatan yang cukup besar. Dana APBG tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Dengan semakin besarnya dana APBG yang dikelola oleh pemerintah gampong perlu adanya pembinaan secara berkesinambungan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur gampong yang baik di bidang pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2019 telah melakukan pembinaan kepada pemerintah gampong dengan melakukan penyusunan produk hukum gampong, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset gampong serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.99
Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah Gampong Yang Dibina				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Muara Dua	17	17	17	17	17	17
2	Banda Sakti	18	18	18	18	18	18
3	Blang Mangat	22	22	22	22	22	22
4	Muara Satu	11	11	11	11	11	11
	Jumlah	68	68	68	68	68	68

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dalam pembinaan perencanaan salah satunya mengarahkan gampong dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan prioritas Dana Desa dengan memperhatikan status desa. Adapun data klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sudah tidak ada desa dengan status tertinggal, 52 gampong menjadi desa berkembang, 14 gampong dengan status maju dan hanya 2 gampong yang mandiri.

Prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan memberdayakan desa dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa. Pada tahun 2017 pemerintah gampong melalui APBG mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk belanja penyertaan modal gampong guna mendukung modal awal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pembinaan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap BUMG sebagai upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tumbuh kembangnya usaha guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan warga gampong dan Pendapatan Asli Gampong (PAG).

Selama tahun 2015-2019 data pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.100
Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun Pendirian dan Penyertaan Modal Gampong					Penyertaan Modal Gampong	BUMDESMA
		2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Muara Dua			2.603.335.927	1.142.419.844	200.775.956	3.946.531.727	1.600.000.000
2.	Banda Sakti			1.110.463.792	2.587.587.257	869.201.942	4.567.252.991	-
3.	Blang Mangat			2.998.218.862	1.662.496.248		4.660.715.110	-
4.	Muara Satu			1.981.842.693	655.567.327	90.000.000	2.727.410.020	-
JUMLAH				8.693.861.274	6.048.070.676	1.159.977.898	15.901.909.848	1.600.000.000

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMG di awal Tahun 2017 sebesar Rp. 8.693.861.274,- dan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 1.1159.977.898,-. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada BUMG sangat besar dan guna mencapai tujuan pendirian perlu adanya pembinaan BUMG tersebut dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.101
Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah BUMG					BUMDESMA
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Muara Dua	17	-	-	14	17	17	1
2	Banda Sakti	18	-	-	7	16	18	-
3	Blang Mangat	22	-	-	16	21	21	-
4	Muara Satu	11	-	-	9	10	11	-
	Jumlah	68	-	-	46	64	67	1

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah BUMG yang ada di Kota Lhokseumawe pertumbuhan mengalami peningkatan pada Tahun 2017 sebanyak 46 unit sampai tahun 2019 sebanyak 67 unit. 1 gampong yang belum mendirikan BUMG yaitu gampong Tunong disebabkan adanya permasalahan dari pemerintah gampong itu sendiri sehingga menghambat jalannya pendirian BUMG. Pada tahun 2019 telah berdiri Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) di Kecamatan Muara Dua yang anggota nya terdiri dari 16 gampong yang ada di Kecamatan Muara Dua.

C. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP-PKK Kecamatan sampai TP-PKK Gampong dan dilakukan secara bergantian setiap tahunnya. Selanjutnya TP-PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan Kelompok-kelompok Masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma dan lain-lain. Jumlah kelompok Dasa Wisma adalah bagian dari jumlah Kelompok PKK Dusun yang ada di Gampong.

Tabel 2.102
Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No.	TP PKK Kecamatan	Jumlah TP-PKK Gampong	Kelompok Binaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Muara Dua	17	13	6	2	2	1
2.	Banda Sakti	18	14	5	4	3	2
3.	Blang Mangat	22	15	4	2	1	0
4.	Muara Satu	11	10	3	2	3	1
	Jumlah	68	52	18	10	9	4

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2015 jumlah yang dibina sebanyak 52 kelompok dan Tahun 2019 menjadi 5 kelompok yang tersebar di 4 Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan sejak adanya dukungan dari pemerintah gampong melalui APBG baik dari Alokasi Dana Gampong (ADG) maupun Dana Desa (DD) kelompok TP-PKK Gampong berjalan dengan sendirinya menjalankan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di gampong masing-masing. Sedangkan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui APBK sangat kurang dalam mengalokasikan anggaran untuk pembinaan TP-PKK Gampong melalui instansi terkait.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK diperoleh dari perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Selama Tahun 2015-2019 data kelompok binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	TP PKK Kecamatan	Jumlah TP-PKK Gampong	Kelompok Binaan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Muara Dua	17	13	6	2	2	1
2.	Banda Sakti	18	14	5	4	3	2
3.	Blang Mangat	22	15	4	2	1	0
4.	Muara Satu	11	10	3	2	3	1
	Jumlah	68	52	18	10	9	4

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

D. Persentase PKK Aktif

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan. TP-PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. TP-PKK Kota Lhokseumawe aktif menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dan dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Dana ADG dan Dana Desasejak tahun 2015 sampai dengan saat ini lebih meningkatkan peran aktif TP-PKK dalam pembangunan gampong khususnya pembinaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase PKK aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlahPKK aktif dengan jumlah PKK dikali 100%. Selama tahun 2015 s/d 2019 jumlah binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104
Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah TP-PKK Aktif	Persentase (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Muara Dua	17	100	100	100	100	100
2	Banda Sakti	18	100	100	100	100	100
3	Blang Mangat	22	100	100	100	100	100
4	Muara Satu	11	100	100	100	100	100
	Jumlah / Persentase	68	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

E. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang Kesehatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui serta wanita usia subur. Oleh karena itu kegiatan posyandu sangat penting dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.

Persentase posyandu aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu dikali 100%. Selama tahun 2015 s/d 2019 jumlah posyandu aktif Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105
Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persentase (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Muara Dua	24	24	100	100	100	100	100
2	Banda Sakti	32	32	100	100	100	100	100
3	Blang Mangat	29	29	100	100	100	100	100
4	Muara Satu	15	15	100	100	100	100	100
	Jumlah / Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel di atas dilihat bahwa jumlah posyandu aktif dalam Kota Lhokseumawe sampai dengan saat ini berjumlah 100 unit yang tersebar di 4 Kecamatan. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah posyandu aktif paling tinggi, mengingat jumlah penduduk yang banyak dan padat. Posyandu dalam Kota Lhokseumawe memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 strata posyandu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.106
Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Strata Posyandu	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pratama	0	0	0	0	0
2	Madya	10	10	10	10	12
3	Purnama	78	78	78	78	87
4	Mandiri	1	1	1	1	1
	Jumlah	89	89	89	89	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2020.

2.3.2.10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Gerakan KB Nasional selama ini telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut belum merata. Makin tinggi pertumbuhan penduduk semakin mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Program Keluarga Berencana. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.107
Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak	95.273	95.868	97.340	98.771	96.481
2	Jumlah	53.717	52.344	53.068	53.600	53.535
	Rata-Rata jumlah anak per Keluarga	1,78	1.83	1.83	1.84	1.80

Sumber: DP3ADALDUK & KB Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah anak per keluarga di Kota Lhokseumawe hanya 2 orang per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di kota Lhokseumawe telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

2.3.2.11. Perhubungan

A. Jumlah kendaraan dan arus penumpang angkutan umum

Permasalahan Transportasi di Kota Lhokseumawe kita hanya akan membicarakan Transporasi darat karena Kota Lhokseumawe tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi.

Tabel 2.108
Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Naik	Turun
2015	33,188	146,936	150,395
2016	33,200	146,946	152,221
2017	107.220	454.805	390.893
2018	100.853	147.352	130.589
2019	129.575	172.154	165.189

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Pada tabel diatas, bahwa jumlah unit kendaraan mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2015 jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe 33,188 unit, Tahun 2016 terdapat 33,200 unit, Tahun 2017 mencapai 107,220 unit, Tahun 2018 mencapai 100,853 unit dan pada Tahun 2019 mencapai 129,575 unit. Adapun dengan Jumlah Penumpang yang naik turun di Terminal Kota Lhokseumawe mengalami penurunan yang signifikan atau dapat dikatakan mengalami fluktuasi yang sangat signifikan dimana pada Tahun 2015 jumlah penumpang yang naik 146,936 penumpang dan turun 150,395 penumpang, pada Tahun 2016 penumpang yang naik 146,946 penumpang dan turun 152,221, pada tahun 2017 penumpang yang naik 454,805 penumpang dan yang turun 390,893 penumpang, pada Tahun 2018 penumpang yang naik 147,352 penumpang dan yang turun 130,589 sedangkan pada Tahun 2019 penumpang yang naik 172,154 penumpang dan yang turun 165,189 penumpang. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan penumpang yang datang ke Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya.

B. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 rasio Ijin trayek sebesar 0,005, Tahun 2016 rasio izin trayek sebesar 0,009, Tahun 2017 rasio izin trayek sebesar 0,008, Tahun 2018 rasio izin trayek sebesar 0,008 sedangkan pada Tahun 2019 rasio izin trayek terjadi penurunan sebesar 0,007. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.109
Rasio Ijin Trayek Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ijin Trayek	895	1.745	1.636	1.636	1.636
2	Jumlah penduduk	191,407	195.186	198.980	203.284	207.202
	Rasio Izin Trayek	0,005	0,009	0,008	0,008	0,007

Sumber : Dinas Perhubungan, Jumlah Penduduk: Sumber BPS Lhokseumawe

C. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Di Kota Lhokseumawe, Uji Kir Angkutan Umum terlihat bahwa Jumlah angkutan yang di uji Kir sangat stabil dimana hampir semua kendaraan mengikuti Uji Kir setiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2015 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 1,12 pada Tahun 2016 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 0,80 pada Tahun 2017 rasio yang mengikuti Uji Kir adalah 1,05 pada tahun 2018 yang mengikuti Uji Kir adalah 1,02 dan pada Tahun 2019 yang mengikuti Uji Kir adalah 1,02 kendaraan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.110
Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kendaraan	2490	2639	2.350	2.381	2.558
2	Kendaraan Yg Diuji	2795	2107	2.234	2.330	2.496
	Rasio	1,12	0,80	1,05	1,02	1,02

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

D. Jumlah Pelabuhan Udara/Laut/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/ bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Terminal Bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Di Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Oleh Karena itu tidak ada penambahan fasilitas Pelabuhan Baik Udara maupun Laut di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.111
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-
2	Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
3	Terminal Bis/Barang	3	3	3	3	3

Sumber Dinas Perhubungan, 2020

E. Kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum cukup baik dimana hampir setengah dari kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe belum memiliki Kir atau tidak melakukan uji Kir. Tapi bila terlihat bahwasanya setiap tahunnya kendaraan yang belum memiliki Kir semakin berkurang seperti terlihat pada tabel dibawah ini bahwa pada Tahun 2015 persentase Kir adalah 112% sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 97%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.112
Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkutan Umum yang memiliki KIR	2795	2107	2.234	2.330	2.496
2	Jumlah Angkutan Umum	2490	2639	2.350	2.381	2.558
Persentase		112	80	99	97	97

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

F. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di kota Lhokseumawe dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.113
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
2	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

G. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin dicari oleh para pendatang/ wisatawan ketika berkunjung disuatu kota/kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen kota Lhokseumawe yaitu 300 hanya tersedia 83 rambu, pada Tahun 2016 jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia yaitu 212 hanya tersedia 78 sedangkan Tahun 2019 jumlah rambu-rambu yang seharusnya 152 hanya tersedia 60 rambu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.114
Pemasangan Rambu-rambu
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	83	78	0	0	60
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	300	212	212	212	152
Persentase		27	36	0	0	39

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

H. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagu jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus truk, dan sepeda motor.

Panjang Jalan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 yaitu 340 km, jumlah kendaraan 56.946 unit terjadi peningkatan ditahun 2019 panjang jalan 412 km sedangkan jumlah kendaraan 52.402 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.115
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan	340	340	412	412	412
2	Jumlah Kendaraan	56.946	56.597	62.325	50.340	52.402
	Rasio	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008

Sumber: Panjang Jalan: Dinas PUPR, Jumlah kendaraan: SAMSAT LHOKSEUMAWE 2020

I. Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.116
Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	5.452	6.428	6.954	7.236	7.510

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel diatas jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2015 sebesar 5.452 ton, pada Tahun 2016 sebesar 6.428 ton, pada Tahun 2017 sebesar 6.954 ton, pada Tahun 2018 sebesar 7.236 ton dan pada Tahun 2019 sebesar 7.510 ton.

J. Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.117
Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (Orang)	297.331	599.167	845.698	277.941	337.343

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 sangat fluktuatif. Pada Tahun 2015 Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal sebanyak 297.331 orang, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 599.167 orang, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan 845.698, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 277.941 dan pada Tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 337.343 orang.

2.3.2.12. Komunikasi dan Informatika

A. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh SKPD Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

B. Pameran / Expo

Pameran/Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk Tahun 2019 telah melakukan sebanyak 2 (dua) macam pameran meliputi pameran pembangunan dan pameran pendidikan.

2.3.2.13. Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah belum

A. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe dari Tahun ke Tahun terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.118
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Aktif	120	100	105	100	100
2	Jumlah Koperasi	299	257	251	251	251
	Persentase	40,13	38,91	41,83	39,84	39,84

Sumber: Disperindagkop, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 persentase koperasi aktif di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 39.84 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan jumlah koperasi dari Tahun-Tahun sebelumnya.

B. Jumlah BPR / LKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan terus terjadi penambahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UKM Non BPR/LKM di Kota Lhokseumawe terus meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.119
Jumlah BPR/LKM
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Seluruh UKM	1318	2314	2361	2372-	2372
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	10	15	15

Sumber: Disperindagkop, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 jumlah Usaha Kecil Menengah mencapai 2372 UKM, terjadi peningkatan dari Tahun-Tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada Tahun 2015 sebanyak 4 BPR dan bertambah menjadi 15 di Tahun 2019.

2.3.2.14. Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tabel 2.120
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Investor	154	205	257	266	270

Sumber: DPMTSPNAKER, 2020.

Pada Tahun 2015 jumlah investor untuk PMDN berjumlah 154 hingga Tahun 2019 semakin meningkat dengan jumlah 270. Khusus untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor.

B. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi pada Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 Tahun di Kota Lhokseumawe. Angka tertinggi mencapai Rp.3.386.437.000.000 pada Tahun 2016. Berikut tabel Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.121
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Tahun	URAIAN	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2015	Jumlah investasi	2.237.000.000.000	-	2.237.000.000.000
2016	Jumlah investasi	3.370.451.771.247	-	3.370.451.771.247
2017	Jumlah investasi	3.373.624.221.247	-	3.373.624.221.247
2018	Jumlah investasi	3.379.911.000.247		3.379.911.000.247
2019	Jumlah investasi	3.389.251.025.247	-	3.389.251.025.247

Sumber: DPMTSPNAKER, 2020.

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMDN/PMA setiap Tahunnya semakin meningkat dengan jumlah PMDN/PMA yang juga meningkat setiap Tahunnya.

Tabel 2.122
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada PMA/PMDN	4	251	93	7.989	7.757
		4.00	8.96	5.17	76.09	8.76

Sumber: DPMTSPNAKER, 2020.

2.3.2.15. Kepemudaan dan Olahraga

A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain. Organisasi pemuda di Kota Lhokseumawe hingga Tahun 2019 berjumlah 50 namun yang tidak aktif berjumlah 10 yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Gampong. Berikut data Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.123
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	32	36	38	42	50
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	44	48	50	53	60
Persentase		72	75	76	79	83

Sumber: Disporapar, 2020.

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.124
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	4	5	10	11	11
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar	38	39	39	40	40
Persentase		10.52	12.82	25.64	27.5	27.5

Sumber: Disporapar, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pembinaan cabang olahraga di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 27.5 persen dari total cabang olahraga yang ada di Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 32 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2016 adalah 146. Berikut tabel 2.123 cakupan pelatih yang bersertifikasi:

Tabel 2.125
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pelatih bersertifikat	32	32	33	33	33
2	Jumlah seluruh pelatih	132	146	146	146	148
Persentase		24.24	21.91	22.60	22.60	22.29

Sumber: Disporapar, 2020.

2.3.2.16. Statistik

A. Buku “Kabupaten/Kota Dalam Angka”

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan pada setiap Tahun merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

B. Buku “PDRB Kabupaten/Kota”

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap Tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

2.3.2.17. Kebudayaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya serta benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.126
Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe

No	Kegiatan
1	Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
2	Pengirim Tim Kesenian Ke LN
3	Anugerah Budaya
4	Audisi Paduan Suara GBN
5	Festival dan Lomba Karya Seni
6	Festival Permainan Rakyat
7	Hari Kesenian Daerah
8	Festival Rapai Uroeh
9	Festival Seudati
10	Festival Cut Bang Cut Kak
11	Festival Lomba Seni Lukis
12	Festival Lomba Lagu Qasidah
13	Festival Seni Budaya Islami
14	Festival Lomba Syiar Budaya Islam
15	Festival Seni Budaya Antar Sekolah
16	Audisi Penyanyi Cilik
17	Pelatihan Pengembangan Kesenian
	Total

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Dari tabel diatas dapat tergambar bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 17 jenis kegiatan seni budaya tari Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan untuk tiap Tahunnya.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.125 berikut ini:

Tabel 2.127
Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No	Lokasi	Makam	Tugu	Monumen/ Museum	Benteng	Tempat Bersejarah	Jlh
1	Kec. Banda Sakti	1 Tgk. Lsm 2 Tgk. Chik Ditungong			1 Kurok-Kurok	1 Meriam Belanda 2 Tiang Gantung Tgk. Chik Ditungong	5
2	Kec. Muara Dua	1 Tgk. Chik Buket Krueng	1 Pahlawan TKR	1 P. Ramli		1 Mon Tujuh	4
3	Kec. Blang Mangat	1 Tgk. Abdul Jalil	1 Tgk. Abdul Jalil				2
4	Kec. Muara Satu	1 Taufik saleh 2 Putroe Neng 3 Tgk. Siah Hudam 4 Tgk. Chik Dipaloh 5 Tgk. Jeurat Meuindram				1 Gua Jepang	6
Jumlah		9	2	1	1	4	17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki situs/bangunan cagar budaya untuk makam terdapat sebanyak 9 (sembilan), tugu sebanyak 2 (dua), benteng sebanyak 1 (satu) unit dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat), jadi jumlah situs/ bangunan cagar budaya Kota Lhokseumawe seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) unit.

2.3.2.18. Perpustakaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan dapat dirumuskan sebagai suatu unit kerja dari sebuah lembaga pendidikan yang berupa tempat penyimpanan koleksi buku-buku pustaka untuk menunjang proses pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 5 jenis perpustakaan di Kota Lhokseumawe. Rincian data jumlah gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.128
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Nama Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1
2	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2
3	Perpustakaan Sekolah	26	26	26	26	26
4	Perpustakaan Rumah Ibadah	9	9	9	9	9
5	Perpustakaan Pesantren	2	2	2	2	2
	Jumlah Perpustakaan	40	40	40	40	40
	Jumlah Penduduk	191,407	195,186	198.980	203.284	203.284
	Rasio	0.0209	0.0205	0.0201	0.0197	0.0197

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020.

Tabel di atas menjelaskan bahwa sejak Tahun 2015-2019 jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe terdapat 40 perpustakaan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio perpustakaan terhadap satuan penduduk mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2015 rasio sebesar 0.0209, Tahun 2016 rasio sebesar 0.0205, Tahun 2017 rasio sebesar 0.0201, Tahun 2018 rasio sebesar 0.0197 dan Tahun 2019 rasio sebesar 0.0197.

2.3.2.19. Kearsipan

A. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan memegang peran penting bagi kelancarannya organisasi, dimana pengelolaan arsip secara baku dapat menjadi sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Kearsipan merupakan suatu proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, bahwa dari periode 2012-2016 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku hanya 15.6% dari Jumlah 32 SKPD. Berikut tabel data jumlah pengelolaan arsip secara baku di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.129
Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah Pengunjung				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku	5	5	5	5	5
2	Jumlah SKPD	32	32	33	33	34
Persentase		15.63	15.63	15.15	15.15	14.71

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020.

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

A. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.130
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lokasi	Ket
1.	Wisata Alam a. Pantai Ujon Blang b. Pulau semadu c. Pantai pulo daruet	Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Muara Satu Kecamatan Muara Dua	
2.	Wisata Budaya/Spiritual a. Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang b. Gua Jepang cot Panggoi c. Meriam Belanda d. Tugu Pahlawan TKR e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng f. Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong g. Mon tujuh h. Makam Tgk. Dlhokseumawe i. Makam Tgk. Chik Ditunong j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng k. Makam Mualim Taufik Shaleh l. Makam Putroe Neng m. Makam Tgk. Syiah Hudam n. Makam Tgk. Chik Dipaloh o. Makam Tgk. Jrad Meuindram p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng q. Museum P. Ramli	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) Gp. Blang Panyang (Muara Satu) Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat) Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) Gp. Mesjid (Blang Mangat) Gp. Banda Masen (Banda Sakti) Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) Gp. Blang Buloh (Blang Mangat) Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Cot Trieng (Muara Satu) Gp. Paloh (Muara Dua)	
3.	Wisata Buatan a. Reservoir (Waduk) b. Taman Riyadah c. Taman Mangat Cerita d. Waduk Jeulikat	Gp. Pusong (Banda Sakti) Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Blang Mangat Kecamatan Blang Mangat	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

B. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe secara terus-menerus berusaha mengaktifkan dan mendorong semua sektor agar masing-masing sektor dapat memberi masukan yang optimal. Salah satu sektor yang perlu didorong secara terus-menerus adalah sektor pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.131
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum_	70462.2	80582	96713.6	123630.1	153969.5
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
	Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)	0.92	1.04	1.20	1.46	1.73
	Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)	1.12	1.24	1.44	1.76	2.07

Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa Migas sejak Tahun 2012-2016 cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2012 kontribusi pariwisata terhadap PDRB Tanpa Migas sebesar 1.05 persen turun hingga menjadi 1.01 persen pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 1.09 persen. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB Migas cenderung mengalami kenaikan setiap Tahunnya sejak 2012 hingga Tahun 2016.

2.3.3.2. Pertanian

A. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, jika memasukkan komponen migas pada Tahun 2014 dan 2015 masih didominasi oleh kelompok sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sedangkan untuk sektor pertanian masih belum begitu mengembirakan. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan serta perikanan dengan rincian seperti terdiskripsikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.132
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	516413.7	529818.9	542572.7	567783.3	599904.7
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		6.76	6.86	6.72	6.71	6.74
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		8.24	8.18	8.08	8.11	8.08

Sumber: PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

B. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kelompok petani yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB dengan migas dan PDRB non migas pada Tahun 2016 adalah Kecamatan Blang Mangat, yaitu sebesar 33,98% dan Kecamatan Muara Dua sebesar 30,10%. Ini menunjukkan bahwa Kecamatan Blang Mangat di dominasi sektor pertanian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.133
Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2019

Sektor	PDRB Migas		PDRB Non Migas	
	2019		2019	
	Kel	%	Kel	%
Kecamatan Banda Sakti	23	10.6%	23	10.6%
Kecamatan Muara Satu	56	25.7%	56	25.7%
Kecamatan Muara Dua	69	31.7%	69	31.7%
Kecamatan Blang Mangat	70	32.1%	70	32.1%
Jumlah	218	100%	218	100%
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas	0,001		0,002	

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, BPS 2020.

C. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima Tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi sejak 2015 hingga 2019. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2016 dan 2017, sementara itu, pada Tahun 2018 dan 2019 komoditi padi menurun secara signifikan hingga sebesar sepertiga dari kondisi sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.134
Produktivitas Komoditas Pangan
Kota Lhokseumawe
Tahun 2015 - 2019

No.	KOMODITI	PRODUKSI (Kg)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	10578000	15333000	15333000	9954000	9954000
2	Jagung	-	198000	198000	-	-
3	Ubi Kayu	2550000	317000	317000	1764000	1764000
4	Ubi Jalar	24000	-	-	-	-
5	Kedelai	-	20000	20000	-	-

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2016-2020.

2.3.3.3. Perdagangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2012 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 15,76% dengan migas, sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 29,29%. Angka ini terus mengalami peningkatan yang berarti khususnya pada sektor migas, sementara itu kontribusi pada tanpa migas mengalami penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.135
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sektor Perdagangan	1508861.4	1515851.6	1523096.2	1546120.1	1548878.4
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		19.76	19.61	18.87	18.26	17.39
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		24.06	23.42	22.67	22.07	20.86

Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

2.3.3.4. Perindustrian

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 3,66%. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 43,98%, dengan memasukkan migas

hampir setengahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan migas setelah sektor perdagangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.136
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sektor Industri	1301452.3	1154623.1	1201646	1288992	1315362
2	Jumlah PDRB dengan Migas	7635732.3	7728897.1	8070275.2	8465414.3	8907082.9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	6270951.3	6473133.4	6718166.2	7005287	7425846.4
	Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)	17.04	14.94	14.89	15.23	14.77
	Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)	20.75	17.84	17.89	18.40	17.71

Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel produksi perikanan:

Tabel 2.137
Produksi Perikanan Budidaya
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi Ikan (ton)	2.914.500	2.990.800	3.182.490	3.703.650	3.604.500
2	Target Daerah (ton)	3.850.600	3.980.700	3.900.420	4.035.000	4.450.000
	Persentase	75.69%	75.13%	81.59%	91.79%	81.00%

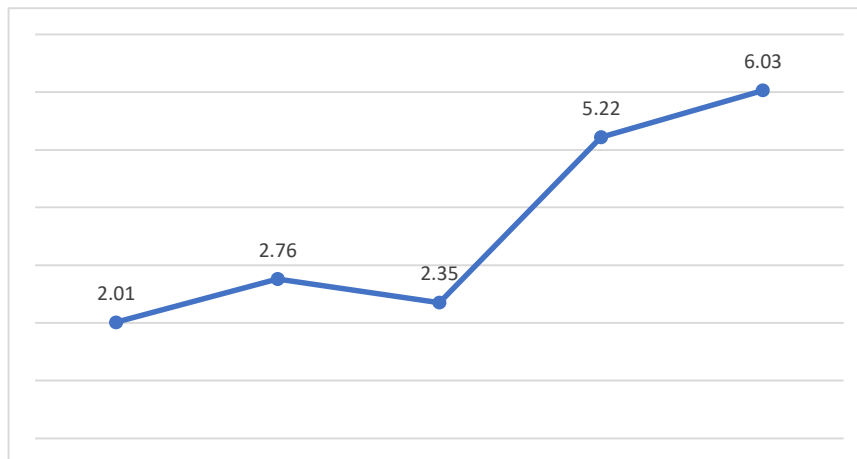
Sumber: DKPPP, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi perikanan budidaya sejak Tahun 2015-2019 terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 91.79%, Semakin tinggi produksi budidaya ikan akan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian masyarakat. Untuk jenis ikan yang umumnya dilakukan petani tambak di wilayah Kota Lhokseumawe adalah ikan bandeng, selebihnya ikan mujair dan Sebagian kecil berbagai jenis udang.

B. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Sub kategori perikanan rata-rata tiap tahun nilainya terus meningkat dikarenakan wilayah Lhokseumawe yang berbatasan dengan lautan/pantai. Pengembangan sub kategori perikanan di Kota Lhokseumawe harus menjadi sektor unggulan untuk jangka waktu pendek, menengah maupun Panjang yang akan memberikan dampak peningkatan perekonomian Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Gambar 2.32
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019



Sumber: PDRB Kota Lhokseumawe, 2015-2019.

2.3.4. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Perencanaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada, tersedianya

dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7 Tahun 2019.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud guna mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara rutin dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh Organisasi pernagkat daerah sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap Tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD.

Selama periode 2017 sampai dengan 2022 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), dimana RKPD tersebut merupakan penjabaran dari program RPJMD Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD merupakan bahan penyusunan RAPBD. Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. RKPD berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan OPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD.

D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan taarsipta ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah serta menjadi acuan lokasi investasi kota baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Disamping itu, RTWR dimaksudkan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serts arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2014.

2.3.4.2. Keuangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh *fraud* tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), berbeda dari Tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat permasalahan pada Tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara Neraca *unaudited* dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reuiu Inspektorat.

2.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal

Tabel 2.138
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	177			
2	Jumlah Total ASN	4311	4351			
Persentase		0.14	4.07			

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 dari 4311 orang ASN di Kota Lhokseumawe baru 0.14% yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal atau hanya 6 orang ASN.. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur.

B. Persentase Pejabat ASN Mengikuti DIKLAT Struktural

Jumlah total jabatan struktural dalam wilayah Kota Lhokseumawe tiap tahunnya terus meningkat dari tahun 2015 hanya 454 orang hingga di tahun 2019 mencapai 518 orang. Sejak periode 2015-2019 jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural di tahun 2016 hanya mencapai 27.57% yang merupakan angka tertinggi dengan 134 orang yang mengikuti diklat struktural tersebut dari total jabatan 486 dan tahun 2015 merupakan angka terendah hanya mencapai 2.86% dari total jabatan 454 hanya 13 orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural.

Pada tahun 2017 s.d 2019 terus terjadi penurunan persentase pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural hingga mencapai 21.43% tahun 2017, 18.70% tahun 2018 dan hanya mencapai 15.64% di tahun 2019. Berikut tabel persentase pejabat ASN mengikuti Diklat Struktural Kota Lhokseumawe tahun 2015-2019.

Tabel 2.139
Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti					
	- PIM II	-	3	3	2	2
	- PIM III	6	26	20	20	17
	- PIM IV	7	105	91	70	62
2	Jumlah Total Jabatan	454	486	532	492	518
Persentase		2,86%	27,57%	21,43%	18,70%	15,64%

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020.

C. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan struktural dan struktural di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2018 menunjukkan penambahan setiap tahunnya, namun di tahun 2019 terjadi penurunan. Total jumlah jabatan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu pada tahun 2015 mencapai 1.190 merupakan jumlah terendah, tahun 2016 mencapai 1.242, tahun 2017 mencapai 2.256, tahun 2018 mencapai 2.433 orang yang merupakan jumlah tertinggi dan pada tahun 2019 turun hingga mencapai 2.105 orang. Posisi dan jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kota Lhokseumawe ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut tabel Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019.

Tabel 2.140
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	29	31	31	31	31
2	Jabatan Administrasi	115	127	124	124	120
3	Jabatan Pengawas	310	348	327	330	330
4	Jabatan Fungsional Tertentu	736	736	1.774	1.948	1.624
	Jumlah Jabatan	1.190	1.242	2.256	2.433	2.105

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2020.

2.3.4.4. Pengawasan

A. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Tabel.141
Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	CC	CC	CC

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015-2019 terus menerus memperoleh predikat CC. Untuk kedepan akan diupayakan terus perbaikan predikat agar dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

B. Level Kapabilitas APIP

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 supaya seluruh tingkat pimpinan kementerian/lembaga pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel.2.142
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2 dengan Catatan	Level 2 dengan Catatan	Level 3 dengan catatan	Level 3

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat tingkat Capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2015 berada pada tingkat level 2 dimana prose audit dilakukan secara tetap, rutin, beruang namun sebagian telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi, Tahun 2018-2019 berada pada level 3 hal ini menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome apip mampu menilai efiesi, efektifitas dan ekonomis suatu program mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

C. **Tingkat Kematangan SPIP**

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern tersebut sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik dan secara memadai diperbaharui untuk memenui keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola. Untuk capaian tingkat kematangan SPIP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.143
Capaian Tingkat Kematangan SPIP Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Level Kapabilitas APIP	-	-	Level 1	Level 2	Level 2

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat Capaian tingkat kematangan SPIP dari Tahun 2015-2016 belum ada pencapaian, sedangkan pada Tahun 2017 pada level 1, dan Tahun 2018-2019 berada pada level 2. Peningkatan ini terus diupayakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

2.3.5. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan

2.3.5.1. Syariat Islam

A. Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah

Perkembangan dayah di Kota Lhokseumawe dari Tahun ke Tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan Agama Islam. Kondisi ini sudah mencapai rata-rata jumlah dayah seluruh Aceh. Jika merujuk pada RPJMA 2017-2022 jumlah dayah seluruh Aceh pada Tahun 2014 adalah 1.065 dayah, sehingga untuk jumlah dayah di Kota Lhokseumawe sudah cukup baik. Berikut tabel yang merinci jumlah dayah, kepemilikan, dan guru dayah di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.144
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019

Tipe	Kepemilikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Yayasan	7	9	11	12	14
	Pribadi	0	0	0	0	0
B	Yayasan	6	9	9	14	15
	Pribadi	0	0	0	0	0
C	Yayasan	30	29	36	35	36
	Pribadi	0	0	0	0	0
D	Yayasan	0	0	0	0	0
	Pribadi	0	0	0	0	0
Jumlah Dayah		43	47	56	61	65
Jumlah Guru Dayah		423	487	492	512	550

Sumber: Dinas Syariat Islam, 2020.

Tabel di atas menggambarkan kondisi jumlah dayah dan guru dayah di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2015-2019. Dayah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2015 berjumlah 43 dayah yang terdiri dari 7 dayah tipe A, dan 6 dayah tipe B dengan jumlah guru berjumlah 423 orang. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2019 jumlah dayah di Kota Lhokseumawe berjumlah 65 dayah, dengan tipe A sebanyak 14 dayah, Tipe B 15 dayah, dan Tipe C sebanyak 36 dayah, dengan jumlah guru sebanyak 550 orang. Keseluruhan dayah tersebut semuanya berada di bawah kepemilikan yayasan.

B. Jumlah Hafiz Hafizah yang di Bina

Tabel 2.145
Jumlah Hafiz Hafizah yang diBina
Tahun 2015-2019

NO	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hafizh hafizah	20	20	10	15	15
Jumlah Hafizh Hafizah		20	20	10	15	15

Sumber: Dinas Syariat Islam, 2020.

Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah hafiz hafizah Kota Lhokseumawe yang mendapat pembinaan ditahun 2015 sebanyak 20 orang, tahun 2016 sebanyak 20 orang, tahun 2017 sebanyak 10 orang, tahun 2018 sebanyak 15 orang dan tahun 2020 sebanyak 15 orang

2.3.5.2. Majelis Ulama

Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah Ulama dan Sosialisasi Fatwa.

A. Pendidikan Kader Ulama (PKU)

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe telah menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak dua kali, yaitu pada Tahun 2015 dan 2019, dimana pada Tahun 2015 peserta yang mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak 12 orang, peserta yang ikut berpartisipasi dalam PKU semuanya laki-laki. Pada Tahun 2019 Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU), jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 30 orang, semua peserta umumnya laki-laki. Berikut tabel data pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama (PKU).

Tabel 2.146
Jumlah Peserta PKU
Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019

No	Tahun	Jumlah Peserta		Keterangan
		Lk	Pr	
1	2015	12 (Orang)	-	
2	2016	20 (Orang)	-	
3	2017	30 (orang)	-	
4	2018	30 (orang)	-	
5	2019	30 (orang)	-	

Sumber : MPU 2020

B. Musyawarah Ulama

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.142 dibawah ini:

Tabel 2.147
Kegiatan Musyawarah Ulama
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sidang Paripurna Ulama	36	42	30	32	40	180
2	Rapat koordinasi MPU	0	3	3	2	2	10
4	Nadwah/Muhasah Ilmiah	1	1	1	1	1	5
5	Muzakarah masalah Keagamaan	1	1	1	1	1	5
6	Pengkajian Aliran Sempalan	-	-	-	-	-	-
7	Rapat Pimpinan MPU	8	7	6	7	5	33
	Jumlah	46	54	41	43	49	233

Sumber : Sekretariat MPU, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2015-2019 kegiatan musyawarah ulama di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sebanyak 233 kali, dimana pada Tahun 2015 sebanyak 46 kali, Tahun 2016 sebanyak 54 kali, dan Tahun 2019 sebanyak 49 kali. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi Sidang Paripurna Ulama dilakukan sebanyak 180 kali, Rapat Koordinasi MPU sebanyak 10 kali, Nadwah/Muhasah Ilmiah sebanyak 5 kali, Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 5 kali, dan Rapat Pimpinan MPU sebanyak 33 kali.

C. Sosialisasi Fatwa

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe hingga saat ini belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa hasil dari kesepakatan para ulama terkait masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, dikarenakan MPU Kota Lhokseumawe belum pernah mengeluarkan fatwa. Karena fatwa – fatwa tentang fenomena sekarang yang berkembang dalam masyarakat sudah dikeluarkan oleh MUI dan MPU Aceh, serta disosialisasikan oleh MUI Pusat dan MPU Aceh, melalui media televisi, surat kabar ataupun media sosial.

2.3.6. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.6.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita. PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan, Tahun 2012 Rp.930.300, dan Tahun 2016 Rp.1.054.900-. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Lhokseumawe semakin meningkat, namun nilai ini masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh (Tahun 2016; Rp 1.108.347,-) Pengeluaran perkapita per bulan Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam grafik pada gambar 2.32 berikut:

Gambar 2.33
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2015 - 2019 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2020.

2.3.6.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kodisi Kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitas wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah rumah tangga Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 yang mendapat akses air bersih melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 1.719 rumah tangga atau sebesar 3.89 persen. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih karena PDAM baru membuat jaringan pipa air untuk wilayah kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.143 berikut ini:

Tabel 2.148
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT)
Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	-	-	-	-	1,719
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	4.35	4.23	4.22	3.97	3.89

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

B. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan yang sangat berarti yaitu sebesar 12,32 persen, pada Tahun 2015 persentase rumah tangga yang berlistrik sebesar 99,14 persen, sedangkan pada Tahun 2009 yaitu 86,82 persen, dengan demikian jumlah rumah tangga yang belum menggunakan listrik di Aceh sebanyak 9.830 unit atau sebesar 0,86 persen. Secara rinci persentase rumah tangga berlistrik di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe)	34,978	36,081	37,632	39,267	40,828
2	Jumlah Rumah Tangga	39,558	40,626	40,726	43,309	44,165
	Persentase	88.42	88.81	92.40	90.67	92.44

Sumber : Publikasi PLN (analog & upb) 2020.

2.3.6.3. Fokus Iklim Investasi

Kondisi iklim investasi di Kota Lhokseumawe dapat diamati dengan melihat beberapa faktor antara lain angka kriminalitas yang tertangani, angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka

A. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tindak kejahatan yang terjadi di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami peningkatan, tindak kejahatan yang terjadi dikelompokkan dalam dua katagori besar yaitu kelompok tindakan kriminal biasa yang merupakan kasus pencurian, penipuan, perompakan, pembunuhan, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain, sedangkan yang dikelompokkan dalam kelompok Kriminal Narkoba yang berupa kasus Ganja dan Sabu-sabu dan zat adiktif lainnya.

Tabel 2.150
Angka Kriminalitas
Kota Lhoksumawe Tahun 2015-2019

Uraian Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pembakaran	7	20	-	3	0
Kebakaran	11	20	-	0	2
Penculikan	2	4	-	1	0
Penghinaan	1	3	-	2	0
pembunuhan	3	2	6	4	0
Penganiayaan	43	37	1	3	20
Pencurian	131	6	83	6	90
Pemerasan	15	12	2	2	0
Pengelapan	29	0	84	1	12
Penipuan	82	0	3	7	11
KDRT	19	33	1	1	3
perjudian	11	0	-	5	0
Perkosaan	7	1	3	4	0
perzinaan	1	3	5	8	0
Jumlah/Total	362	141	188	47	119
Jumlah Penduduk	191.407	195.186	198.980	203.284	203.284
Angka Kriminalitas (Per 10.000)	18.91	7.22	9.44	2.31	5.85

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019 cenderung meningkat di Tahun 2019 untuk kasus pencurian dan penganiayaan. Kondisi ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi iklim investasi di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2015 angka kriminalitas per satuan penduduk sebesar 18.91, hingga akhir Tahun 2019 menurun menjadi 5.85. Masih tetap dibutuhkan usaha-usaha yang konkrit dari semua elemen pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif dalam rangka mendorong iklim investasi.

B. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Melihat angka partisipasi angkatan kerja ditentukan melalui perbandingan antara yang bekerja dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas pada suatu daerah. Dari Tahun 2015-2019 Angka partisipasi angkatan kerja Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.151
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	190.75	197.91	199.12	200.27	201.15
	Usia 15 Tahun	0	5	0	6	6
2	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Ke Atas	58.804	65.454	67.388	67.857	77.021
Angka Partisipasi Angkatan Kerja		30.83	33.07	33.84	33.88	38.29

Sumber : Lhokseumawe dalam Angka, 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya menunjukkan peningkatan. Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2019 sebesar 38.29 meningkat dari Tahun sebelumnya yang mencapai 33.38.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumawe berkurang drastis pada Tahun 2019. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Lhokseumawe terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Berikut tabel 2.151 data tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.152
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	TPT	10,88	7,46	11,20	13,06	10,51
2	TPAK	55,34	56,77	59,10	59,38	60,22

Sumber : Statistik daerah, BPS Lhokseumawe 2020.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak Tahun 2018-2019 menunjukkan angka penurunan, dimana pada Tahun 2018 TPT sebesar 13.06 turun menjadi 10.51 pada Tahun 2019. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya sejak Tahun 2015-2019. TPAK Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah 60.22. Indikator yang menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) dari penduduk usia kerja ini meningkat dari Tahun sebelumnya yang mencapai 59.38.

2.3.6.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam aspek daya saing suatu daerah. Beberapa hal yang menjadi indikator dalam mengamati kondisi sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe antara lain Rasio Ketergantungan dan Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

A. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.153
Rasio Ketergantungan
Kota Lhokseumawe Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Ketergantungan	50,91	53,10	52,33	52,13	51,90

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2020.

Tabel di atas menjelaskan bahwa Rasio Ketergantungan Kota Lhokseumawe menunjukkan penurunan. Tahun 2019 Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe mencapai 51.90 persen, turun dari Tahun sebelumnya yang mencapai 52.13 persen.

B. Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang disusun untuk kurun waktu 20 Tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain:

- a. dalam Konteks Nasional Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- b. fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan kota-kota *hinterland* disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi.

Dengan demikian sistem pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.154
Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2015- 2019

No	Fungsi Pelayanan	Pusat Kegiatan	Keterangan
1	Pusat Kegiatan Nasional	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya (wilayah Kab. Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara dan Muara Batu)
2	Pusat Pelayanan Kota	Keude Cunda	Kecamatan Muara Dua
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	Lhoksemawe	Pusat Kecamatan Banda Sakti
		Kandang	Pusat Kecamatan Muara Dua
		Batuphat Timur	Pusat Kecamatan Muara Satu
		Keude Peunteuet	Pusat Kecamatan Blang Mangat
4	Pusat Lingkungan	Lhokseumawe Selatan	Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan
		Lhokseumawe Utara	Pusat Mukim Lhokseumawe Utara
		Kandang	Pusat Mukim Kandang
		Cunda	Pusat Mukim Cunda
		Paloh Timur	Pusat Mukim Paloh Timur
		Paloh Barat	Pusat Mukim Paloh Barat
		Meuraksa	Pusat Mukim Meuraksa
		Peunteuet	Pusat Mukim Peunteuet
		Mangat Makmu	Pusat Mukim Mangat Makmu

Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2011-2023

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam melaksanakan pembangunan, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam hal penyusunan rencana terkait keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa, misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBK dilaksanakan dengan mengukur perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah.

APBK Lhokseumawe disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja pelaksanaan ABPK Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan APBK Lhokseumawe
Tahun 2016-2020

Nomor Urut	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBK Tahun 2020*)	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN DAERAH	908,888,389,624	895,420,389,898	749,405,667,506	864,499,598,943	921,872,347,282	0.36%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	56,348,631,473	62,986,260,104	65,618,966,778	61,454,942,996	67,223,805,350	4.51%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24,519,447,669	27,839,764,484	33,855,813,011	28,475,036,318	31,880,000,000	6.78%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,816,764,587	4,050,483,522	3,088,925,300	3,758,646,496	4,710,823,350	5.40%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,253,406,003	5,093,717,479	5,100,912,333	5,108,664,333	5,200,000,000	5.15%
1.1.4	Zakat dan Infaq	8,790,038,934	-	-	7,644,838,340	8,800,000,000	0.03%
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14,968,974,280	26,002,294,619	23,573,316,134	16,467,757,509	16,632,982,000	2.67%
1.2	Dana Perimbangan	688,355,157,426	637,913,101,782	586,255,868,918	607,297,641,452	617,243,482,000	-2.69%
1.2.1	Transfer Umum	510,811,772,599	502,593,212,599	492,307,017,018	504,262,665,312	507,857,153,000	-0.14%
1.2.2	Transfer Khusus	177,543,384,827	135,319,889,183	93,948,851,900	103,034,976,140	109,386,329,000	-11.40%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	164,184,600,724	194,521,028,012	97,530,831,811	195,747,014,495	237,405,059,932	6.87%
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	20,547,760,000	20,114,160,000	21,366,880,000	30,079,920,000	10.00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan	25,208,475,969	23,121,731,293	23,302,809,346	26,704,399,172	29,117,787,473	3.67%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48,793,965,000	150,851,536,719	53,113,862,465	147,566,670,653	178,207,352,459	38.24%
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah	73,736,159,755	-	1,000,000,000	90,100,000	-	-81.30%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	16,446,000,000	-	-	18,964,670	-	-81.57%
	JUMLAH PENDAPATAN	908,888,389,624	895,420,389,898	749,405,667,506	864,499,598,943	921,872,347,282	0.36%

Nomor Urut	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBK Tahun 2020*)	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	BELANJA DAERAH	890,338,348,966	870,168,392,236	775,480,033,294	873,465,604,518	932,428,473,462	1.16%
2.1	Belanja Tidak Langsung	476,249,189,555	414,975,811,120	399,988,550,303	412,220,469,101	453,595,514,550	-1.21%
2.1.1	Belanja Pegawai	342,892,103,380	289,169,161,900	281,603,206,480	289,071,620,823	305,501,682,831	-2.85%
2.1.4	Belanja Hibah	25,923,600,000	6,478,342,693	7,607,600,000	6,228,895,000	15,866,498,000	-11.55%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,273,954,000	8,870,270,130	8,159,430,000	7,695,849,500	10,489,512,500	-11.72%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	-	928,342,379	973,164,381	-	6,381,491,785	61.92%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	89,805,703,175	109,323,295,018	101,336,724,357	109,096,151,414	114,256,329,434	6.20%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	353,829,000	206,399,000	308,425,085	127,952,364	1,100,000,000	32.79%
2.2	Belanja Langsung	414,089,159,411	455,192,581,116	375,491,482,991	461,245,135,417	478,832,958,912	3.70%
2.2.1	Belanja Pegawai	53,390,938,000	56,276,230,315	49,974,636,110	59,769,863,300	62,621,499,000	4.07%
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	124,713,210,923	175,321,832,046	182,434,448,725	197,599,996,127	207,544,365,907	13.58%
2.2.3	Belanja Modal	235,985,010,488	223,594,518,755	143,082,398,156	203,875,275,990	208,667,094,005	-3.03%
	JUMLAH BELANJA	890,338,348,966	870,168,392,236	775,480,033,294	873,465,604,518	932,428,473,462	1.16%
	SURPLUS (DEFISIT)	18,550,040,657	25,251,997,662	(26,074,365,788)	(8,966,005,576)	(10,556,126,180)	

Nomor Urut	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBK Tahun 2020*)	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	PEM BIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	6,230,562,464	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,995	12,056,126,180	17.94%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6,230,562,464	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,995	12,056,126,180	17.94%
	JUMLAH PENERIMAAN PEM BIAYAAN	6,230,562,464	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,995	12,056,126,180	17.94%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	10.67%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	10.67%
	JUMLAH PENGELUARAN PEM BIAYAAN	-	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	10.67%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK Tahun 2020

3.1.1.1 Perkembangan dan Kinerja Pendapatan

Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe berasal dari Dana Perimbangan, kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, khususnya dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Lhokseumawe yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin meningkat yaitu pada tahun 2016 proporsi PAD terhadap total pendapatan sebesar 6,20% meningkat menjadi 7,29% pada tahun 2020. Sedangkan proporsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 proporsi Dana Perimbangan sebesar 75,74% turun menjadi 66,96% pada tahun 2020. Selanjutnya proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 proporsinya sebesar 18,06% meningkat menjadi 25,75% pada tahun 2020.

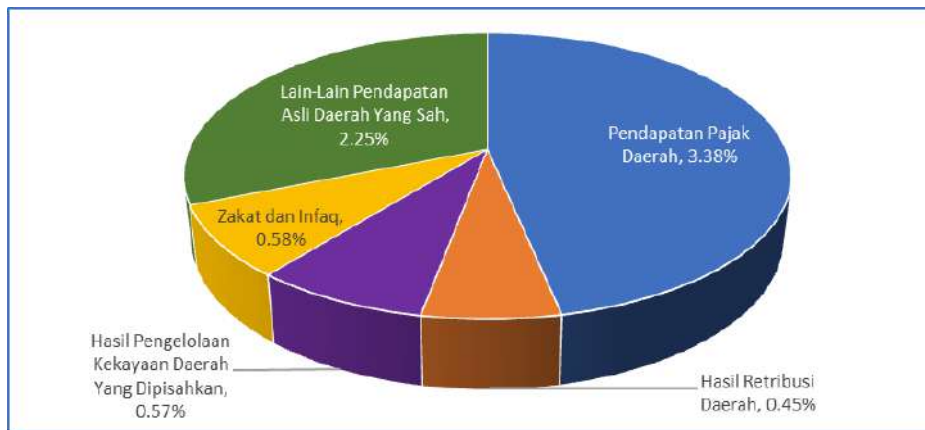
Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa, rata-rata pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe sejak tahun 2016-2020 sebesar 4,51%, sementara rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan (-2,69%), dan rata-rata pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 6,87%. Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan Kota Lhokseumawe menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,36%.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh daerah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Zakat dan Infaq; serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Selama periode 5 tahun terakhir (2016-2020) kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan trend yang positif yaitu sebesar 7,23%. Kontribusi terbesar diberikan oleh Pendapatan Pajak Daerah yaitu 3,38%. Kemudian kontribusi terbesar kedua berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu 2,25%. Sedangkan Zakat dan Infaq memberikan kontribusi sebesar 0,58%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 0,57, dan Hasil Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 0,45%.

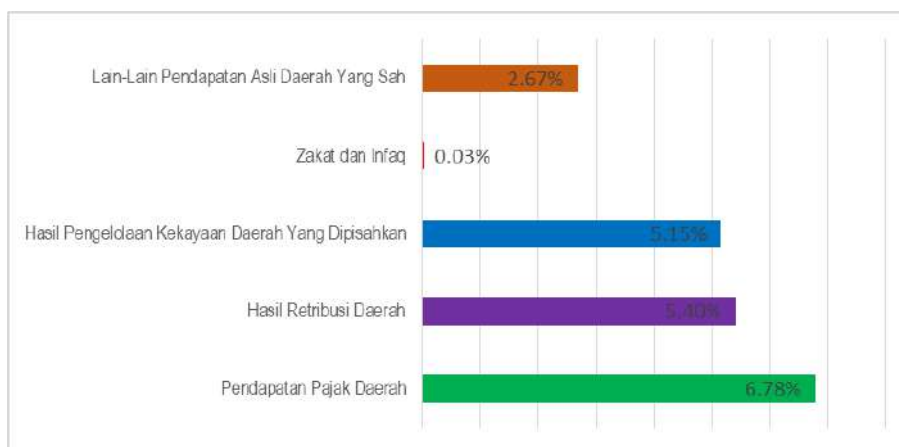
Gambar 3.1
Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Selama periode 5 tahun terakhir (2016-2020) Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe mengalami rata-rata pertumbuhan 4,51%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang mencapai 6,78%, disusul oleh Hasil Retribusi Daerah yang mencapai 5,40%. Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh rata-rata 5,15%, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata 2,67%, sedangkan Zakat dan Infaq hanya tumbuh rata-rata 0,03%.

Gambar 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Komponen PAD
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Dari tabel 3.1 juga dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp.56,3 Milyar, tahun 2017 realisasinya meningkat menjadi Rp.62,9 Milyar, dan pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp.65,5 Milyar. Hanya saja pada tahun 2019 realisasi PAD mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu mencapai Rp.61,4 Milyar. Akan tetapi pada APBK Lhokseumawe 2020 PAD Kota Lhokseumawe ditargetkan diatas realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.67,2 Milyar.

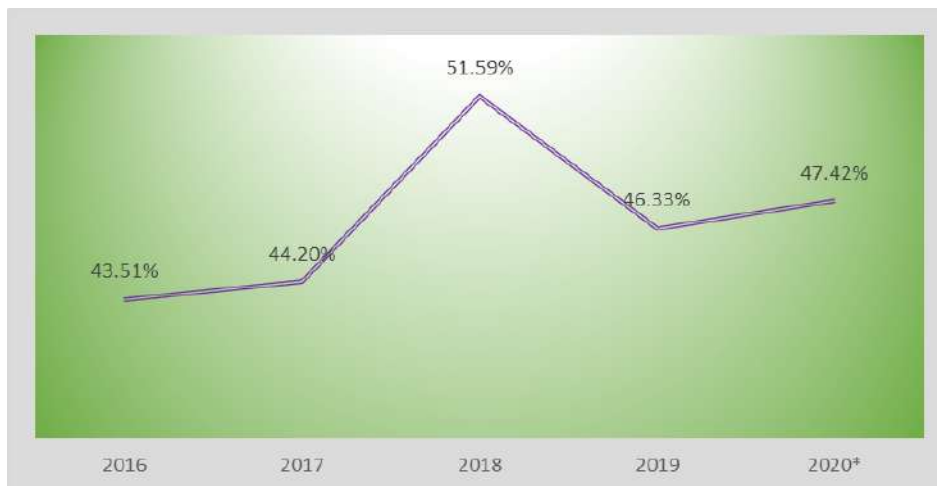
Gambar 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Lebih lanjut, jika ditinjau proporsi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD Kota Lhokseumawe selama periode 2016-2020 proporsi terbesar disumbangkan oleh Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 46,73%. Pada tahun 2016 proporsi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 43,51%, meningkat menjadi 44,20% pada 2017 hingga 2018 proporsinya meningkat signifikan hingga mencapai 51,59%. Akan tetapi pada 2019 proporsinya menurun menjadi 46,33%, dan pada tahun 2020 proporsinya ditargetkan mencapai 47,42%.

Gambar 3.4
Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Selanjutnya, proporsi Hasil Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 proporsi Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD sebesar 6,77%. Hingga tahun 2018 proporsi ini terus mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2019 proporsinya sebesar 6,12% mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya sebesar 4,17%. Dan pada tahun 2020 proporsi Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD ditargetkan sebesar 7,01%. Secara umum proporsi Hasil Retribusi Daerah selama periode 2016-2020 sebesar 6,19%. Berfluktuasinya proporsi Hasil Retribusi Daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi pos-pos retribusi daerah yang belum optimal.

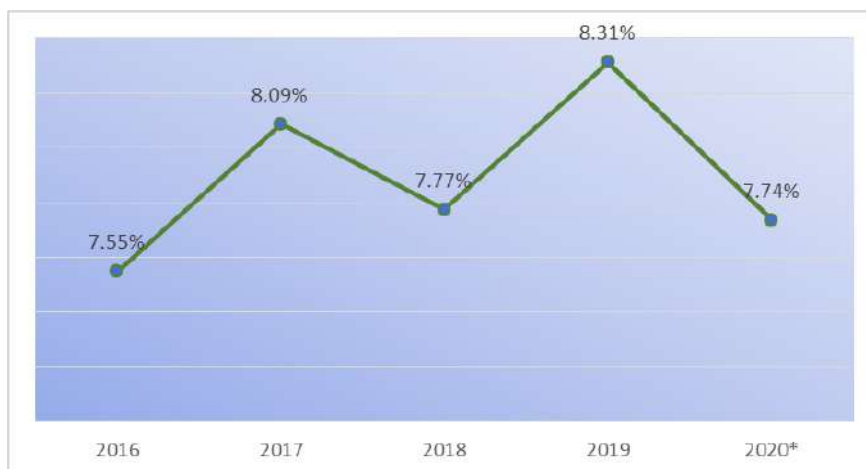
Gambar 3.5
Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Komponen pembentuk PAD Kota Lhokseumawe yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum proporsinya terhadap PAD Kota Lhokseumawe sebesar 7,89% selama periode 2016-2020. Besaran proporsi pada tahun 2016 sebesar 7,55%, meningkat menjadi 8,09% pada tahun 2017, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 7,77%. Pada tahun 2018, proporsinya kembali meningkat menjadi 8,31% dan pada tahun 2020 proporsinya ditargetkan 7,74%.

Gambar 3.6
Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020

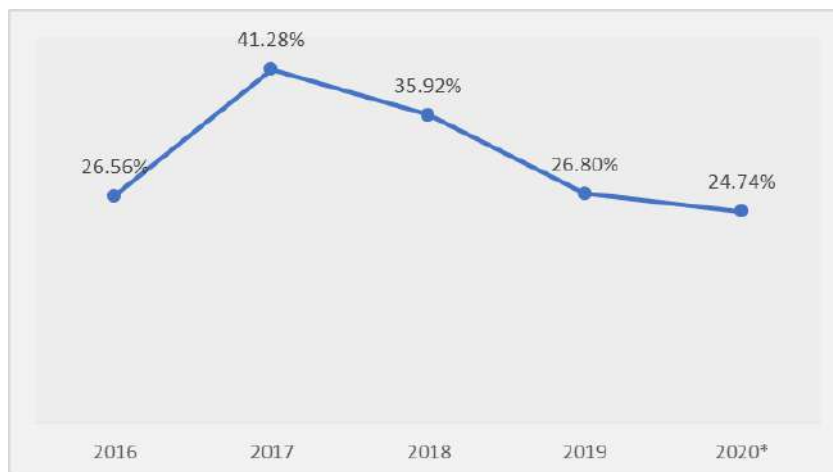


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Komponen selanjutnya pembentuk PAD adalah Zakat dan Infaq. Proporsi komponen ini terhadap PAD selama tahun 2016-2020 secara umum sebesar 8,05%. Pada tahun 2016 proporsi Zakat dan Infaq terhadap PAD Kota Lhokseumawe mencapai 15,60%, akan tetapi proporsi ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 12,44%, dan pada APBK 2020 proporsinya ditargetkan menjadi 13,09%.

Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pendapatan Pajak Daerah. Secara umum proporsi komponen ini mencapai 31,13% selama periode 2016-2020. Walaupun proporsinya setiap tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 proporsi komponen ini mencapai 26,56%, meningkat drastis pada tahun 2017 menjadi 41,28%, dan hingga akhir 2019 proporsinya turun hingga menjadi 26,80%. Dan pada APBK 2020 proporsinya ditargetkan 24,74%.

Gambar 3.7
Proporsi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

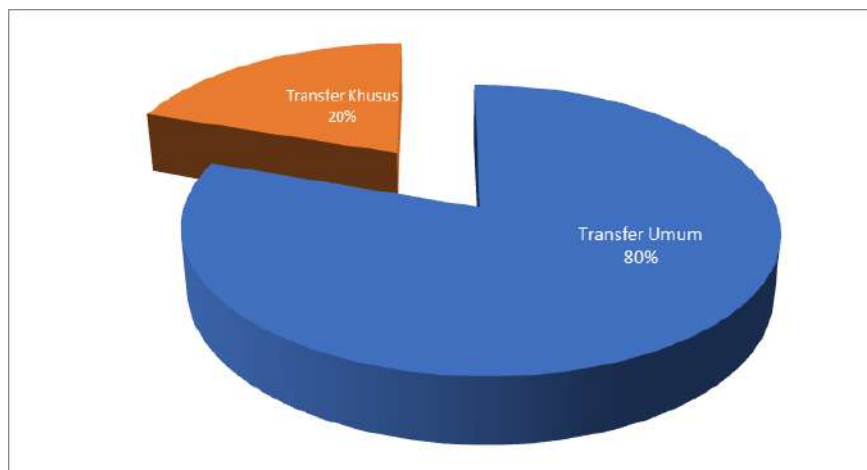
B. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer keuangan dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya.

Secara umum selama periode tahun 2016-2020 proporsi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 72,28%. Akan tetapi jika ditinjau dari sisi rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020, Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan negatif dimana rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya (-2,69%).

Komponen Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total dana perimbangan selama periode tahun 2016-2020 yang mencapai 80,26%, selebihnya sebesar 19,74% disumbangkan oleh Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.

Gambar 3.8
Proporsi Komponen Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

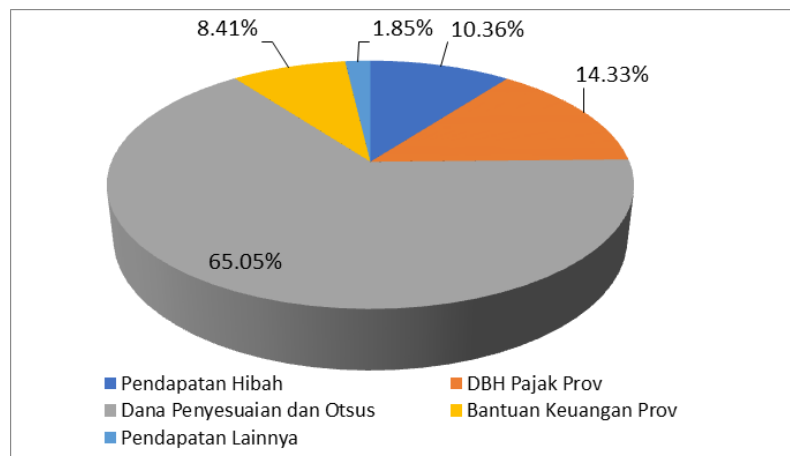
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen pembentuk Lain-lain Pendaptan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan Pendapatan Lainnya.

Selama periode tahun 2016-2020 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 6,87%.

Dari sisi pertumbuhan menurut komponen pembentuk Lain-lain Pendapatan Daerah, proporsi terbesar disumbangkan oleh komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang mencapai 65,05%; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar 14,33%; selanjutnya Pendapatan Hibah memberikan kontribusi sebesar 10,33% terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi proporsinya sebesar 8,41%; serta Pendapatan Lainnya sebesar 1,85%.

Gambar 3.9
Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

3.1.1.2 Realisasi Belanja

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Analisis belanja sekurang-kurangnya dilihat dari realisasi belanja dibanding dengan anggaran pada periode 5 tahun sebelumnya.

Pada tabel 3.1. dapat dilihat bahwa kondisi belanja mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan. Pada tahun 2016, total realisasi belanja sebesar Rp.890,3 Milyar dan pada APBK tahun 2020 total belanja Kota Lhokseumawe sebesar Rp.932,4 Milyar. Rata-rata pertumbuhan total belanja Kota Lhokseumawe pada periode tahun 2016-2020 mencapai 1,16%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung (-1,21%) dan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 3,70%.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan netto Kota Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah 14,09%, dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar 17,94%, dan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan sebesar 10,67%.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perkembangan neraca daerah tahun 2016-2020, analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019

No	Uraian	Realisasi Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	
1.	ASET	1,478,721,970,564	1,572,886,387,732	1,537,493,771,796	1,873,693,348,889	8.21
1.1	Aset Lancar	61,132,392,910	71,454,452,845	47,891,068,771	60,989,497,706	(0.08)
1.1.1	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
1.1.2	Kas	24,848,296,572	55,346,327,231	27,275,911,337	38,427,072,755	15.64
1.1.3	Piutang	18,729,669,972	11,293,394,937	15,916,884,289	17,570,984,086	(2.11)
1.1.4	Biaya Dibayar Dimuka	278,086,457	276,112,517	209,640,654	247,493,878	(3.81)
1.1.5	Persediaan	17,276,339,909	4,538,618,160	4,488,632,492	4,743,946,987	(35.00)
1.2	Aset Tidak Lancar	1,417,589,577,654	1,501,431,934,887	1,489,602,703,025	1,812,703,851,183	8.54
1.2.1	Investasi Jangka Panjang	31,460,381,397	32,137,605,063	30,184,570,715	27,964,491,845	(3.85)
1.2.2	Aset Tetap	1,361,939,179,519	1,443,566,365,752	1,431,639,929,567	1,744,118,718,652	8.59
1.2.3	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.2.4	Aset Lainnya	24,190,016,737	25,727,964,072	27,778,202,743	40,620,640,685	18.86
	JUMLAH ASET	1,478,721,970,564	1,572,886,387,732	1,537,493,771,796	1,873,693,348,889	8.21
2.	KEWAJIBAN	248,807,663,902	94,234,177,887	24,211,073,407	16,071,470,938	(59.88)
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	248,807,663,902	94,234,177,887	24,211,073,407	16,071,470,938	(59.88)
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
3.	EKUITAS DANA	1,229,914,306,661	1,478,652,209,845	1,513,282,698,388	1,857,621,877,951	14.73
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,478,721,970,564	1,572,886,387,732	1,537,493,771,796	1,873,693,348,889	8.21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019

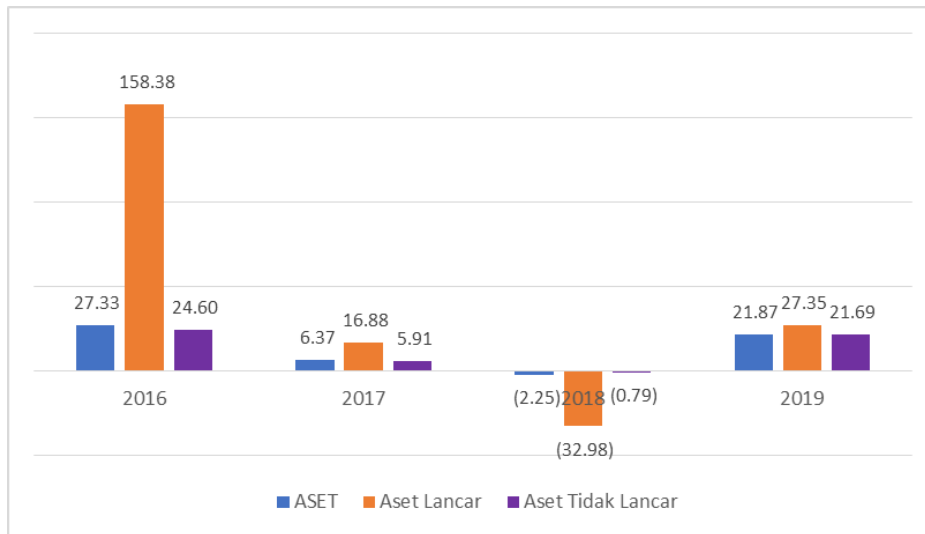
Berdasarkan penyajian data neraca diatas, dapat diketahui tentang jumlah aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar serta kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi dua jenis, yaitu : a) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja; utang retensi; utang pendapatan diterima dimuka; dan utang jangka pendek lainnya; b) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri pemerintah pusat, dan utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya ekuitas dana menjelaskan tentang kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa kondisi neraca daerah Lhokseumawe mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2016 total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar Rp.1,478 Triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp.1,572 Triliun. Pada tahun 2018 total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe turun menjadi Rp.1,537 Triliun, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.1,873 Triliun. Rata-rata pertumbuhan total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe pada periode tahun 2016-2019 mencapai 8,21%.

Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2016 sebesar Rp.31,460 Milyar, tahun 2017 sebesar Rp.32,137 Milyar, tahun 2018 sebesar Rp.30,184 Milyar, dan tahun 2019 menjadi Rp.27,964 Milyar. Untuk kewajiban, pada tahun 2016 jumlah kewajiban sebesar Rp.248,807 Milyar, tahun 2017 sebesar Rp.94,234 Milyar, tahun 2018 berjumlah Rp.24,211 Milyar, dan pada tahun 2019 menjadi Rp.16,071 Milyar.

Gambar 3.10
Pertumbuhan Aset Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019, diolah

Dari gambar 3.10 dapat diketahui bahwa pertumbuhan aset Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat berfluktuasi baik dari aset lancar maupun aset tidak lancar. Selama tahun 2016-2019 pertumbuhan negatif aset Kota Lhokseumawe hanya terjadi pada tahun 2018 dengan pertumbuhan minus (-2,25%). Sedangkan tahun 2016, 2017, dan 2019 aset Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan positif dengan masing-masing pertumbuhan 27,33% pada tahun 2016; 6,37% pada tahun 2017; dan 21,87% pada tahun 2019.

Dalam rangka memperoleh gambaran perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*) dan rasio solvabilitas (*solvability ratio*). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang likuid.

Tingkat likuiditas dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (*Current Ratio*). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lama untuk diuangkan dibanding aset lain. Cara ini lebih dikenal dengan *Quick Ratio Analysis*. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio *lavarage* digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio *lavarage* adalah *total debt to equity ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) dan *total debt to total asset ratio* (rasio hutang terhadap total aktiva). Rasio keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

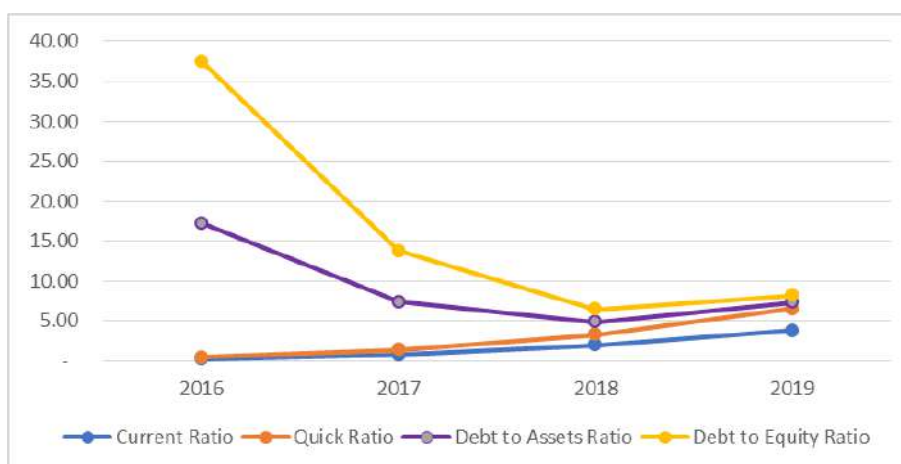
Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2016-2019

Balance Sheet Ratios		Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Liquidity Ratio	<i>Current Ratio</i>	0.25	0.76	1.98	3.79
	<i>Quick Ratio</i>	0.17	0.64	1.32	2.70
Solvability Ratio	<i>Debt to Assets Ratio</i>	16.83	5.99	1.57	0.86
	<i>Debt to Equity Ratio</i>	20.23	6.37	1.60	0.87

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio lancar (*current ratio*) pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan angka dibawah satu, artinya kemampuan daerah untuk menutupi hutang jangka pendeknya masih rendah. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 *current ratio* menunjukkan angka diatas satu, hal ini menunjukkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) jauh diatas jumlah hutang lancar, dengan kata lain kemampuan Kota Lhokseumawe dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya masih tinggi.

Gambar 3.11
Balance Sheet Ratio
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 (diolah)

Quick ratio Kota Lhokseumawe untuk tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka di atas satu, yang berarti kemampuan aktiva lancar likuid mampu menutupi hutang lancar. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 menunjukkan angka di bawah satu.

Selanjutnya nilai total *debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* dari tahun 2016-2019 menunjukkan dalam batas aman (*solvable*) dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil.

3.2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe tercermin pada komponen anggaran itu sendiri yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta ketepatan penggunaan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan agar memperoleh hasil yang optimal, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe. Sementara untuk kebijakan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai semua program dan kegiatan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus merencanakan, melaksanakan, mengendalikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana keuangan pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan melalui pengelolaan APBD yang baik dapat menggapai cita-cita dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri.

Belanja aparatur menjadi perhatian yang serius dalam pengeluaran anggaran daerah tiap tahunnya. Dominasi belanja pegawai di APBK pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non aparatur yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.

Selama periode tahun 2016-2020, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran berkisar 39% - 44%, dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 41,23%. Jika dilihat persentase proporsi belanja aparatur selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang menurun. Dimana pada tahun 2016 proporsinya mencapai 44,51% dan pada APBK tahun 2020 ditargetkan sebesar 39,48%. Hal ini menunjukkan bahwa APBK Kota Lhokseumawe relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi belanja aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBK dan pengeluaran dalam APBK lebih banyak digunakan untuk belanja program pelayanan masyarakat.

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
2016	396,283,041,380	890,338,348,966	44.51%
2017	345,445,392,215	870,168,392,236	39.70%
2018	331,577,842,590	775,480,033,294	42.76%
2019	348,841,484,123	873,465,604,518	39.94%
2020*)	368,123,181,831	932,428,473,462	39.48%
Rata-Rata	358,054,188,428	868,376,170,495	41.23%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Salah satu kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Defisit anggaran merupakan sekian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan di masa depan dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 kondisi surplus/(defisit) riil anggaran Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Lhokseumawe
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	908,888,389,624	895,420,389,898	749,405,667,506	864,499,598,943	921,872,347,282
	<i>dikurangi realisasi :</i>					
2a.	Belanja Daerah	890,338,348,966	870,168,392,236	775,480,033,294	873,465,604,518	932,428,473,462
2b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000
	Surplus / (Defisit) Riil	18,550,040,657	24,251,997,662	(28,374,365,788)	(9,966,005,576)	(12,056,126,180)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Dari tabel di atas tampak bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Kota Lhokseumawe mengalami surplus anggaran. Sedangkan pada 2018 – 2020 mengalami defisit anggaran. Surplus anggaran tahun 2016 dipergunakan sebagai pembiayaan pada tahun 2017 dan surplus tahun 2017 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun 2018. Defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2018, 2019 dan 2020 disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan belanja dan pengeluaran daerah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Untuk itu diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

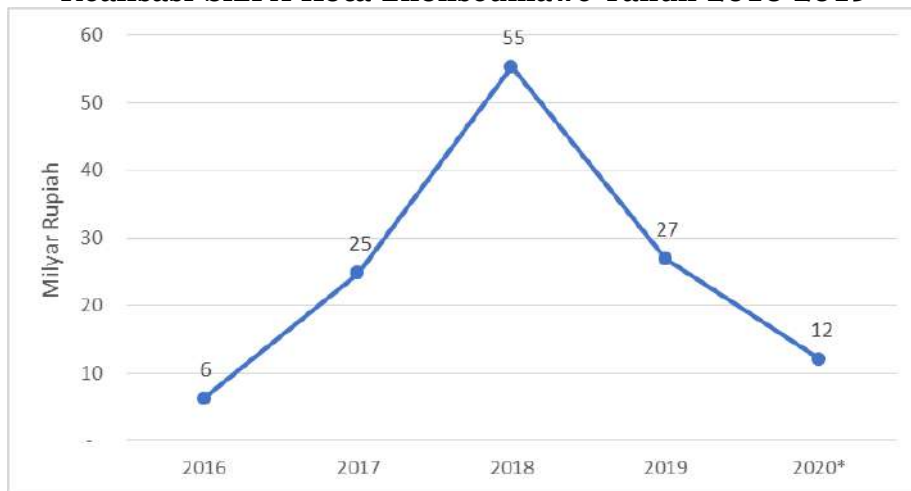
Selanjutnya, dalam rangka menutupi defisit riil dalam APBK Lhokseumawe diperoleh dari sumber penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	6,230,562,464	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,995	12,056,126,180
2	Pencairan Dana Cdadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembli Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Gambar 3.12
Realisasi SiLPA Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2019



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016-2019 dan *)APBK 2020 (diolah)

Analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilakukan untuk memberikan gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBK tahun-tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa tren realisasi SiLPA selama tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.55,3 Milyar, dan SiLPA terendah adalah pada tahun 2016 sebesar Rp.6,2 Milyar. Secara umum rata-rata pertumbuhan SiLPA Kota Lhokseumawe sebesar 17,97%.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe selama lima tahun.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang bersyariat, sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki sebagaimana yang tertuang dalam Visi Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber pendapatan Kota Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan analisis realisasi APBK Lhokseumawe selama 3 tahun pelaksanaan RPJM Kota Lhokseumawe (2017-2019) dan APBK Lhokseumawe tahun 2020, maka proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe untuk tahun 2021-2022 dapat digambarkan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Perubahan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	2021		2022	
		RPJM	REVISI	RPJM	REVISI
4.	PENDAPATAN DAERAH	802,265,760,807	919,149,778,882	807,725,943,861	920,350,778,882
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	72,691,060,628	64,501,236,950	74,871,792,447	65,702,236,950
4.1.1.	Pajak Daerah	31,287,505,828	30,699,000,000	32,226,131,002	31,900,000,000
4.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,921,341,980	5,200,000,000	14,338,982,239	5,200,000,000
4.1.3.	Retribusi Daerah	5,194,277,795	4,265,823,350	5,350,106,128	4,265,823,350
4.1.4.	Zakat dan Infaq	7,700,000,000	7,850,000,000	7,700,000,000	7,850,000,000
4.1.5.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14,587,935,026	16,486,413,600	15,256,573,078	16,486,413,600
4.2.	Pendapatan Transfer	705,341,512,046	824,568,621,932	707,401,540,450	824,568,621,932
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	680,630,239,265	699,312,865,000	682,441,356,673	699,312,865,000
4.2.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	57,839,252,000	35,094,002,000	57,839,252,000	35,094,002,000
4.2.1.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	459,628,037,000	472,763,151,000	459,628,037,000	472,763,151,000
4.2.1.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	102,792,370,000	61,417,516,000	102,792,370,000	61,417,516,000
4.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	47,968,813,000	-	47,968,813,000
4.2.1.5.	Dana Insentif Daerah (DID)	-	21,048,688,000	-	21,048,688,000
4.2.1.6.	Dana Desa	60,370,580,265.19	61,020,695,000	62,181,697,673	61,020,695,000
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24,711,272,780	125,255,756,932	24,960,183,777	125,255,756,932
4.2.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	24,711,272,780	29,117,787,473	24,960,183,777	29,117,787,473
4.2.2.2.	Dana Otonomi Khusus	-	96,137,969,459	-	96,137,969,459

NO.	URAIAN	2021		2022	
		RPJM	REVISI	RPJM	REVISI
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24,233,188,134	30,079,920,000	25,452,610,964	30,079,920,000
4.3.1.	Pendapatan Hibah	24,233,188,134	30,079,920,000	25,452,610,964	30,079,920,000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	802,265,760,807	919,149,778,882	807,725,943,861	920,350,778,882
5.	BELANJA DAERAH	815,902,219,980	936,206,162,904	824,077,422,006	940,309,982,105
5.1.	Belanja Operasi	570,012,465,753	620,503,482,770	575,320,271,193	600,711,358,981
5.1.1.	Belanja Pegawai	317,100,786,390	350,326,261,377	320,271,794,254	368,892,574,446
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	246,253,204,099	177,732,975,055	248,871,214,156	204,169,623,808
5.1.5.	Belanja Hibah	3,692,700,900	51,692,496,025	3,508,065,855	16,359,822,900
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2,965,774,365	40,751,750,313	2,669,196,928	11,289,337,828
5.2.	Belanja Modal	131,303,139,812	193,964,858,916	133,182,383,559	215,555,471,141
5.3.	Belanja Tak Terduga	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
5.4.	Belanja Transfer	113,486,614,415	120,637,821,219	114,474,767,254	122,943,151,983
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	3,648,178,362	6,381,491,785	3,757,623,713	6,700,566,374
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	109,838,436,052	114,256,329,434	110,717,143,541	116,242,585,609
	JUMLAH BELANJA	815,902,219,980	936,206,162,904	824,077,422,006	940,309,982,105
	Surplus / (Defisit)	(13,636,459,173)	(17,056,384,022)	(16,351,478,145)	(19,959,203,223)

NO.	URAIAN	2021		2022	
		RPJM	REVISI	RPJM	REVISI
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	13,636,459,173	17,056,384,022	16,351,478,145	19,959,203,223
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15,036,459,173	18,056,384,022	17,851,478,145	20,959,203,223
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	15,036,459,173	18,056,384,022	17,851,478,145	20,959,203,223
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1,400,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	1,400,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000
6.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

Sumber : Proyeksi, BPKD Kota Lhokseumawe, 2020

Dari tabel 3.7 dapat digambarkan bahwa Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe untuk tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.919,149 Milyar meningkat dari yang diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp.802,265 Milyar, dan pada tahun 2022 proyeksi pendapatan sebesar Rp.920,350 Milyar, sedangkan yang diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp.807,725 Milyar.

Peningkatan proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan perubahan beberapa peraturan tentang pendapatan daerah. Terutama dalam Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana pada proyeksi sebelumnya belum dimasukkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Hal ini sebagaimana telah dirubahnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Disamping itu, peningkatan proyeksi pendapatan berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Seiring dengan peningkatan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah tahun 2021 dan 2022 juga meningkat dari proyeksi sebelumnya. Pada proyeksi sebelumnya belanja daerah Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar Rp.815,902 Milyar meningkat menjadi Rp.936,206 Milyar. Demikian juga untuk tahun 2022 proyeksi sebelumnya sebelumnya Rp.824,077 Milyar meningkat menjadi Rp.940,309 Milyar.

Demikian juga dengan pembiayaan daerah, pada proyeksi sebelumnya untuk tahun 2021 sebesar Rp.13,636 Milyar meningkat menjadi Rp.17,056 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2022 proyeksi sebelumnya sebesar Rp.16,351 Milyar meningkat menjadi Rp.19,959 Milyar.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan sisa waktu pelaksanaan program pembangunan jangka menengah 2 (dua) tahun kedepan.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di sisa waktu pelaksanaan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang disajikan berikut ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 3.8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022

No.	Uraian	2021	2022
1	Pendapatan	919,149,778,882	920,350,778,882
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	18,056,384,022	20,959,203,223
	Total Penerimaan	937,206,162,904	941,309,982,105
	DIKURANGI :		
4	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	1,000,000,000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	936,206,162,904	940,309,982,105

Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel 3.8 di atas dapat digambarkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp.936,206 Milyar dan tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.940,309 Milyar. Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III, sebagai berikut :

- Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
- Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN	2021	2022
I.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	936,206,162,904	940,309,982,105
	<i>Dikurangi dengan :</i>		
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>350,326,261,377</i>	<i>368,892,574,446</i>
	<i>Belanja Hibah</i>	<i>51,692,496,025</i>	<i>16,359,822,900</i>
	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>40,751,750,313</i>	<i>11,289,337,828</i>
	<i>Belanja Bagi Hasil</i>	<i>6,381,491,785</i>	<i>6,700,566,374</i>
	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	<i>114,256,329,434</i>	<i>116,242,585,609</i>
	<i>Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</i>	<i>372,797,833,970</i>	<i>420,825,094,948</i>
II.	Rencana Penggunaan Prioritas I	177,732,975,055	204,169,623,808
III.	Rencana Penggunaan Prioritas II dan III	195,064,858,915	216,655,471,141

Sumber : Data diolah, 2020

Dalam rangka menjaga proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dapat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mendatang dengan proyeksi jumlah penerimaan terus meningkat, maka terdapat beberapa pertimbangan alokasi belanja, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu penetapan dalam menentukan program/kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlu peningkatan kontribusi Baitul Mal (khusus dalam pengentasan kemiskinan) dan sektor swasta, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar di berbagai lapangan usaha di Kota Lhokseumawe;
3. Dalam rangka penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan sampai kapan, maka pada tahun 2021 belanja Kota Lhoskeumawe juga diarahkan untuk penanganan Covid-19. Penggunaan belanja diarahkan terutama untuk pendanaan penanganan kesehatan, program ketahanan pangan, serta program *Social Safety Net* (Jaring Pengaman Sosial) dampak Covid-19.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pembangunan di Kota Lhokseumawe tentu tidak terlepas dari pengaruh Global yang kompleks, hal ini akan memberi dampak pada masalah-masalah dan tantangan yang akan dihadapi baik secara global, nasional maupun daerah untuk sisa waktu pemerintahan periode 2017-2022. Dalam konteks Nasional permasalahan pandemic Covid 19 yang melanda negeri telah memberi dampak terhadap Kota Lhokseumawe, dimana pemerintah Kota Lhokseumawe bertanggung jawab terhadap proses antisipasi dan pencegahan serta penanganan dari Pandemi Covid 19, selain itu dalam konteks kedaerahan terlihat bahwa hilangnya jati diri *ureuëng Acèh* (masyarakat Aceh) yang memiliki kepekaan sosial, nilai gotong royong serta musyawarah pada kehidupan sehari-hari, kemudian melemahnya ekonomi masyarakat dan karakter kemandirian yang berdampak pada daya beli masyarakat. Selanjutnya, pergeseran nilai karakter pemerintahan yang bersih dan berwibawa akibat lemahnya kepemimpinan yang seharusnya berperan sebagai pengayom masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Secara makro, permasalahan Kota Lhokseumawe terlihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe tahun 2019 mencapai 23.05 ribu orang atau 11,18%. Angka ini masih relatif tinggi walaupun cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 11.81%. Di samping itu, pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dirasakan masih minim. Dalam hal keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe dirasakan belum mencapai proporsi yang diharapkan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi, sedangkan kebutuhan untuk belanja pegawai masih lumayan besar. Namun dengan terbitnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang

memberikan 40% Dana Otsus seluruh pengelolaan DOKA kembali ke kab/kota, telah memberikan sedikit ruang fiskal bagi Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota Lhokseumawe tentu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, adapun permasalahan dan tantangan tersebut antara lain:

1. Dinul Islam, Keistimewaan dan Sosial Budaya
 - a. Masih kurangnya eksplorasi cagar budaya;
 - b. Tingginya pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - c. Belum optimalnya pemberian bantuan terhadap operasional panti asuhan/jompo;
2. Ekonomi, Industri dan Pariwisata
 - a. Perkembangan industri cenderung menurun seiring dengan habisnya produktivitas Kilang Arun;
 - b. Daya serap tenaga kerja belum menunjukkan perkembangan yang signifikan;
 - c. Menurunnya produksi perikanan budidaya;
 - d. Kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi;
 - e. Pertumbuhan Ekonomi yang belum mencapai target RPJM Kota Lhokseumawe;
 - f. Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe yang belum Optimal;
 - g. Jumlah angka kemiskinan yang belum mencapai target RPJM Kota Lhokseumawe;
 - h. Ketahanan pangan dan energi yang harus terus dijaga kesinambungannya;

3. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
 - b. Terbatasnya Gedung Perpustakaan Umum Daerah;
 - c. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN;
 - d. Kualitas pendidikan yang mengalami stagnan sehingga harus ditingkatkan;
 - e. Masih adanya usia anak yang masih putus sekolah.
 - f. Kondisi ruang sekolah yang masih dalam kondisi rusak

4. Pelayanan Kesehatan
 - a. Belum tersedianya Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Rasio pelayanan Posyandu terhadap Balita belum memenuhi standar;
 - c. Masih tingginya kasus *pneumonia* pada bayi;
 - d. Pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah;
 - e. Belum optimalnya pemberian imunisasi campak pada balita;
 - f. Masih ditemukan beberapa kasus seperti penderita TBC BTA(+), DBD, dan Diare;
 - g. Pelayanan akses kesehatan yang belum maksimal;
 - h. Pencegahan dan Penanganan Covid-19;

5. Penataan Birokrasi Pemerintah
 - a. Masih ada delapan SKPK yang belum memiliki gedung kantor;
 - b. Penurunan opini tata kelola keuangan dari WTP menjadi WDP;
 - c. Minimnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun pelatihan formal bagi ASN;
 - d. Masih adanya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti;

6. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
 - a. Penanganan sanitasi masih belum optimal;
 - b. Penanganan timbulan sampah belum optimal;
 - c. Masih rendahnya akses air bersih kepada rumah tangga;
 - d. Jumlah rambu-rambu lalu lintas belum memadai;
 - e. Sarana-Prasarana publik yang belum fungsional.

4.2. Isu- Isu Strategis Daerah

Perbedaan antara harapan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dengan kondisi saat ini (*existing*) merupakan *gap* yang dapat dijadikan isu strategis untuk program kerja sisa periode Tahun 2017-2022 mendatang. Selain isu strategis daerah, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan isu daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera.
5. Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (*Aceh Peumulia*);
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan (*Aceh Meuadab*);
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan (*Aceh Damee*);
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (*Aceh Troe*);

5. Pengembangan pertanian dan perikanan (*Aceh Meugoe ngon Meulaot*);
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (*Aceh Kaya*);
7. Pengembangan pariwisata (*Aceh Kaya*);
8. Ketenagakerjaan (*Aceh Kreatif*);
9. Ketersediaan dan ketahanan energi (*Aceh Energi*);
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi (*Aceh SIAT*);
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (*Aceh Seumeugot*);
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni (*Aceh Seuninya*);
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan (*Aceh Caroeng*);
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (*Aceh Teuga*);
15. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan (*Aceh Seujahtra*);
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (*Aceh Seujahtra*);
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup (*Aceh Green*).

Berdasarkan uraian atas Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan di atas, maka ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam.

Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam melalui pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam menjadi isu strategis dimana perilaku kehidupan sehari-hari individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, implementasi Qanun tentang pelaksanaan Dinul Islam harus dilaksanakan secara optimal. Kemudian pemahaman dan pengamalan agama dikalangan para pendidik juga perlu digalakkan sehingga dapat memberikan ilmu dan arahan pada generasi muda dalam menghadapi derasnya arus globalisasi.

2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata

Beberapa poin yang menjadi isu strategis dalam lingkup Ekonomi, Industri dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe meliputi:

➤ Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. Dengan adanya KEK ini diharapkan dapat menampung tenaga kerja untuk wilayah Kota Lhokseumawe.

➤ Pengembangan Industri.

Pengembangan industri di Kota Lhokseumawe difokuskan pada pengembangan industri jasa dan industri rumah tangga.

➤ Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikembangkan meliputi: Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, Pantai Meraksa, Bukit Goa Jepang, dan Waduk Jeulikat serta kawasan sekitaran waterboom di Kecamatan Blang Mangat.

➤ Pusat Pelayanan Skala Regional.

Berdasarkan letak geografis, Kota Lhokseumawe dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan perdagangan barang/ jasa, pendidikan, kesehatan dengan skala regional yang meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.

➤ Peningkatan Investasi Sektor Riil dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan pembangunan tidak bisa diharapkan pada andalan APBD saja, perlu adanya Investasi yang mampu menumbuhkan perekonomian dengan cepat. Investasi yang dapat dipromosikan dan dilakukan di Kota Lhokseumawe antara lain Investasi bidang Perikanan, Kelautan, Industri, Pariwisata, Perhotelan dan bidang-bidang lainnya.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas guru serta jumlah tenaga pendidik, kemudian pendistribusian guru secara merata pada setiap kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang terampil sehingga mampu bersaing di era globalisasi.

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Fokus dilakukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas tenaga kesehatan. Selain itu, Kota Lhokseumawe akan menaikkan status Puskesmas menjadi Rumah sakit tipe D sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta pelaksanaan Program pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.

5. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan.

Fokus dilakukan pada pengambilan kebijakan guna memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menempatkan pimpinan SKPK sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian. Disamping itu, pemanfaatan anggaran yang lebih efisien serta melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan transparan dan akuntabel. Meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pendistribusian aparatur pemerintah yang proporsional guna pemberian pelayanan publik yang prima untuk memperoleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan.

Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup masyarakat.

Pada isu pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan dengan adanya dukungan serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah disusun guna mengantisipasi dampak lingkungan dari pembangunan RPJM Kota Lhokseumawe.

7. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif terus dilakukan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, menguatkan kembali nilai-nilai perdamaian (*sustainable peace*) guna menciptakan situasi aman tentram dalam kehidupan masyarakat Kota Lhokseumawe.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dirumuskan dengan berorientasi masa depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, Visi kepala daerah terpilih harus dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah:

**“TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT,
SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN
MOU HELSINKI”.**

Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerinthan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
2. Sehat mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;

3. Cerdas mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
4. Sejahtera mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual.

5.2 Misi

Dalam mewujudkan Visi Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui beberapa Misi sebagai berikut :

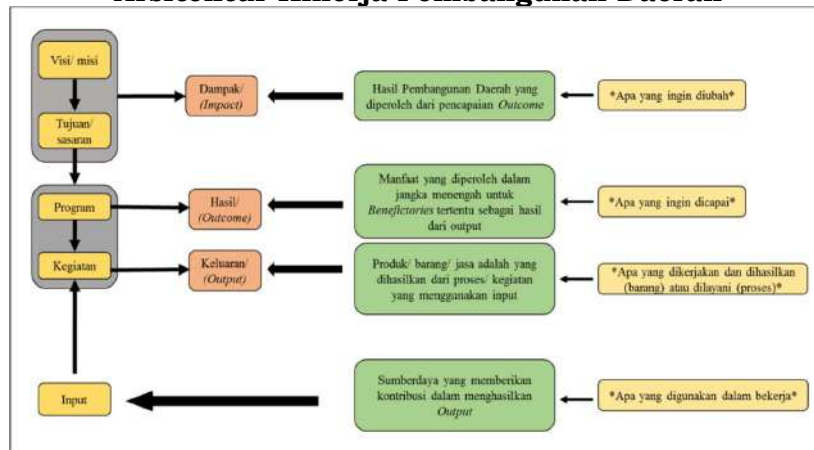
1. **Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat**, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang islami.
2. **Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan**, yaitu mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerjasama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan.
3. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*)**, yaitu peningkatan kinerja serta peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai**, yaitu mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.
6. **Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari**, yaitu pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;
7. **Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan**, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJM. Secara totalitas arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

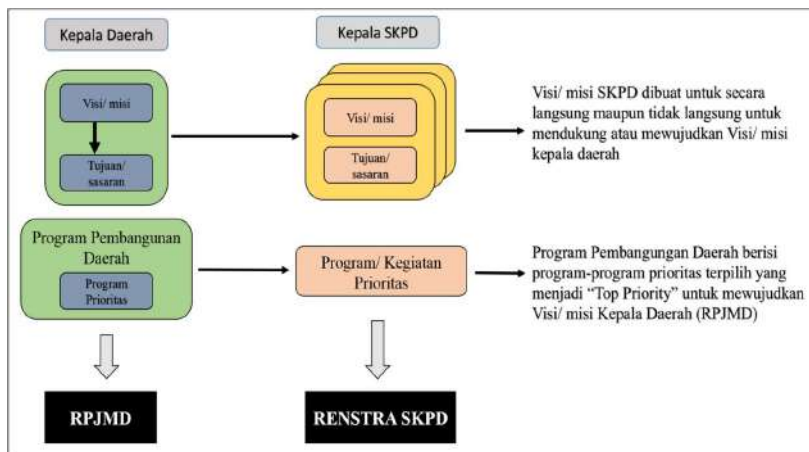


Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Hubungan antara kepala daerah dan SKPK dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 5.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Tujuan dan Sasaran Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu periode 2017-2022 dapat dilihat dalam table 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022
Visi "Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki".

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir	
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.	Misi 1, Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.	1.1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam		Indeks Syariat Islam	Indeks	50	54	54	57	56	61	0	66	0	70	0	0	
						Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam	Persen	-	-	-	-	-	-	70	-	70	-	80	80
		1.1.1	Menguatnya Penegakan Syariat Islam dalam Bermasyarakat	Perubahan Sasaran Misi I	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	69	58	59	37	50	0	42	0	36	0	0.00	
						Persentase penurunan pelanggaran syariat islam	Persen	-	-	-	-	-	-	60	-	60	-	70	70.00
					Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)	Rp (milyar)	8.79	8.88	7.43	8.97	8.80	9.06	14.00	9.15	9.15	9.24	9.24	9.24	
					Persentase peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa	Persen	-	-	-	-	-	-	90	-	95	-	100	100	
		1.1.2	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Penambahan Sasaran Misi I	Cakupan pembinaan adat Gampong	Jumlah gampong	0	68	68	68	68	68	68	68	68	0	68	0	0
						Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	-	12	-	12	-
					Persentase pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Persen	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	100	100	

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.	Misi 2, Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan PDRB	Persen	1.18	6.50	3.84	6.80	3.97	5.86	4.00	5.98	4.10	6.02	4.20	4.20
					Pengendalian laju inflasi	Persen	5.60	2.80	2.05	2.60	1.20	2.42	1.50	2.25	1.40	2.09	1.30	1.30
		2.1.1	Menurunkan angka kemiskinan		Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	11.98	9.50	11.81	9.30	11.18	9.28	11.00	9.26	10.80	9.24	10.80	10.80
					Tingkat pengangguran terbuka	Persen	10.51	10.40	12.52	10.33	11.06	10.28	11.05	9.56	11.04	9.49	11.03	11.03
					Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp (Juta)	1.01	1.04	10.86	1.08	11.42	1.12	11.82	1.16	1.16	1.20	1.20	1.20
					Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20	20	NA	20	20	20	20	40	25	40	30	30
		2.1.2	Meningkatnya pertumbuhan UMKM		Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2,314	2,314	3,850	2,323	5,084	2,333	2,333	2,342	2,342	2,351	2,351	2,351
					Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	17.84	18.197	NA	18.56	NA	18.93	18.93	19.31	19.31	19.7	19.7	19.697
					Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Persen	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	90	0
		2.1.3	Meningkatnya iklim investasi		Jumlah Investor	PMDN/PMA	305.0	320.3	348.0	336.3	386.0	353.1	342.0	370.7	352.0	389.3	362.0	362.0
					Peningkatan investor	Persen	-	-	-	-	-	-	91	-	95	-	98	98.0
					Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3387	3556.4	3656	3734	3838.8	3921	3,399	4117	3,409	4323	3,419	3,419
					Peningkatan nilai investasi	Persen	-	-	-	-	-	-	95,2	-	97	-	98	98
					Cakupan Pengendalian dan pembinaan BUMD dan BLUD	Persen	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	90	90
		2.1.4	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata		Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	1.09	1.12	NA	1.16	NA	1.19	1.19	1.23	1.23	1.26	1.26	1.26
			Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	24	24	20	24	20	30	20	30	20	35	20	20.00		

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.1.5	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Penambahan Sasaran Misi II	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31.49	31.49	80	32.12	80.00	32.76	32.76	33.42	33.42	34.09	34.09	34.09
					Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100	100	80	100	80	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
		2.1.6	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;	Penambahan Sasaran Misi II	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
					Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-	-	-	-	-	-	85	0	90	0	95	95
					Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
					Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	-	-	-	-	-	-	95	-	98	-	100	100
					Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	6.48	6.54	6.61	6.61	6.68	6.68	6.75	6.74	6.81	6.81	6.88	6.88
					Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8.20	8.20	8.20	8.27	8.33	8.33	8.40	8.40	8.47	8.47	8.53	8.53
					Persentase peningkatan produksi pertanian	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir
							Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.	Misi 3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	3.1	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	75.78	76.31	76.62	76.84	77.30	77.38	77.38	77.92	77.92	78.47	78.47	78.47
		3.1.1	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Rerata nilai ujian nasional:													
				-Rerata nilai ujian nasional SD/MI	Nilai	87	90	NA	90	NA	95	95	95	95	95	95	95
				-Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs	Nilai	56	75	NA	80	NA	85	95	90	95	95	95	95
				Angka Partisipasi Kasar:													
				- APK SD/MI	Angka	105.6	105.6	95.1	105.6	94.4	105.6	100.0	105.6	100.0	105.6	100.0	100.0
				- APK SMP/MTs	Angka	101.0	101.0	111.8	101.0	97.3	101.0	100.0	101.0	100.0	101.0	100.0	100.0
				Angka Partisipasi Murni:													
				- APM SD/MI	Angka	93.66	96.47	81.81	99.36	84.47	99.36	90.00	99.36	90.00	99.36	90.00	90.00
				- APM SMP/MTs	Angka	79.05	81.42	81.24	83.86	66.31	86.38	90.00	88.97	90.00	91.64	90.00	90.00
				Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15.16	15.28	NA	15.40	NA	15.53	15.53	15.65	15.65	15.78	15.78	15.78
		3.1.2	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Rasio ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	51.90	51.38	NA	50.87	NA	50.61	50.61	50.36	0.00	50.11	0.00	0.00
				Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	18	28	20	30	NA	30	5	32	7	32	7	7
		3.1.3	Meningkatnya status tipe Dayah	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	14	15	15	16	16	17	14	18	15	19	16	16
		3.2	Meningkatkan kualitas kesehatan.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.1	71.2	NA	71.3	NA	71.4	71.4	71.5	71.5	71.6	71.6	71.6
		3.2.1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	2	5	2	6	1	7	-	-	-	-	0

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		3.2.1.a	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	-	-	-	-	-	-	7	-	7	7	
		3.2.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	50	60	NA	70	NA	80	80	90	-	100	-	0
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	NA	100	NA	100	100	100	-	100	-	0
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	5.8	6.2	NA	6.6	NA	7.1	15.6	7.6	-	8.1	-	0.0
		3.2.2.a	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Penambahan Sasaran Misi III	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	
					persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	
		3.2.3	Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I		Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	82.2	91.5	NA	92.0	NA	92.5	92.5	93.0	-	100.0	-	0.0
		3.2.3.a	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	81,1	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	
					Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	57,8	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100	

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
		3.2.4	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia	Penambahan Sasaran Misi III	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	95,8	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
					Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
					Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	93,6	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
					Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	88,6	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	87,4	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
					Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	38	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	85,4	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
					Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02
					Prevelensi Balita Gizi Kurang	persen	0.62	-	-	-	-	-	-	-	1.18	-	1.18	1.18
					Cakupan Desa Siaga	jumlah	82.35	-	-	-	-	-	-	-	88.24	-	100.00	100.00

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir		
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
4.	Misi 4, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance).	4.1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik		Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	NA	C	NA	BB	CC	BB	B	B	B	B		
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan		Kategori hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	CC	CC	C	CC	BB	CC	BB	B	B	B	B	B	
					Kategori hasil evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
					Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	88	88	88
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	persen	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100	100
					Level Kapabilitas APIP	level	-	-	-	-	-	-	-	3 level	-	3 level	-	4 dengan catatan level	4 dengan catatan level	
					Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	level	-	-	-	-	-	-	-	3 level	-	3 level	-	3 level	3 level	
				4.1.2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)		Cakupan pengelolaan Website pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
					Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	80	80	80	80	80	80	4.0	80	4.0	80	4.0	4.0		
		4.1.3	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Penambahan Sasaran Misi IV	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	40	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75.00			
5.	Misi 5, Mewujudkan pemerataan	5.1	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar		Pencapaian target nasional 100-0-100	Persen	3.89-81.3-71.4	4.01-76.4-73.5	NA	4.13-16.8-75.7	NA	4.25-13.8-75.7	4.25-13.8-75.7	4.38-11.3-80.4	4.38-11.3-80.4	4.51-9.3-82.8	4.51-9.3-82.8	4.51-9.3-82.8		

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir	
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.	5.1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat		Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih	Persen	3.89	4.96	NA	80.00	17.03	90.00	4.25	100.00	4.38	100.00	4.51	4.51	
					Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah (Ha)	81.30	76.42	2.44	16.81	0.79	13.79	13.79	11.30	11.30	9.27	9.27	9.27	
					Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	6.98	7.68	3.64	8.45	3.67	9.29	4.25	10.22	4.38	11.24	4.51	4.51	
		5.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal		Kategori capaian kinerja infrastruktur publik	Absolut	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		5.2.1	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan		Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	58.13	62.20	NA	66.55	NA	71.21	71.21	76.20	76.20	81.53	81.53	81.53	
		5.2.2	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal		Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	36.80	40.11	0.14	43.72	1.00	47.66	47.66	51.95	51.95	56.62	51.95	51.95	
6.	Misi 6, Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.	6.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0.69	0.75	NA	0.82	NA	0.98	0.98	1.15	1.15	1.36	1.36	1.36	
		6.1.1	Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau		Luasan RTH Publik 20%	Ha	25.4	27.9	25.4	30.7	25.5	33.8	-	37.2	-	40.9	-	0.0	
		6.1.2	Terselenggaranya manajemen sampah kota		Persentase sampah yang tertangani	Persen	71.4	75.0	81.5	78.7	81.0	82.7	82.7	86.8	86.8	91.1	92.0	92.0	
7.	Misi 7, Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan	7.1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan		Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio (Per 10.000)	58.76	52.88	NA	47.60	NA	42.84	42.84	38.55	38.55	34.70	34.70	34.70	
		7.1.1	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat		Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	69	58	59	37	50	63	42	60	36	65	65	
		7.1.2	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	40	-	100	70	73	-	-	-	-	-	-	-	

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Ket	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Akhir
								Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		7.1.3	Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penambahan Sasaran Misi VII	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	-	50	80	80	90	80	80	90	90	95	95	95
					Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18.39	18.39	18.39	18.39	18.39	18.39	45.00	18.39	47.00	18.39	50.00	50.00
					Cakupan penanggulangan kebakaran	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Strategi dan arah kebijakan serta Arah Kebijakan pertahun secara lebih rinci di uraikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut

Tabel 6.1 (T-C.12)
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Misi 1						
Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.						
1.1	Memperkuat pelaksanaan syariat islam	1.1.1	Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat	1.1.1.1	Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman syariat islam bagi masyarakat	Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai keislaman
						Meningkatkan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan agama bagi masyarakat
				1.1.1.2	Peningkatan Sosialisasi ZIS	Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		1.1.2	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	1.1.2.1	Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya aceh
						Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat
Misi 2						
Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.						
2.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi	2.1.1	Menurunkan angka kemiskinan	2.1.1.1	Peningkatan dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Mengembangkan keahlian daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi dan jiwa kewirausahaan dan akses kesempatan kerja

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
				2.1.1.2	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak	Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
		2.1.2	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	2.1.2.1	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima	Memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional
		2.1.3	Meningkatnya Iklim Investasi	2.1.3.1	Peningkatan promosi dan potensi daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam promosi potensi daerah
				2.1.3.2	Percepatan pelayanan investasi melalui e-permit	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan investasi e permit
		2.1.4	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata	2.1.4.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pembangunan pariwisata daerah

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		2.1.5	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	2.1.5.1	Peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga
		2.1.6	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;	2.1.6.1	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya keunggulan kompetitif pada sektor kelautan perikanan, peternakandan pangan	Pemanfaatan dan pengelolaan sektor pertanian, kelautan perikanan dan pangan
Misi 3						

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.						
3.1	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	3.1.1	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	3.1.1.1	Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran	Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan sarana prasarana pembelajaran
		3.1.2	Meningkatnya generasi yang berdaya saing	3.1.2.1	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan SDM melalui pembinaan pemuda
					Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	peningkatan saran dan prasarana olah raga
		3.1.3	Meningkatnya status Tipe Dayah	3.1.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana Dayah	Penyediaan sarana dan prasarana dayah
3.2	Meningkatkan kualitas kesehatan.	3.2.1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	3.2.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta jaringannya
		3.2.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	3.2.2.1	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit menular	Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit menular

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		3.2.3	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	3.2.3.1	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit tidak menular	Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular
		3.2.4	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia	3.2.4.1	Peningkatan kemitraan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, usia produktif dan lansia	Peningkatan kualitas kesehatan melalui kemitraan kesehatan
Misi 4						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance).						
4.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	4.1.1.1	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur	Melaksanakan perencanaan, pelaporan, evaluasi sesuai prosedur secara transparan dan akuntabel
						Pembentukan Lembaga Perbankan Pembiayaan Syariah secara Profesional dan Mandiri

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		4.1.2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	4.1.2.1	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik
		4.1.3	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	4.1.3.1	Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam pemilu
Misi 5						
Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.						
5.1	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	5.1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	5.1.1.1	Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata	Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap air minum

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
				5.1.1.2	Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat	Penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan kawasan pemukiman kumuh
5.2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal	5.2.1	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan	5..2.1.1	Peningkatan ruas jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
		5.2.2	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	5.2.2.1	Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
Misi 6						
Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.						
6.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	6.1.1	Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	6.1.1.1	Peningkatan kawasan terbuka hijau	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan RTH dan pemeliharaan kawasan RTH

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
				6.1.1.2	Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang	Penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah/kota;
		6.1.2	Terselenggaranya manajemen sampah kota	6.1.2.1	Peningkatan manajemen pengelolaan sampah	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana prasarana lingkungan permukiman
						Relokasi TPA yang memiliki ramah lingkungan dan terjaminnya pengelolaan sampah yang baik
Misi 7						
Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan.						
7.1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan	7.1.1	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	7.1.1.1	Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam	Meningkatkan ketertiban dalam menegakkan syariat islam

Misi	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		7.1.2	Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.1.2.1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat

**Tabel 6.2 (T-C.13.)
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022**

Tahun 2018	Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dan infrastruktur pendukung guna percepatan pengembangan kawasan startegis KEK Arun. Angka pengangguran dapat diturunkan melalui peningkatan keterampilan SDM dan lembaga. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” .
Tahun 2019	Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pembangunan SDM pemerintah serta perangkat daerah yang menggunakan data terpadu dan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi bagi perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan data (<i>evidence based planning</i>). Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta Nilai-nilai budaya keAcehan yang Islami. Penguatan kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan yang akuntabel terus diupayakan guna mencapai dan mempertahankan opini pelaporan keuangan. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Membangun Pemerintahan Yang Berintegritas Serta Penguatan Kinerja Keuangan Yang Akuntabel” .
Tahun 2020	Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada pembanguan masyarakat yang berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan menjadi sangat penting. Penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi bagi perangkat daerah sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Sentra Industri Kecil dan Menengah terus dibina untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi hijau (<i>green economic growth</i>). Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi” .

<p>Tahun 2021</p>	<p>Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19. Upaya terus dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang handal sebagai tenaga kerja professional serta akses lapangan kerja akan terus meningkat mengingat telah beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Arun. Keberadaan beberapa Universitas baik negeri maupun swasta dapat mendukung peningkatan SDM dan memperkuat posisi Kota Lhokseumawe sebagai sentra pelayanan pendidikan regional. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing SDM”.</p>
<p>Tahun 2022</p>	<p>Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini difokuskan untuk terus menjaga dan menerapkan nilai nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan masih sangat penting. Peningkatan daya saing pendidikan dengan indikator APM, APK dan Angka Harapan Lama Sekolah diharapkan sudah memenuhi target SDG’s. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru) yang terdistribusi secara merata. Demikian juga dengan pengarusutamaan Syariat Islam menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan aqidah, ahlak dan syariat agar menjadi masyarakat yang berkarakter Islami. Disamping itu menurunnya kasus NAPZA dan pornografi. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Dengan Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam”.</p>

Dari hasil telaah visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel 6.3 berikut ini :

Tabel 6.3
Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2022

No.	Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam
2	Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5	Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan
6	Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan
7	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.2 Program Pembangunan Daerah

Proses penjabaran Visi dan Misi pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 setelah tujuan, sasaran, strategi adalah kebijakan umum dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMK. Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMK ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra

SKPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMK dengan Renstra OPD.

Secara rinci Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif dengan nomenklatur dan kodefikasi rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel 6.4 berikut ini:

Tabel 6.4
Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi
Visi : Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Misi 1 : Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam serta Nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat	Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat	Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman syariat islam bagi masyarakat	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	24%	4,228,336,100	24 %	22,000,000	24 %	460,000,000	24 %	358,550,000	24 %	840,550,000	DINAS PK		
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	3 event	18,400,000	3 event	500,000,000	30 event	50,000,000	35 event	50,450,000	68 event	600,450,000	DINAS PK		
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	2	330,663,437	2	544,402,800	3.00	304,400,000	3.00	400,615,000	8.00	1,249,417,800	DINAS PK		
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola	2	1,372,740,000	2	192,763,000	-	-	-	-	2.00	192,763,000	DINAS PK		
				Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	12	7,468,728,484	12	7,248,177,902	12	5,612,395,000	12	4,712,600,900	36	17,573,173,802	DSIPD		
				Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Ulama	Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam	12	2,824,418,690	12	1,734,759,000	12	2,803,821,650	12	2,828,044,200	36	7,366,624,850	DSIPD		
				Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dayah	5	425,000,000	31	3,622,044,750	25	2,463,500,000	30	6,331,371,600	86	12,416,916,350	DSIPD		
				Program Penelitian dan Pengembangan Agama	Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam	-	-	-	-	1	50,000,000	1	30,355,000	2	80,355,000	DSIPD		
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pembinaan Adat Gampong	-	-	3 Keg	49,840,000	3 Keg	56,500,000	3 Keg	129,450,000	9 Kegiatan	235,790,000	Sekretariat MAA		
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pembinaan Adat Istiadat	-	-	-	-	120 Orang	31,000,000	100 Orang	31,350,000	220 org	62,350,000	Sekretariat MAA		
				Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan	-	-	-	-	1 Pasang	30,000,000	-	-	1 Pasang	30,000,000	Sekretariat MAA		
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah	1 Keg	60,000,000	1 Keg	49,890,000	-	-	-	-	1 Keg	49,890,000	Sekretariat MAA		
				Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra	Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh	12 Bulan	87,072,500	12 Bulan	71,990,000	12 Bulan	421,323,296	12 Bulan	938,286,000	36 Bulan	1,431,599,296	SETDAKO		
				Program Penyusunan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Pendidikan Agama	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama	-	-	100 %	25,000,000	100 %	60,503,975	100 %	71,203,975	100 %	156,707,950.00	Sekretariat MPU		
				Program Penelitian dan Pengembangan Agama	Cakupan Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik	-	-	100 %	17,600,000	100 %	25,400,000	100 %	25,600,000	100 %	68,600,000.00	Sekretariat MPU		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Cakupan Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan	-		100 %	75,630,000	100 %	39,779,800	100 %	40,500,000	100 %	155,909,800.00	Sekretariat MPU
				Program Pembinaan Keagamaan dan adat	Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal	1 Kegiatan	17,922,000	0	-	1 Kegiatan	17,922,000	1 Kegiatan	19,702,000	2 Kegiatan	37,624,000	Sekretariat Baitul Mal
		Peningkatan Sosialisasi ZIS		Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal	Jumlah penerimaan ZISWAP	8,60 Milyar	5,050,409,000	7 Milyar	5,583,044,700	8.8 Milyar	14,296,546,380	8.8 Milyar	9,084,338,180	8.8 Milyar	28,963,929,260	Sekretariat Baitul Mal
Total Misi 1							21,883,690,211		19,737,142,152		26,723,092,101		25,052,416,855		71,512,651,108	M1
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang berdaya saing yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi	Menurunkan angka kemiskinan	Peningkatan dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial	31.49 %	8,057,377,863	70%	5,165,628,010	60%	925,810,070	65%	272,900,000	65%	6,364,338,080	DINSOS
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100 %	117,450,000	50%	59,797,050	70%	230,323,750	90%	712,846,200	90%	1,002,967,000	DINSOS
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan	100 %	96,000,000	80%	184,000,000	80%	170,524,800	100%	659,200,000	100%	1,013,724,800	DINSOS
				Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang Menerima Bantuan	69 %	85,120,000	90%	112,710,000	90%	16,555,272	95%	66,300,000	95%	195,565,272	DINSOS
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penyandang penyakit sosial yang menerima jaminan sosial	100 %	-	100%	29,000,000	-	-	100%	43,250,000	100%	72,250,000	DINSOS
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa pemulihan	100 %	91,960,250	70%	175,303,360	80%	138,189,692	90%	602,600,000	90%	916,093,052	DINSOS
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	98.61%	291,420,230	98.61%	330,000,000	99.49%	117,950,000	100 %	160,148,800	100 %	608,098,800	DPMPPTSP dan NAKER
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	96.33%	239,975,000	100 %	20,000,000	100 %	20,300,000	100 %	280,275,000	DPMPPTSP dan NAKER
				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan kerja	97.94%	299,645,440	97.94%	263,700,000	97.13%	76,323,350	85%	100,700,000	85%	440,723,350	DPMPPTSP dan NAKER
			Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	-	-	0	-	27.27 %	87,665,000	33.33 %	40,406,000	33.33 %	128,071,000	DP3AP2KB
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di	100 %	1,101,425,010	100 %	99,702,600	100 %	100,570,000	100 %	226,595,000	100 %	426,867,600	DP3AP2KB

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	-	-	20%	76,610,000	20%	51,681,200	20%	50,445,000	20%	178,736,200	DP3AP2KB
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	75.3%	149,765,000	75.3%	149,675,000	75.3%	679,684,000	75.3%	1,159,286,000	75.3%	1,988,645,000	DP3AP2KB
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan			12 bln	125,000,000	12 bln	59,599,552	12 bln	30,500,000	36 bln	215,099,552	DKPPP
				Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Cakupan Pembinaan dan Pengekan Hukum Kelautan			12 bln	184,500,000					12 bln	184,500,000	DKPPP
				Program Peningkatan Kegiatan Daya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	12 bln	114,294,800	12 bln	160,530,100					12 bln	160,530,100	DKPPP
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1704 Ton	525,352,400	1704 Ton	963,862,161	1721 Ton	639,785,488	1738 Ton	389,902,500	5163 Ton	1,993,550,149	DKPPP
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.48%	3,384,147,100	6.54%	2,305,553,889	6.61%	494,752,012	6.68%	962,235,500	19.83%	3,762,541,401	DKPPP
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan Pemasaran Produksi Perikanan	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	180,080,000					1 Kegiatan	180,080,000	DKPPP
				Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Dikembangkan	5 unit	715,533,100	5 unit	365,768,830	5 unit	198,742,500			10 unit	564,511,330	DKPPP
				Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan					30	159,996,000	30	351,200,000	60	511,196,000	DKPPP
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani	12 bln	1,084,969,600	12 bln	913,043,600	12 bln	47,000,000	12 bln	40,500,000	36 bln	1,000,543,600	DKPPP
				Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan	15873 Ton	1,269,824,000	15873 Ton	338,970,150	15905 Ton	1,174,020,557	15936.56 Ton		47714.56 Ton	1,512,990,707	DKPPP
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	516%	49,609,600	100%	124,344,000	100%	50,000,000	100%	206,325,000	100%	380,669,000	DKPPP
				Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8.2%	745,500							0%	-	DKPPP
		Meningkatkan Iklim Investasi	Peningkatan promosi dan potensi daerah	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan	100%	929,212,499	100%	1,373,919,296	100%	762,850,000	100%	1,291,700,000	100%	3,428,469,296	DKPPP
				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Produktifitas Komoditas Pangan	0.002%	144,090,000	0.002%	9,285,000	0.002%	40,003,453	0.002%	1,180,500,000	0.006%	1,229,788,453	DKPPP
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB							50%	600,700,000	50%	600,700,000	DKPPP
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	0.73%	108,128,000	0.73%	167,600,000	0.736%	203,900,000	0.742%	111,200,000	2.208%	482,700,000	DKPPP

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Percepatan pelayanan investasi melalui e-permit	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Persentase Terciptanya Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	1 Kegiatan	340,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,251,200	3 Kegiatan	65,251,200	DISKOP		
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Berkembangnya Jumlah Wirasaha yang Unggul dan Kompetitif	-	-	1 Kegiatan	59,875,000	-	-	1 Kegiatan	59,875,000	1 Kegiatan	59,875,000	DISKOP		
				Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	-	100 %	50,000,000	-	-	100 %	50,000,000	DISKOP					
				Program Pengembangan Koperasi Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	Persentase Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah	-	-	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	25,500,000	24 Bulan	45,500,000	DISKOP				
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Berdasarkan Berita Acara	-	3 Kegiatan	1,576,000,000	1 Kegiatan	52,395,000	1 Kegiatan	50,440,000	5 Kegiatan	1,678,835,000	DISKOP			
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Informasi Harga Pasar Tentang Harga Pokok Barang Penting dan Strategis Serta Terlaksananya Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang	4 Kecamatan	10,236,850,608	1 Tahun	3,799,399,000	1 Tahun	2,456,225,000	1 Tahun	2,846,200,000	3 tahun	9,101,824,000	DISKOP		
				Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang	-	1 Kegiatan	549,927,500	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	550,800,000	3 Kegiatan	1,500,727,500	DISKOP			
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	17.84 %	927,727,600	18.2 %	398,904,100	18.56 %	69,100,000	18.93 %	1,297,200,000	18.93 %	1,765,204,100	DISKOP		
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan UMKM	2,314	2,335,880,480	-	2,323	1,490,000,000	2,333	-	2,314	1,490,000,000	DISKOP			
				Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang	1	310,100,000								DISKOP			
				Program Peningkatan Mutu Industri	Persentase Kualitas Produk Industri yang Meningkatkan	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	29,712,500	-	1 Kegiatan	40,500,000	2 Kegiatan	70,212,500	DISKOP			
				Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan kerjasama Investasi	99.86%	35,951,600	-	-	99.86%	39,849,700	99.86%	40,500,000	99.86%	80,349,700	DPMPPTSP dan NAKER		
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	99.86 %	45,959,092	-	-	99.86 %	45,959,092	DPMPPTSP dan NAKER					
				Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan prasarana	-	-	-	-	100%	35,850,000	100%	35,850,000	DPMPPTSP dan NAKER				
				Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu	96.20%	217,059,000	96.20%	525,855,000	93.78%	436,615,000	100 %	546,870,000	100 %	1,509,340,000	DPMPPTSP dan NAKER		
		Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23%	217,722,000	1.23%	641,994,000	1.23%	234,247,000	1.23%	151,400,000	1.23%	1,027,641,000	DISPORAPAR		
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	24%	63,123,000	24%	85,997,000	-	-	24%	85,997,000	DISPORAPAR				
				Program Pengembangan Kemitraan	Kunjungan Wisata	44%	13,575,000	-	-	60%	197,199,800	60%	197,199,800	DISPORAPAR				
Total Misi 2							33,354,059,680		21,817,306,238		11,724,233,396		15,092,451,000		48,633,990,634	M2		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	10,913,878,521	100%	8,504,713,897	100%	11,283,761,135	100%	12,282,740,000	100%	32,071,215,032	DINAS PK
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	415,436,000	100%	636,979,000	100%	307,750,000	100%	5,100,118,892	100%	6,044,847,892	DINAS PK
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	75,000,000	100%	57,125,000	100%	186,125,000	100%	35,000,000	100%	278,250,000	DINAS PK
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti			5 Kegiatan	29,350,000		-			5 Kegiatan	29,350,000	DINAS PK
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2	3,200,000	100%	1,200,000	100%	81,200,000	100%	1,200,000	300%	83,600,000	DINAS PK
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	1 Kegiatan	267,600,000		-	1 Kegiatan	296,839,000	1 Kegiatan	500,000,000	3 Kegiatan	796,839,000	DINAS PK
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD		-	1 Dokumen	6,560,000	1 Dokumen	2,560,000			2 Dokumen	9,120,000	DINAS PK
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD dengan Akreditasi B	10%	1,837,561,600	20%	1,681,315,200	35%	3,984,405,338	50%	4,924,586,000	50%	10,590,306,538	DINAS PK
					Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD			40.00		50.00		60.00		50.00	-	DINAS PK
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI	93.66%	42,088,744,243	80.59%	33,454,419,180	91.83%	51,049,809,947	99.36%	42,184,500,000	99.36%	126,688,729,127	DINAS PK
					Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs			73.28		86.95		86.38		82.20	-	DINAS PK
				Program Pendidikan Menengah	Persentase Angka partisipasi Murni SMA/SMK/MA	90.00%	639,207,680	92%	802,036,400	0.00	-	0.00		92%	802,036,400	DINAS PK
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	100%	46,208,000	100%	69,312,000	0.00	-	0.00		100%	69,312,000	DINAS PK
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	10%	1,060,775,000	30%	75,000,000	40%	645,627,523	0.50	2,150,120,000	0.50	2,870,747,523	DINAS PK
					Persentase Pengawas Sekolah yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah			85.00		85.00		85.00		85.00	-	DINAS PK
					Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru			10.00		15.00		20.00		15.00	-	DINAS PK
					Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan							60.00		60.00	-	DINAS PK
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	10%				100%	60,000,000	100%	1,045,500,000	100%	1,105,500,000	DINAS PK

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
				Program Pendidikan Non Formal	Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi 'B'					20%	2,562,862,662	35%	597,566,000	35%	3,160,428,662	DINAS PK			
				Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah			3235 Orang	55,000,000	3235 Orang	1,477,060,000	3235 Orang	2,102,200,000	3235 Orang	3,634,260,000	PERPUS			
				Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah	Cakupan Peningkatan Kpasitas Majelis Pendidikan Daerah	-	-	-	-	-	-	100	225,847,600	100	225,847,600	Sekretariat MPD			
				Program Perencanaan dan Pengawasan/Monitorin dan Evaluasi	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan	-	-	12 bln	119,800,000	12 bln	219,880,000	12 bln	151,745,000	36 bln	491,425,000	Sekretariat MPD			
		Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	83%	20,558,500	83%	33,500,000	83%	450,700,000	91%	352,434,900	91%	836,634,900	DISPORAPAR			
				Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Wirausaha muda yang dibina	-	-	80	75,000,000	80	680,000,000	-	-	80	755,000,000	DISPORAPAR			
				Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Olah raga	12	1,211,953,600	12	1,743,125,570	13	1,859,540,000	13	1,888,138,000	38	5,490,803,570	DISPORAPAR			
			Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	18 cabor	-	28 cabor	249,000,000	30 cabor	550,000,000	30 cabor	500,000,000	88 cabor	1,299,000,000	DISPORAPAR			
		Meningkatnya status Tipe Dayah	Peningkatan sarana dan prasarana Dayah	Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dayah	5	425,000,000	31	3,622,044,750	25	2,463,500,000	30	6,331,371,600	86	12,416,916,350	DSIPD			
	Meningkatkan kualitas kesehatan.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100 %	5,306,609,512	100	5,094,553,537	100	6,184,419,255	100	7,279,123,000	100	18,558,095,792	DINKES			
				Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana	100 %	632,597,600	100	872,461,720	100	833,619,290	100	1,349,269,290	100	3,055,350,300	DINKES			
				Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur	-	-	-	-	100 %	815,491,000	-	-	100	815,491,000	DINKES			
				Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	-	-	-	-	2 Kegiatan	75,297,900	2 Kegiatan	9,000,000	4 Kegiatan	84,297,900	DINKES			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen SPM (Standar Pelayanan Minimum) SKPD	-	-	-	-	1 Dokumen	17,330,000	-	-	1 Dokumen	17,330,000	DINKES			
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,180,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Kegiatan	3,580,000	DINKES			
				Program Ohat dan perbekalan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Obat dan Perbekalan kesehatan	12 Bulan	2,647,530,902	12 Bulan	2,179,970,988	12 Bulan	3,304,443,000	12 Bulan	2,900,023,000	36 Bulan	8,384,436,988	DINKES			
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	2 PKM	20,206,065,626	3 PKM	29,583,889,325	1 PKM	20,098,523,215	1 PKM	18,320,674,000	5 PKM	68,003,086,540	DINKES			

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan	20 %	20,809,871,265	40%	5,607,497,940	20%	6,963,629,235	20%	14,495,063,946	20%	27,066,191,121	DINKES		
				Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan	20 %	20,284,876	40%	2,915,300	20%	4,172,000,000	20%	1,700,000,000	20%	5,874,915,300	DINKES		
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	1.5 %	108,750,000	1.0%	315,344,400	0.5%	135,650,000	0.4%	135,000,000	0.4%	585,994,400	DINKES		
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	91.5 %	1,232,815,050	97.9%	600,787,000	-	-	-	-	97.9%	600,787,000	DINKES		
				Program Evaluasi pengendalian dan Pelaporan	Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan	12 bln	376,805,148	12 bln	924,067,000	12 bln	414,050,000	12 bln	673,159,944	36 bln	2,011,276,944	DINKES		
				Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Paramedis serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR	-	-	-	-	1125 Jumlah	130,120,000	1138 Jumlah	564,900,000	1138 Jumlah	695,020,000	DINKES		
				Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang di tingkatkan Kompetensinya	32.6 %	18,508,191	36.2%	188,907,450	12.9%	187,340,000	70.6%	104,000,000	70.6%	480,247,450	DINKES		
				Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah Anak per keluarga	2 org	1,421,786,000	2 org	2,103,512,800	2 org	2,263,815,000	2 org	2,652,554,000	6 org	7,019,881,800	DP3AP2KB		
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pelayanan Reproduksi Remaja	70 %	165,624,100	70 %	100,000,000	70 %	99,017,000	70 %	135,613,000	70 %	334,630,000	DP3AP2KB		
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Akseptor KB	-	-	81 %	50,000,000	81.6 %	59,691,100	81.78 %	60,458,100	81.78 %	170,149,200	DP3AP2KB		
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Peserta KB Aktif	81.29 %	105,283,600	81.45 %	109,690,000	81.62 %	68,150,800	81.78 %	79,645,000	81.78 %	257,485,800	DP3AP2KB		
		Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi	Program pengawasan obat dan makanan	Persentase Kecamatan /Desa sehat	5 %	375,000,000	5 %	243,750,000	5 %	133,945,000	5 %	365,552,000	5 %	743,247,000	DINKES		
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Gerakan Masyarakat Dalam Sekele	-	-	4 Kecamatan	616,625,750	4 Kecamatan	488,594,000	4 Kecamatan	1,222,700,000	4 Kecamatan	2,327,919,750	DINKES		
				Program pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa yang melaksanakan STBM	22 %	121,093,400	4.4 %	607,732,580	26.5%	147,318,137	47.1%	1,056,150,000	47.1%	1,811,200,717	DINKES		
				Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC-BTA Positif	7.94 %	1,749,815,458	6.33%	1,146,965,300	9.2%	723,326,000	7%	2,331,114,000	7%	4,201,405,300	DINKES		
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I	Peningkatan kemitraan kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100 %	1,040,878,653	100%	1,451,104,688	100%	1,308,744,834	100%	1,321,112,000	100%	4,080,961,522	DINKES		
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Persen 141 (6/4.269x100.000 LH)	430,773,200	119 (5/4199x100.00 LH)	3,984,981,142	142 (6/4215x100.00 LH)	163,455,000	142 (6/4215x100.00 LH)	137,800,000	142 (6/4215x100.00 LH)	4,286,236,142	DINKES		
				Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan desa dengan Posyandu Lansia	-	-	100%	185,705,000	-	-	100%	88,050,000	100%	273,755,000	DINKES		
Total Misi 3							115,777,415,725		107,187,142,917		126,950,770,371		137,355,229,272		371,493,142,560	M3		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance).	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	917,362,925.00	100 %	1,078,875,775	100 %	1,305,616,325	100 %	1,093,790,000	100 %	3,478,282,100	PUPR		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,012,225,000.00	100 %	1,070,725,000	100 %	459,083,000	100 %	1,869,700,000	100 %	3,399,508,000	PUPR		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-	100 %	128,107,690	-	-	100 %	128,107,690	PUPR		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyediaan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen Perencanaan SKPK	-	-	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	5,000,000	PUPR		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100%	459,585,875	100%	505,544,463	100%	556,098,909	100%	1,521,229,247	KESBANGPOL		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100%	98,600,000	100%	108,460,000	100%	119,306,000	100%	326,366,000	KESBANGPOL		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	240,000,000	KESBANGPOL		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	1 Dok	1,200,000	1 Dok	1,320,000	1 Dok	1,452,000	100%	3,972,000	KESBANGPOL		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4,185,215,172	100%	3,810,558,980	100%	4,069,155,760	100%	4,428,750,760	300%	12,308,465,500	SATPOL PP & WH		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	503,940,960	100%	327,900,000	100%	648,800,000	100%	213,800,000	100%	1,190,500,000	SATPOL PP & WH		
				Program Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	78,316,000	100%	117,474,000	100%	609,652,687	100%	497,732,876	100%	1,224,859,563	SATPOL PP & WH		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	3 Kegiatan	84,400,000	3 Kegiatan	121,467,000	3 Kegiatan	122,017,000	3 Kegiatan	72,867,000	9 Kegiatan	316,351,000	SATPOL PP & WH		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	1,700,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	2,400,000	SATPOL PP & WH		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	-	-	1 Dokumen	5,200,000	1 Dokumen	5,200,000	1 Dokumen	5,200,000	3 Dokumen	15,600,000	SATPOL PP & WH		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	529,709,699	100%	500,462,324	100%	691,774,607	100%	621,413,350	100%	1,813,650,281	DINSOS		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	166,072,000	100%	90,830,000	100%	162,607,780	100%	211,910,982	100%	465,348,762	DINSOS		
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	128,750,000	100%	120,000,000	100%	171,975,000	100%	145,000,000	100%	436,975,000	DINSOS		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	100%	19,000,000	100%	9,000,000	100%	20,000,000	100%	48,000,000	DINSOS		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	100%	1,300,000	100%	600,000	100%	495,000	100%	1,200,000	100%	2,295,000	DINSOS		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	621,586,362	93.51%	690,460,960	96.29%	728,966,825	100%	690,722,600	100%	2,110,150,385	DMPPTSP dan NAKER		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	182,974,768	99.63%	154,020,000	96.01%	144,840,000	100%	89,200,000	100%	388,060,000	DMPPTSP dan NAKER		
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	-	-	-	-	99.26%	90,675,000	-	-	100%	90,675,000	DMPPTSP dan NAKER		
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	86.87%	45,000,000	86.87%	54,000,000	79.20%	67,000,000	100%	30,000,000	100%	151,000,000	DMPPTSP dan NAKER		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	450,000	2 Dokumen	250,000	2 Dokumen	1,200,000	2 Dokumen	1,200,000	6 Dokumen	2,650,000	DMPPTSP dan NAKER		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DMPPTSP dan NAKER		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	622,522,375	100%	529,023,125	100%	565,948,625	100%	575,861,000	100%	1,670,832,750	DP3AP2KB		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	151,300,865	100%	97,858,000	100%	127,340,000	100%	94,240,000	100%	319,438,000	DP3AP2KB		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	50,000,000	100%	50,000,000	100%	94,330,000	100%	50,000,000	100%	194,330,000	DP3AP2KB		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	8,100,000	1 Dokumen	8,148,000	1 Dokumen	700,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	10,048,000	DP3AP2KB		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	341,129,000	100%	611,615,600	100%	591,600,100	100%	431,490,000	100%	1,634,705,700	DISPORAPAR		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	148,140,000	100%	177,464,650	100%	177,464,650	100%	343,140,000	100%	698,069,300	DISPORAPAR		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	80,000,000	-	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	160,000,000	DISPORAPAR		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	5,200,000	DISPORAPAR		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,138,454,880	100 %	1,003,350,220	100 %	1,142,912,579	100 %	1,020,570,000	100 %	3,166,832,799	BAPPEDA		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	597,661,900	100 %	487,449,947	100 %	900,260,079	100 %	176,539,466	100 %	1,564,249,492	BAPPEDA		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	-	100 %	-	100 %	101,500,000	100 %	-	100 %	101,500,000	BAPPEDA	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	5 Kegiatan	50,000,000	5 Kegiatan	32,470,000	5 Kegiatan	35,000,000	5 Kegiatan	44,700,000	15 Kegiatan	112,170,000	BAPPEDA	
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	4,004,000	1 Dokumen	2,032,000	1 Dokumen	1,999,900	1 Dokumen	1,199,900	3 Dokumen	5,231,800	BAPPEDA	
				Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan	5 Dokumen	85,566,075	-	-	-	-	5 Dokumen	40,500,000	1 Dokumen	40,500,000	BAPPEDA	
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	53,096,150	-	-	-	-	1 Dokumen	53,096,150	BAPPEDA	
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	1 Dokumen	387,798,400	1 Dokumen	488,897,766	1 Dokumen	225,496,366	1 Dokumen	347,100,000	3 Dokumen	1,061,494,132	BAPPEDA	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	9 Dokumen	2,389,158,259	9 Dokumen	1,780,031,230	9 Dokumen	1,465,859,243	9 Dokumen	1,464,139,732	27 Dokumen	4,710,030,205	BAPPEDA	
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	0 Bulan	-	12 bln	195,479,900	12 bln	250,001,400	12 bln	188,845,000	36 bln	634,326,300	BAPPEDA	
				Program Perencanaan Sosial Budaya	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	12 Bulan	108,200,300	12 bln	116,550,650	12 bln	117,139,200	12 bln	82,713,900	36 bln	316,403,750	BAPPEDA	
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	12 Bulan	99,850,000	12 bln	172,910,500	0	-	12 bln	211,259,000	24 bln	384,169,500	BAPPEDA	
				Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Cakupan penyediaan laporan koordinasi pendanaan pembangunan daerah	4 Laporan	162,044,175	4 Laporan	328,910,275	4 Laporan	312,892,225	4 Laporan	190,400,000	12 Laporan	832,202,500	BAPPEDA	
				Program Khusus	Cakupan penyediaan Dokumen	1 Dokumen	28,410,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA	
				Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Cakupan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	-	-	-	50 %	170,114,400	55 %	160,040,000	55 %	330,154,400	BAPPEDA	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	404,991,605	100%	385,882,630	100%	435,267,680	100%	430,190,800	100%	1,251,341,110	PERPUS	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	83,590,000	100%	69,740,000	100%	208,700,000	100%	168,700,000	100%	447,140,000	PERPUS	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-	100%	51,382,500	-	-	100%	51,382,500	PERPUS	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	5 keg	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	PERPUS	
				Program Penyusunan Perencanaan SKPK	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	3,200,000	PERPUS	
				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip	-	-	-	-	15 OPD	15,000,000	-	-	15 OPD	15,000,000	PERPUS	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	-	-	-	-	60%	30,500,000	60%	30,500,000	PERPUS		
				Program Peningkatan SDM Kearsipan	Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan	-	-	140 org	40,000,000	140 org	40,500,000	140 org	80,500,000	140 org	80,500,000	PERPUS		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,153,603,800	100 %	1,003,034,184	100 %	1,198,222,665	100 %	1,322,855,450	100 %	3,524,112,299	DKPPP		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	160,155,000	100%	190,450,000	100%	449,500,000	100%	41,850,000	100%	681,800,000	DKPPP		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur			100%	141,085,000			100%	141,085,000			DKPPP		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	12 bln	15,000,000									DKPPP		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja dan Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	20 Buku	3,750,000	20 Buku	1,200,000	20 Buku	1,200,000	10 Buku	1,200,000	50 Buku	3,600,000	DKPPP		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	19,030,668,599	100 %	20,557,419,300	100 %	21,652,263,426	100 %	21,703,710,092	100 %	82,944,061,417	DLH		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	2,609,618,780	100 %	2,973,320,980	100 %	3,037,646,605	100 %	2,259,600,000	100 %	10,880,186,365	DLH		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	77,100,000	100 %	493,729,392	100 %	474,068,000	100 %	398,958,000	100 %	1,443,855,392	DLH		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	-	-	0	-	1 Dokumen	3,300,000	-	-	1 Dokumen	3,300,000	DLH		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,600,000	1 Dokumen	3,650,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	9,650,000	DLH		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH		
				program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	758,927,017	100%	697,360,000	100%	750,590,200	100%	794,329,800	100%	3,001,207,017	CAPIL		
				program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	106,989,000	100%	223,983,500	100%	146,420,000	100%	95,120,000	100%	572,512,500	CAPIL		
				program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	50,000,000	100%	50,000,000	100%	149,470,000	100%	50,000,000	100%	299,470,000	CAPIL		
				program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	-	-	-	-	-	-	1 Keg	29,800,000	1 Keg	29,800,000	CAPIL		
				program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,549,800	1 Dokumen	800,000	1 Dokumen	800,000	1 Dokumen	1,195,000	1 Dokumen	6,344,800	CAPIL		
				program peningkatan dan pengembangan pembangunan kota	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAPIL		
				program penataan administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP	85 %	858,144,650	80%	812,406,000	85%	1,401,367,000	88%	1,099,390,750	88%	4,171,308,400	CAPIL		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	581,432,998	100 %	549,553,522	100 %	685,955,200	100 %	613,444,050	100 %	2,430,385,770	DPMG		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	177,054,770	100 %	213,080,000	100 %	141,020,000	100 %	66,020,000	100 %	597,174,770	DPMG		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur	-	-	-	-	100 %	70,525,000	-	-	100 %	70,525,000	DPMG		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Didikuti	1 Kegiatan	7,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	3 Kegiatan	47,000,000	DPMG		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,150,000	1 Dokumen	800,000	1 Kegiatan	800,000	1 Kegiatan	1,200,000	1 Kegiatan	4,950,000	DPMG		
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pengembangan Masyarakat Perdesaan	68 Gampong	448,906,500	68 Gampong	471,659,625	68 Gampong	200,000,000	68 Gampong	253,358,400	68 Gampong	1,373,924,525	DPMG		
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	-	-	-	-	100 %	143,998,950	100 %	361,557,100	100 %	505,556,050	DPMG		
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	371,894,775	100 %	433,510,000	100 %	328,000,000	100 %	412,178,000	100 %	1,545,582,775	DPMG		
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	-	-	-	-	100 %	450,688,750	100 %	535,190,000	100 %	985,878,750	DPMG		
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	11.78 %	69,851,375	-	-	12.3 %	47,749,925	12.4 %	406,282,600	12.4 %	523,883,900	DPMG		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,351,628,350	100	1,481,042,900	100	1,700,331,300	100	1,467,778,200	100	4,649,152,400	DISHUB		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	508,980,000	100	530,690,000	100	597,330,000	100	695,421,200	100	1,823,441,200	DISHUB		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 Persen	21,000,000	-	-	100	113,040,000	100	-	100	113,040,000	DISHUB		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kegiatan	-	-	-	5	-	5	-	5	-	DISHUB		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,950,000	1	1,450,000	1	-	1	770,000	2	2,220,000	DISHUB		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0	-	DISHUB		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	DISHUB		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bln	302,441,880	12 bln	379,766,880	12 bln	404,576,265	12 bln	379,589,426	36 bln	1,163,932,571	DISKOMINFO		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bln	221,640,000	12 bln	240,080,000	12 bln	311,580,000	12 bln	330,500,000	36 bln	882,160,000	DISKOMINFO	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	12 bln	80,000,000	12 bln	80,000,000	12 bln	115,525,000	12 bln	80,000,000	36 bln	275,525,000	DISKOMINFO	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	29,800,000	3 Kegiatan	109,800,000	DISKOMINFO	
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	12,488,500	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	14,888,500	DISKOMINFO	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	8,901,477,434	100 %	9,928,944,844	100 %	10,499,076,004	100 %	9,697,957,600	100 %	30,125,978,448	SETDAKO	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	4,864,648,250	100 %	3,764,049,110	100 %	6,691,257,491	100 %	6,042,559,750	100 %	16,497,866,351	SETDAKO	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	492,350,000	100 %	341,750,000	100 %	623,250,000	100 %	668,000,000	100 %	1,633,000,000	SETDAKO	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di Ikuti	5 Kegiatan	278,804,000	5 Kegiatan	288,099,000	8 Kegiatan	364,281,400	9 Kegiatan	392,907,500	22 Kegiatan	1,045,287,900	SETDAKO	
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	1 Dokumen	58,726,620	1 Dokumen	54,905,000	1 Dokumen	68,594,600	1 Dokumen	63,697,600	3 Dokumen	187,197,200	SETDAKO	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKIP, LKPD, IKK, dan EKPOD	4 Dokumen	262,625,000	4 Dokumen	190,149,400	4 Dokumen	263,931,292	4 Dokumen	217,705,300	12 Dokumen	671,785,992	SETDAKO	
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah	12 Bulan	591,672,500	12 Bulan	1,199,143,000	12 Bulan	975,202,776	12 Bulan	988,455,000	36 Bulan	3,162,800,776	SETDAKO	
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Informasi publik secara elektronik	12 Bulan	212,600,120	12 Bulan	371,980,500	12 Bulan	572,477,300	12 Bulan	582,233,200	36 Bulan	1,526,691,000	SETDAKO	
				Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan kerjasama antar pemerintah daerah	1 Kegiatan	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDAKO	
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan produk hukum daerah yang disasilitasi	12 Bulan	1,328,270,000	12 Bulan	1,633,216,400	12 Bulan	3,516,006,500	12 Bulan	3,099,750,000	36 Bulan	8,248,972,900	SETDAKO	
				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	12 Bulan	6,121,709,200	12 Bulan	8,992,388,000	12 Bulan	25,353,270,581	12 Bulan	18,145,129,646	36 Bulan	52,490,788,227	SETDAKO	
				Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan pelaksanaan kegiatan keagamaan	12 Bulan	729,320,000	12 Bulan	887,270,000	12 Bulan	929,500,000	12 Bulan	940,516,000	36 Bulan	2,757,286,000	SETDAKO	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	12 Bulan	479,138,670	12 Bulan	554,880,800	12 Bulan	489,680,000	12 Bulan	542,548,400	36 Bulan	1,587,109,200	SETDAKO	
				Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	12 Bulan	34,970,000	12 Bulan	21,000,000	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	35,800,000	36 Bulan	92,800,000	SETDAKO	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Peringatan Hari-hari Besar	Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	8 Hari Besar	1,412,889,400	8 Hari Besar	1,453,227,600	8 Hari Besar	1,567,015,000	8 Hari Besar	1,574,494,900	24 Hari Besar	4,594,737,500	SETDAKO		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	6,071,657,496	100	7,059,699,336	100	7,362,874,696	100	5,358,413,150	100	19,780,987,182	SETWAN		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur	100	1,539,661,151	100	2,068,473,810	100	2,727,509,626	100	1,867,195,000	100	6,663,178,436	SETWAN		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100	309,845,750	100	660,753,250	100	1,205,512,875	100	322,598,850	100	2,188,864,975	SETWAN		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	5	263,750,000	5	475,000,000	-	-	-	-	5	475,000,000	SETWAN		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2	4,650,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,200,000	3	4,700,000	SETWAN		
				Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas	100	4,347,922,675	100	6,180,579,700	100	7,989,947,499	100	6,194,520,000	100	20,365,047,199	SETWAN		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	32,935,000	100%	37,700,000	100%	102,700,000	100%	106,700,000	100%	247,100,000	Kec. Banda Sakti		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-	100%	75,562,500	-	-	100%	75,562,500	Kec. Banda Sakti		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,048,900	1 Dokumen	848,800	1 Dokumen	999,900	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	3,048,700	Kec. Banda Sakti		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Banda Sakti		
				Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong	12 bln	91,014,000	12 bln	91,014,000	12 bln	91,014,000	12 bln	90,863,000	36 bln	272,891,000	Kec. Banda Sakti		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	2 Kegiatan	122,200,000	2 Kegiatan	143,900,000	2 Kegiatan	164,595,000	2 Kegiatan	211,138,950	6 Kegiatan	519,633,950	Kec. Banda Sakti		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan Saweu Gampong	18 Gampong		18 Gampong		18 Gampong		18 Gampong		18 Gampong		Kec. Banda Sakti		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan Musrenbang	1 Kecamatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kec. Banda Sakti		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	100%	411,970,802	100%	405,982,852	100%	475,492,809	100%	487,789,000	100%	1,781,235,463	Kec. Blang Mangat		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	26,760,000	100%	36,360,000	100%	91,760,000	100%	121,700,000	100%	276,580,000	Kec. Blang Mangat		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-	100%	80,600,000	-	-	100%	80,600,000	Kec. Blang Mangat		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	5,400,000	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	12,650,000	Kec. Blang Mangat		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong	12 bln	105,486,225	12 bln	106,016,325	12 bln	106,016,325	12 bln	105,867,725	36 bln	423,386,600	Kec. Blang Mangat		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan	2 Kegiatan	127,594,000	2 Kegiatan	111,000,000	2 Kegiatan	162,679,350	2 Kegiatan	238,721,590	6 Kegiatan	639,994,940	Kec. Blang Mangat		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	398,729,050	100%	429,318,794	100%	665,648,918	100%	469,994,400	100%	1,963,691,162	Kec. Muara Dua		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	93,746,000	100%	97,359,000	100%	269,180,378	100%	88,000,000	100%	548,285,378	Kec. Muara Dua		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	-	100%	-	100%	69,517,500	100%	-	100%	69,517,500	Kec. Muara Dua		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,650,000	1 Dokumen	1,550,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,165,000	3 Dokumen	7,365,000	Kec. Muara Dua		
				Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	12 bln	87,066,800	12 bln	87,065,650	12 bln	87,065,650	12 bln	86,267,040	36 bln	347,465,140	Kec. Muara Dua		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan)	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	100%	113,539,985	100%	174,000,000	100%	615,433,100	100%	248,575,150	100%	1,151,548,235	Kec. Muara Dua		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	452,394,525	100 %	407,937,585	100 %	502,311,710	100 %	468,500,297	100 %	1,378,749,592	Kec. Muara Satu		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	54,578,600	100 %	65,961,400	100 %	185,500,000	100 %	129,500,000	100 %	380,961,400	Kec. Muara Satu		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	0 %	-	100 %	62,465,000	-	-	100 %	62,465,000	Kec. Muara Satu		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,360,000	1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,198,240	3 Dokumen	3,598,240	Kec. Muara Satu		
				Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	100 %	71,600,000	100 %	90,907,500	100 %	90,907,500	100 %	90,140,750	100 %	271,955,750	Kec. Muara Satu		
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan)	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	100 %	118,002,100	100 %	123,122,100	100 %	169,633,650	100 %	173,925,060	100 %	466,680,810	Kec. Muara Satu		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	741,991,365	100%	713,033,108	100%	806,840,008	100%	1,043,342,100	100%	2,563,215,216	DISKOP		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	161,481,350	100 %	747,037,500	100 %	294,428,100	100 %	96,400,000	100 %	1,137,865,600	DISKOP		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	86,845,000	100 %	40,000,000	100 %	166,845,000	DISKOP		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	5 Kegiatan	8,000,000	5 Kegiatan	3,000,000	5 Kegiatan	9,800,000	15 Kegiatan	20,800,000	DISKOP		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,990,000	2 Dokumen	1,340,000	-	-	2 Dokumen	1,200,000	4 Dokumen	2,540,000	DISKOP	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyediaan Dokumen DED	4 Dokumen	278,886,000	4 Dokumen	348,269,000	-	-	1 Dokumen	70,700,000	5 Dokumen	418,969,000	DISKOP	
				Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda	Persentase Pengrajin Binaan Yang Terbina	-	-	5 Kegiatan	640,000,000	1 Kegiatan	40,500,000	6 Kegiatan	680,500,000	DISKOP			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2,206,399,641	100%	2,461,447,163	100%	2,398,754,188	100%	2,445,317,000	100%	7,305,518,351	BPBD	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	348,381,800	100%	421,430,600	100%	402,130,600	100%	341,300,000	100%	1,164,861,200	BPBD	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	35,520,000	100%	54,036,000	100%	184,063,800	100%	116,500,000	100%	354,599,800	BPBD	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	BPBD	
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	4,450,000	1 Dokumen	1,700,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	4,100,000	BPBD	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin Kencang, Abrasi, dll	18.39%	13,160,228,265	18.39%	8,333,678,072	18.39%	140,000,000	18.39%	3,061,000,000	18.39%	11,534,678,072	BPBD	
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BPBD	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	60,613,787,600	100%	694,864,620	100%	783,444,520	100%	746,272,700	100%	2,224,581,840	INSPEKTORAT	
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	82,415,750	100%	120,800,000	100%	290,000,000	100%	195,603,230	100%	606,403,230	INSPEKTORAT	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	110,000,000	100%	110,000,000	100%	198,660,000	100%	110,000,000	100%	418,660,000	INSPEKTORAT	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	5 Kegiatan	35,000,000	5 Kegiatan	65,800,000	5 Kegiatan	81,600,000	5 Kegiatan	116,542,200	15 Kegiatan	263,942,200	INSPEKTORAT	
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	1,099,700	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	3,399,700	INSPEKTORAT	
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP	65 LHP	950,910,988	150 LHP	1,393,930,200	140 LHP	1,821,504,400	110 LHP	2,258,819,600	400 LHP	5,474,254,200	INSPEKTORAT	
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor)	-	-	5 org	110,720,800	5 org	170,172,800	15 org	183,500,000	25 org	464,393,600	INSPEKTORAT	
				Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah laporan pengawasan ASN	1 Laporan	37,917,100	1 Laporan	17,127,000	-	-	1 Laporan	33,000,000	2 Laporan	50,127,000	INSPEKTORAT	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%	2,320,096,294	100%	2,383,622,450	100%	2,323,837,000	100%	651,437,518	BPKD		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100%	1,098,800,343	100%	1,890,131,762	100%	467,300,000	100%	93,416,200	BPKD		
				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%		-	-	100%	230,717,500	100%	126,500,000	100%	126,500,000	BPKD		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	100%		-	-	-	-	100%	198,000,000	100%	198,000,000	BPKD		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK			1 Dokumen	1,656,000	2 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	1,200,000	4 Dokumen	540,000	BPKD		
				Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bln		12 bln	292,000,000	12 bln	293,981,100	12 bln	329,448,300	36 bln	102,267,578	BPKD		
				Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran Penerimaan PAD	45,09 Milyar		43,05 Milyar	596,160,000	51,00 Milyar	716,783,000	44,28 Milyar	844,731,850	44,28 Milyar	222,784,700	BPKD		
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APEK	7 Dokumen		7 Dokumen	4,212,638,950	7 Dokumen	3,944,775,550	7 Dokumen	4,017,626,850	21 Dokumen	1,076,041,320	BPKD		
				Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP		WTP	145,000,000	WTP	164,842,500	WTP	120,964,000	WTP	43,108,500	BPKD		
				Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1,306,430,200	8 Dokumen	1,095,414,600	8 Dokumen	1,069,557,600	24 Dokumen	160,020,050	BPKD		
				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 bln		12 bln	105,700,000	12 bln	119,800,000	12 bln	625,133,100	36 bln	175,785,300	BPKD		
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	663,803,618	100 %	616,562,080	100 %	716,772,080	100 %	695,762,159	100 %	2,029,096,319	BKPSDM		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	77,720,000	100 %	76,000,000	100 %	216,625,000	100 %	120,400,000	100 %	413,025,000	BKPSDM		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-	100 %	128,960,000	-	-	-	128,960,000	BKPSDM		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	100 %	48,000,000	100 %	48,000,000	100 %	48,000,000	100 %	144,000,000	BKPSDM		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,650,000	1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	4,000,000	BKPSDM		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	2.86 %	98,350,000	2.86 %	854,529,702	3.15 %	425,141,466	3.46 %	467,816,416	3.46 %	1,747,487,584	BKPSDM		
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	203,028,350	12 Bulan	578,630,600	12 Bulan	989,564,085	12 Bulan	826,380,725	36 Bulan	2,394,575,410	BKPSDM		
				Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,383,372,162	100 %	465,914,500	100 %	642,831,500	100 %	522,500,000	100 %	1,631,246,000	DSIPD		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	628,440,000	100 %	145,782,900	100 %	1,833,907,900	100 %	61,300,000	100 %	2,040,990,800	DSIPD		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	90,000,000	100 %	90,000,000	100 %	189,742,500	100 %	90,000,000	100 %	369,742,500	DSIPD
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	1,950,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,199,900	3 Dokumen	7,199,900	DSIPD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100 %	1,407,620,200	100 %	1,516,138,325	100 %	1,534,683,425.00	100 %	4,458,441,950.00	Sekretariat MPU
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	-	-	100 %	70,500,000	100 %	103,600,000	100 %	82,600,000	100 %	256,700,000.00	Sekretariat MPU
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	100 %	30,225,000	-	-	100 %	30,225,000.00	Sekretariat MPU
				Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	-	-	100 %	500,000	100 %	800,000	100 %	1,200,000	100 %	2,500,000.00	Sekretariat MPU
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	435,930,700	100 %	474,320,970	100 %	539,548,620	100 %	723,069,100	100 %	1,736,938,690	Sekretariat Baitul Mal
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	114,360,000	100 %	69,360,000	100 %	89,360,000	100 %	58,700,000	100 %	217,420,000	Sekretariat Baitul Mal
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	-	-	-	100 %	76,570,000	-	-	100 %	76,570,000	Sekretariat Baitul Mal
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	4,400,000	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	800,000	2 Dokumen	1,200,000	4 Dokumen	3,900,000	Sekretariat Baitul Mal
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	454,053,890	12 Bulan	486,365,000	12 Bulan	594,345,400	12 Bulan	568,795,000	36 Bulan	1,649,505,400	Sekretariat MAA
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	57,720,000	12 Bulan	81,300,000	12 Bulan	92,300,000	12 Bulan	93,200,000	36 Bulan	266,800,000	Sekretariat MAA
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	-	-	-	-	12 Bulan	19,165,000	12 Bulan	55,000,000	24 Bulan	74,165,000	Sekretariat MAA
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Skpk	4 Buku	1,900,000	4 Buku	400,000	5 Buku	800,000	5 Buku	1,200,000	14 Bulan	2,400,000	Sekretariat MAA
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100 %	425,452,245	100 %	549,934,745	100 %	493,026,700	100 %	1,468,413,690	Sekretariat MPD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100 %	86,300,000	100 %	106,300,000	100 %	82,700,000	100 %	275,300,000	Sekretariat MPD

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	-	-	-	-	100 %	24,180,000	100 %	-	100 %	24,180,000	Sekretariat MPD		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di Ikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat MPD		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	-	-	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	800,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	3,100,000	Sekretariat MPD		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat MPD		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelengkapan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	100%	219,250,000	100%	363,590,000	100%	582,840,000	PERTANAHAN		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	100%	103,700,000	100%	566,000,000	100%	669,700,000	PERTANAHAN		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	-	-	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	160,000,000	PERTANAHAN		
				Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	-	-	-	-	-	-	100%	1,200,000	100%	1,200,000	PERTANAHAN		
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Ketersediaan Data	-	-	-	-	-	-	100%	50,500,000	100%	50,500,000	PERTANAHAN		
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	100%	50,500,000	100%	50,500,000	PERTANAHAN		
		Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK terhadap informasi publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Kegiatan	1,484,748,900	1 Kegiatan	110,525,000	1 Kegiatan	1,678,000,000	1 Kegiatan	147,200,000	1 Kegiatan	1,935,725,000	DISKOMINFO		
				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Cakupan Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	1 Kegiatan	140,000,000	-	-	1 Kegiatan	140,000,000	DISKOMINFO		
				Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media	Cakupan Kerjasama Informasi dengan Massa Media	-	-	-	-	1 Kegiatan	37,000,000	-	-	1 Kegiatan	37,000,000	DISKOMINFO		
				Program Pengelolaan Data dan Informasi	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi	1 Kegiatan	177,700,000	1 Kegiatan	164,040,000	1 Kegiatan	666,334,000	1 Kegiatan	626,349,500	3 Kegiatan	1,456,723,500	DISKOMINFO		
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB	Ada	110,187,500.00	Ada	96,850,000.00	-	-	-	-	Ada	96,850,000.00	BAPPEDA		
				Program Pengembangan Data / Informasi	Keterbukaan informasi publik melalui website	Ada	217,223,900	Ada	142,382,550	Ada	150,174,800	Ada	293,101,600	Ada	585,658,950	BAPPEDA		

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	12 bulan	438,899,000	12 bulan	741,670,000	12 bulan	1,276,350,466	12 bulan	351,100,000	36 bulan	2,369,120,466	SETDAKO	
				Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Cakupan kerjasama informasi dengan mass media	100%	619,400,000	100%	641,585,800	100%	734,800,000	100%	398,800,000	100%	1,775,185,800	SETDAKO	
Total Misi 4							171,130,824,996		129,000,886,493		160,490,056,765		140,750,569,496		428,562,896,097	M4	
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.	Meningkatkan prasarana pelayanan dasar	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal berakses air minum/air bersih	4.82 %		4.96	21,277,133,650	80.00	11,565,783,500	90.00	15,694,581,000	90.00	48,537,498,150	PUPR	
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	66 %		70.62		75.56		80.85			-	PUPR	
				Program Pengendalian Banjir	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	44.64 %		40.18	85,710,995	36.16	-	32.54	-	40.18	85,710,995	PUPR	
				Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Cakupan penanganan kawasan kumuh	81.3 Ha		76.40	2,078,318,000	16.80	5,381,707,137	13.80	1,045,100,000	13.80	8,505,125,137	PUPR	
				Program pengembangan perumahan	Rasio rumah layak huni	0,22 Rasio		0.24	-	0.26	6,049,934,000	0.29	2,107,227,000	0.29	8,157,161,000	PUPR	
					Rasio permukiman layak huni	0,87 Rasio		0.89		0.81		0.93			-	PUPR	
				Program Lingkungan sehat Perumahan	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	1,89 Persen		1.51	15,455,522,496	1.21	7,560,630,402	0.97	10,913,261,220	0.97	33,929,414,118	PUPR	
				Program Pembangunan sarana dan prasarana umum	Persentase PSU dalam kondisi baik	0,11 Persen		0.11	27,209,839,224	0.12	32,703,283,817	0.12	26,116,430,238	0.12	86,029,553,279	PUPR	
			Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat		Persentase lingkungan permukiman kumuh	2,82 Persen		1.97		1.38		0.97			-	PUPR	
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencanaan	-		-		1 Kegiatan	150,000,000	3 Kegiatan	150,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	PUPR	
				Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan Air yang tertampung			100 %	50,000,000	100 %	655,000,000	-	-	100 %	705,000,000	PUPR	
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan	Peningkatan ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	58.1%		62.20	48,712,579,211	66.60	70,474,301,233	71.20	79,528,115,390	71.20	198,714,995,834	PUPR	
					Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	2.11%		2.54		3.04		3.65			-	PUPR	
					Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	8.9%		10.67		12.80		15.37			-	PUPR	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	53.15%		58.46	8,542,516,500	64.31	20,453,525,523	70.74	7,429,000,000	70.74	36,425,042,023	PUPR
				Program Pembangunan Turap/Talup/Bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	41.27%		51.27	5,946,994,592	61.27	11,531,003,000	71.27	9,786,000,000	70.74	27,263,997,592	PUPR
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	58.14%		63.95	715,713,371	70.35	-	77.38	97,700,000	77.38	813,413,371	PUPR
		Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat	60 Persen	43,570,000	60	35,730,000	60	30,500,000	60	24,000,000	60	90,230,000	DISHUB
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ	12 Bulan	103,424,600	12	85,880,000	12	60,000,000	12	49,000,000	12	194,880,000	DISHUB
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio Izin Trayek	0,009 Rasio	312,357,500	0	315,858,500	5	339,560,600	7	410,320,000	12	1,065,739,100	DISHUB
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Uji Kir angkutan umum	0,80 Rasio		0.87		0.95		0.97		0.99	-	DISHUB
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik	1 Sarana	1,479,906,000	1	120,894,000	1	2,595,030,000	1	1,760,700,000	1	4,476,624,000	DISHUB
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan pemasangan rambu-rambu	36,8 Persen	1,249,997,500	40.11	226,340,000	43.72	2,421,075,000	47.66	1,041,800,000	56.62	3,689,215,000	DISHUB
				Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi	60 Persen	-	60	75,000,000	60	105,000,000	60	-	60	180,000,000	DISHUB
Total Misi 5							3,189,255,600		130,934,030,539		172,076,334,212		156,153,234,848		459,163,599,599	M5
Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terselenggaranya Penataan Ruang Daerah	Peningkatan kawasan terbuka hijau	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan dokumen Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	2 Dokumen	70,000,000	3 Dokumen	496,000,000	5 Dokumen	566,000,000	PUPR	
				Program Pemanfaatan Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25.4 Ha	-	27.9 Ha	-	30.7 Ha	-	33.8 Ha	-	-	-	PUPR
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.082 %	-	0.082 %	-	0.082 %	-	0.083 %	-	-	-	PUPR
					Ketaatan terhadap KTRW	3.28 %	-	3.28 %	-	3.29 %	-	3.3 %	-	-	-	PUPR
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	25.4 Ha	172,749,700	27.9 Ha	550,485,800	30.7 Ha	138,000,000	33.8 Ha	89,300,000	92.4 Ha	950,535,500	DLH
				Program Peningkatan Keindahan dan Keresasian Kota	Cakupan Pelaksanaan Keindahan dan Keresasian Kota	1 Kecamatan	153,891,500	1 Kecamatan	150,985,800	2 Kecamatan	142,000,000	2 Kecamatan	200,400,000	2 Kecamatan	647,277,300	DLH
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	100 %	478,562,500	100 %	864,000,000	100 %	667,080,000	100 %	1,050,500,000	100 %	3,060,142,500	DLH

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d Tahun 2020		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	100 %	384,517,500	100 %	101,218,960	100 %	404,169,000	100 %	19,875,000	100 %	909,780,460	DLH		
				Program Rehabilitasi Dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	1	119,900,000	1	63,850,000	2	376,787,500	2	275,900,000	5	836,437,500	DLH		
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Database Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	DLH		
				Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Minimum	1	474,493,910	1	2,218,196,998	1	615,000,000	1	2,373,400,000	3	5,681,090,908	DLH		
				Program Normalisasi Jaringan Air Limbah	Cakupan Penanganan Limbah/Tinja	-	-	-	-	40 %	100,000,000	60 %	50,500,000	60 %	150,500,000	DLH		
Total Misi 6							1,784,115,110		3,948,737,558		2,513,036,500		4,555,875,000		12,801,764,168	M6		
Misi 7 : Mewujudkan ketenram, ketertiban, kedamaian dan persatuan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan	Meningkatnya pemahaman terhadap Syariat islam	Peningkatan patroli dan penertiban qanun Syariat Islam	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			1 Keg	10,000,000	1 Keg	11,000,000	1 Keg	12,100,000	3 Keg	33,100,000	KESBANGPOL		
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda/Qanun	25 %	346,900,000	50%	253,000,000	80%	164,150,000	80%	383,900,000	80%	801,050,000	SATPOL PP & WH		
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kantrantibmas	50%	910,305,350	50%	1,749,921,280	80%	313,690,000	80%	660,808,000	80%	2,724,419,280	SATPOL PP & WH		
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	7 Keg	427,525,775	6 Keg	323,600,000	13 Keg	751,125,775	KESBANGPOL		
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			3 Keg	139,200,000	3 Keg	233,670,000	4 Keg	500,032,000	10 Keg	872,902,000	KESBANGPOL		
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	1 Keg	80,550,000	3 Keg	331,600,000	4 Keg	412,150,000	KESBANGPOL		
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	-	-	2 Keg	425,000,000	2 Keg	425,000,000	KESBANGPOL		
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			2 Keg	88,000,000	2 Keg	96,800,000	2 Keg	106,480,000	6 Keg	291,280,000	KESBANGPOL		
				Program pendidikan politik masyarakat	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	7 Keg	402,644,560	3 Keg	310,350,000	10 Keg	712,994,560	KESBANGPOL		
				Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	27.88 %	65,720,000	27.88	-	27.88%	80,300,000	0	-	27.88%	80,300,000	SATPOL PP & WH		
Total Misi 7							1,322,925,350		2,240,121,280		1,810,330,335		3,053,870,000		7,104,321,615	M7		

Selain program yang disajikan dalam RPJMK pada Tabel 6.4 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dilaksanakan yaitu Program untuk Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sedang berjalan maka pada Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe juga menampilkan Program sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, dan dapat dilihat pada Tabel 6.4A.

Tabel 6.4A memuat program dari tahun 2021 sampai dengan 2022 yang merupakan tahun akhir RPJM Kota Lhokseumawe.

Secara rinci Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif dengan nomenklatur dan kodefikasi rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 6.4A berikut ini:

Tabel 6.4A

Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Misi

Visi : Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1, Memperkuat pelaksanaan syariat islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.	Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat	Peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman syariat islam bagi masyarakat	Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai keislaman	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	11,077,300,000	15 Orang	13,373,983,507	15 Orang	24,451,283,507	DSI-PD
				Meningkatkan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung penerapan agama bagi masyarakat	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama	50 Persen	633,463,530	100 Persen	656,722,500	100 Persen	1,290,186,030	MPU
			Peningkatan Sosialisasi ZIS	Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS	PROGRAM BAITUL MAL	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	7,548,624,000	9.24 Milyar	12,064,560,745	9.24 Milyar	19,613,184,745	B. MAL
		Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan nilai budaya aceh	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	288,350,000	100 Persen	291,555,000	100 Persen	579,905,000	MAA
				Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	90 Persen	150,000,000	95 Persen	660,000,000	95 Persen	810,000,000	PK
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	80 Persen	150,000,000	80 Persen	650,000,000	80 Persen	800,000,000	PK

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah	85 Persen	150,000,000	85 Persen	205,000,000	85 Persen	355,000,000	PK
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.45 Persen	250,000,000	45.45 Persen	250,000,000	45.45 Persen	500,000,000	PK
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Pengelolaan Museum	80 Persen	613,430,102	80 Persen	860,000,000	80 Persen	1,473,430,102	PK
Total Misi 1								20,861,167,632		29,011,821,752		49,872,989,384	
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi	Menurunkan angka kemiskinan	Peningkatan dan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Mengembangkan keahlian daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi dan jiwa kewirausahaan dan akses kesempatan kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	44,000,000	2 Dokumen	88,000,000	DPMTSP
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	70 Persen	418,848,800	70 Persen	428,000,000	70 Persen	846,848,800	DPMTSP
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	49 Persen	130,300,000	70 Persen	140,000,000	70 Persen	270,300,000	DPMTSP
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja	78 Persen	198,000,000	78 Persen	216,800,000	78 Persen	414,800,000	DPMTSP
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun	0	110,000,000	0	121,000,000	0	231,000,000	DPMTSP
			Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak	Peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	75.30 Persen	360,000,000	75.30 Persen	410,000,000	75.30 Persen	770,000,000	DINAS PP

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	20 Persen	460,000,000	20 Persen	500,000,000	20 Persen	960,000,000	DINAS PP
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	23 Persen	500,000,000	25 Persen	500,000,000	25 Persen	1,000,000,000	DINAS PP
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak	100 Persen	127,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	277,000,000	DINAS PP
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	95 Persen	375,000,000	100 Persen	455,000,000	100 Persen	830,000,000	DINAS PP
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	76 Persen	675,000,000	100 Persen	850,000,000	100 Persen	1,525,000,000	DINAS PP
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima	Memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4 Kec	1,096,100,000	4 Kec	1,572,050,000	4 Kec	2,668,150,000	DISKOP
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	4 Kec	430,000,000	4 Kec	473,000,000	4 Kec	903,000,000	DISKOP
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	21.89 Persen	680,000,000	21.89 Persen	1,255,000,000	21.89 Persen	1,935,000,000	DISKOP
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi Tera ulang	100 Persen	3,125,000,000	100 Persen	1,968,921,600	100 Persen	5,093,921,600	DISKOP

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	972,560,715	19.70 Persen	1,069,816,787	19.70 Persen	2,042,377,502	DISKOP
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang memiliki izin	30 Persen	50,000,000	30 Persen	55,000,000	30 Persen	105,000,000	DISKOP
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan data SINAS	12 Bulan	141,245,720	12 Bulan	155,370,292	12 Bulan	296,616,012	DISKOP
					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	30,000,000	40.37 Persen	33,000,000	40.37 Persen	63,000,000	DISKOP
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	20,000,000	40.37 Persen	22,000,000	40.37 Persen	42,000,000	DISKOP
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase BPR/LKM aktif	100 Persen	20,000,000	100 Persen	22,000,000	100 Persen	42,000,000	DISKOP
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	66,640,000	5 Persen	73,304,000	5 Persen	139,944,000	DISKOP
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	460,000,000	5 Persen	506,000,000	5 Persen	966,000,000	DISKOP
		Meningkatnya Iklim Investasi	Peningkatan promosi dan potensi daerah	Menyediakan sarana dan prasarana dalam promosi potensi daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	371 Investor	387,408,263	389 Investor	447,032,863	389 Investor	834,441,126	DPMTSP
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	Cakupan promosi potensi sumberdaya,	100 Persen	250,000,000	100 Persen	218,565,329	100 Persen	468,565,329	DPMTSP
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan dalam pengawasan	30 Perusahaan	169,400,000	30 Perusahaan	178,470,000	30 Perusahaan	347,870,000	DPMTSP

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Percepatan pelayanan investasi melalui e-permit	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan investasi e permit	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lamanya proses perizinan	6 Hari	328,700,000	5 Hari	358,700,000	5 Hari	687,400,000	DPMTSP
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	12 Bulan	72,000,000	12 Bulan	72,000,000	12 Bulan	144,000,000	DPMTSP
		Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pembangunan pariwisata daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	95,148,337	1.26 Persen	95,148,337	1.26 Persen	190,296,674	DISPORA
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	807,589,684	1.26 Persen	547,589,684	1.26 Persen	1,355,179,368	DISPORA
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kunjungan Wisata	17 Persen	785,699,800	17 Persen	535,699,800	17 Persen	1,321,399,600	DISPORA
		Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	2,923,864,600	67 Persen	3,243,751,060	67 Persen	6,167,615,660	DINSOS
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	3,690,000,000	100 Persen	4,130,000,000	100 Persen	7,820,000,000	DINSOS
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 Persen	41,245,000,000	80 Persen	6,322,500,000	80 Persen	47,567,500,000	DINSOS

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	771,553,700	80 Persen	848,709,070	80 Persen	1,620,262,770	DINSOS
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	81.94 Persen	104,121,700	82.11 Persen	109,300,000	82.11 Persen	213,421,700	DINAS PP
		Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya keunggulan kompetitif pada sektor kelautan perikanan, peternakandan pangan	Pemanfaatan dan pengelolaan sektor pertanian, kelautan perikanan dan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	3,377,473,500	6.81 Persen	3,615,788,455	6.81 Persen	6,993,261,955	DKPP
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	2,993,702,500	1773 Ton	2,788,892,750	1773 Ton	5,782,595,250	DKPP
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan dan pegendalian sumberdaya kelautan	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	160,000,000	DKPP
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/peternakan/peternakan	60 Persen	719,076,000	80 Persen	719,076,000	80 Persen	1,438,152,000	DKPP
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100 Persen	616,862,000	100 Persen	616,862,000	100 Persen	1,233,724,000	DKPP

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perkebunan	100 Persen	681,200,000	100 Persen	751,200,000	100 Persen	1,432,400,000	DKPP
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase sarana pendukung penyakit ternak	80 Persen	636,100,000	90 Persen	655,000,000	90 Persen	1,291,100,000	DKPP
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	0.002 Persen	1,987,250,000	0.002 Persen	2,004,265,000	0.002 Persen	3,991,515,000	DKPP
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 Persen	206,325,000	100 Persen	232,517,925	100 Persen	438,842,925	DKPP
Total Misi 2								73,398,170,319		39,611,330,952		113,009,501,271	
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran	Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan sarana prasarana pembelajaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	144,687,677,954	100 Persen	165,970,881,397	100 Persen	310,658,559,351	PK
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	46,855,344,386	100 Persen	54,068,693,000	100 Persen	100,924,037,386	PK
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	750,000,000	100 Persen	500,000,000	100 Persen	1,250,000,000	PK
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	2,343,260,000	3261 Orang	697,750,000	3261 Orang	3,041,010,000	ARPUS
					PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	65 Persen	414,795,479	70 Persen	456,275,027	70 Persen	871,070,506	MPD
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berijazah S1/D4	100 Persen	110,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	220,000,000	PK
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	85 Persen	250,000,000	85 Persen	300,000,000	85 Persen	550,000,000	PK

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatnya generasi yang berdaya saing	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan SDM melalui pembinaan pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	1,011,035,000	98 Persen	911,035,000	98 Persen	1,922,070,000	DISPORA
			Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	peningkatan sarana dan prasarana olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	2,962,681,560	23 Cabor	1,812,524,268	23 Cabor	4,775,205,828	DISPORA
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembina pramuka yang dibina	100 Persen	130,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	240,000,000	DISPORA
		Meningkatnya status Tipe Dayah	Peningkatan sarana dan prasarana Dayah	Penyediaan sarana dan prasarana dayah	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	14,125,845,100	16 Dayah	7,654,866,577	16 Dayah	21,780,711,677	DSI-PD
	Meningkatkan kualitas kesehatan.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta jaringannya	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	205,000,000	100 Persen	225,500,000	100 Persen	430,500,000	DINKES
		Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit menular	Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit menular	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.26 -	629,460,000	0.26 -	356,906,000	0.26 -	986,366,000	DINKES
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	40,513,660,672	0	46,130,843,872	0	86,644,504,544	DINKES
		Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan Untuk menangani penyakit tidak menular	Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat	100 Persen	210,000,000	100 Persen	231,000,000	100 Persen	441,000,000	DINKES
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Sehat	10.29 Persen	310,000,000	20.58 Persen	341,000,000	20.58 Persen	651,000,000	DINKES

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia	Peningkatan kemitraan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, usia produktif dan lansia	Peningkatan kualitas kesehatan melalui kemitraan kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	2,902,046,000	2 Anak	3,116,648,300	2 Anak	6,018,694,300	DINAS PP
Total Misi 3								258,410,806,151		282,993,923,441		541,404,729,592	
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance).	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur	Melaksanakan perencanaan, pelaporan, evaluasi sesuai prosedur secara transparan dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	62,525,205,698	100 Persen	65,450,190,852	100 Persen	127,975,396,550	DINKES
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	9,786,983,368	100 Persen	12,814,090,122	100 Persen	22,601,073,490	PUPR
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,742,177,941	100 Persen	5,098,733,895	100 Persen	10,840,911,836	BPBD
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	1,640,710,073	18.39 Persen	422,400,000	18.39 Persen	2,063,110,073	BPBD
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	10,990,768,688	100 Persen	10,685,130,508	100 Persen	21,675,899,196	SATPOL
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,731,527,881	100 Persen	4,020,783,456	100 Persen	7,752,311,337	DINSOS
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	360,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	760,000,000	DINSOS

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,503,141,424	100 Persen	5,593,328,404	100 Persen	11,096,469,828	DPMTSP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,309,758,000	100 Persen	3,693,097,670	100 Persen	7,002,855,670	DINAS PP
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	2 Persen	50,000,000	2 Persen	70,000,000	2 Persen	120,000,000	DINAS PP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,240,422,676	100 Persen	8,098,190,209	100 Persen	15,338,612,885	DKPP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,371,305,194	100 Persen	4,808,435,713	100 Persen	9,179,740,907	TANAH
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	80 Persen	350,000,000	83.33 Persen	385,000,000	83.33 Persen	735,000,000	TANAH
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	0.14 Persen	300,000,000	0.14 Persen	330,000,000	0.14 Persen	630,000,000	TANAH
					PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	9.62 Persen	510,000,000	9.64 Persen	561,000,000	9.64 Persen	1,071,000,000	TANAH
					PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	9.62 Persen	150,000,000	9.64 Persen	150,000,000	9.64 Persen	300,000,000	TANAH
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase peningkatan SDM Aparatur	90 Persen	757,615,000	90 Persen	833,376,500	90 Persen	1,590,991,500	TANAH

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Cakupan pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	100 Persen	200,000,000	100 Persen	220,000,000	100 Persen	420,000,000	TANAH
					PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	80 Persen	313,000,000	83.33 Persen	344,300,000	83.33 Persen	657,300,000	TANAH
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	26,189,024,728	100 Persen	26,644,811,131	100 Persen	52,833,835,859	DLH
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,005,655,218	100 Persen	8,926,853,414	100 Persen	15,932,508,632	CAPIL
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	2,330,163,500	0.97 Persen	1,748,400,000	0.97 Persen	4,078,563,500	CAPIL
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	767,965,000	0.88 Persen	755,000,000	0.88 Persen	1,522,965,000	CAPIL
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	1,097,000,000	Ada -	1,601,043,625	Ada -	2,698,043,625	CAPIL
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan Data Kependudukan	90 Persen	165,000,000	90 Persen	165,000,000	90 Persen	330,000,000	CAPIL
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,900,185,510	100 Persen	3,203,260,613	100 Persen	6,103,446,123	DPGM
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	1,405,210,000	68 gampong	1,555,000,000	68 gampong	2,960,210,000	DPGM

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	2,030,017,700	4 Kelompok	2,557,670,241	4 Kelompok	4,587,687,941	DPGM
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,188,428,611	100 Persen	5,291,285,744	100 Persen	10,479,714,355	DISHUB
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,423,079,630	100 Persen	3,423,079,630	100 Persen	6,846,159,260	KOMINFO
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,291,561,443	100 Persen	5,817,413,588	100 Persen	11,108,975,031	DISKOP
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,485,831,423	100 Persen	2,705,733,918	100 Persen	5,191,565,341	DISPORA
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,236,184,860	100 Persen	2,874,536,000	100 Persen	6,110,720,860	ARPUS
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	34 OPD	400,000,000	34 OPD	147,750,000	34 OPD	547,750,000	ARPUS
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60 Persen	100,000,000	65 Persen	116,370,954	65 Persen	216,370,954	ARPUS

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	35,874,218,761	100 Persen	43,412,960,150	100 Persen	79,287,178,911	SETDAKO
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	12 titik wilayah	18,984,219,646	12 titik wilayah	23,879,077,939	12 titik wilayah	42,863,297,585	SETDAKO
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan daerah	8 Hari Besar	3,233,902,000	8 Hari Besar	3,642,503,100	8 Hari Besar	6,876,405,100	SETDAKO
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	45 Qanun	1,758,675,000	45 Qanun	2,356,886,400	45 Qanun	4,115,561,400	SETDAKO
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23,243,448,084	100 Persen	26,747,794,586	100 Persen	49,991,242,670	SETWAN
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	6,399,366,500	100 Persen	7,674,266,500	100 Persen	14,073,633,000	SETWAN
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,737,587,058	100 Persen	8,337,337,402	100 Persen	16,074,924,460	BAPPEDA
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	1,799,458,868	100 Persen	2,195,013,958	100 Persen	3,994,472,826	BAPPEDA
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	3,216,584,460	100 Persen	3,791,972,761	100 Persen	7,008,557,221	BAPPEDA

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	60 Persen	693,410,000	75 Persen	838,520,500	75 Persen	1,531,930,500	BAPPEDA
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	15,611,589,865	100 Persen	15,615,126,154	100 Persen	31,226,716,019	BPKD
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	5,382,572,600	WTP Opini	4,726,494,227	WTP Opini	10,109,066,827	BPKD
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik	64 Dokumen	2,367,355,300	64 Dokumen	2,638,147,227	64 Dokumen	5,005,502,527	BPKD
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Besaran Penerimaan PAD	49.20 Milyar	2,170,296,200	49.20 Milyar	2,489,079,135	49.20 Milyar	4,659,375,335	BPKD
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8,298,059,928	100 Persen	9,952,544,716	100 Persen	18,250,604,644	BKPSDM
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	2,245,492,496		2,407,144,771		4,652,637,267	BKPSDM
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan	15.29 Persen	3,605,667,800	16.29 Persen	450,000,000	16.29 Persen	4,055,667,800	BKPSDM
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8,437,932,688	100 Persen	8,437,932,688	100 Persen	16,875,865,376	INSPEKTOR AT
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan	100%	240,500,000	100%	240,500,000	100%	481,000,000	INSPEKTOR AT
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase kasus pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	2,889,550,000	100%	2,889,550,000	100%	5,779,100,000	INSPEKTOR AT

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level kapabilitas APIP	3	794,989,000	3	794,989,000	3	1,589,978,000	INSPEKTOR AT
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat marturitas SIP Pemko Lhokseumawe	level 3	733,889,730	4 dengan catatat	733,889,730	4 dengan catatat	1,467,779,460	INSPEKTOR AT
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,578,430,414	100 Persen	2,779,690,327	100 Persen	5,358,120,741	B. SAKTI
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	244,330,000	12 Bulan	208,641,997	12 Bulan	452,971,997	B. SAKTI
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	8,295,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	18,295,000	B. SAKTI
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	72,000,000	B. SAKTI
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 gampong	40,376,950	18 gampong	40,160,000	18 gampong	80,536,950	B. SAKTI
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,147,286,607	100 Persen	2,322,456,103	100 Persen	4,469,742,710	B. MANGAT
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	10,000,000	B. MANGAT
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	271,217,629	12 Bulan	240,218,501	12 Bulan	511,436,130	B. MANGAT

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	30,000,000	B. MANGAT
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	20,000,000	B. MANGAT
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22 gampong	61,535,290	22 gampong	39,505,100	22 gampong	101,040,390	B. MANGAT
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,233,548,140	100 Persen	2,233,548,140	100 Persen	4,467,096,280	M. SATU
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	208,611,344	12 Bulan	208,611,344	12 Bulan	417,222,688	M. SATU
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	16,000,000	M. SATU
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	75,500,000	12 Bulan	75,500,000	12 Bulan	151,000,000	M. SATU
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 gampong	26,240,200	11 gampong	26,240,200	11 gampong	52,480,400	M. SATU
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,544,789,138	100 Persen	2,542,484,138	100 Persen	5,087,273,276	M. DUA
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	265,192,846	12 Bulan	265,192,846	12 Bulan	530,385,692	M. DUA

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	12 Bulan	22,590,050	12 Bulan	22,590,050	12 Bulan	45,180,100	M. DUA
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	23,500,000	12 Bulan	23,500,000	12 Bulan	47,000,000	M. DUA
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 gampong	41,167,100	17 gampong	41,167,100	17 gampong	82,334,200	M. DUA
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,657,415,579	100 Persen	2,748,743,572	100 Persen	5,406,159,151	KESBANGPOL
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	100 Persen	705,674,800	100 Persen	669,222,000	100 Persen	1,374,896,800	KESBANGPOL
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	90 Persen	160,257,800	90 Persen	111,156,000	90 Persen	271,413,800	KESBANGPOL
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan penyakit masyarakat	85 Persen	435,256,025	90 Persen	668,503,778	90 Persen	1,103,759,803	KESBANGPOL
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen	634,693,950	100 Persen	790,896,988	100 Persen	1,425,590,938	KESBANGPOL

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,206,925,677	100 Persen	3,429,442,187	100 Persen	6,636,367,864	DSI-PD
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,768,646,069	100 Persen	3,226,575,873	100 Persen	5,995,221,942	MPU
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,542,263,089	100 Persen	2,446,430,860	100 Persen	4,988,693,949	B. MAL
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1,424,481,804	100 Persen	1,564,651,004	100 Persen	2,989,132,808	MAA
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1,607,419,842	100 Persen	1,768,359,826	100 Persen	3,375,779,668	MPD
				Pembentukan Lembaga Perbankan Pembiayaan Syariah secara Profesional dan Mandiri	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyediaan Laporan pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe	12 Laporan	5,255,100,100	12 Laporan	1,280,000,000	12 Laporan	6,535,100,100	SETDAKO
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyediaan laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik / proyek	12 Laporan	266,648,400	12 Laporan	350,895,668	12 Laporan	617,544,068	SETDAKO
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	100 Persen	1,657,063,200	100 Persen	2,006,800,000	100 Persen	3,663,863,200	SETDAKO

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	237,108,525	80 Persen	237,108,525	80 Persen	474,217,050	KOMINFO
					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	1,851,559,475	100 Persen	1,851,559,475	100 Persen	3,703,118,950	KOMINFO
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	100 Persen	34,000,000	100 Persen	34,000,000	100 Persen	68,000,000	KOMINFO
		Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Meningkatkan ketertiban, pembinaan dan pengembangan politik masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam pemilu	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pemilih terhadap pemilu dan pilkada	0 Persen	35,537,500,000	75 Persen	773,192,800	75 Persen	36,310,692,800	KESBANGPOL
Total Misi 4								409,415,314,593		400,874,041,533		810,289,356,126	
Misi 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM le Beusare Rata	Peningkatan akses kebutuhan penduduk terhadap air minum	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan air yang tertampung	100 Persen	10,100,000,000	100 Persen	12,800,000,000	100 Persen	22,900,000,000	PUPR
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Cakupan penduduk berakses air minum	100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	2,320,000,000	100 Persen	3,420,000,000	PUPR
			Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat	Penanganan jumlah rumah yang tidak layak huni dan kawasan pemukiman kumuh	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan yang memiliki drainase / saluran pembuangan air	10.22 Persen	3,000,000,000	11.24 Persen	5,000,000,000	11.24 Persen	8,000,000,000	PUPR
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	0.32 Persen	3,800,000,000	0.35 Persen	3,800,000,000	0.35 Persen	7,600,000,000	PUPR

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan prasarana umum yang tersedia	80 Persen	18,781,984,621	90 Persen	19,290,027,620	90 Persen	38,072,012,241	PUPR
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	0.96 Persen	363,000,000	0.98 Persen	399,300,000	0.98 Persen	762,300,000	PUPR
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik yang handal	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan	Peningkatan ruas jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	92,222,477,388	81.5 Persen	91,852,498,624	81.5 Persen	184,074,976,012	PUPR
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	77.81 Persen	9,120,600,000	85.59 Persen	15,689,720,000	85.59 Persen	24,810,320,000	PUPR
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	cakupan bangunan gedung yang terbangun	80 Persen	4,000,000,000	80 Persen	4,000,000,000	80 Persen	8,000,000,000	PUPR
		Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	2,499,000,000	70 Persen	1,731,000,000	70 Persen	4,230,000,000	DISHUB
Total Misi 5								144,987,062,009		156,882,546,244		301,869,608,253	
Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan kawasan terbuka hijau	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan RTH dan pemeliharaan kawasan RTH	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada -	476,000,000	Ada -	473,000,000	Ada -	949,000,000	DLH
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	261,330,000	100 Persen	284,463,000	100 Persen	545,793,000	DLH
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	37.2 Ha	3,701,324,700	40.9 Ha	3,741,707,170	40.9 Ha	7,443,031,870	DLH

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12 Bulan	255,000,000	12 Bulan	280,000,000	24 Bulan	535,000,000	DLH
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	38,000,000	24 Bulan	73,000,000	DLH
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	11,000,000	24 Bulan	21,000,000	DLH
			Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang	Penyusunan perencanaan, dokumentasi dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah/kota;	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan penataan kawasan	0.083 Persen	2,025,600,000	0.086 Persen	3,025,920,000	0.086 Persen	5,051,520,000	PUPR
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	3.40 Persen	2,750,000,000	3.35 Persen	2,700,233,600	3.35 Persen	5,450,233,600	PUPR
		Terselenggaranya manajemen sampah kota	Peningkatan manajemen pengelolaan sampah	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan air limbah dan sarana prasarana lingkungan permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86.51 Persen	6,100,000,000	95.57 Persen	8,600,000,000	95.57 Persen	14,700,000,000	PUPR
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah B3 yang dikelola	100 Persen	2,015,000,000	100 Persen	2,216,500,000	100 Persen	4,231,500,000	DLH

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPK Penanggung Jawab
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	12 Bulan	111,000,000	12 Bulan	71,000,000	24 Bulan	182,000,000	DLH
				Relokasi TPA yang memiliki ramah lingkungan dan terjaminnya pengelolaan sampah yang baik	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	100 Persen	7,250,000,000	100 Persen	7,822,000,000		15,072,000,000	DLH
Total Misi 6								24,990,254,700		29,263,823,770		54,254,078,470	
Misi 7 : Mewujudkan ketentram, ketertiban, kedamaian dan persatuan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan perundangan	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Peningkatan patroli dan penerbitan qanun Syariat Islam	Meningkatkan ketertiban dalam menegakkan syariat islam	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	3,542,787,500	95 Persen	1,446,894,413	95 Persen	4,989,681,913	SATPOL
		Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penanggulangan kebakaran	100 Persen	600,600,000	100 Persen	225,600,000	100 Persen	826,200,000	BPBD
Total Misi 7								4,143,387,500		1,672,494,413		5,815,881,913	
Total								936,206,162,904		940,309,982,105			

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program-program yang mendukung Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih tahun 2017-2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Kerangka Pendanaan disusun dengan mengacu pada tabel T-C.15, oleh karena itu kerangka pendanaan pembangunan daerah yang telah dianggarkan untuk periode Tahun 2018 s.d Tahun 2020 yang bersifat realisasi dan penetapan APBK dapat dilihat pada tabel 7.1 dan untuk periode Tahun 2021 s.d Tahun 2022 yang bersifat proyeksi keuangan dapat dilihat 7.1.A berikut ini:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2018-2020
Pemerintah Kota Lhokseumawe

Nomor Urut	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	APBK Tahun 2020*)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	BELANJA DAERAH	870,168,392,236	775,480,033,294	873,465,604,518	932,428,473,462
2.1	Belanja Tidak Langsung	414,975,811,120	399,988,550,303	412,220,469,101	453,595,514,550
2.1.1	Belanja Pegawai	289,169,161,900	281,603,206,480	289,071,620,823	305,501,682,831
2.1.4	Belanja Hibah	6,478,342,693	7,607,600,000	6,228,895,000	15,866,498,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,870,270,130	8,159,430,000	7,695,849,500	10,489,512,500
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	928,342,379	973,164,381	-	6,381,491,785
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	109,323,295,018	101,336,724,357	109,096,151,414	114,256,329,434
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	206,399,000	308,425,085	127,952,364	1,100,000,000
2.2	Belanja Langsung	455,192,581,116	375,491,482,991	461,245,135,417	478,832,958,912
2.2.1	Belanja Pegawai	56,276,230,315	49,974,636,110	59,769,863,300	62,621,499,000
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	175,321,832,046	182,434,448,725	197,599,996,127	207,544,365,907
2.2.3	Belanja Modal	223,594,518,755	143,082,398,156	203,875,275,990	208,667,094,005
	JUMLAH BELANJA	870,168,392,236	775,480,033,294	873,465,604,518	932,428,473,462

Tabel 7.1.A
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2021-2022
Pemerintah Kota Lhokseumawe

NO.	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		RPJM	Perubahan RPJM	RPJM	Perubahan RPJM
5.	BELANJA DAERAH	815,902,219,980	936,206,162,904	824,077,422,006	940,309,982,105
5.1.	Belanja Operasi	570,012,465,753	620,503,482,770	575,320,271,193	600,711,358,981
5.1.1.	Belanja Pegawai	317,100,786,390	350,326,261,377	320,271,794,254	368,892,574,446
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	246,253,204,099	177,732,975,055	248,871,214,156	204,169,623,808
5.1.5.	Belanja Hibah	3,692,700,900	51,692,496,025	3,508,065,855	16,359,822,900
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2,965,774,365	40,751,750,313	2,669,196,928	11,289,337,828
5.2.	Belanja Modal	131,303,139,812	193,964,858,916	133,182,383,559	215,555,471,141
5.3.	Belanja Tak Terduga	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
5.4.	Belanja Transfer	113,486,614,415	120,637,821,219	114,474,767,254	122,943,151,983
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	3,648,178,362	6,381,491,785	3,757,623,713	6,700,566,374
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	109,838,436,052	114,256,329,434	110,717,143,541	116,242,585,609
	JUMLAH BELANJA	815,902,219,980	936,206,162,904	824,077,422,006	940,309,982,105

Selanjutnya Program-program yang mendukung Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih tahun 2017-2022 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Rencana Program-Program yang telah direalisasikan untuk periode Tahun 2018 s.d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini:

TABEL 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PERIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2018 - 2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD								Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja s.d 2020				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	TOTAL BELANJA			348,017,286,717.16		411,313,322,471.62		499,844,353,725.00		475,983,414,916.20		1,387,141,091,112.82			
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			129,807,035,153.16		244,872,336,498.62		295,727,628,323.00		291,816,072,606.00		832,416,037,427.62			
1 01	Bidang Pendidikan			57,347,611,044.00		45,318,010,677.00		70,460,940,605.00		68,821,330,892.00		184,600,282,174.00	DINAS PK		
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	10,913,878,521	100%	8,504,713,897	100%	11,283,761,135	100%	12,282,740,000	100%	32,071,215,032	DINAS PK		
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	415,436,000	100%	636,979,000	100%	307,750,000	100%	5,100,118,892	100%	6,044,847,892	DINAS PK		
1 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	75,000,000	100%	57,125,000	100%	186,125,000	100%	35,000,000	100%	278,250,000	DINAS PK		
1 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti			5 Kegiatan	29,350,000		-		5 Kegiatan		29,350,000	DINAS PK		
1 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2	3,200,000	100%	1,200,000	100%	81,200,000	100%	1,200,000	300%	83,600,000	DINAS PK		
1 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	1 Kegiatan	267,600,000		-	1 Kegiatan	296,839,000	1 Kegiatan	500,000,000	3 Kegiatan	796,839,000	DINAS PK		
1 01 10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD			1 Dokumen	6,560,000	1 Dokumen	2,560,000		2 Dokumen		9,120,000	DINAS PK		
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD dengan Akreditasi B	10%	1,837,561,600	20%	1,681,315,200	35%	3,984,405,338	50%	4,924,586,000	50%	10,590,306,538	DINAS PK		
1		Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	30%		40%		50%		60%		60%	-	DINAS PK		
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI	93.66%	42,088,744,243	80.59%	33,454,419,180	91.83%	51,049,809,947	99.36%	42,184,500,000	99.36%	126,688,729,127	DINAS PK		
1		Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs	79.05 %		73.28%		86.95%		86.38%		86.38%	-	DINAS PK		
1 01 17	Program Pendidikan Menengah	Persentase Angka partisipasi Murni SMA/SMK/MA	90.00%	639,207,680	92%	802,036,400	0.00	-	0.00	92%		802,036,400	DINAS PK		
1 01 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	100%	46,208,000	100%	69,312,000	0.00	-	0.00	100%		69,312,000	DINAS PK		
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	10%	1,060,775,000	30%	75,000,000	40%	645,627,523	0.50	2,150,120,000	0.50	2,870,747,523	DINAS PK		
		Persentase Pengawas Sekolah yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah	10%		85%		85%		85%		85%	-	DINAS PK		
		Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru	20%		10%		15%		20%		20%	-	DINAS PK		
		Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan	30%		40%		50%		60%		60%	-	DINAS PK		
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	10%				100%	60,000,000	100%	1,045,500,000	100%	1,105,500,000	DINAS PK		
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Cakupan Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi "B"					20%	2,562,862,662	35%	597,566,000	35%	3,160,428,662	DINAS PK		
1 01	Bidang Pendidikan									225,847,600.00		225,847,600.00	Sekretariat MPD		
1 01 27	Program Peningkatan Kapasitas Majelis Pendidikan Daerah	Cakupan Peningkatan Kpasitas Majelis Pendidikan Daerah	-		-		-		100	225,847,600	100	225,847,600	Sekretariat MPD		
1 02	Bidang Kesehatan			55,079,598,881.16		53,608,459,119.62		46,298,475,866.00		54,053,891,180.00		153,960,826,165.62	DINKES		
1 02 01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100 %	5,306,609,512	100	5,094,553,537	100	6,184,419,255	100	7,279,123,000	100	18,558,095,792	DINKES		
1 02 02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana	100 %	632,597,600	100	872,461,720	100	833,619,290	100	1,349,269,290	100	3,055,350,300	DINKES		
1 02 03	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin Aparatur	-	-	-	-	100 %	815,491,000	-	-	100	815,491,000	DINKES		
1 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	-	-	-	-	2 Kegiatan	75,297,900	2 Kegiatan	9,000,000	4 Kegiatan	84,297,900	DINKES		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen SPM (Standar Pelayanan Minimum) SKPD	-	-	-	-	1 Dokumen	17,330,000	-	-	1 Dokumen	17,330,000	DINKES		
1 02 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	1 Dokumen	2,200,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,180,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Kegiatan	3,580,000	DINKES		
1 02 15	Program Obat dan perbekalan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Obat dan Perbekalan kesehatan	12 Bulan	2,647,530,902	12 Bulan	2,179,970,988	12 Bulan	3,304,443,000	12 Bulan	2,900,023,000	36 Bulan	8,384,436,988	DINKES		
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	2 PKM	20,206,065,626	3 PKM	29,583,889,325	1 PKM	20,098,523,215	1 PKM	18,320,674,000	5 PKM	68,003,086,540	DINKES		
1 02 17	Program pengawasan obat dan makanan	Persentase Kecamatan /Desa sehat	5 %	375,000,000	5 %	243,750,000	5 %	133,945,000	5 %	365,552,000	5 %	743,247,000	DINKES		
1 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-	-	4 Kecamatan	616,625,750	4 Kecamatan	488,594,000	4 Kecamatan	1,222,700,000	4 Kecamatan	2,327,919,750	DINKES		
1 02 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100 %	1,040,878,653	100%	1,451,104,688	100%	1,308,744,834	100%	1,321,112,000	100%	4,080,961,522	DINKES		
1 02 21	Program pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa yang melaksanakan STBM	22 %	121,093,400	4.4 %	607,732,580	26.5%	147,318,137	47.1%	1,056,150,000	47.1%	1,811,200,717	DINKES		
1 02 22	Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC-BTA Positif	7.94 %	1,749,815,458	6.33%	1,146,965,300	9.2%	723,326,000	7%	2,331,114,000	7%	4,201,405,300	DINKES		
1 02 23	Program standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya	32.6 %	18,508,191	36.2%	188,907,450	12.9%	187,340,000	70.6%	104,000,000	70.6%	480,247,450	DINKES		
1 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan	20 %	20,809,871,265	40%	5,607,497,940	20%	6,963,629,235	20%	14,495,063,946	20%	27,066,191,121	DINKES		
1 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Optimalisasi sarana dan prasaranan Kesehatan	20 %	20,284,876	40%	2,915,300	20%	4,172,000,000	20%	1,700,000,000	20%	5,874,915,300	DINKES		
1 02 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	1.5 %	108,750,000	1.0%	315,344,400	0.5%	135,650,000	0.4%	135,000,000	0.4%	585,994,400	DINKES		
1 02 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	91.5 %	1,232,815,050	97.9%	600,787,000	-	-	-	-	97.9%	600,787,000	DINKES		
1 02 30	Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan desa dengan Posyandu Lansia	-	-	100%	185,705,000	-	-	100%	88,050,000	100%	273,755,000	DINKES		
1 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Persen 141 (6/4.269x100.00 LH)	430,773,200	119 (5/4199x100.00 LH)	3,984,981,142	142 (6/4215x100.00 LH)	163,455,000	142 (6/4215x100.00 LH)	137,800,000	142 (6/4215x100.00 LH)	4,286,236,142	DINKES		
1 02 34	Program Evaluasi pengendalian dan Pelaporan	Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan	12 bln	376,805,148	12 bln	924,067,000	12 bln	414,050,000	12 bln	673,159,944	36 bln	2,011,276,944	DINKES		
1 02 35	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Paramedis serta Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mempunyai STR	-	-	-	-	1125 Jumlah	130,120,000	1138 Jumlah	564,900,000	1138 Jumlah	695,020,000	DINKES		
1 03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1,929,587,925.00		89,560,467,094.00		122,026,027,408.00		117,041,186,390.00		328,627,680,892.00	PUPR		
1 03. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	917,362,925.00	100 %	1,078,875,775	100 %	1,305,616,325	100 %	1,093,790,000	100 %	3,478,282,100	PUPR		
1 03. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,012,225,000.00	100 %	1,070,725,000	100 %	459,083,000	100 %	1,869,700,000	100 %	3,399,508,000	PUPR		
1 03. 00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-	100 %	128,107,690	-	-	100 %	128,107,690	PUPR		
1 03. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR		
1 03. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyediaan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR		
1 03. 7	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen Perencanaan SKPK	-	-	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	5,000,000	PUPR		
1 03. 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR		
1 03. 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	58.1%	-	62.20	48,712,579,211	66.60	70,474,301,233	71.20	79,528,115,390	71.20	198,714,995,834	PUPR		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	2.11%	-	2.54	-	3.04	-	3.65	-	-	-	PUPR		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD								Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja s.d 2020				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			8.9%		10.67			12.80			15.37			-	PUPR
1 03. 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	53.15%		58.46	8,542,516,500	64.31		20,453,525,523	70.74	7,429,000,000	70.74	36,425,042,023		PUPR
1 03. 17	Program Pembangunan Turap/Talup/Bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	41.27%		51.27	5,946,994,592	61.27		11,531,003,000	71.27	9,786,000,000	70.74	27,263,997,592		PUPR
1 03. 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	58.14%		63.95	715,713,371	70.35		-	77.38	97,700,000	77.38	813,413,371		PUPR
1 03. 26	Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan Air yang tertampung			100 %	50,000,000	100 %		655,000,000	-	-	100 %	705,000,000		PUPR
1 03. 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal berakses air minum/air bersih	4.82 %		4.96	21,277,133,650	80.00		11,565,783,500	90.00	15,694,581,000	90.00	48,537,498,150		PUPR
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	66 %		70.62		75.56			80.85				-	PUPR
1 03. 28	Program Pengendalian Banjir	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	44.64 %		40.18	85,710,995	36.16		-	32.54	-	40.18	85,710,995		PUPR
1 03. 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Cakupan penanganan kawasan kumuh	81.3 Ha		76.40	2,078,318,000	16.80		5,381,707,137	13.80	1,045,100,000	13.80	8,505,125,137		PUPR
1 03. 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan dokumen Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	2 Dokumen		70,000,000	3 Dokumen	496,000,000	5 Dokumen	566,000,000		PUPR
1 03. 32	Program Pemanfaatan Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25.4 Ha	-	27.9 Ha	-	30.7 Ha	-	-	33.8 Ha	-	-	-		PUPR
1 03. 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.082 %	-	0.082 %	-	0.082 %	-	-	0.083 %	-	-	-		PUPR
		Ketaatan terhadap RTRW	3.28 %	-	3.28 %	-	3.29 %	-	-	3.3 %	-	-	-		PUPR
1 04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					42,665,361,720.00			46,463,848,219.00		39,286,918,458.00		128,416,128,397.00		PUPR
1 04. 15	Program pengembangan perumahan	Rasio rumah layak huni	0,22 Rasio		0,24	-	0,26		6,049,934,000	0,29	2,107,227,000	0,29	8,157,161,000		PUPR
		Rasio permukiman layak huni	0,87 Rasio		0,89		0,81			0,93			-		PUPR
1 04. 16	Program Lingkungan sehat Perumahan	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	1,89 Persen		1,51	15,455,522,496	1,21		7,560,630,402	0,97	10,913,261,220	0,97	33,929,414,118		PUPR
1 04. 21	Program Pembangunan sarana dan prasarana umum	Persentase PSU dalam kondisi baik	0,11 Persen		0,11	27,209,839,224	0,12		32,703,283,817	0,12	26,116,430,238	0,12	86,029,553,279		PUPR
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	2,82 Persen		1,97		1,38			0,97			-		PUPR
4 03. 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana	-		-		1 Kegiatan		150,000,000	3 Kegiatan	150,000,000	4 Kegiatan	300,000,000		PUPR
1 05	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					876,585,875.00			1,947,514,798.00		2,766,018,909.00		5,590,119,582.00		KESBANGPOL
1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	459,585,875	100%		505,544,463	100%	556,098,909	100%	1,521,229,247		KESBANGPOL
1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	98,600,000	100%		108,460,000	100%	119,306,000	100%	326,366,000		KESBANGPOL
1 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	80,000,000	100%		80,000,000	100%	80,000,000	100%	240,000,000		KESBANGPOL
1 05 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1 Dok	1,200,000	1 Dok		1,320,000	1 Dok	1,452,000	100%	3,972,000		KESBANGPOL
1 05 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			1 Keg	10,000,000	1 Keg		11,000,000	1 Keg	12,100,000	3 Keg	33,100,000		KESBANGPOL
1 05 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	7 Keg		427,525,775	6 Keg	323,600,000	13 Keg	751,125,775		KESBANGPOL
1 05 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			3 Keg	139,200,000	3 Keg		233,670,000	4 Keg	500,032,000	10 Keg	872,902,000		KESBANGPOL
1 05 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	1 Keg		80,550,000	3 Keg	331,600,000	4 Keg	412,150,000		KESBANGPOL
1 05 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	-		-	2 Keg	425,000,000	2 Keg	425,000,000		KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	05	21	Program pendidikan politik masyarakat	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			-	-	7 Keg	402,644,560	3 Keg	310,350,000	10 Keg	712,994,560	KESBANGPOL
1	05	23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan			2 Keg	88,000,000	2 Keg	96,800,000	2 Keg	106,480,000	6 Keg	291,280,000	KESBANGPOL
1	05		Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												SATPOL PP & WH
1	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4,185,215,172	100%	3,810,558,980	100%	4,069,155,760	100%	4,428,750,760	300%	12,308,465,500	SATPOL PP & WH
1	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	503,940,960	100%	327,900,000	100%	648,800,000	100%	213,800,000	100%	1,190,500,000	SATPOL PP & WH
1	05	03	Program Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	78,316,000	100%	117,474,000	100%	609,652,687	100%	497,732,876	100%	1,224,859,563	SATPOL PP & WH
1	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	3 Kegiatan	84,400,000	3 Kegiatan	121,467,000	3 Kegiatan	122,017,000	3 Kegiatan	72,867,000	9 Kegiatan	316,351,000	SATPOL PP & WH
1	05	07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	1,700,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	2,400,000	SATPOL PP & WH
1	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	-	-	1 Dokumen	5,200,000	1 Dokumen	5,200,000	1 Dokumen	5,200,000	3 Dokumen	15,600,000	SATPOL PP & WH
1	05	015	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kantrantibmas	50%	910,305,350	50%	1,749,921,280	80%	313,690,000	80%	660,808,000	80%	2,724,419,280	SATPOL PP & WH
1	05	016	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda/Qanun	25 %	346,900,000	50%	253,000,000	80%	164,150,000	80%	383,900,000	80%	801,050,000	SATPOL PP & WH
1	05	023	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	27.88 %	65,720,000	27.88	-	27.88%	80,300,000	0	-	27.88%	80,300,000	SATPOL PP & WH
1	06		Bidang Sosial			9,273,739,812.00		6,457,330,744.00		2,517,255,971.00		3,356,620,532.00		12,331,207,247.00	DINSOS
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	529,709,699	100%	500,462,324	100%	691,774,607	100%	621,413,350	100%	1,813,650,281	DINSOS
1	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	166,072,000	100%	90,830,000	100%	162,607,780	100%	211,910,982	100%	465,348,762	DINSOS
1	06	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	128,750,000	100%	120,000,000	100%	171,975,000	100%	145,000,000	100%	436,975,000	DINSOS
1	06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	100%	19,000,000	100%	9,000,000	100%	20,000,000	100%	48,000,000	DINSOS
1	06	07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	100%	1,300,000	100%	600,000	100%	495,000	100%	1,200,000	100%	2,295,000	DINSOS
1	06	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial	31.49 %	8,057,377,863	70%	5,165,628,010	60%	925,810,070	65%	272,900,000	65%	6,364,338,080	DINSOS
1	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100 %	117,450,000	50%	59,797,050	70%	230,323,750	90%	712,846,200	90%	1,002,967,000	DINSOS
1	06	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100 %	96,000,000	80%	184,000,000	80%	170,524,800	100%	659,200,000	100%	1,013,724,800	DINSOS
1	06	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang Menerima Bantuan	69 %	85,120,000	90%	112,710,000	90%	16,555,272	95%	66,300,000	95%	195,565,272	DINSOS
1	06	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penyandang penyakit sosial yang menerima jaminan sosial	100 %	-	100%	29,000,000	-	-	100%	43,250,000	100%	72,250,000	DINSOS
1	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanqap darurat	100 %	91,960,250	70%	175,303,360	80%	138,189,692	90%	602,600,000	90%	916,093,052	DINSOS
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			53,074,210,819.00		51,827,302,381.00		63,275,555,499.00		60,632,204,077.00		175,735,061,966.00	
2	01		Bidang Tenaga Kerja			1,441,076,800.00		1,732,405,960.00		1,246,955,175.00		1,092,271,400.00		4,071,632,535.00	DPMP TSP dan NAKER
2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	621,586,362	93.51%	690,460,960	96.29%	728,966,825	100%	690,722,600	100%	2,110,150,385	DPMP TSP dan NAKER
2	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	182,974,768	99.63%	154,020,000	96.01%	144,840,000	100%	89,200,000	100%	388,060,000	DPMP TSP dan NAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	-	-	-	-	99.26%	90,675,000	-	-	100%	90,675,000	DPMPTSP dan NAKER
2 01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	86.87%	45,000,000	86.87%	54,000,000	79.20%	67,000,000	100%	30,000,000	100%	151,000,000	DPMPTSP dan NAKER
2 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	450,000	2 Dokumen	250,000	2 Dokumen	1,200,000	2 Dokumen	1,200,000	6 Dokumen	2,650,000	DPMPTSP dan NAKER
2 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP dan NAKER
2 01 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	98.61%	291,420,230	98.61%	330,000,000	99.49%	117,950,000	100 %	160,148,800	100 %	608,098,800	DPMPTSP dan NAKER
2 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	96.33%	239,975,000	100 %	20,000,000	100 %	20,300,000	100 %	280,275,000	DPMPTSP dan NAKER
2 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan kerja	97.94%	299,645,440	97.94%	263,700,000	97.13%	76,323,350	85%	100,700,000	85%	440,723,350	DPMPTSP dan NAKER
2 02	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2,083,113,250.00		1,011,016,725.00		1,707,918,825.00		2,198,033,000.00		4,916,968,550.00	DP3AP2KB
2 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	622,522,375	100%	529,023,125	100%	565,948,625	100%	575,861,000	100%	1,670,832,750	DP3AP2KB
2 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	151,300,865	100%	97,858,000	100%	127,340,000	100%	94,240,000	100%	319,438,000	DP3AP2KB
2 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	50,000,000	100%	50,000,000	100%	94,330,000	100%	50,000,000	100%	194,330,000	DP3AP2KB
2 02 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	8,100,000	1 Dokumen	8,148,000	1 Dokumen	700,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	10,048,000	DP3AP2KB
2 02 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Menuju Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	-	-	0	-	27.27 %	87,665,000	33.33 %	40,406,000	33.33 %	128,071,000	DP3AP2KB
2 02 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	1,101,425,010	100 %	99,702,600	100 %	100,570,000	100 %	226,595,000	100 %	426,867,600	DP3AP2KB
2 02 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	-	-	20%	76,610,000	20 %	51,681,200	20 %	50,445,000	20 %	178,736,200	DP3AP2KB
2 02 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	75.3 %	149,765,000	75.3 %	149,675,000	75.3 %	679,684,000	75.3 %	1,159,286,000	75.3 %	1,988,645,000	DP3AP2KB
2 03	Bidang Pangan			2,311,330,899.00		2,692,947,480.00		2,602,857,665.00		3,064,580,450.00		8,360,385,595.00	DKPPP
2 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,153,603,800	100 %	1,003,034,184	100 %	1,198,222,665	100 %	1,322,855,450	100 %	3,524,112,299	DKPPP
2 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	160,155,000	100%	190,450,000	100%	449,500,000	100%	41,850,000	100%	681,800,000	DKPPP
2 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur					100%	141,085,000			100%	141,085,000	DKPPP
2 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	12 bln	15,000,000								-	DKPPP
2 03 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja dan Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	20 Buku	3,750,000	20 Buku	1,200,000	20 Buku	1,200,000	10 Buku	1,200,000	50 Buku	3,600,000	DKPPP
2 03 18	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani							1 Keg	200,650,000	1 Keg	200,650,000	DKPPP
2 03 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan	100 %	929,212,499	100%	1,373,919,296	100%	762,850,000	100%	1,291,700,000	100%	3,428,469,296	DKPPP
2 03 20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	516 %	49,609,600	100 %	124,344,000	100 %	50,000,000	100 %	206,325,000	100 %	380,669,000	DKPPP
2 04	Bidang Pertanahan			-		-		402,950,000.00		1,111,790,000.00		1,514,740,000.00	PERTANAHAN
2 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelengkapan Administrasi Perkantoran		-			100%	219,250,000	100%	363,590,000	100%	582,840,000	PERTANAHAN
2 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		-			100%	103,700,000	100%	566,000,000	100%	669,700,000	PERTANAHAN
2 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai		-			100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	160,000,000	PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target 12	Rp 13	
			Target 4	Rp 5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11			
2 04 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	-	-	-	-	-	-	100%	1,200,000	100%	1,200,000	PERTANAHAN
2 04 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Ketersediaan Data	-	-	-	-	-	-	100%	50,500,000	100%	50,500,000	PERTANAHAN
2 04 17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Laporan Konflik dan Sengketa Pertanahan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	100%	50,500,000	100%	50,500,000	PERTANAHAN
2 05	Bidang Lingkungan Hidup			23,505,102,489.00		27,976,857,230.00		27,611,514,531.00		28,423,343,092.00		84,011,714,853.00	DLH
2 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	19,030,668,599	100 %	20,557,419,300	100 %	21,652,263,426	100 %	21,703,710,092	100 %	82,944,061,417	DLH
2 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	2,609,618,780	100 %	2,973,320,980	100 %	3,037,646,605	100 %	2,259,600,000	100 %	10,880,186,365	DLH
2 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	77,100,000	100 %	493,729,392	100 %	474,068,000	100 %	398,958,000	100 %	1,443,855,392	DLH
2 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	-	-	0	-	1 Dokumen	3,300,000	-	-	1 Dokumen	3,300,000	DLH
2 05 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,600,000	1 Dokumen	3,650,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	9,650,000	DLH
2 05 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2 05 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	100 %	478,562,500	100 %	864,000,000	100 %	667,080,000	100 %	1,050,500,000	100 %	3,060,142,500	DLH
2 05 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	100 %	384,517,500	100 %	101,218,960	100 %	404,169,000	100 %	19,875,000	100 %	909,780,460	DLH
2 05 18	Program Rehabilitasi Dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	1	119,900,000	1	63,850,000	2	376,787,500	2	275,900,000	5	836,437,500	DLH
2 05 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Database Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	DLH
2 05 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	25.4 Ha	172,749,700	27.9 Ha	550,485,800	30.7 Ha	138,000,000	33.8 Ha	89,300,000	92.4 Ha	950,535,500	DLH
2 05 25	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Minimum	1	474,493,910	1	2,218,196,998	1	615,000,000	1	2,373,400,000	3	5,681,090,908	DLH
2 05 26	Program Peningkatan Keindahan dan Keresasian Kota	Cakupan Pelaksanaan Keindahan dan Keresasian Kota	1 Kecamatan	153,891,500	1 Kecamatan	150,985,800	2 Kecamatan	142,000,000	2 Kecamatan	200,400,000	2 Kecamatan	647,277,300	DLH
2 05 27	Program Normalisasi Jaringan Air Limbah	Cakupan Penanganan Limbah/Tinja	-	-	-	-	40 %	100,000,000	60 %	50,500,000	60 %	150,500,000	DLH
2 06	Bidang Administrasi Kependudukan			1,777,610,467.00		1,784,549,500.00		2,448,647,200.00		2,069,835,550.00		6,303,032,250.00	CAPIL
2 06 01	program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	758,927,017	100%	697,360,000	100%	750,590,200	100%	794,329,800	100%	3,001,207,017	CAPIL
2 06 02	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	106,989,000	100%	223,983,500	100%	146,420,000	100%	95,120,000	100%	572,512,500	CAPIL
2 06 03	program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	50,000,000	100%	50,000,000	100%	149,470,000	100%	50,000,000	100%	299,470,000	CAPIL
2 06 05	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	-	-	-	-	-	1 Keg	29,800,000	1 Keg	29,800,000	29,800,000	CAPIL
2 06 10	program penyusunan perencanaan satuan kerja perangkat kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,549,800	1 Dokumen	800,000	1 Dokumen	800,000	1 Dokumen	1,195,000	1 Dokumen	6,344,800	CAPIL
2 06 11	program peningkatan dan pengembangan pembangunan kota	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAPIL
2 06 15	program penataan administrasi kependudukan	Cakupan Penerbitan KTP	85 %	858,144,650	80%	812,406,000	85%	1,401,367,000	88%	1,099,390,750	88%	4,171,308,400	CAPIL
2 07	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			1,658,290,418.00		1,678,603,147.00		2,078,737,825.00		2,669,230,150.00		6,426,571,122.00	DPMG
2 07. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	581,432,998	100 %	549,553,522	100 %	685,955,200	100 %	613,444,050	100 %	2,430,385,770	DPMG
2 07. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	177,054,770	100 %	213,080,000	100 %	141,020,000	100 %	66,020,000	100 %	597,174,770	DPMG
2 07. 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur	-	-	-	-	100 %	70,525,000	-	-	100 %	70,525,000	DPMG
2 07. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	1 Kegiatan	7,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	20,000,000	3 Kegiatan	47,000,000	DPMG
2 07. 7	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,150,000	1 Dokumen	800,000	1 Kegiatan	800,000	1 Kegiatan	1,200,000	1 Kegiatan	4,950,000	DPMG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD								Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi kinerja s.d 2020				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2 07. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pengembangan Masyarakat Perdesaan	68 Gampong	448,906,500	68 Gampong	471,659,625	68 Gampong	200,000,000	68 Gampong	253,358,400	68 Gampong	1,373,924,525	DPMG		
2 07. 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan	-	-	-	100 %	143,998,950	100 %	361,557,100	100 %	505,556,050	DPMG			
2 07. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	371,894,775	100 %	433,510,000	100 %	328,000,000	100 %	412,178,000	100 %	1,545,582,775	DPMG		
2 07. 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	-	-	-	100 %	450,688,750	100 %	535,190,000	100 %	985,878,750	DPMG			
2 07. 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	11.78 %	69,851,375	-	12.3 %	47,749,925	12.4 %	406,282,600	12.4 %	523,883,900	DPMG			
2 08	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			1,692,693,700.00		2,363,202,800.00		2,490,673,900.00		2,928,270,100.00		7,782,146,800.00	DP3AP2KB		
2 08. 15	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah Anak per keluarga	2 org	1,421,786,000	2 org	2,103,512,800	2 org	2,263,815,000	2 org	2,652,554,000	6 org	7,019,881,800	DP3AP2KB		
2 08. 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pelayanan Reproduksi Remaja	70 %	165,624,100	70 %	100,000,000	70 %	99,017,000	70 %	135,613,000	70 %	334,630,000	DP3AP2KB		
2 08. 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Akseptor KB	-	-	81 %	50,000,000	81.6 %	59,691,100	81.78 %	60,458,100	81.78 %	170,149,200	DP3AP2KB		
2 08. 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Peserta KB Aktif	81.29 %	105,283,600	81.45 %	109,690,000	81.62 %	68,150,800	81.78 %	79,645,000	81.78 %	257,485,800	DP3AP2KB		
2 09	Bidang Perhubungan			5,073,813,950.00		2,872,885,400.00		7,961,866,900.00		5,449,789,400.00		16,284,541,700.00	DISHUB		
2 09. 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,351,628,350	100	1,481,042,900	100	1,700,331,300	100	1,467,778,200	100	4,649,152,400	DISHUB		
2 09. 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat	100 Persen	508,980,000	100	530,690,000	100	597,330,000	100	695,421,200	100	1,823,441,200	DISHUB		
2 09. 03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparat	100 Persen	21,000,000	-	100	113,040,000	100	-	100	113,040,000	DISHUB			
2 09. 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Kegiatan	-	-	5	-	5	-	5	-	DISHUB			
2 09. 07.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,950,000	1	1,450,000	1	-	1	770,000	2	2,220,000	DISHUB		
2 09. 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	0	-	DISHUB			
2 09. 10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) SKPD	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	DISHUB			
2 09. 15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat	60 Persen	43,570,000	60	35,730,000	60	30,500,000	60	24,000,000	60	90,230,000	DISHUB		
2 09. 16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ	12 Bulan	103,424,600	12	85,880,000	12	60,000,000	12	49,000,000	12	194,880,000	DISHUB		
2 09. 17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio Izin Trayek	0,009 Rasio	312,357,500	0	315,858,500	5	339,560,600	7	410,320,000	12	1,065,739,100	DISHUB		
2 09. 18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Uji Kir angkutan umum	0,80 Rasio	-	0,87	0,95	0,97	0,99	-	-	-	DISHUB			
2 09. 19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik	1 Sarana	1,479,906,000	1	120,894,000	1	2,595,030,000	1	1,760,700,000	1	4,476,624,000	DISHUB		
2 09. 21.	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi	36,8 Persen	1,249,997,500	40.11	226,340,000	43.72	2,421,075,000	47.66	1,041,800,000	56.62	3,689,215,000	DISHUB		
2 10	Bidang Komunikasi dan Informatika			2,268,430,780.00		1,026,900,380.00		3,394,215,265.00		1,594,638,926.00		6,015,754,571.00	DISKOMINFO		
2 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bln	302,441,880	12 bln	379,766,880	12 bln	404,576,265	12 bln	379,589,426	36 bln	1,163,932,571	DISKOMINFO		
2 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bln	221,640,000	12 bln	240,080,000	12 bln	311,580,000	12 bln	330,500,000	36 bln	882,160,000	DISKOMINFO		
2 10 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	12 bln	80,000,000	12 bln	80,000,000	12 bln	115,525,000	12 bln	80,000,000	36 bln	275,525,000	DISKOMINFO		
2 10 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	29,800,000	3 Kegiatan	109,800,000	DISKOMINFO		
2 10 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	12,488,500	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	14,888,500	DISKOMINFO		
2 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Kegiatan	1,484,748,900	1 Kegiatan	110,525,000	1 Kegiatan	1,678,000,000	1 Kegiatan	147,200,000	1 Kegiatan	1,935,725,000	DISKOMINFO		
2 10 17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Cakupan Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	1 Kegiatan	140,000,000	-	-	1 Kegiatan	140,000,000	DISKOMINFO		
2 10 18	Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media	Cakupan Kerjasama Informasi dengan Massa Media	-	-	-	-	1 Kegiatan	37,000,000	-	-	1 Kegiatan	37,000,000	DISKOMINFO		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab	
			Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp		
			Tahun 2017											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2 15	Bidang Persandian													DISKOMINFO
2 16	Bidang Kebudayaan			5,950,139,537.00		1,259,165,800.00		814,400,000.00		809,615,000.00		2,883,180,800.00		DINAS PK
16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	24%	4,228,336,100	24 %	22,000,000	24 %	460,000,000	24 %	358,550,000	24 %	840,550,000	24 %	DINAS PK
16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	3 event	18,400,000	3 event	500,000,000	30 event	50,000,000	35 event	50,450,000	68 event	600,450,000	68 event	DINAS PK
16 18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	2	330,663,437	2	544,402,800	3.00	304,400,000	3.00	400,615,000	8.00	1,249,417,800	8.00	DINAS PK
16 19	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola	2	1,372,740,000	2	192,763,000		-			2.00	192,763,000	2.00	DINAS PK
2 16	Bidang Kebudayaan			-		49,840,000.00		117,500,000.00		160,800,000.00		328,140,000.00		Sekretariat MAA
2 16 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pembinaan Adat Gampong	-	-	3 Keg	49,840,000	3 Keg	56,500,000	3 Keg	129,450,000	9 Kegiatan	235,790,000	9 Kegiatan	Sekretariat MAA
2 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pembinaan Adat Istiadat	-	-	-	120 Orang	31,000,000	100 Orang	31,350,000	220 org	62,350,000	220 org	62,350,000	Sekretariat MAA
2 16 19	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan	-	-	-	1 Pasang	30,000,000	-	-	1 Pasang	30,000,000	1 Pasang	30,000,000	Sekretariat MAA
2 17	Bidang Perpustakaan			521,481,605.00		511,622,630.00		2,173,410,180.00		2,702,290,800.00		5,387,323,610.00		PERPUS
2 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	404,991,605	100%	385,882,630	100%	435,267,680	100%	430,190,800	100%	1,251,341,110	100%	PERPUS
2 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	83,590,000	100%	69,740,000	100%	208,700,000	100%	168,700,000	100%	447,140,000	100%	PERPUS
2 17 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	100%	51,382,500	-	-	100%	51,382,500	-	-	PERPUS
2 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	5 keg	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PERPUS
2 17 07	Program Penyusunan Perencanaan SKPK	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	3,200,000	3 Dokumen	PERPUS
2 17 15	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah			3235 Orang	55,000,000	3235 Orang	1,477,060,000	3235 Orang	2,102,200,000	3235 Orang	3,634,260,000	3235 Orang	PERPUS
2 18	Bidang Kearsipan			-		-		55,000,000.00		71,000,000.00		126,000,000.00		PERPUS
2 18 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	-	-	-	15 OPD	15,000,000	-	-	15 OPD	15,000,000	15 OPD	15,000,000	PERPUS
2 18 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	-	-	-	60%	30,500,000	60%	30,500,000	60%	30,500,000	PERPUS
2 18 19	Program Peningkatan SDM Kearsipan	Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan	-	-	-	140 org	40,000,000	140 org	40,500,000	140 org	80,500,000	140 org	80,500,000	PERPUS
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			21,492,063,197.00		12,796,127,839.00		8,359,766,571.00		8,840,977,809.00		29,996,872,228.00		
3 01	Bidang Kelautan dan Perikanan			4,759,327,400.00		4,285,294,980.00		1,552,875,552.00		1,733,838,000.00		7,572,008,532.00		DKPPP
3 01 16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan			12 bln	125,000,000	12 bln	59,599,552	12 bln	30,500,000	36 bln	215,099,552	36 bln	DKPPP
3 01 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Cakupan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Kelautan			12 bln	184,500,000					12 bln	184,500,000		DKPPP
3 01 19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan	12 bln	114,294,800	12 bln	160,530,100					12 bln	160,530,100		DKPPP
3 01 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	1704 Ton	525,352,400	1704 Ton	963,862,161	1721 Ton	639,785,488	1738 Ton	389,902,500	5163 Ton	1,993,550,149	5163 Ton	DKPPP
3 01 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.48 %	3,384,147,100	6.54 %	2,305,553,889	6.61 %	494,752,012	6.68 %	962,235,500	19.83 %	3,762,541,401	19.83 %	DKPPP
3 01 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan Pemasaran Produksi Perikanan	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	180,080,000					1 Kegiatan	180,080,000		DKPPP
3 01 25	Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Dikembangkan	5 unit	715,533,100	5 unit	365,768,830	5 unit	198,742,500			10 unit	564,511,330		DKPPP
3 01 26	Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan					30	159,996,000	30	351,200,000	60	511,196,000	60	DKPPP
3 02	Bidang Pariwisata			294,420,000.00		727,991,000.00		234,247,000.00		348,599,800.00		1,310,837,800.00		DISPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 02 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23%	217,722,000	1.23%	641,994,000	1.23%	234,247,000	1.23%	151,400,000	1.23%	1,027,641,000	DISPORAPAR
3 02 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	24%	63,123,000	24%	85,997,000	-	-	-	-	24%	85,997,000	DISPORAPAR
3 02 17	Program Pengembangan Kemitraan	Kunjungan Wisata	44%	13,575,000	-	-	-	-	60%	197,199,800	60%	197,199,800	DISPORAPAR
3 03	Bidang Pertanian			2,607,757,100.00		1,428,898,750.00		1,464,924,010.00		1,932,900,000.00		4,826,722,760.00	DKPPP
3 03 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani	12 bln	1,084,969,600	12 bln	913,043,600	12 bln	47,000,000	12 bln	40,500,000	36 bln	1,000,543,600	DKPPP
3 03 17	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	8.2 %	745,500							0 %	-	DKPPP
3 03 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan	15873 Ton	1,269,824,000	15873 Ton	338,970,150	15905 Ton	1,174,020,557	15936.56 Ton	47714.56 Ton	1,512,990,707	DKPPP	
3 03 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Produktifitas Komoditas Pangan	0.002 %	144,090,000	0.002 %	9,285,000	0.002 %	40,003,453	0.002 %	1,180,500,000	0.006 %	1,229,788,453	DKPPP
3 03 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB							50 %	600,700,000	50 %	600,700,000	DKPPP
3 01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	0.73 %	108,128,000	0.73 %	167,600,000	0.736 %	203,900,000	0.742 %	111,200,000	2.208 %	482,700,000	DKPPP
3 04	Bidang Kehutanan												DKPPP
3 05	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral												PUPR
3 06	Bidang Perdagangan			10,236,850,608.00		5,925,326,500.00		2,908,620,000.00		3,447,440,000.00		12,281,386,500.00	DISKOP
3 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan serta Tera Ulang	-	-	3 Kegiatan	1,576,000,000	1 Kegiatan	52,395,000	1 Kegiatan	50,440,000	5 Kegiatan	1,678,835,000	DISKOP
3 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Informasi Harga Pasar Tentang Harga Pokok Barang Penting dan Strategis Serta Terlaksananya Pasar Rakyat	4 Kecamatan	10,236,850,608	1 Tahun	3,799,399,000	1 Tahun	2,456,225,000	1 Tahun	2,846,200,000	3 tahun	9,101,824,000	DISKOP
3 06 20	Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang	-	-	1 Kegiatan	549,927,500	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	550,800,000	3 Kegiatan	1,500,727,500	DISKOP
3 07	Bidang Perindustrian			3,593,708,080.00		428,616,600.00		2,199,100,000.00		1,378,200,000.00		4,005,916,600.00	DISKOP
3 07 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan UMKM	2,314	2,335,880,480	-	2,323	1,490,000,000	2,333	-	2,314	1,490,000,000	DISKOP	
3 07 20	Program Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Promosi Perdagangan dan Keikutsertaan Dalam Event Pameran Dagang	1	310,100,000									DISKOP
3 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	17.84 %	927,727,600	18.2 %	398,904,100	18.56 %	69,100,000	18.93 %	1,297,200,000	18.93 %	1,765,204,100	DISKOP
3 07 24	Program Peningkatan Mutu Industri	Persentase Kualitas Produk Industri yang Meningkat	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	29,712,500	-	-	1 Kegiatan	40,500,000	2 Kegiatan	70,212,500	DISKOP
3 07 25	Program Pengembangan dan Pembinaan Dekranasda	Persentase Pengrajin Binaan Yang Terbina	-	-	-	-	5 Kegiatan	640,000,000	1 Kegiatan	40,500,000	6 Kegiatan	680,500,000	DISKOP
3 08	Bidang Transmigrasi												-
4	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			143,643,977,539.00		101,817,555,744.00		132,481,403,323.00		114,694,160,415.20		348,993,119,491.20	
4 01	Bidang Administrasi Pemerintahan			25,863,473,694.00		29,752,993,654.00		52,370,866,240.00		43,930,040,896.00		126,053,900,790.00	SETDAKO
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	8,901,477,434	100 %	9,928,944,844	100 %	10,499,076,004	100 %	9,697,957,600	100 %	30,125,978,448	SETDAKO
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	4,864,648,250	100 %	3,764,049,110	100 %	6,691,257,491	100 %	6,042,559,750	100 %	16,497,866,351	SETDAKO
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	492,350,000	100 %	341,750,000	100 %	623,250,000	100 %	668,000,000	100 %	1,633,000,000	SETDAKO
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di Ikuti	5 Kegiatan	278,804,000	5 Kegiatan	288,099,000	8 Kegiatan	364,281,400	9 Kegiatan	392,907,500	22 Kegiatan	1,045,287,900	SETDAKO
4 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	1 Dokumen	58,726,620	1 Dokumen	54,905,000	1 Dokumen	68,594,600	1 Dokumen	63,697,600	3 Dokumen	187,197,200	SETDAKO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab		
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4	01	10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPI, LPPD, IKK, dan EKPOD	4 Dokumen	262,625,000	4 Dokumen	190,149,400	4 Dokumen	263,931,292	4 Dokumen	217,705,300	12 Dokumen	671,785,992	SETDAKO
4	01	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah	12 Bulan	591,672,500	12 Bulan	1,199,143,000	12 Bulan	975,202,776	12 Bulan	988,455,000	36 Bulan	3,162,800,776	SETDAKO
4	01	17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Informasi publik secara elektronik	12 Bulan	212,600,120	12 Bulan	371,980,500	12 Bulan	572,477,300	12 Bulan	582,233,200	36 Bulan	1,526,691,000	SETDAKO
4	01	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan kerjasama antar pemerintah daerah	1 Kegiatan	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	SETDAKO
4	01	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	12 Bulan	1,328,270,000	12 Bulan	1,633,216,400	12 Bulan	3,516,006,500	12 Bulan	3,099,750,000	36 Bulan	8,248,972,900	SETDAKO
4	01	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	12 Bulan	6,121,709,200	12 Bulan	8,992,388,000	12 Bulan	25,353,270,581	12 Bulan	18,145,129,646	36 Bulan	52,490,788,227	SETDAKO
4	01	29	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan pelaksanaan kegiatan keagamaan	12 Bulan	729,320,000	12 Bulan	887,270,000	12 Bulan	929,500,000	12 Bulan	940,516,000	36 Bulan	2,757,286,000	SETDAKO
4	01	30	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	12 Bulan	479,138,670	12 Bulan	554,880,800	12 Bulan	489,680,000	12 Bulan	542,548,400	36 Bulan	1,587,109,200	SETDAKO
4	01	31	Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesra	Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh	12 Bulan	87,072,500	12 Bulan	71,990,000	12 Bulan	421,323,296	12 Bulan	938,286,000	36 Bulan	1,431,599,296	SETDAKO
4	01	33	Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	12 Bulan	34,970,000	12 Bulan	21,000,000	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	35,800,000	36 Bulan	92,800,000	SETDAKO
4	01	34	Program Peringatan Hari-hari Besar	Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	8 Hari Besar	1,412,889,400	8 Hari Besar	1,453,227,600	8 Hari Besar	1,567,015,000	8 Hari Besar	1,574,494,900	24 Hari Besar	4,594,737,500	SETDAKO
4	01		Bidang Administrasi Pemerintahan			12,537,487,072.00		16,446,506,096.00		19,287,344,696.00		13,743,927,000.00		49,477,777,792.00	SETWAN
4	01.	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	6,071,657,496	100	7,059,699,336	100	7,362,874,696	100	5,358,413,150	100	19,780,987,182	SETWAN
4	01.	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur	100	1,539,661,151	100	2,068,473,810	100	2,727,509,626	100	1,867,195,000	100	6,663,178,436	SETWAN
4	01.	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparat	100	309,845,750	100	660,753,250	100	1,205,512,875	100	322,598,850	100	2,188,864,975	SETWAN
4	01.	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	5	263,750,000	5	475,000,000	-	-	-	-	5	475,000,000	SETWAN
4	01.	07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2	4,650,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,200,000	3	4,700,000	SETWAN
4	01.	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase anggota DPRK yang menjalankan Tugas	100	4,347,922,675	100	6,180,579,700	100	7,989,947,499	100	6,194,520,000	100	20,365,047,199	SETWAN
4	01		Bidang Administrasi Pemerintahan			248,197,900.00		273,462,800.00		434,871,400.00		409,901,950.00		1,118,236,150.00	Kec. Banda Sakti
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat	100 %	32,935,000	100%	37,700,000	100%	102,700,000	100%	106,700,000	100%	247,100,000	Kec. Banda Sakti
4	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparat	-	-	-	-	100%	75,562,500	-	-	100%	75,562,500	Kec. Banda Sakti
4	01	07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,048,900	1 Dokumen	848,800	1 Dokumen	999,900	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	3,048,700	Kec. Banda Sakti
4	01	08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Banda Sakti
4	01	09	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong	12 bln	91,014,000	12 bln	91,014,000	12 bln	91,014,000	12 bln	90,863,000	36 bln	272,891,000	Kec. Banda Sakti
4	01	28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	2 Kegiatan	122,200,000	2 Kegiatan	143,900,000	2 Kegiatan	164,595,000	2 Kegiatan	211,138,950	6 Kegiatan	519,633,950	Kec. Banda Sakti
				Cakupan pelaksanaan Saweu Gampong	18 Gampong		18 Gampong		18 Gampong		18 Gampong		18 Gampong		Kec. Banda Sakti
				Cakupan pelaksanaan Musrenbang	1 Kecamatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kec. Banda Sakti
4	01		Bidang Administrasi Pemerintahan			677,211,027.00		664,409,177.00		917,548,484.00		955,278,315.00		2,537,235,976.00	Kec. Blang Mangat
4	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	100%	411,970,802	100%	405,982,852	100%	475,492,809	100%	487,789,000	100%	1,781,235,463	Kec. Blang Mangat
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat	100%	26,760,000	100%	36,360,000	100%	91,760,000	100%	121,700,000	100%	276,580,000	Kec. Blang Mangat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	Target	Rp	Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	100%	80,600,000	-	100%	80,600,000	-	100%	80,600,000	Kec. Blang Mangat	
4 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	5,400,000	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	12,650,000	12,650,000	Kec. Blang Mangat	
4 01 09	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan kecamatan, mukim, gampong	12 bln	105,486,225	12 bln	106,016,325	12 bln	106,016,325	12 bln	105,867,725	36 bln	423,386,600	423,386,600	Kec. Blang Mangat	
4 01 28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/ Kel	2 Kegiatan	127,594,000	2 Kegiatan	111,000,000	2 Kegiatan	162,679,350	2 Kegiatan	238,721,590	6 Kegiatan	639,994,940	639,994,940	Kec. Blang Mangat	
4 01	Bidang Administrasi Pemerintahan			699,935,225.00		689,328,585.00		1,011,817,860.00		863,264,347.20		2,564,410,792.20	2,564,410,792.20	Kec. Muara Satu	
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	452,394,525	100 %	407,937,585	100 %	502,311,710	100 %	468,500,297	100 %	1,378,749,592	1,378,749,592	Kec. Muara Satu	
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	54,578,600	100 %	65,961,400	100 %	185,500,000	100 %	129,500,000	100 %	380,961,400	380,961,400	Kec. Muara Satu	
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	0 %	-	100 %	62,465,000	-	-	100 %	62,465,000	62,465,000	Kec. Muara Satu	
4 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,360,000	1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,198,240	3 Dokumen	3,598,240	3,598,240	Kec. Muara Satu	
4 01 09	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	100 %	71,600,000	100 %	90,907,500	100 %	90,907,500	100 %	90,140,750	100 %	271,955,750	271,955,750	Kec. Muara Satu	
4 01 28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan)	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	100 %	118,002,100	100 %	123,122,100	100 %	169,633,650	100 %	173,925,060	100 %	466,680,810	466,680,810	Kec. Muara Satu	
4 01	Bidang Administrasi Pemerintahan			696,731,835.00		789,293,444.00		1,707,845,546.00		894,001,590.00		3,391,140,580.00	3,391,140,580.00	Kec. Muara Dua	
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	398,729,050	100%	429,318,794	100%	665,648,918	100%	469,994,400	100%	1,963,691,162	1,963,691,162	Kec. Muara Dua	
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	93,746,000	100%	97,359,000	100%	269,180,378	100%	88,000,000	100%	548,285,378	548,285,378	Kec. Muara Dua	
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	-	100%	-	100%	69,517,500	100%	-	100%	69,517,500	69,517,500	Kec. Muara Dua	
4 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,650,000	1 Dokumen	1,550,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,165,000	3 Dokumen	7,365,000	7,365,000	Kec. Muara Dua	
4 01 09	Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	12 bln	87,066,800	12 bln	87,065,650	12 bln	87,065,650	12 bln	86,267,040	36 bln	347,465,140	347,465,140	Kec. Muara Dua	
4 01 28	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (Khusus Kecamatan)	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	100%	113,539,985	100%	174,000,000	100%	615,433,100	100%	248,575,150	100%	1,151,548,235	1,151,548,235	Kec. Muara Dua	
4 01	Bidang Administrasi Pemerintahan			15,754,979,706.00		11,272,291,835.00		3,126,148,588.00		5,980,317,000.00		20,378,757,423.00	20,378,757,423.00	BPBD	
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2,206,399,641	100%	2,461,447,163	100%	2,398,754,188	100%	2,445,317,000	100%	7,305,518,351	7,305,518,351	BPBD	
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	348,381,800	100%	421,430,600	100%	402,130,600	100%	341,300,000	100%	1,164,861,200	1,164,861,200	BPBD	
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	35,520,000	100%	54,036,000	100%	184,063,800	100%	116,500,000	100%	354,599,800	354,599,800	BPBD	
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	15,000,000	1 Kegiatan	15,000,000	15,000,000	BPBD	
4 01 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	1 Dokumen	4,450,000	1 Dokumen	1,700,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	1,200,000	1 Dokumen	4,100,000	4,100,000	BPBD	
4 01 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan pameran daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	
4 01 35	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin Kencang, Abrasi, dll	18.39%	13,160,228,265	18.39%	8,333,678,072	18.39%	140,000,000	18.39%	3,061,000,000	18.39%	11,534,678,072	11,534,678,072	BPBD	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	BPBD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 02	Bidang Pengawasan			61,832,431,438.00		2,514,342,620.00		3,346,481,420.00		3,644,937,730.00		9,505,761,770.00	INSPEKTORAT
4 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	60,613,787,600	100%	694,864,620	100%	783,444,520	100%	746,272,700	100%	2,224,581,840	INSPEKTORAT
4 02 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	82,415,750	100%	120,800,000	100%	290,000,000	100%	195,603,230	100%	606,403,230	INSPEKTORAT
4 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	110,000,000	100%	110,000,000	100%	198,660,000	100%	110,000,000	100%	418,660,000	INSPEKTORAT
4 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Yang Diikuti	5 Kegiatan	35,000,000	5 Kegiatan	65,800,000	5 Kegiatan	81,600,000	5 Kegiatan	116,542,200	15 Kegiatan	263,942,200	INSPEKTORAT
4 02 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	1,099,700	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	3,399,700	INSPEKTORAT
4 02 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP	65 LHP	950,910,988	150 LHP	1,393,930,200	140 LHP	1,821,504,400	110 LHP	2,258,819,600	400 LHP	5,474,254,200	INSPEKTORAT
4 02 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjurangan tenaga pemeriksa (auditor)	-	-	5 org	110,720,800	5 org	170,172,800	15 org	183,500,000	25 org	464,393,600	INSPEKTORAT
4 02 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah laporan pengawasan ASN	1 Laporan	37,917,100	1 Laporan	17,127,000	-	-	1 Laporan	33,000,000	2 Laporan	50,127,000	INSPEKTORAT
4 03	Bidang Perencanaan			5,268,372,739.00		4,803,561,188.00		4,873,350,192.00		4,221,108,598.00		13,898,019,978.00	BAPPEDA
4 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,138,454,880	100 %	1,003,350,220	100 %	1,142,912,579	100 %	1,020,570,000	100 %	3,166,832,799	BAPPEDA
4 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	597,661,900	100 %	487,449,947	100 %	900,260,079	100 %	176,539,466	100 %	1,564,249,492	BAPPEDA
4 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	-	100 %	-	100 %	101,500,000	100 %	-	100 %	101,500,000	BAPPEDA
4 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	5 Kegiatan	50,000,000	5 Kegiatan	32,470,000	5 Kegiatan	35,000,000	5 Kegiatan	44,700,000	15 Kegiatan	112,170,000	BAPPEDA
4 03 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	4,004,000	1 Dokumen	2,032,000	1 Dokumen	1,999,900	1 Dokumen	1,199,900	3 Dokumen	5,231,800	BAPPEDA
4 03 15	Program Pengembangan Data / Informasi	Keterbukaan informasi publik melalui website	Ada	217,223,900	Ada	142,382,550	Ada	150,174,800	Ada	293,101,600	Ada	585,658,950	BAPPEDA
4 03 16	Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan	5 Dokumen	85,566,075	-	-	-	-	5 Dokumen	40,500,000	1 Dokumen	40,500,000	BAPPEDA
4 03 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	1 Dokumen	-	1 Dokumen	53,096,150	-	-	-	-	1 Dokumen	53,096,150	BAPPEDA
4 03 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	1 Dokumen	387,798,400	1 Dokumen	488,897,766	1 Dokumen	225,496,366	1 Dokumen	347,100,000	3 Dokumen	1,061,494,132	BAPPEDA
4 03 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	9 Dokumen	2,389,158,259	9 Dokumen	1,780,031,230	9 Dokumen	1,465,859,243	9 Dokumen	1,464,139,732	27 Dokumen	4,710,030,205	BAPPEDA
4 03 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	0 Bulan	-	12 bln	195,479,900	12 bln	250,001,400	12 bln	188,845,000	36 bln	634,326,300	BAPPEDA
4 03 23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	12 Bulan	108,200,300	12 bln	116,550,650	12 bln	117,139,200	12 bln	82,713,900	36 bln	316,403,750	BAPPEDA
4 03 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	12 Bulan	99,850,000	12 bln	172,910,500	0	-	12 bln	211,259,000	24 bln	384,169,500	BAPPEDA
4 03 26	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Cakupan penyediaan laporan koordinasi pendanaan pembangunan daerah	4 Laporan	162,044,175	4 Laporan	328,910,275	4 Laporan	312,892,225	4 Laporan	190,400,000	12 Laporan	832,202,500	BAPPEDA
4 03	Program Khusus	Cakupan penyediaan Dokumen	1 Dokumen	28,410,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
4 03 30	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Cakupan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	-	-	-	50 %	170,114,400	55 %	160,040,000	55 %	330,154,400	BAPPEDA
4 04	Bidang Keuangan			-		10,078,481,787.00		10,856,568,462.00		10,124,298,700.00		31,059,348,949.00	BPKD
4 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	100%	2,320,096,294	100%	2,383,622,450	100%	2,323,837,000	100%	651,437,518	BPKD
4 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	100%	1,098,800,343	100%	1,890,131,762	100%	467,300,000	100%	93,416,200	BPKD
4 04 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	-	-	-	100%	230,717,500	100%	126,500,000	100%	126,500,000	BPKD
4 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	100%	-	-	-	-	-	100%	198,000,000	100%	198,000,000	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 04 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK			1 Dokumen	1,656,000	2 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	1,200,000	4 Dokumen	540,000	BPKD
4 04 15	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bln		12 bln	292,000,000	12 bln	293,981,100	12 bln	329,448,300	36 bln	102,267,578	BPKD
4 04 16	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	Besaran Penerimaan PAD	45,09 Milyar		43,05 Milyar	596,160,000	51,00 Milyar	716,783,000	44,28 Milyar	844,731,850	44,28 Milyar	222,784,700	BPKD
4 04 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dokumen		7 Dokumen	4,212,638,950	7 Dokumen	3,944,775,550	7 Dokumen	4,017,626,850	21 Dokumen	1,076,041,320	BPKD
4 04 18	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP		WTP	145,000,000	WTP	164,842,500	WTP	120,964,000	WTP	43,108,500	BPKD
4 04 19	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1,306,430,200	8 Dokumen	1,095,414,600	8 Dokumen	1,069,557,600	24 Dokumen	160,020,050	BPKD
4 04 20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 bln		12 bln	105,700,000	12 bln	119,800,000	12 bln	625,133,100	36 bln	175,785,300	BPKD
4 05	Bidang Kepegawaian			1,046,551,968.00		2,175,122,382.00		2,526,462,631.00		2,159,559,300.00		6,861,144,313.00	BKPSDM
4 05 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	663,803,618	100 %	616,562,080	100 %	716,772,080	100 %	695,762,159	100 %	2,029,096,319	BKPSDM
4 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	77,720,000	100 %	76,000,000	100 %	216,625,000	100 %	120,400,000	100 %	413,025,000	BKPSDM
4 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	-	100 %	128,960,000	-	-	-	128,960,000	BKPSDM
4 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	-	-	100 %	48,000,000	100 %	48,000,000	100 %	48,000,000	100 %	144,000,000	BKPSDM
4 05 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	3,650,000	1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,400,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	4,000,000	BKPSDM
4 05 15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	2.86 %	98,350,000	2.86 %	854,529,702	3.15 %	425,141,466	3.46 %	467,816,416	3.46 %	1,747,487,584	BKPSDM
4 05 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	203,028,350	12 Bulan	578,630,600	12 Bulan	989,564,085	12 Bulan	826,380,725	36 Bulan	2,394,575,410	BKPSDM
4 06	Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan			12,821,909,336.00		13,381,679,052.00		13,617,198,550.00		14,677,861,600.00		41,676,739,202.00	DSIPD
4 06 1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,383,372,162	100 %	465,914,500	100 %	642,831,500	100 %	522,500,000	100 %	1,631,246,000	DSIPD
4 06 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	628,440,000	100 %	145,782,900	100 %	1,833,907,900	100 %	61,300,000	100 %	2,040,990,800	DSIPD
4 06 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	90,000,000	100 %	90,000,000	100 %	189,742,500	100 %	90,000,000	100 %	369,742,500	DSIPD
4 06 7	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	1,950,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,199,900	3 Dokumen	7,199,900	DSIPD
4 06 15	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	12	7,468,728,484	12	7,248,177,902	12	5,612,395,000	12	4,712,600,900	36	17,573,173,802	DSIPD
4 06 16	Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Peran Ulama	Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam	12	2,824,418,690	12	1,734,759,000	12	2,803,821,650	12	2,828,044,200	36	7,366,624,850	DSIPD
4 06 21	Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Dayah	5	425,000,000	31	3,622,044,750	25	2,463,500,000	30	6,331,371,600	86	12,416,916,350	DSIPD
4 06 31	Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama	Jumlah Hafiz/Hafizah			15	70,000,000	20	20,000,000	10	100,490,000	45	190,490,000	DSIPD
4 06 32	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	Cakupan Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam					1	50,000,000	1	30,355,000	2	80,355,000	DSIPD
4 06	Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan			-		1,596,850,200.00		1,776,447,100.00		1,755,787,400.00		5,129,084,700.00	Sekretariat MPU
4 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-		100 %	1,407,620,200	100 %	1,516,138,325	100 %	1,534,683,425.00	100 %	4,458,441,950.00	Sekretariat MPU
4 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	-		100 %	70,500,000	100 %	103,600,000	100 %	82,600,000	100 %	256,700,000.00	Sekretariat MPU
4 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-		-	-	100 %	30,225,000	-	-	100 %	30,225,000.00	Sekretariat MPU
4 06 07	Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	-		100 %	500,000	100 %	800,000	100 %	1,200,000	100 %	2,500,000.00	Sekretariat MPU
4 06 31	Program Penyusunan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Pendidikan Agama	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Para Ulama	-		100 %	25,000,000	100 %	60,503,975	100 %	71,203,975	100 %	156,707,950.00	Sekretariat MPU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja s.d 2020		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 06 32	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	Cakupan Sosialisasi Hukum dan Fatwa Melalui Media Elektronik	-		100 %	17,600,000	100 %	25,400,000	100 %	25,600,000	100 %	68,600,000,000	Sekretariat MPU
4 06 46	Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Cakupan Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Keagamaan	-		100 %	75,630,000	100 %	39,779,800	100 %	40,500,000	100 %	155,909,800,000	Sekretariat MPU
4 06	Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan			5,623,021,700.00		6,128,625,670.00		15,020,747,000.00		9,887,009,280.00		31,036,381,950.00	Sekretariat Baitul Mal
4 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	435,930,700	100 %	474,320,970	100 %	539,548,620	100 %	723,069,100	100 %	1,736,938,690	Sekretariat Baitul Mal
4 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	114,360,000	100 %	69,360,000	100 %	89,360,000	100 %	58,700,000	100 %	217,420,000	Sekretariat Baitul Mal
4 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100 %	-	-	-	100 %	76,570,000	-	-	100 %	76,570,000	Sekretariat Baitul Mal
4 06 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen perencanaan SKPK	2 Dokumen	4,400,000	1 Dokumen	1,900,000	1 Dokumen	800,000	2 Dokumen	1,200,000	4 Dokumen	3,900,000	Sekretariat Baitul Mal
4 06 11	Program Pembinaan Keagamaan dan adat	Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal	1 Kegiatan	17,922,000	0	-	1 Kegiatan	17,922,000	1 Kegiatan	19,702,000	2 Kegiatan	37,624,000	Sekretariat Baitul Mal
4 06 47	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal	Jumlah penerimaan ZISWAF	8,60 Milyar	5,050,409,000	7 Milyar	5,583,044,700	8.8 Milyar	14,296,546,380	8.8 Milyar	9,084,338,180	8.8 Milyar	28,963,929,260	Sekretariat Baitul Mal
4 06	Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan			573,673,890.00		617,955,000.00		706,610,400.00		718,195,000.00		2,042,760,400.00	Sekretariat MAA
4 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	454,053,890	12 Bulan	486,365,000	12 Bulan	594,345,400	12 Bulan	568,795,000	36 Bulan	1,649,505,400	Sekretariat MAA
4 06 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	57,720,000	12 Bulan	81,300,000	12 Bulan	92,300,000	12 Bulan	93,200,000	36 Bulan	266,800,000	Sekretariat MAA
4 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	-	-	-	-	12 Bulan	19,165,000	12 Bulan	55,000,000	24 Bulan	74,165,000	Sekretariat MAA
4 06 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Skpk	4 Buku	1,900,000	4 Buku	400,000	5 Buku	800,000	5 Buku	1,200,000	14 Bulan	2,400,000	Sekretariat MAA
4 06 17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah	1 Keg	60,000,000	1 Keg	49,890,000	-	-	-	-	1 Keg	49,890,000	Sekretariat MAA
4 06	Bidang Bidang Keistimewaan dan Kekhususan			-		632,652,245.00		901,094,745.00		728,671,700.00		2,262,418,690.00	Sekretariat MPD
4 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100 %	425,452,245	100 %	549,934,745	100 %	493,026,700	100 %	1,468,413,690	Sekretariat MPD
4 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100 %	86,300,000	100 %	106,300,000	100 %	82,700,000	100 %	275,300,000	Sekretariat MPD
4 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	-	-	-	-	100 %	24,180,000	100 %	-	100 %	24,180,000	Sekretariat MPD
4 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang Di ikuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat MPD
4 06 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPK	-	-	1 Dokumen	1,100,000	1 Dokumen	800,000	1 Dokumen	1,200,000	3 Dokumen	3,100,000	Sekretariat MPD
4 06 08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pameran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat MPD
4 06 22	Program Perencanaan dan Pengawasan/Monitorin dan Evaluasi	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan	-	-	12 bln	119,800,000	12 bln	219,880,000	12 bln	151,745,000	36 bln	491,425,000	Sekretariat MPD

Selanjutnya Program-program yang mendukung Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih tahun 2017-2022 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Rencana program prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun indikasi rencana program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 7.2.A berikut ini:

TABEL 7.2 A
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2021 - 2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		8	9	
			Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL BELANJA DAERAH			936,206,162,904		940,309,982,105		1,876,516,145,009	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			551,584,044,891		562,700,808,919		1,114,284,853,810	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,022,215,321		2,224,634,853		4,246,850,174	MPD
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1,607,419,842	100 Persen	1,768,359,826	100 Persen	3,375,779,668	MPD
1 01 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	65 Persen	414,795,479	70 Persen	456,275,027	70 Persen	871,070,506	MPD
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			192,653,022,340		220,949,574,397		413,602,596,737	PK
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	144,687,677,954	100 Persen	165,970,881,397	100 Persen	310,658,559,351	PK
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	100 Persen	46,855,344,386	100 Persen	54,068,693,000	100 Persen	100,924,037,386	PK
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Guru Berjajazah S1/D4	100 Persen	750,000,000	100 Persen	500,000,000	100 Persen	1,250,000,000	PK
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berjajazah S1/D4	100 Persen	110,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	220,000,000	PK
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	85 Persen	250,000,000	85 Persen	300,000,000	85 Persen	550,000,000	PK
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			14,125,845,100		7,654,866,577		21,780,711,677	DSI-PD
1 01 07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Jumlah Dayah tipe "A"	15 Dayah	14,125,845,100	16 Dayah	7,654,866,577	31 Dayah	21,780,711,677	DSI-PD
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			104,393,326,370		112,735,440,724		217,128,767,094	DINKES
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	62,525,205,698	100 Persen	65,450,190,852	100 Persen	127,975,396,550	DINKES
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematiaan Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	40,513,660,672	0	46,130,843,872	0	86,644,504,544	DINKES
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.26 -	629,460,000	0.26 -	356,906,000	0.26 -	986,366,000	DINKES
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	80 Persen	205,000,000	100 Persen	225,500,000	100 Persen	430,500,000	DINKES
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Sehat	10.29 Persen	520,000,000	20.58 Persen	572,000,000	20.58 Persen	1,092,000,000	DINKES
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			140,205,660,756		158,802,462,346		299,008,123,102	PUPR
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	9,786,983,368	100 Persen	12,814,090,122	100 Persen	22,601,073,490	PUPR
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan air yang tertampung	100 Persen	10,100,000,000	100 Persen	12,800,000,000	100 Persen	22,900,000,000	PUPR
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan penduduk berakses air minum	100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	2,320,000,000	100 Persen	3,420,000,000	PUPR
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86.51 Persen	6,100,000,000	95.57 Persen	8,600,000,000	95.57 Persen	14,700,000,000	PUPR
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	77.81 Persen	9,120,600,000	85.59 Persen	15,689,720,000	85.59 Persen	24,810,320,000	PUPR
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	10.22 Persen	3,000,000,000	11.24 Persen	5,000,000,000	11.24 Persen	8,000,000,000	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		8	9		
				Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	cakupan bangunan gedung yang terbangun	80 Persen	4,000,000,000	80 Persen	4,000,000,000	80 Persen	8,000,000,000	PUPR
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan penataan kawasan	0.083 Persen	2,025,600,000	0.086 Persen	3,025,920,000	0.086 Persen	5,051,520,000	PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	76.2 Persen	92,222,477,388	81.5 Persen	91,852,498,624	81.5 Persen	184,074,976,012	PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	ketaatan terhadap RTRW	3.40 Persen	2,750,000,000	3.35 Persen	2,700,233,600	3.35 Persen	5,450,233,600	PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			22,944,984,621		23,489,327,620		46,434,312,241	PUPR
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	0.96 Persen	363,000,000	0.98 Persen	399,300,000	0.98 Persen	762,300,000	PUPR
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	0.32 Persen	3,800,000,000	0.35 Persen	3,800,000,000	0.35 Persen	7,600,000,000	PUPR
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan prasarana umum yang tersedia	80 Persen	18,781,984,621	90 Persen	19,290,027,620	90 Persen	38,072,012,241	PUPR
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7,983,488,014		5,746,733,895		13,730,221,909	BPBD
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,742,177,941	100 Persen	5,098,733,895	100 Persen	10,840,911,836	BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	18.39 Persen	1,640,710,073	18.39 Persen	422,400,000	18.39 Persen	2,063,110,073	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penanggulangan kebakaran	100 Persen	600,600,000	100 Persen	225,600,000	100 Persen	826,200,000	BPBD
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			14,533,556,188		12,132,024,921		26,665,581,109	SATPOL
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	10,990,768,688	100 Persen	10,685,130,508	100 Persen	21,675,899,196	SATPOL
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Qanun	90 Persen	3,542,787,500	95 Persen	1,446,894,413	95 Persen	4,989,681,913	SATPOL
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			52,721,946,181		18,965,743,586		71,687,689,767	DINSOS
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,731,527,881	100 Persen	4,020,783,456	100 Persen	7,752,311,337	DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	67 Persen	2,923,864,600	67 Persen	3,243,751,060	67 Persen	6,167,615,660	DINSOS
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	3,690,000,000	100 Persen	4,130,000,000	100 Persen	7,820,000,000	DINSOS
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 Persen	41,245,000,000	80 Persen	6,322,500,000	80 Persen	47,567,500,000	DINSOS
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 Persen	771,553,700	80 Persen	848,709,070	80 Persen	1,620,262,770	DINSOS
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	360,000,000	100 Persen	400,000,000	100 Persen	760,000,000	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		8	9			
				Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					123,694,900,846		128,628,129,213		252,323,030,059	
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6,404,290,224		6,543,128,404		12,947,418,628	DPMTSP
2	07	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,503,141,424	100 Persen	5,593,328,404	100 Persen	11,096,469,828			DPMTSP
2	07	02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	44,000,000	2 Dokumen	88,000,000			DPMTSP
2	07	03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70 Persen	418,848,800	70 Persen	428,000,000	70 Persen	846,848,800			DPMTSP
2	07	04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	49 Persen	130,300,000	70 Persen	140,000,000	70 Persen	270,300,000			DPMTSP
2	07	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja	78 Persen	198,000,000	78 Persen	216,800,000	78 Persen	414,800,000			DPMTSP
2	07	05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan	0	110,000,000	0	121,000,000	0	231,000,000			DPMTSP
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5,806,758,000		6,558,097,670		12,364,855,670	DINAS PP
2	08	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,309,758,000	100 Persen	3,693,097,670	100 Persen	7,002,855,670			DINAS PP
2	08	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	75.30 Persen	360,000,000	75.30 Persen	410,000,000	75.30 Persen	770,000,000			DINAS PP
2	08	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	20 Persen	460,000,000	20 Persen	500,000,000	20 Persen	960,000,000			DINAS PP
2	08	04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	23 Persen	500,000,000	25 Persen	500,000,000	25 Persen	1,000,000,000			DINAS PP
2	08	05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak	100 Persen	127,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	277,000,000			DINAS PP
2	08	06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	95 Persen	375,000,000	100 Persen	455,000,000	100 Persen	830,000,000			DINAS PP
2	08	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	76 Persen	675,000,000	100 Persen	850,000,000	100 Persen	1,525,000,000			DINAS PP
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7,446,747,676		8,330,708,134		15,777,455,810	DKPP
2	09	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,240,422,676	100 Persen	8,098,190,209	100 Persen	15,338,612,885			DKPP
2	09	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 Persen	206,325,000	100 Persen	232,517,925	100 Persen	438,842,925			DKPP
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					6,951,920,194		7,632,112,213		14,584,032,407	TANAH
2	10	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,371,305,194	100 Persen	4,808,435,713	100 Persen	9,179,740,907			TANAH
2	10	04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	80 Persen	350,000,000	83.33 Persen	385,000,000	83.33 Persen	735,000,000			TANAH
2	10	10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	0.14 Persen	300,000,000	0.14 Persen	330,000,000	0.14 Persen	630,000,000			TANAH
2	10	12 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	9.62 Persen	510,000,000	9.64 Persen	561,000,000	9.64 Persen	1,071,000,000			TANAH
2	10	13 PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	9.62 Persen	150,000,000	9.64 Persen	150,000,000	9.64 Persen	300,000,000			TANAH
2	10	14 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase peningkatan SDM Aparatur	90 Persen	757,615,000	90 Persen	833,376,500	90 Persen	1,590,991,500			TANAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		8	9		
				Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Cakupan pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	100 Persen	200,000,000	100 Persen	220,000,000	100 Persen	420,000,000	TANAH
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	80 Persen	313,000,000	83.33 Persen	344,300,000	83.33 Persen	657,300,000	TANAH
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			40,303,679,428		41,582,481,301		81,886,160,729	DLH
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	26,189,024,728	100 Persen	26,644,811,131	100 Persen	52,833,835,859	DLH
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada -	476,000,000	Ada -	473,000,000	Ada -	949,000,000	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	261,330,000	100 Persen	284,463,000	100 Persen	545,793,000	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	37.2 Ha	3,701,324,700	40.9 Ha	3,741,707,170	40.9 Ha	7,443,031,870	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan limbah B3 yang dikelola	100 Persen	2,015,000,000	100 Persen	2,216,500,000	100 Persen	4,231,500,000	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12 Bulan	255,000,000	12 Bulan	280,000,000	24 Bulan	535,000,000	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	38,000,000	24 Bulan	73,000,000	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	12 Bulan	111,000,000	12 Bulan	71,000,000	24 Bulan	182,000,000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan pengaduan lingkungan hidup	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	11,000,000	24 Bulan	21,000,000	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	100 Persen	7,250,000,000	100 Persen	7,822,000,000	100 Persen	15,072,000,000	DLH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11,365,783,718		13,196,297,039		24,562,080,757	CAPIL
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,005,655,218	100 Persen	8,926,853,414	100 Persen	15,932,508,632	CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	0.97 Persen	2,330,163,500	0.97 Persen	1,748,400,000	0.97 Persen	4,078,563,500	CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Akta Kelahiran	0.88 Persen	767,965,000	0.88 Persen	755,000,000	0.88 Persen	1,522,965,000	CAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada -	1,097,000,000	Ada -	1,601,043,625	Ada -	2,698,043,625	CAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan Data Kependudukan	90 Persen	165,000,000	90 Persen	165,000,000	90 Persen	330,000,000	CAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			6,335,413,210		7,315,930,854		13,651,344,064	DPGM
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,900,185,510	100 Persen	3,203,260,613	100 Persen	6,103,446,123	DPGM
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong	68 gampong	1,405,210,000	68 gampong	1,555,000,000	68 gampong	2,960,210,000	DPGM
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3 Kelompok	2,030,017,700	4 Kelompok	2,557,670,241	7 Kelompok	4,587,687,941	DPGM
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			3,056,167,700		3,295,948,300		6,352,116,000	DINAS PP
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	2 Persen	50,000,000	2 Persen	70,000,000	2 Persen	120,000,000	DINAS PP
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 Anak	2,902,046,000	2 Anak	3,116,648,300	2 Anak	6,018,694,300	DINAS PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		8	9		
				Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	81.94 Persen	104,121,700	82.11 Persen	109,300,000	82.11 Persen	213,421,700	DINAS PP
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			7,687,428,611		7,022,285,744		14,709,714,355	DISHUB
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,188,428,611	100 Persen	5,291,285,744	100 Persen	10,479,714,355	DISHUB
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	65 Persen	2,499,000,000	70 Persen	1,731,000,000	70 Persen	4,230,000,000	DISHUB
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5,511,747,630		5,511,747,630		11,023,495,260	KOMINFO
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,423,079,630	100 Persen	3,423,079,630	100 Persen	6,846,159,260	KOMINFO
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik	80 Persen	237,108,525	80 Persen	237,108,525	80 Persen	474,217,050	KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pelaksanaan E-Government	100 Persen	1,851,559,475	100 Persen	1,851,559,475	100 Persen	3,703,118,950	KOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5,888,201,443		6,473,717,588		12,361,919,031	DISKOP
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,291,561,443	100 Persen	5,817,413,588	100 Persen	11,108,975,031	DISKOP
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	30,000,000	40.37 Persen	33,000,000	40.37 Persen	63,000,000	DISKOP
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	40.09 Persen	20,000,000	40.37 Persen	22,000,000	40.37 Persen	42,000,000	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase BPR/LKM aktif	100 Persen	20,000,000	100 Persen	22,000,000	100 Persen	42,000,000	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	66,640,000	5 Persen	73,304,000	5 Persen	139,944,000	DISKOP
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro dan kecil	5 Persen	460,000,000	5 Persen	506,000,000	5 Persen	966,000,000	DISKOP
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			1,207,508,263		1,274,768,192		2,482,276,455	DPMTSP
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	371 Investor	387,408,263	389 Investor	447,032,863	760 Investor	834,441,126	DPMTSP
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	100 Persen	250,000,000	100 Persen	218,565,329	100 Persen	468,565,329	DPMTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lamanya proses perizinan	6 Hari	328,700,000	5 Hari	358,700,000	11 Hari	687,400,000	DPMTSP
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan dalam pengawasan	30 Perusahaan	169,400,000	30 Perusahaan	178,470,000	30 Perusahaan	347,870,000	DPMTSP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	12 Bulan	72,000,000	12 Bulan	72,000,000	24 Bulan	144,000,000	DPMTSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6,589,547,983		5,539,293,186		12,128,841,169	DISPORA
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,485,831,423	100 Persen	2,705,733,918	100 Persen	5,191,565,341	DISPORA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	91 Persen	1,011,035,000	98 Persen	911,035,000	98 Persen	1,922,070,000	DISPORA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	23 Cabor	2,962,681,560	23 Cabor	1,812,524,268	46 Cabor	4,775,205,828	DISPORA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembina pramuka yang dibina	100 Persen	130,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	240,000,000	DISPORA
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			34,000,000		34,000,000		68,000,000	KOMINFO
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	100 Persen	34,000,000	100 Persen	34,000,000	100 Persen	68,000,000	KOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1,313,430,102		2,625,000,000		3,938,430,102	PK
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	90 Persen	150,000,000	95 Persen	660,000,000	95 Persen	810,000,000	PK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		8	9	
					Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	80 Persen	150,000,000	80 Persen	650,000,000	80 Persen	800,000,000	PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah	85 Persen	150,000,000	85 Persen	205,000,000	85 Persen	355,000,000	PK
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45.45 Persen	250,000,000	45.45 Persen	250,000,000	45.45 Persen	500,000,000	PK
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Pengelolaan Museum	80 Persen	613,430,102	80 Persen	860,000,000	80 Persen	1,473,430,102	PK
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1,712,831,804		1,856,206,004		3,569,037,808	MAA
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1,424,481,804	100 Persen	1,564,651,004	100 Persen	2,989,132,808	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tokoh Adat	50 Persen	288,350,000	100 Persen	291,555,000	100 Persen	579,905,000	MAA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5,579,444,860		3,572,286,000		9,151,730,860	ARPUS
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,236,184,860	100 Persen	2,874,536,000	100 Persen	6,110,720,860	ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3235 Orang	2,343,260,000	3261 Orang	697,750,000	6496 Orang	3,041,010,000	ARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			500,000,000		264,120,954		764,120,954	ARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	34 OPD	400,000,000	34 OPD	147,750,000	34 OPD	547,750,000	ARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	60 Persen	100,000,000	65 Persen	116,370,954	65 Persen	216,370,954	ARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			19,255,008,256		18,978,680,705		38,233,688,961	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7,048,038,000		7,121,543,205		14,169,581,205	DKPP
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	6.74 Persen	3,377,473,500	6.81 Persen	3,615,788,455	6.81 Persen	6,993,261,955	DKPP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	1756 Ton	2,993,702,500	1773 Ton	2,788,892,750	1773 Ton	5,782,595,250	DKPP
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	100,000,000	24 Bulan	160,000,000	DKPP
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	100 Persen	616,862,000	100 Persen	616,862,000	100 Persen	1,233,724,000	DKPP
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1,688,437,821		1,178,437,821		2,866,875,642	DISPORA
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	95,148,337	1.26 Persen	95,148,337	1.26 Persen	190,296,674	DISPORA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.23 Persen	807,589,684	1.26 Persen	547,589,684	1.26 Persen	1,355,179,368	DISPORA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kunjungan Wisata	17 Persen	785,699,800	17 Persen	535,699,800	17 Persen	1,321,399,600	DISPORA
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			4,023,626,000		4,129,541,000		8,153,167,000	DKPP
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	60 Persen	719,076,000	80 Persen	719,076,000	80 Persen	1,438,152,000	DKPP
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan prasarana pertanian/perkebunan	100 Persen	681,200,000	100 Persen	751,200,000	100 Persen	1,432,400,000	DKPP
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase sarana pendukung penyakit ternak	80 Persen	636,100,000	90 Persen	655,000,000	90 Persen	1,291,100,000	DKPP
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	0.002 Persen	1,987,250,000	0.002 Persen	2,004,265,000	0.002 Persen	3,991,515,000	DKPP
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			5,331,100,000		5,268,971,600		10,600,071,600	DISKOP
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4 Kec	1,096,100,000	4 Kec	1,572,050,000	4 Kec	2,668,150,000	DISKOP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		8	9	
					Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	4 Kec	430,000,000	4 Kec	473,000,000	4 Kec	903,000,000	DISKOP
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	21.89 Persen	680,000,000	21.89 Persen	1,255,000,000	21.89 Persen	1,935,000,000	DISKOP
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi Tera ulang	100 Persen	3,125,000,000	100 Persen	1,968,921,600	100 Persen	5,093,921,600	DISKOP
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,163,806,435		1,280,187,079		2,443,993,514	DISKOP
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	19.31 Persen	972,560,715	19.70 Persen	1,069,816,787	19.70 Persen	2,042,377,502	DISKOP
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang memiliki izin	30 Persen	50,000,000	30 Persen	55,000,000	30 Persen	105,000,000	DISKOP
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan data SINAS	12 Bulan	141,245,720	12 Bulan	155,370,292	24 Bulan	296,616,012	DISKOP
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			96,672,641,691		111,351,184,343		208,023,826,034	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			67,029,827,107		76,929,123,257		143,958,950,364	SETDAKO
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	35,874,218,761	100 Persen	43,412,960,150	100 Persen	79,287,178,911	SETDAKO
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	12 titik wilayah	18,984,219,646	12 titik wilayah	23,879,077,939	12 titik wilayah	42,863,297,585	SETDAKO
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan daerah	8 Hari Besar	3,233,902,000	8 Hari Besar	3,642,503,100	16 Hari Besar	6,876,405,100	SETDAKO
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	45 Qanun	1,758,675,000	45 Qanun	2,356,886,400	90 Qanun	4,115,561,400	SETDAKO
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyediaan Laporan pengendalian Inflasi di Kota Lhokseumawe	12 Laporan	5,255,100,100	12 Laporan	1,280,000,000	24 Laporan	6,535,100,100	SETDAKO
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyediaan laporan pengendalian pembangunan program dan kegiatan fisik/proyek	12 Laporan	266,648,400	12 Laporan	350,895,668	24 Laporan	617,544,068	SETDAKO
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase layanan Pengadaan secara elektronik	100 Persen	1,657,063,200	100 Persen	2,006,800,000	100 Persen	3,663,863,200	SETDAKO
4	02		SEKRETARIAT DPRD			29,642,814,584		34,422,061,086		64,064,875,670	SETWAN
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	23,243,448,084	100 Persen	26,747,794,586	100 Persen	49,991,242,670	SETWAN
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	100 Persen	6,399,366,500	100 Persen	7,674,266,500	100 Persen	14,073,633,000	SETWAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			53,128,074,575		53,441,380,851		106,569,455,426	
5	01		PERENCANAAN			12,753,630,386		14,324,324,121		27,077,954,507	BAPPEDA
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,737,587,058	100 Persen	8,337,337,402	100 Persen	16,074,924,460	BAPPEDA
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	90 Persen	1,799,458,868	100 Persen	2,195,013,958	100 Persen	3,994,472,826	BAPPEDA
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	100 Persen	3,216,584,460	100 Persen	3,791,972,761	100 Persen	7,008,557,221	BAPPEDA
5	02		KEUANGAN			25,531,813,965		25,468,846,743		51,000,660,708	BPKD
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	15,611,589,865	100 Persen	15,615,126,154	100 Persen	31,226,716,019	BPKD
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK laporan keuangan daerah	WTP Opini	5,382,572,600	WTP Opini	4,726,494,227	WTP Opini	10,109,066,827	BPKD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	2,367,355,300	64 Dokumen	2,638,147,227	128 Dokumen	5,005,502,527	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		8	9	
				Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Besaran Penerimaan PAD	49.20 Milyar	2,170,296,200	49.20 Milyar	2,489,079,135	49.20 Milyar	4,659,375,335	BPKD	
5 03	KEPEGAWAIAN			10,543,552,424		12,359,689,487		22,903,241,911	BKPSDM	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8,298,059,928	100 Persen	9,952,544,716	100 Persen	18,250,604,644	BKPSDM	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	2,245,492,496		2,407,144,771		4,652,637,267	BKPSDM	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3,605,667,800		450,000,000		4,055,667,800	BKPSDM	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15.29 Persen	3,605,667,800	16.29 Persen	450,000,000	16.29 Persen	4,055,667,800	BKPSDM	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			693,410,000		838,520,500		1,531,930,500	BAPPEDA	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	60 Persen	693,410,000	75 Persen	838,520,500	75 Persen	1,531,930,500	BAPPEDA	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			13,096,861,418		13,096,861,418		26,193,722,836		
6 01	INSPEKTORAT DAERAH			13,096,861,418		13,096,861,418		26,193,722,836	INSPEKTORAT	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	8,437,932,688	100 Persen	8,437,932,688	100 Persen	16,875,865,376	INSPEKTORAT	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100 Persen	2,889,550,000	100 Persen	2,889,550,000	100 Persen	5,779,100,000	INSPEKTORAT	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	240,500,000	100 Persen	240,500,000	100 Persen	481,000,000	INSPEKTORAT	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3 Level	794,989,000	4 dengan Catatan Level	794,989,000	4 dengan Catatan Level	1,589,978,000	INSPEKTORAT	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	3 Level	733,889,730	3 Level	733,889,730	3 Level	1,467,779,460	INSPEKTORAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			10,866,610,708		11,153,505,846		22,020,116,554		
7 01	KECAMATAN			2,907,432,364		3,074,492,324		5,981,924,688	B. SAKTI	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,578,430,414	100 Persen	2,779,690,327	100 Persen	5,358,120,741	B. SAKTI	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	244,330,000	12 Bulan	208,641,997	24 Bulan	452,971,997	B. SAKTI	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	8,295,000	12 Bulan	10,000,000	24 Bulan	18,295,000	B. SAKTI	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	36,000,000	12 Bulan	36,000,000	24 Bulan	72,000,000	B. SAKTI	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18 gampong	40,376,950	18 gampong	40,160,000	18 gampong	80,536,950	B. SAKTI	
7 01	KECAMATAN			2,510,039,526		2,632,179,704		5,142,219,230	B. MANGAT	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,147,286,607	100 Persen	2,322,456,103	100 Persen	4,469,742,710	B. MANGAT	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	24 Bulan	10,000,000	B. MANGAT	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	271,217,629	12 Bulan	240,218,501	25 Bulan	511,436,130	B. MANGAT	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	24 Bulan	30,000,000	B. MANGAT	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	24 Bulan	20,000,000	B. MANGAT	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		8	9		
				Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22 gampong	61,535,290	22 gampong	39,505,100	22 gampong	101,040,390	B. MANGAT
7	01		KECAMATAN			2,551,899,684		2,551,899,684		5,103,799,368	M. SATU
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,233,548,140	100 Persen	2,233,548,140	100 Persen	4,467,096,280	M. SATU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	208,611,344	12 Bulan	208,611,344	24 Bulan	417,222,688	M. SATU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	8,000,000	24 Bulan	16,000,000	M. SATU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	75,500,000	12 Bulan	75,500,000	24 Bulan	151,000,000	M. SATU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 gampong	26,240,200	11 gampong	26,240,200	11 gampong	52,480,400	M. SATU
7	01		KECAMATAN			2,897,239,134		2,894,934,134		5,792,173,268	M. DUA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,544,789,138	100 Persen	2,542,484,138	100 Persen	5,087,273,276	M. DUA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 Bulan	265,192,846	12 Bulan	265,192,846	24 Bulan	530,385,692	M. DUA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	22,590,050	12 Bulan	22,590,050	24 Bulan	45,180,100	M. DUA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	23,500,000	12 Bulan	23,500,000	24 Bulan	47,000,000	M. DUA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 gampong	41,167,100	17 gampong	41,167,100	17 gampong	82,334,200	M. DUA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			40,130,798,154		5,761,715,138		45,892,513,292	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			40,130,798,154		5,761,715,138		45,892,513,292	KESBANGPOL
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,657,415,579	100 Persen	2,748,743,572	100 Persen	5,406,159,151	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	100 Persen	705,674,800	100 Persen	669,222,000	100 Persen	1,374,896,800	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pemilih terhadap pemilu dan pilkada	0 Persen	35,537,500,000	75 Persen	773,192,800	75 Persen	36,310,692,800	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	90 Persen	160,257,800	90 Persen	111,156,000	90 Persen	271,413,800	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan penyakit masyarakat	85 Persen	435,256,025	90 Persen	668,503,778	90 Persen	1,103,759,803	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 Persen	634,693,950	100 Persen	790,896,988	100 Persen	1,425,590,938	KESBANGPOL
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN			27,777,222,365		35,197,715,672		62,974,938,037	
9	01		KEKHUSUSAN ACEH			3,402,109,599		3,883,298,373		7,285,407,972	MPU
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,768,646,069	100 Persen	3,226,575,873	100 Persen	5,995,221,942	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Peningkatan Sumber Daya Ulama	50 Persen	633,463,530	100 Persen	656,722,500	100 Persen	1,290,186,030	MPU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan s.d Tahun 2022		SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2021		Tahun 2022		8	9		
			Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	01	KEKHUSUSAN ACEH		10,090,887,089		14,510,991,605		24,601,878,694	B. MAL	
9	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,542,263,089	100 Persen	2,446,430,860	100 Persen	4,988,693,949	B. MAL
9	01	04 PROGRAM BAITUL MAL	Jumlah penerimaan ZISWAF	9.15 Milyar	7,548,624,000	9.24 Milyar	12,064,560,745	9.24 Milyar	19,613,184,745	B. MAL
9	01	KEKHUSUSAN ACEH		14,284,225,677		16,803,425,694		31,087,651,371	DSI-PD	
9	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,206,925,677	100 Persen	3,429,442,187	100 Persen	6,636,367,864	DSI-PD
9	01	02 PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafiz/Hafizah	12 Orang	11,077,300,000	15 Orang	13,373,983,507	27 Orang	24,451,283,507	DSI-PD

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran serta ukuran dalam mencapai keberhasilan atas visi dan misi kepala daerah terpilih 2017-2022. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Lhokseumawe diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dalam proses Perubahan RPJMK Lhokseumawe kali ini, beberapa indikator utama di OPD mengalami perubahan. Perubahan indikator terjadi di beberapa OPD dan secara umum disebabkan antara lain penyesuaian dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam OPD, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penambahan indikator baru sesuai kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun OPD tersebut antara lain:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator “Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi”.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan, Persentase Peningkatan Produksi Peternakan dan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Balita Gizi Buruk, Cakupan Desa Siaga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar dan beberapa indikator lainnya.
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Kasus Pengaduan yang Ditindak Lanjuti, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Level Kapabilitas APIP dan Tingkat Marturitas SPIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesbangpol Linmas Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPBD Kota Lhokseumawe berupa penambahan indikator Cakupan Penanggulangan Kebakaran.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 8.1 berikut ini:

TABEL 8.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017-2022

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022)
					2018		2019		2020		2021		2022		
					Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	DSI PD	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	50	54	54	57	56	61	0	66	0	70	0	0
	DSI PD	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam									70		80	80	
2	DSI PD	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	69	58	59	37	50	0	42	0	36	0	0
3	B. MAL	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)	Rp (milyar)	9	9	7	9	9	9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9
4	MAA	Cakupan pembinaan adat Gampong	Jumlah gampong	0	68	68	68	68	68	68	68	0	68	0	0
5	MAA	Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Bulan	12	12	12	12	12	12	-	12	-	12	-	-
6	BPS	Pertumbuhan PDRE	Persen	1.18	6.50	3.84	6.80	3.97	5.86	4.00	5.98	4.10	6.02	4.20	4.20
7	BPS	Pengendalian laju inflasi (disperindagkop)	Persen	5.60	2.80	2.05	2.60	1.20	2.42	1.95	2.25	1.40	2.09	1.30	1.30
8	BPS	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	11.98	9.50	11.81	9.30	11.18	9.28	11.00	9.26	10.80	9.24	10.80	10.80
9	BPS	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	10.51	10.40	12.52	10.33	11.06	10.28	11.05	9.56	11.04	9.49	11.03	11.03
10	BPS	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp (Juta)	1.01	1.04	10.86	1.08	11.42	1.12	11.82	1.16	1.16	1.20	1.20	1.20
11	DP3A P2KB	Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20	20	NA	20	20	20	20	40	25	40	30	30
12	Diskop	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2314	2314	3850	2323	5084	2333	2333	2342	2342	2351	2351	2351

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022)
					Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	BPS	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	17.84	18.20	NA	18.56	NA	18.93	18.93	19.31	19.31	19.70	19.70	19.70
14	Set dako	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Persen	-	-	-	-	-	-	80.00	-	80.00	-	90.00	90
15	DPM PTSP	Jumlah Investor	PMDN/ PMA	305	320	348	336	386	353	342	371	352	389	362	362
16	DPM PTSP	Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3387	3556.35	3656	3734.17	3838.8	3920.88	3.399	4116.92	3.409	4322.77	3.419	3
17	Dis Pora	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	1.09	1.12	NA	1.16	NA	1.19	1.19	1.23	1.23	1.26	1.26	1.26
18	Dis Pora	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	24.00	24.00	20.00	24.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	35.00	20.00	20.00
19	Dinsos	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31.49	31.49	80.00	32.12	80.00	32.76	32.76	33.42	33.42	34.09	34.09	34.09
20	Dinsos	Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	DKPP	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
22	DKPP	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
23	DKPP	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	6.48	6.54	6.61	6.61	6.68	6.68	6.75	6.74	6.81	6.81	6.88	6.88
24	DKPP	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8.20	8.20	8.20	8.27	8.33	8.33	8.40	8.40	8.47	8.47	8.53	8.53
25	DKPP	Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-	-	-	-	-	-	85	0	90	0	95	95
26	DKPP	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	-	-	-	-	-	-	95	-	98	-	100	100
27	DKPP	Persentase peningkatan produksi pertanian	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
29	BPS	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	75.78	76.31	76.62	76.84	77.30	77.38	77.38	77.92	77.92	78.47	78.47	78.47
	PK	Rerata nilai ujian nasional:													

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022)
					Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30	PK	-Rerata nilai ujian nasional SD/MI	Nilai	87	90	NA	90	NA	95	95	95	95	95	95	95
31	PK	-Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs	Nilai	56	75	NA	80	NA	85	95	90	95	95	95	95
	PK	Angka Partisipasi Kasar:													
33	PK	- APK SD/MI	Angka	106	106	95	106	94	106	100	106	100	106	100	100
34	PK	- APK SMP/MTs	Angka	101	101	112	101	97	101	100	101	100	101	100	100
	PK	Angka Partisipasi Murni:													
35	PK	- APM SD/MI	Angka	94	96	82	99	84	99	90	99	90	99	90	90
36	PK	- APM SMP/MTs	Angka	79	81	81	84	66	86	90	89	90	92	90	90
37	PK	Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15	15	NA	15	NA	16	16	16	16	16	16	16
38	PK	Rasio ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	51.90	51.38	NA	50.87	NA	50.61	50.61	50.36	0.00	50.11	0.00	0.00
39	Dis Pora	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	18	28	20	30	NA	30	5	32	7	32	7	7
40	DSI PD	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	14	15	15	16	16	17	14	18	15	19	16	16
41	Dinkes	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.05	71.16	NA	71.28	NA	71.39	71.39	71.51	71.51	71.62	71.62	71.62
42	Dinkes	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	2	3.00	2	1	1	1	0	0	0	0	0.00
43	Dinkes	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	50	60	6.33	70	9.2	80	80	90	90	100	100	100.00
44	Dinkes	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	NA	100	NA	100	100	100	0	100	0	0
45	Dinkes	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	5.78	6.18	2.5	6.62	14.6	7.08	15.62	7.58	16.72	8.11	17.89	17.89

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022)
					Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
46	Dinkes (Revisi)	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
47	Dinkes (Revisi)	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
48	Dinkes (Revisi)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
49	Dinkes	Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	91.50	81.5	92.00	56.2	92.50	92.50	93.00	93.00	100.00	100.00	100.00	100.00
50	Dinkes (Revisi)	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	81,1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
51	Dinkes (Revisi)	Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	57,8	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
52	Dinkes (Revisi)	Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
53	Dinkes (Revisi)	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	95,8	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
54	Dinkes (Revisi)	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	persen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
55	Dinkes (Revisi)	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	93,6	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
56	Dinkes (Revisi)	Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	88,6	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
57	Dinkes (Revisi)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	87,4	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
58	Dinkes (Revisi)	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	38	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
59	Dinkes (Revisi)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	85,4	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
60	Dinkes (Revisi)	Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0.02411	0	0.02411	0

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022)
					Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
61	Dinkes (Revisi)	Prevelensi Balita Gizi Kurang	persen	0.62	0	0	0	0	0	0	0	1.18129	0	1.18129	1
62	Dinkes (Revisi)	Cakupan Desa Siaga	jumlah	82	0	0	0	0	0	0	0	88	0	100	100
63	Setda	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	NA	C	NA	BB	CC	BB	B	B	B	B
64	Setda	Kategori hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	CC	CC	C	CC	BB	CC	BB	B	B	B	B
65	Setda	Kategori hasil evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
66	Setda	Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Persen	0	0	0	0	0	0	80	0	85	0	90	90
67	BPKD	Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68	Inspek torat	Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	-	-	-	-	-	-	100	0	100	0	88	88
69	Inspek torat	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	persen	-	-	-	-	-	-	100	0	100	0	100	100
70	Inspek torat	Level Kapabilitas APIP	level	-	-	-	-	-	-	3 level	-	3 level	-	4 dengan catatan level	4 dengan catatan level
71	Inspek torat	Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	level	-	-	-	-	-	-	3 level	-	3 level	-	3 level	3 level
72	Kominfo	Cakupan pengelolaan Website pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
73	Kominfo	Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	80	80	80	80	80	80	4.0	80	4.0	80	4.0	4.0
74	Kesbang Pol	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	40	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75
75	PUPR	Pencapaian target nasional 100-0-100	Persen	3.89-81.3-71.4	4.01-76.4-73.5	NA	4.13-16.8-75-7	NA	4.25-13.8-75.7	4.25-13.8-75.7	4.38-11.3-80.4	4.38-11.3-80.4	4.51-9.3-82.8	4.51-9.3-82.8	4.51-9.3-82.8

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2017)	2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022)
					Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
76	PUPR	Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih	Persen	3.89	4.96	NA	80.00	17.03	90.00	4.25	100.00	4.38	100.00	4.51	4.51
77	PUPR	Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah (Ha)	81.30	76.42	2.44	16.81	0.79	13.79	13.79	11.30	11.30	9.27	9.27	9.27
78	PUPR	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	6.98	7.68	3.64	8.45	3.67	9.29	4.25	10.22	4.38	11.24	4.51	4.51
79	PUPR	Kategori capaian kinerja infrastruktur publik	Absolut	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
80	PUPR	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	58.13	62.20	NA	66.55	NA	71.21	71.21	76.20	76.20	81.53	81.53	81.53
81	Dishub	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas	Persen	36.80	40.11	0.14	43.72	1.00	47.66	47.66	51.95	51.95	56.62	51.95	51.95
82	DLH	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0.69	0.75	NA	0.82	NA	0.98	0.98	1.15	1.15	1.36	1.36	1.36
83	DLH	Luasan RTH Publik 20%	Ha	25.40	27.94	25.40	30.73	25.50	33.81	0.00	37.19	0.00	40.91	0.00	0.00
84	DLH	Persentase sampah yang tertangani	Persen	71.40	74.97	81.53	78.72	81.00	82.65	82.65	86.79	86.80	91.13	92.00	92.00
85	PP WH	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio (Per 10.000)	58.76	52.88	NA	47.60	NA	42.84	42.84	38.55	38.55	34.70	34.70	34.70
86	PP WH	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	69	58	59	37	50	63	42	60	36	65	65
87	Kesbang Pol	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	40	-	100	70	73	-	-	-	-	-	-	-
88	PP WH	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	-	50	80	80	90	80	80	90	90	95	95	95
89	BPBD	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18.39	18.39	18.39	18.39	18.39	18.39	45.00	18.39	47.00	18.39	50.00	50.00
90	BPBD	Cakupan penanggulangan kebakaran	Persen	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100

Selanjutnya target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam bentuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe dalam proses Perubahan RPJMK Lhokseumawe kali ini, beberapa indikator di OPD mengalami perubahan indikator daerah. Perubahan Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut secara umum disebabkan antara lain penyesuaian dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam OPD, Lahirnya OPD Baru, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi serta penambahan indikator baru sesuai kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun OPD yang mengalami perubahan indikator tersebut antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan WH, Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Bappeda, BPKD, Inspektorat, MAA dan Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 8.2 berikut ini:

TABEL 8.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA LHOEKSEUMAWE
TAHUN 2017-2022

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ASPEK PELAYANAN UMUM													
1.			Layanan Urusan Wajib Dasar													
1.1.			Pendidikan													
1.1.	PK	1.	Persentase PAUD dengan Akreditasi B	Persen	10	20	NA	35	NA	50	50	70	70	90	90	90
1.1.	PK	2.	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	30	40	NA	50	NA	60	60	75	75	90	90	90
1.1.	PK	3.	Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI	Persen	93.66	96.5	81.81	99.36	84.47	99.36	90.00	99.36	90.00	99.36	90.00	90
1.1.	PK	4.	Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs	Persen	79.05	81.4	81.24	83.86	66.31	86.38	90.00	89.00	90.00	91.64	90.00	90
1.1.	PK	5.	Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik	Persen	10	30	NA	40	NA	50	50	60	60	70	70	70
1.1.	PK	6.	Persentase Pengawas Sekolah yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah	Persen	10	85	NA	85	NA	85	85	90	90	90	90	90
1.1.	PK	7.	Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru	Persen	20	10	NA	15	NA	20	30	40	40	70	70	70
1.1.	PK	8.	Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan	Persen	30	40	NA	50	NA	60	60	70	70	80	80	80
1.1.	PK	9.	Persentase Guru Berijazah S1/D4	Persen	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	100
1.1.	PK	10.	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persen	0	0	0	0	0	0	85	0	85	0	85	85
1.2.			Kesehatan													
2.	Dinkes	1.	Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.	Dinkes	2.	Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas	Persen	100	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	Dinkes	3.	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	2	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0
2.	Dinkes	4.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	12.13	100	11.12	100	9.38	100	100	100	100	100	100	100
2.	Dinkes	5.	Persentase Kecamatan/ desa sehat	Persen	5	5	0	5	0	5	5	5	5	5	5	5
2.	Dinkes	6.	Persentase pasar sehat	Persen	2	2	0	2	0	2	2	2	2	2	2	2
2.	Dinkes	7.	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat	Jumlah	0	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1
2.	Dinkes	8.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Dinkes	9.	Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT	Persen	80	80	100	80	100	85	85	90	90	95	95	95
2.	Dinkes	10.	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Persen	20	20	4.4	20	26.5	20	94	20	100	20	20	20
2.	Dinkes	11.	Persentase Desa ODF	Persen	20	20	1.5	20	7.4	20	9	20	15	20	20	20
2.	Dinkes	12.	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis	Persen	50	50	75	50	75	50	80	50	85	50	90	90
2.	Dinkes	13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	50	60	6.33	70	9.2	80	80	90	90	100	100	100
2.	Dinkes	14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Dinkes	15.	Cakupan Penderita diare yang ditangani	Persen	20	30	34.5	40	46.3	60	60	80	80	100	100	100
2.	Dinkes	16.	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	100	36.2	100	12.9	100	100	100	100	100	100	100
2.	Dinkes	17.	optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	Persen	50	80	70	80	75	80	80	100	100	100	100	100
2.	Dinkes	18.	Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus	Persen	50	80	1	80	0.5	80	80	80	80	80	80	80
2.	Dinkes	19.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	88	80	97.9	100	97.6	100	100	100	100	100	100	100
2.	Dinkes	20.	Cakupan Desa dengan posyandu lansia	Persen	0	80	100	85	100	90	90	95	95	100	100	100
2.	Dinkes	21.	Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia	Persen	0	80	100	85	100	90	90	95	95	100	100	100
2.	Dinkes	22.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Persen	1.8	0	119	0	142	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dinkes	23.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Persen	5	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dinkes	24.	Cakupan pelayanan Informasi kesehatan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.	Dinkes	25.	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	100	100
1.3.			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.3.	PUPR	1.	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	58.13	62.20	NA	66.55	NA	71.21	71.21	76.20	76.20	81.53	81.53	81.53
1.3.	PUPR	2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	2.11	2.54	0.54	3.04	1.37	3.65	3.65	4.38	4.38	5.26	5.26	5.26
1.3.	PUPR	3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	8.89	10.67	70.74	12.80	73.92	15.37	14.52	18.44	15.60	22.13	17.53	17.53
1.3.	PUPR	4.	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	53.15	58.46	70.74	64.31	73.92	70.74	70.74	77.81	77.81	85.59	85.59	85.59
1.3.	PUPR	5.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	41.27	51.27	71.27	61.27	81.27	71.27	71.27	81.27	81.27	91.27	91.27	91.27
1.3.	PUPR	6.	Persentase jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	58.14	63.95	26.23	70.35	67.48	77.38	77.38	85.12	85.12	93.64	93.64	93.64
1.3.	PUPR	7.	Persentase akses Air Minum/ air bersih	Persen	4.82	4.96	65.29	5.11	17.03	5.27	5.27	5.42	5.42	5.59	5.59	5.59
1.3.	PUPR	8.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	66.00	70.62	65.29	75.56	65.29	80.85	80.85	86.51	86.51	95.57	95.57	95.57
1.3.	PUPR	9.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	44.64	40.18	32.54	36.16	29.29	32.54	32.54	29.29	29.29	26.36	26.36	26.36
1.3.	PUPR	10.	Cakupan dokumen perencanaan tataruang	Dokumen	-	-	0	2	1	3	3	3	3	1	1	1
1.3.	PUPR	11.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
1.3.	PUPR	12.	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	25.40	27.90	33.80	30.70	37.20	33.80	33.80	37.20	37.20	40.90	37.80	37.80
1.3.	PUPR	13.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	3.28	3.28	3.30	3.29	3.40	3.30	3.30	3.40	3.40	3.35	3.35	3.35
1.4.			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
1.4.	PUPR	1.	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.22	0.24	0.17	0.26	0.17	0.29	0.29	0.32	0.32	0.35	0.35	0.35
1.4.	PUPR	2.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.87	0.89	0.93	0.81	0.96	0.93	0.93	0.96	0.96	0.98	0.98	0.98
1.4.	PUPR	3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	Persen	1.89	1.51	0.97	1.21	0.77	0.97	0.97	0.77	0.77	0.62	0.56	0.56
1.4.	PUPR	4.	Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha	81.30	76.42	2.44	16.81	0.79	13.79	13.79	11.30	11.30	9.27	9.27	9.27
1.4.	PUPR	5.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2.82	1.97	0.67	1.38	0.53	0.97	0.97	0.68	0.68	0.47	0.47	0.47
1.4.	PUPR	6.	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk	Persen	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.5.			Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat													
1.5.	PP dan WH	1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	-	50	80	80	90	80	80	90	90	95	95	95
1.5.	PP dan WH	2.	Persentase penegakan Perda/Qanun	Persen	25	50	80	80	90	80	80	90	90	95	95	95
1.5.	PP dan WH	3.	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat	Persen	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	27.88	50.91	27.88	50.91	27.88	50.91	50.91
1.5.	PP dan WH	4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rasio	-	-	-	-	-	-	720	720	720	720	720	720
1.5.			Penanggulangan Bencana													
1.5.	BPBD	1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18.39	18.39	18.39	18.39	18.39	18.39	45.00	18.39	47.00	18.39	50.00	50.00
1.5.	BPBD	2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	100.00	45.00	100.00	50.00	50.00
1.5.	BPBD	3.	Wilayah Terkena Bencana Alam Kota Lhokseumawe	Persen	-	-	-	-	-	-	46.00	-	45.00	-	42.00	42.00
1.6.			Sosial													
1.6.	Dinsos	1.	Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang menerima bantuan	Persen	69	70	100	80	100	80	80	80	80	80	80	80
1.6.	Dinsos	2.	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.	Dinsos	3.	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.			Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
2.4.			Pertanahan													
2.4.	Per Tanah	1.	Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	M2 (Juta)	-	-	-	-	17.37	-	17.383	-	17.42	-	17.452	17.45

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.4.	Per Tanah	2.	Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	M2 (Ribuan)	-	-	-	-	255.169	-	256.96	-	257.5	-	258.0	258.0
2.4.	Per Tanah	3.	Jumlah Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan	Jumlah	-	-	-	-	3	-	2	-	4	-	5	5
2.4.	Per Tanah	4.	Jumlah Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Terdaftar	Jumlah	-	-	-	-	5	-	3	-	5	-	6	6
2.4.	Per Tanah	5.	Luas Hak Guna Bangunan (HGB)	M2 (Ribuan)	-	-	-	-	316.598	-	316.92	-	317.23	-	317.55	317.5
2.7.			Tenaga Kerja													
2.7.	DPMPSTP	1.	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	-	20	50	30	60	50	50	60	60	70	70	70
2.7.	DPMPSTP	2.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	-	20	50	30	60	50	49	60	49	70	70	70
2.7.	DPMPSTP	3.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun	Rasio	1	0	20	0	20	0	1	0	1	0	1	1
2.7.	DPMPSTP	4.	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja	Persen	80	80	85	80	85	85	77.9	85	78	90	78	78
2.8.			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.8.	DP3A P2KB	1.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	67.5	100	82.5	82.5
2.8.	DP3A P2KB	2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	75.30	75.30	24.00	75.30	25.00	75.30	75.30	75.30	80.00	75.30	80.00	80.00
2.8.	DP3A P2KB	3.	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.8.	DP3A P2KB	4.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	24.70	24.70	14.00	24.95	14.00	25.20	14.14	25.45	30.00	25.70	30.00	30.00
2.9.			Pangan													
2.9.	DKPPP	1.	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persen	0	30	30	40	40	50	50	60	60	80	80	80
2.9.	DKPPP	2.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	516	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.			Lingkungan Hidup													
2.11.	DLH	1.	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11.	DLH	2.	Cakupan limbah B3 yang dikelola	Persen	0	100	NA	100	NA	100	100	100	100	100	100	100
2.11.	DLH	3.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Jumlah	0	1	75	2	123	2	2	1	1	1	1	1
2.11.	DLH	4.	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	25.40	27.90	33.80	30.70	37.20	33.80	33.80	37.20	37.50	40.90	40.90	40.90
2.11.	DLH	5.	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum	Jumlah	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.11.	DLH	6.	Cakupan pelaksanaan keindahan dan kerasian kota	Kecamatan	1	1	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3
2.11.	DLH	7.	Penanganan Sampah	Persen	71.40	73.54	81.53	75.75	81.00	78.02	81.00	80.36	882.00	82.77	83.00	83.00
2.12.			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
2.12.	Capil	1.	Rasio Penduduk ber KTP	Persen	858	883	878	883	956	883	0,96	883	0,97	883	0,97	0,97
2.12.	Capil	2.	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	79	80	88	85	96	88	88	90	90	93	93	93
2.12.	Capil	3.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	85	88	93	89	95	90	90	90	90	90	90	90
2.13.			Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong													
2.13.	DPMG	1.	Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong	Gampong	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
2.13.	DPMG	2.	Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	0
2.13.	DPMG	3.	Jumlah Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	11.78	12.00	5.80	12.30	5.80	12.40	2.00	12.45	3.00	12.50	4.00	4.00
2.13.	DPMG	4.	Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong	Unit	47	-	-	-	-	-	69	-	70	-	71	71
2.13.	DPMG	5.	Cakupan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong	Gampong	68	-	-	-	-	-	68	-	68	-	68	68

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2.14.	DP3A P2KB	1.	Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga	Rata-rata	1.64	2.00	1.40	2.00	2.16	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.14.	DP3A P2KB	2.	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	2.00	2.00	1.94	2.00	2.16	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2.14.	DP3A P2KB	3.	Cakupan pelayanan reproduksi remaja	Persen	0	70	150	70	52	70	70	70	70	70	70	70
2.14.	DP3A P2KB	4.	Rasio Akseptor KB	Persen	81.29	81.45	81.54	81.62	52.00	81.78	81.78	81.94	81,80	82.11	82,00	82,00
2.14.	DP3A P2KB	5.	Cakupan Peserta KB aktif	Persen	81.29	81.45	81.54	81.62	52.00	81.78	81.78	81.94	81,80	82.11	82,00	82,00
2.15.			Perhubungan													
2.15.	Dishub	1.	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat	Persen	60	60	60	60	61	60	-	60	-	60	-	-
2.15.	Dishub	2.	Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ	Bulan	12	12	12	12	12	12	-	12	-	12	-	-
2.15.	Dishub	3.	Rasio Izin Trayek	Persen	0.01	0.00	0.01	5.00	0.01	7.00	0.01	10.00	0.01	12.00	0.01	0.01
2.15.	Dishub	4.	Jumlah Uji Kir angkutan umum	Unit	1	1	2234	1	2230	1	2579	1	2589	1	2594	2594
2.15.	Dishub	5.	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik	Sarana	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-
2.15.	Dishub	6.	Cakupan pemasangan rambu-rambu	Unit	36.80	40.11	0.00	43.72	60.00	47.66	80.00	51.95	50.00	56.62	70.00	70.00
2.15.	Dishub	7.	Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi	Persen	60	60	0	60	12	60	-	60	-	60	-	-
2.15.	Dishub	8.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Unit	-	-	-	-	-	-	129.58	-	130.23	-	132.26	132.26
2.15.	Dishub	9.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	-	-	-	-	-	-	3.00	-	3.00	-	3.00	3.00
2.15.	Dishub	10.	Persentase layanan angkutan darat	%	-	-	-	-	-	-	26,05	-	26,04	-	26,03	26,03
2.15.	Dishub	11.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	-	-	-	-	-	-	98.00	-	98.00	-	99.00	99.00
2.15.	Dishub	12.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	-	-	-	-	-	-	0,008	-	0,009	-	0,009	0,009

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.15.	Dishub	13.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	ton	-	-	-	-	-	-	7.63	-	7.82	-	8.21	8.21
2.15.	Dishub	14.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang	-	-	-	-	-	-	352.89	-	378.23	-	821.69	821.69
2.16.			Komunikasi dan Informatika													
2.16.	Kominfo	1.	Cakupan kerjasama informasi dengan mass media	Bulan	12	12	12	12	12	12	70%	12	70%	12	70%	0.7
2.16.	Kominfo	2.	Cakupan surat elektronik resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe bagi OPD dan ASN	Persen	30%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	0.4
2.16.	Kominfo	3.	Cakupan jumlah Kelompok Informasi Gampong (KIG)	Jumlah	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7
2.16.	Kominfo	4.	Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Persen	20%	20%	20%	20%	20%	20%	60%	60%	60%	60%	60%	0.6
2.16.	Kominfo	5.	Cakupan Jaringan Intranet dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Persen	10%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	40%	40%	40%	40%	40%
2.17.			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
2.17.	Diskop	1.	Cakupan Penyediaan Dokumen DED	Persen	NA	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
2.17.	Diskop	2.	Cakupan pembinaan terhadap UKM	Persen	3	3	0	3	0	5	5	5	5	5	5	5
2.17.	Diskop	3.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	38.91	39.26	42.56	39.54	47.69	39.81	39.81	40.09	40.09	40.37	40.37	40.37
2.18.			Penanaman Modal													
2.18.	DPMPSTP	1.	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jenis Media	3	3	3	3	5	3	5	5	5	5	5	5
2.18.	DPMPSTP	2.	Lamanya proses perizinan	Hari	7	7	6	7	6	6	6	6	6	5	6	6
2.19.			Kepemudaan dan Olahraga													
2.19.	Disporapar	1.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	83	83	75	83	75	91	75	91	75	98	75	75

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.19.	Disporapar	2.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	12	12	10	13	10	13	13	15	14	15	15	15
2.19.	Disporapar	3.	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	21	21	15	24	17	24	17	30	18	30	18	18
2.19.	Disporapar	4.	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	Jumlah Cabor	18	28	11	30	11	30	11	32	12	34	12	12
2.19.	Disporapar	5.	Persentase pembina pramuka yang dibina		0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
2.20.			Statistik													
2.20.	Bappeda	1.	Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Tidak
2.22.			Kebudayaan													
2.22.	PK	1.	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	24	24	NA	30	NA	35	-	40	-	45	-	-
2.22.	PK	2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	-	3	NA	3	NA	3	-	3	-	3	-	-
2.22.	PK	3.	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	Jumlah	2	2	NA	2	NA	2	-	2	-	2	-	-
2.22.	PK	4.	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	Persen	-	-	-	-	-	-	90	-	90	-	100	100
2.22.	PK	5.	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	100	100
2.22.	PK	6.	Cakupan Pembinaan Sejarah	Persen	-	-	-	-	-	-	85	-	85	-	85	85
2.22.	PK	7.	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persen	-	-	-	-	-	-	45,45	-	45,45	-	50	50
2.22.	PK	8.	Cakupan Pengelolaan Museum	Persen	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	100	100
2.23.			Perpustakaan													
2.23.	ARPUS	1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Jumlah	3,159	3,159	4,774	3,184	5,719	3,210	3,225	3,235	3,245	3,261	3,275	3,275
2.23.	ARPUS	2.	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	Bulan	12	12	176	12	195	12	12	12	12	12	12	12

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.24.			Kearsipan													
2.24.	ARPUS	1.	Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	15	15	25	15	35	20	100%	20	100%	25	100%	1
2.24.	ARPUS	2.	Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1
3.			Layanan Urusan Pilihan													
3.26.			Pariwisata													
3.26.	Disporapar	1.	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1.09	1.12	NA	1.16	NA	1.19	1.19	1.23	1.23	1.26	1.26	1.26
3.26.	Disporapar	2.	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	24.00	24.00	20.00	24.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	35.00	20.00	20.00
3.27.			Pertanian													
3.27.	DKPPP	1.	Cakupan pembinaan Kelompok Tani	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3.27.	DKPPP	2.	Produktivitas Komoditas Pangan	Ton	15,873	15,873	15,873	15,905	15,905	15,937	15,937	15,968	15,969	16,000	16,001	16,001
3.27.	DKPPP	3.	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	Persen	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
3.30.			Perdagangan													
3.30.	Diskop	1.	Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang	Bulan	12	12	1	12	1	12	12	12	12	12	12	12
3.30.	Diskop	2.	Cakupan pengembangan pasar rakyat	Kecamatan	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4
3.31.			Perindustrian													
3.31.	Diskop	1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	17.84	18.20	7.27	18.56	7.32	18.93	18.93	19.31	19.31	19.70	19.70	19.7

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.31.	Diskop	2.	Cakupan promosi perdagangan dan keikutsertaan dalam event pameran dagang	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.25.			Kelautan dan Perikanan													
3.25.	DKPPP	1.	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3.25.	DKPPP	2.	Cakupan pembinaan dan penegakan hukum kelautan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3.25.	DKPPP	3.	Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3.25.	DKPPP	4.	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Ton	1,704	1,704	1.704	1,721	1.721	1,738	2	1,756	2	1,773	2	2
3.25.	DKPPP	5.	Cakupan sarana dan prasarana perikanan yang dikembangkan	Unit	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7
3.25.	DKPPP	6.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4.			Layanan Pendukung Urusan													
4.1.	Setdako		Sekretariat Daerah													
7.	Setdako	1.	Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LPPD, IKK, dan EKPOD	Dokumen	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.	Setdako	2.	Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah	Kali	12	12	12	2	2	12	2	12	4	12	4	
7.	Setdako	3.	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	Perda/Qanun	12	12	12	4	14	12	3	12	12	12	12	
				Perwal	12	12	12	40	45	12	40	12	45	12	45	
7.	Setdako	4.	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	Titik wilayah	12	12	12	10		12	10	12	20	12	20	
7.	Setdako	5.	Cakupan pelaksanaan Pengajian Gampong diwilayah Kota Lhokseumawe	Gampong	12	12	12	68	68	12	68	12	68	12	68	
7.	Setdako	6.	Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Hari Besar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.1.	Setdako	7.	Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4.1.	Setdako	8.	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Bulan	12	12	12	12	12	12	0	12	0	12	0	0

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.2.			Sekretariat Dewan													
4.2.	Sekwan	1.	Persentase Qanun yang ditetapkan	Persen	100	100	53.33	100	47.06	100	100	100	0	100	0	0
4.2.	Sekwan	2.	Persentase Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	Persen	100	100	83.33	100	100	100	100	100	0	100	0	0
4.2.	Sekwan	3.	Persentase Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
5.			Layanan Penunjang Urusan													
5.1.			Perencanaan Pembangunan													
5.1.	Bappeda	1.	Keterbukaan informasi publik melalui website	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.1.	Bappeda	2.	Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan	Dokumen	5	5	3	5	3	5	5	5	-	5	-	-
5.1.	Bappeda	3.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Dokumen	1	1	1	1	0	1	1	1	-	1	-	-
5.1.	Bappeda	4.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-
5.1.	Bappeda	5.	Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana	Kegiatan	0	0	1	1	1	3	0	3	-	4	-	-
5.1.	Bappeda	6.	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	9	9	9	9	6	9	9	9	-	9	-	-
5.1.	Bappeda	7.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	12	-	-
5.1.	Bappeda	8.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	12	-	-
5.1.	Bappeda	9.	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	12	-	-
5.1.	Bappeda	10.	Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	-	-
5.1.	Bappeda	11.	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	12
5.1.	Bappeda	12.	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12	12

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.1.	Bappeda	13.	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	100	100
5.1.	Bappeda	14.	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
5.1.	Bappeda	15.	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	90	90
5.2.			Keuangan													
5.2.	BPKD	1.	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5.2.	BPKD	2.	Jumlah penerimaan PAD	Milyar	66.50	66.50	65.60	68.50	61.50	70.50	49.20	72.60	49.20	74.80	49.20	49.20
			Besaran penerimaan PAD	Milyar	-	-	-	-	-	-	49.20	0.00	49.20	0.00	49.20	49.20
5.2.	BPKD	3.	Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK	Dokumen	7	7	7	7	7	7	0	7	0	7	0	0
5.2.	BPKD	4.	Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah	Dokumen	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	10	10
			Cakupan laporan pengelolaan barang milik daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	8	0	64	0	64	64
5.2.	BPKD	1.	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5.2.	BPKD	2.	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Opini	-	-	-	-	-	-	WTP	-	WTP	-	WTP	WTP
5.3.			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan													
5.3.	BKPSDM	1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	Persen	2.86	2.86	18.29	3.15	16.29	3.46	3.46	3.81	3.81	4.19	4.19	4.19
5.3.	BKPSDM	2.	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6.			Pengawasan													
6.1.	Inspektorat	1.	Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP	LHP	65	140	205	140	348	140	145	140	-	140	-	-
6.1.	Inspektorat	2.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjurangan tenaga pemeriksa (auditor)	ASN	37	50	20	50	36	50	50	50	-	50	-	-

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.1.	Inspektorat	3.	Jumlah laporan pengawasan ASN	Jumlah	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3000	4000	-	4000	-	-
6.1.	Inspektorat	4.	Persentase Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SAKIP OPD	Persen	75	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.1.	Inspektorat	5.	Persentase OPD dan Gampong yang dilakukan Pengawasan	Persen	80	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
6.1.	Inspektorat	6.	Persentase Auditor yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	60	-	-	-	-	-	65	-	60	-	65	65
6.1.	Inspektorat	7.	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Kategori	-	-	-	-	-	-	C	-	B	-	BB	BB
6.1.	Inspektorat	8.	Indeks Integritas	Indeks	-	-	-	-	-	-	7.50	-	7.60	-	8.00	8.00
7.			Kecamatan													
7.1.	Kantor Camat	1.	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7.1.	Kantor Camat	2.	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	Kegiatan	2	2	7	2	12	2	2	2	2	2	2	2
7.1.	Kantor Camat	3.	Cakupan pelaksanaan <i>Saweu Gampong</i>	Gampong	68	68	51	68	52	68	68	68	68	68	68	68
7.1.	Kantor Camat	4.	Cakupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1
8.1.			Kesatuan Bangsa dan Politik													
8.1.	Kesbang Pol	1.	Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.1.	Kesbang Pol	2.	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.1.	Kesbang Pol	3.	Cakupan dukungan kelancaran Pemilu	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9.			Kekhususan													
9.7.	DSIPD	1.	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9.7.	DSIPD	2.	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	81	69	69	59	59	50	0	42	0	36	0	0

KODE	OPD	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN				TARGET						KONDISI AKHIR RPJM (2022)
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Capaian	Target	Capaian	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	RPJM	Revisi RPJM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9.7.	DSIPD	3.	Jumlah Hafiz/Hafizah	Jumlah	20	15	10	20	10	25	10	25	12	25	15	15
9.7.	DSIPD	4.	Cakupan sosialisasi hukum Islam	Bulan	12	12	12	12	12	12	-	12	-	12	-	-
9.8.	MPU	1.	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Persentase peningkatan kapasitas sumber daya ulama													
9.9.	Baitul Mal	1.	Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal	Kegiatan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
9.10.	MAA	1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola	Jumlah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.11.	MPD	1.	Cakupan pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	0	0
9.11.	MPD	2.	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	80	80

BAB IX

PENUTUP

Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 memuat kondisi umum, isu-isu strategis, penjabaran visi, misi, arah kebijakan, kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan.

Seiring perjalanan waktu, perlu dilakukan perubahan terhadap RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 mengingat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kota Lhokseumawe periode tahun 2018 dan 2019, serta adanya kebijakan-kebijakan baru seperti terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 diharapkan dapat mengakomodir dan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang ada serta dapat mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Lhokseumawe yang telah dicanangkan di awal masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2017 – 2022.

Perubahan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra OPD, serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe untuk sisa periode hingga tahun 2022. Oleh karena itu keberhasilan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Periode 2017-2022 dalam **Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki** akan terwujud dengan dukungan dan komitmen bersama dari berbagai pihak.


WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA